



LAPORAN KEUANGAN BADAN POM (AUDITED)



BAGIAN ANGGARAN 063



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 *AUDITED*

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691 ext. 1109, 4209221, Fax: 4244691 (1109)
Website: www.pom.go.id

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2025

Sekretaris Utama Badan POM,



JAYADI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	xii
Pernyataan Tanggung Jawab	xiii
Pernyataan Telah Direviu	xiv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3. Basis Akuntansi	12
A.4. Dasar Pengukuran	13
A.5. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan	25
B.2. Belanja	35
B.3. Belanja Pegawai	36
B.4. Belanja Barang	36
B.5. Belanja Modal	37
B.5.1. Belanja Modal Tanah	38
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41
B.5.5. Belanja Modal Lainnya	41
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	44
C.1 Aset Lancar	44
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	44
C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	44
C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	45

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	46
C.1.5 Piutang Bukan Pajak	46
C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	47
C.1.7 Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)	48
C.1.8 Persediaan	48
C.2 Aset Tetap	49
C.2.1 Tanah	49
C.2.2 Peralatan dan Mesin	53
C.2.3 Gedung dan Bangunan	65
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	71
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	73
C.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	78
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	83
C.3 Piutang Jangka Panjang	84
C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	84
C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	85
C.4 Aset Lainnya	85
C.4.1 Aset Tak Berwujud	85
C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	88
C.4.3 Aset Lain-Lain	88
C.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	93
C.5 Kewajiban Jangka Pendek	93
C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	93
C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka	94
C.5.3 Uang Muka dari KPPN	95
C.6 Ekuitas	95
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	96
D.2. Beban Pegawai	101
D.3. Beban Persediaan	103
D.4. Beban Barang dan Jasa	104
D.5. Beban Pemeliharaan	105
D.6. Beban Perjalanan Dinas	106
D.7. Beban Barang untuk diserahkan ke Masyarakat	107
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	108

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	110
D.10. Kegiatan Non Operasional	110
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	120
E.2. Surplus/Defisit LO	120
E.3. Koreksi yang Menambah atau Mengurangi Ekuitas	120
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	120
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan	120
E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi	121
E.3.4. Selisih Revaluasi Aset	121
E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	121
E.3.6. Koreksi Lain-lain	122
E.4. Transaksi Antar Entitas	122
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain	123
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	123
E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung	125
E.5. Ekuitas Akhir	126
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	
F.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	127
F.2. Pengungkapan Lain-Lain	127
F.2.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	127
F.2.2. Rekening Pemerintah	127
F.2.3. Alat Gelas Kualitatif	127
F.2.4. Penerimaan Hibah Uang Luar Negeri Tahun 2024	128
F.2.5. Pinjam Pakai Aset antar Satker di lingkungan Badan POM atau Antara Satker Badan POM dengan Kementerian/Badan/Pemerintah daerah lainnya.	130
F.2.6. Sewa Gedung Kantor	138
F.2.7. Kesalahan Penggunaan Akun	139
F.2.8. Barang Bukti	141
F.2.9. Hasil Inventarisasi Aset	142
F.2.10. Transaksi Resiprokal	147
F.2.11. Capaian Output per Fungsi APBN Tahun 2024	147
F.2.12. Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024	147

Daftar Singkatan

Tabel 1	:	Kriteria Kualitas Piutang	18
Tabel 2	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	21
Tabel 3	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 4	:	Perincian Perubahan DIPA Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	24
Tabel 5	:	Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	25
Tabel 6	:	Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	26
Tabel 7	:	Perincian Pendapatan penjualan peralatan dan mesin Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	27
Tabel 8	:	Perincian Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	28
Tabel 9	:	Perincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	29
Tabel 10	:	Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	30
Tabel 11	:	Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sesuai tupoksi per jenis layanan	31
Tabel 12	:	Perincian Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	31
Tabel 13	:	Perincian Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	32
Tabel 14	:	Perincian Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	34
Tabel 15	:	Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	35
Tabel 16	:	Perbandingan Realisasi Belanja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	35
Tabel 17	:	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	36
Tabel 18	:	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	37
Tabel 19	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	37
Tabel 20	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	38
Tabel 21	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	38

Tabel 22	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	39
Tabel 23	:	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	39
Tabel 24	:	Realisasi Belanja Penambah Nilai Modal Gedung dan Bangunan Per Satuan Kerja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	40
Tabel 25	:	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	41
Tabel 26	:	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 dan 2023	42
Tabel 27	:	Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Satuan Kerja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	42
Tabel 28	:	Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Per Satuan Kerja Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024	43
Tabel 29	:	Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023	45
Tabel 30	:	Perincian Belanja Barang Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) per 31 Desember 2024	46
Tabel 31	:	Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024	46
Tabel 32	:	Perincian Piutang Bukan Pajak	47
Tabel 33	:	Perincian Pembatalan Pengakuan Piutang	47
Tabel 34	:	Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	47
Tabel 35	:	Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024	48
Tabel 36	:	Perincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023	48
Tabel 37	:	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024	49
Tabel 38	:	Hibah Tanah per 31 Desember 2024	50
Tabel 39	:	Mutasi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	51
Tabel 40	:	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	53
Tabel 41	:	Perincian Mutasi Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	53
Tabel 42	:	Perincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	54
Tabel 43	:	Perincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP per 31 Desember 2024	56
Tabel 44	:	Perincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	56
Tabel 45	:	Perincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	57
Tabel 46	:	Perincian Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan per 31 Desember 2024	57

Tabel 47	:	Perincian Pembangunan Nilai Aset (Langsung) per 31 Desember 2024	58
Tabel 48	:	Perincian Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	58
Tabel 49	:	Perincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	59
Tabel 50	:	Perincian Koreksi Pencatatan per 31 Desember 2024	60
Tabel 51	:	Perincian Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	61
Tabel 52	:	Perincian Reklasifikasi Keluar ke Persediaan per 31 Desember 2024	61
Tabel 53	:	Perincian Transfer Keluar per 31 Desember 2024	62
Tabel 54	:	Perincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	62
Tabel 55	:	Perincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	63
Tabel 56	:	Perincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	65
Tabel 57	:	Perincian Pembelian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	66
Tabel 58	:	Perincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	66
Tabel 59	:	Perincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	66
Tabel 60	:	Perincian Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	67
Tabel 61	:	Perincian Transfer Masuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	67
Tabel 62	:	Perincian Satker Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	67
Tabel 63	:	Perincian Satker Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	68
Tabel 64	:	Perincian Satker Pengembangan Melalui KDP Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	69
Tabel 65	:	Perincian Satker Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	69
Tabel 66	:	Perincian Satker Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	70
Tabel 67	:	Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	70
Tabel 68	:	Perincian Satker Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	70
Tabel 69	:	Perincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024	71
Tabel 70	:	Perincian Satker Reklasifikasi Masuk Jaringan per 31 Desember 2024	72
Tabel 71	:	Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	73
Tabel 72	:	Perincian Satker Saldo Awal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	74

Tabel 73	:	Perincian Satker Pembelian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2024	74
Tabel 74	:	Perincian Satker Pembelian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	75
Tabel 75	:	Perincian Satker Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	76
Tabel 76	:	Perincian Satker Reklasifikasi Keluar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	77
Tabel 77	:	Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	77
Tabel 78	:	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	78
Tabel 79	:	Perincian Satker Perolehan/Penambahan KDP per 31 Desember 2024	79
Tabel 80	:	Perincian Satker Pengembangan KDP per 31 Desember 2024	80
Tabel 81	:	Perincian Satker Koreksi Nilai KDP Bertambah per 31 Desember 2024	80
Tabel 82	:	Perincian Satker Penyelesaian Pembangunan dengan KDP per 31 Desember 2024	81
Tabel 83	:	Perincian Satker Pengembangan Melalui KDP per 31 Desember 2024	81
Tabel 84	:	Perincian Satker Koreksi Nilai KDP Berkurang per 31 Desember 2024	82
Tabel 85	:	Perincian Satker KDP per 31 Desember 2024	83
Tabel 86	:	Perincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024	84
Tabel 87	:	Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024	85
Tabel 88	:	Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	86
Tabel 89	:	Perincian Satker Pembelian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	86
Tabel 90	:	Perincian Satker Pengembangan Nilai Aset (Langsung) per 31 Desember 2024	87
Tabel 91	:	Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan ATB per 31 Desember 2024	87
Tabel 92	:	Perincian Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	88
Tabel 93	:	Perincian Satker Penghentian dari Penggunaan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	89
Tabel 94	:	Perincian Satker Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	90
Tabel 95	:	Perincian Satker Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	90
Tabel 96	:	Perincian Satker Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	91
Tabel 97	:	Perincian Satuan Kerja Aset Lain-lain per 31 Desember 2024	92

Tabel 98	:	Perincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024	92
Tabel 99	:	Perincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024	93
Tabel 100	:	Perincian Satker Pendapatan Sewa Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	94
Tabel 101	:	Perincian Satker Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka per 31 Desember 2024	95
Tabel 102	:	Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak TA 2024 dan 2023	96
Tabel 103	:	Perincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 31 Des 2024	96
Tabel 104	:	Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 31 Des 2024	97
Tabel 105	:	Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan Per jenis layanan 31 Des 2024	98
Tabel 106	:	Perincian Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka 31 Des 2024	98
Tabel 107	:	Perincian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 31 Des 2024	100
Tabel 108	:	Perincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023	102
Tabel 109	:	Perincian Beban Persediaan TA dan 2023	103
Tabel 110	:	Perincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	104
Tabel 111	:	Perincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023	106
Tabel 112	:	Perincian Beban perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023	107
Tabel 113	:	Perincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA dan 2023	108
Tabel 114	:	Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023	108
Tabel 115	:	Perincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024 dan 2023	110
Tabel 116	:	Perincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023	110
Tabel 117	:	Perincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar TA 2024 dan 2023	111
Tabel 118	:	Perincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 31 Des 2024	111
Tabel 119	:	Perincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya 31 Des 2024	112
Tabel 120	:	Perincian Beban Kerugian Pelepasan Aset 31 Des 2024	113
Tabel 121	:	Perincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023	114
Tabel 122	:	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 31 Des 2024	115
Tabel 123	:	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 31 Des 2024	116
Tabel 124	:	Perincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 31 Des 2024	117
Tabel 125	:	Perincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 31 Des 2024	118
Tabel 126	:	Perincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 31 Des 2024	118
Tabel 127	:	Perincian Beban Persediaan Usang/Rusak 31 Des 2024	119
Tabel 128	:	Perincian Koreksi Nilai Persediaan Sampai Dengan 31 Desember 2024	121

Tabel 129	:	Perincian Koreksi Atas Reklasifikasi Sampai Dengan 31 Desember 2024	121
Tabel 130	:	Perincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	122
Tabel 131	:	Perincian Transaksi Antar Entitas Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	123
Tabel 132	:	Perincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar Sampai Dengan 31 Desember 2024	124
Tabel 133	:	Perincian Pengesahan Hibah Langsung Sampai Dengan 31 Desember 2024	126
Tabel 134	:	Perincian Peningkatan Klasifikasi UPT	127
Tabel 135	:	Perincian Pengesahan Hibah Langsung	128
Tabel 136	:	Perincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	129
Tabel 137	:	Perincian Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan Balai POM di Sofifi	131
Tabel 138	:	Perincian Barang Bukti per 31 Desember 2024	141
Tabel 139	:	Perincian PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	148
Tabel 140	:	Perincian PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	149
Tabel 141	:	Perincian PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	151

Lampiran 1	: Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Lampiran 2	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Lampiran 3	: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
Lampiran 4	: Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan per Jenis layanan dan per satuan kerja
Lampiran 5	: Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
Lampiran 6	: Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Lampiran 7	: Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Lampiran 8	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Lampiran 9	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Lampiran 10	: Realisai Belanja per Satuan kerja
Lampiran 11	: Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 Per Satker
Lampiran 12	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Satker
Lampiran 13	: Belanja Barang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)
Lampiran 14	: Persediaan
Lampiran 15	: Persediaan Usang Rusak
Lampiran 16	: Tanah
Lampiran 17	: Peralatan dan Mesin
Lampiran 18	: Kepemilikan Senjata Api
Lampiran 19	: Gedung dan Bangunan
Lampiran 20	: Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran 21	: Aset Tetap Lainnya
Lampiran 22	: Aset Tak Berwujud
Lampiran 23	: Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran 24	: Utang Kepada Pihak Ketiga
Lampiran 25	: Perincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Lampiran 26	: Perincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar Per Satker
Lampiran 27	: Tindak Lanjut Temuan BPK
Lampiran 28	: Daftar Rekening Virtual BPOM
Lampiran 29	: Daftar Rincian Alat Gelas Kualitatif
Lampiran 30	: Rincian Hibah Langsung
Lampiran 31	: Rincian Barang Bukti
Lampiran 32	: Transaksi Resiprokal
Lampiran 33	: Capaian Output per Fungsi APBN Per 31 Desember 2024



**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

TARUNA IKRAR

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024 *AUDITED*
NOMOR: PI.03.01.7.05.25.05

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 *Audited* berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian Manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektur Utama,



Yan Setiadi, AK., M.B.A.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp271.957.247.499,00 atau mencapai 118,84% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp228.845.990.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.192.782.718.683,00 atau mencapai 93,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.354.321.946.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.595.022.638.247,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp142.464.268.747,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.379.465.824.426,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp73.092.545.074,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp76.733.203.724,00 dan Rp3.518.289.434.523,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp269.274.652.736,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.276.987.720.907,00. Sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.007.713.068.171,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos-Pos

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Luar Biasa masing-masing sebesar Rp11.245.892.945,00 dan Rp0,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.018.958.961.116,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp3.615.482.684.919,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp2.018.958.961.116,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp15.630.491.466,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp1.906.135.219.254,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah senilai Rp3.518.289.434.523,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024				31 DESEMBER 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi
PENDAPATAN DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	228.845.990.000,00	271.957.247.499,00	43.111.257.499,00	118,84	251.467.161.949,00
Jumlah Pendapatan dan Hibah		228.845.990.000,00	271.957.247.499,00	43.111.257.499,00	118,84	251.467.161.949,00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	802.168.468.000,00	799.476.921.775,00	(2.691.546.225,00)	99,66	722.558.060.480,00
Belanja Barang	B.4	1.252.694.112.000,00	1.164.716.080.588,00	(87.978.031.412,00)	92,98	1.238.148.571.087,00
Belanja Modal	B.5	299.459.366.000,00	228.589.716.320,00	(70.869.649.680,00)	76,33	230.351.781.008,00
Jumlah Belanja		2.354.321.946.000,00	2.192.782.718.683,00	(161.539.227.317,00)	93,14	2.191.058.412.575,00

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



TARUNA IKRAR



BADAN POM

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	495.957,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	254.994.365,00	176.400.000,00
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	C.1.3	2.760.255.555,00	1.152.528.423,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.4	0,00	399.462,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	487.727.240,00	476.584.097,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(487.727.240,00)	(2.382.920,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.7	0,00	474.201.177,00
Persediaan	C.1.8	139.448.522.870,00	148.808.484.839,00
Jumlah Aset Lancar		142.464.268.747,00	150.612.013.901,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1.726.822.662.687,00	1.688.380.858.025,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.209.368.070.471,00	3.099.255.818.791,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.057.417.869.828,00	991.271.337.416,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	29.595.727.807,00	29.151.311.568,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	15.618.156.541,00	18.600.793.300,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	22.878.016.202,00	48.419.791.693,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(2.682.234.679.110,00)	(2.489.920.660.342,00)
Jumlah Aset Tetap		3.379.465.824.426,00	3.385.159.250.451,00
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	1.327.337.564,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	(1.327.337.564,00)	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	134.552.580.264,00	138.198.335.885,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	18.051.733.311,00	11.064.623.482,00
Aset Lain-lain	C.4.3	9.454.353.280,00	55.916.268.806,00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.4.4	(88.966.121.781,00)	(88.513.425.741,00)
Jumlah Aset Lainnya		73.092.545.074,00	116.665.802.432,00
JUMLAH ASET		3.595.022.638.247,00	3.652.437.066.784,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.1	50.692.133.248,00	10.346.135.403,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.2	26.040.574.519,00	26.608.246.462,00
Uang Mukadari KPPN	C.5.3	495.957,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		76.733.203.724,00	36.954.381.865,00
JUMLAH KEWAJIBAN		76.733.203.724,00	36.954.381.865,00

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
EKUITAS			
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6	3.518.289.434.523,00	3.615.482.684.919,00
Jumlah Ekuitas		3.518.289.434.523,00	3.615.482.684.919,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.595.022.638.247,00	3.652.437.066.784,00

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



TARUNA IKRAR



**LAPORAN OPERASIONAL
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	269.274.652.736,00	241.658.193.456,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		269.274.652.736,00	241.658.193.456,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	828.968.108.436,00	718.866.991.756,00
Beban Persediaan	D.3	79.009.988.033,00	80.066.369.350,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	487.801.974.351,00	521.934.926.500,00
Beban Pemeliharaan	D.5	115.196.415.324,00	94.715.472.478,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	488.682.948.379,00	544.209.373.301,00
Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	D.7	1.903.696.800,00	1.365.401.828,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	275.424.589.584,00	280.473.779.787,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0,00	1.543.839,00
Jumlah Beban		2.276.987.720.907,00	2.241.633.858.839,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.007.713.068.171,00)	(1.999.975.665.383,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(10.017.513.261,00)	(4.840.272.975,00)
Pendapatan Pelepasan Aset		1.103.543.243,00	1.692.384.517,00
Beban Pelepasan Aset		11.121.056.504,00	6.532.657.492,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(1.228.379.684,00)	29.816.272.719,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.495.348.471,00	34.841.651.218,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.723.728.155,00	5.025.378.499,00
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(11.245.892.945,00)	24.975.999.744,00
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.018.958.961.116,00)	(1.974.999.665.639,00)
SURPLUS (DEFISIT)-LO		(2.018.958.961.116,00)	(1.974.999.665.639,00)

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	3.615.482.684.919,00	3.623.992.256.883,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.018.958.961.116,00)	(1.974.999.665.639,00)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	1.339.812.429,00	1.080.482.259,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.3	40.362.816,00	(10.387.409,00)
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	14.724.517.398,00	20.237.439.464,00
Koreksi Lain-Lain	E.3.6	(474.201.177,00)	(16.480.000,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	15.630.491.466,00	21.291.054.314,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.906.135.219.254,00	1.945.199.039.361,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(97.193.250.396,00)	(8.509.571.964,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	3.518.289.434.523,00	3.615.482.684.919,00

Jakarta, 7 Mei 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR



BADAN POM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Badan
Pengawas Obat
dan Makanan*

PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Yang dimaksud dengan pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan, pengawasan selama beredar adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat

dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

a. Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

b. Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

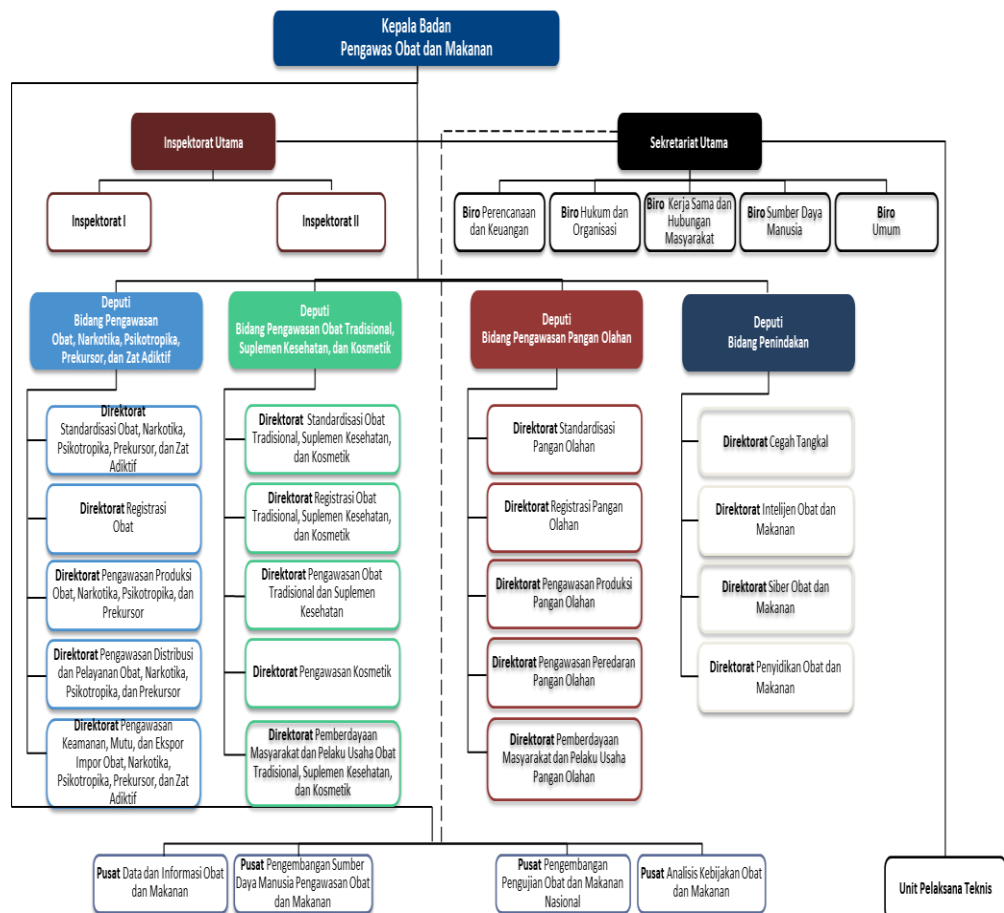
Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 4 pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Badan Pengawas Obat dan Makanan



Jumlah UPT BPOM terdiri atas 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM.

Rincian klasifikasi, tipologi, dan lokasi UPT BPOM sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Lokasi		
1	Balai Besar POM (Eselon II)	1. Banda Aceh 2. Medan 3. Padang 4. Pekanbaru 5. Palembang 6. Bandar Lampung 7. Jakarta	8. Bandung 9. Semarang 10. Yogyakarta 11. Surabaya 12. Serang 13. Denpasar 14. Mataram	15. Pontianak 16. Palangkaraya 17. Banjarmasin 18. Samarinda 19. Manado 20. Makassar 21. Jayapura
2	Balai POM (Eselon III)	1. Jambi 2. Bengkulu 3. Batam 4. Kupang 5. Palu 6. Kendari 7. Ambon	8. Pangkal Pinang 9. Gorontalo 10. Mamuju 11. Sofifi 12. Manokwari 13. Tarakan 14. Payakumbuh	15. Tangerang 16. Tasikmalaya 17. Bogor 18. Surakarta 19. Kediri 20. Jember 21. Palopo
3	Loka POM (Eselon IV)	1. Kabupaten Aceh Tengah 2. Kabupaten Aceh Selatan 3. Kota Tanjungbalai 4. Kabupaten Toba 5. Kabupaten Dharmasraya 6. Kota Dumai 7. Kabupaten Indragiri Hilir 8. Kabupaten Bungo 9. Kota Lubuklinggau 10. Kabupaten Rejang Lebong 11. Kabupaten Tulangbawang 12. Kabupaten Belitung	13. Kota Tanjungpinang 14. Kabupaten Banyumas 15. Kabupaten Buleleng 16. Kabupaten Bima 17. Kabupaten Ende 18. Kabupaten Manggarai Barat 19. Kabupaten Sanggau 20. Kabupaten Kotawaringin Barat 21. Kabupaten Tabalong 22. Kabupaten Tanah Bumbu 23. Kota Balikpapan 24. Kabupaten Kepulauan Sangihe	25. Kabupaten Banggai 26. Kabupaten Baubau 27. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 28. Kabupaten Pulau Morotai 29. Kabupaten Sorong 30. Kabupaten Merauke 31. Kabupaten Mimika 32. Kabupaten Sambas 33. Kabupaten Belu 34. Kabupaten Sumba Timur

Renstra BPOM Tahun 2019 – 2024 memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi BPOM

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi BPOM sebagai berikut:

- Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang unit akuntansi di lingkungan BPOM yang meliputi satuan kerja di kantor pusat sebanyak 10 satker, serta UPT BPOM sebanyak 73 satker yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

BPOM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPOM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BPOM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPOM sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA

- (1) Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- b. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- c. Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - (2) Pendapatan – LO
LO

Pendapatan – LO diakui pada saat jasa/layanan telah diterima oleh pengguna jasa/layanan. Pada transaksi pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau termin, pembayaran/uang yang telah disetorkan ke Kas Negara diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPOM adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan berdasarkan kas yang diterima adalah pendapatan diakui pada saat penerimaan kas, yang berlaku pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) kecuali untuk *Certificate of Pharmaceutical Product (CPP)*.

- b. Pengakuan pendapatan berdasarkan hak

Pengakuan pendapatan berdasarkan hak adalah pendapatan diakui pada saat BPOM telah memberikan jasa layanan/barang. Pengakuan pendapatan berdasarkan hak berlaku pada layanan jasa berikut:

- 1) Pendaftaran notifikasi kosmetik/pembaharuan/variasi;
- 2) Evaluasi Persetujuan Protokol Uji Bioekivalensi (PPUB);
- 3) Evaluasi permohonan persetujuan uji klinik obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan;
- 4) Pendaftaran pra registrasi obat tradisional dan suplemen makanan;
- 5) Pendaftaran registrasi produk baru/daftar ulang/variasi obat tradisional dan suplemen makanan;
- 6) Pendaftaran dan evaluasi pangan olahan;
- 7) Pendaftaran iklan dan evaluasi iklan obat tradisional, suplemen makanan dan iklan obat;
- 8) Permohonan Analisa Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- 9) Surat Keterangan Ekspor (*Certificate of Pharmaceutical Product*);
- 10) Evaluasi permohonan obat pengembangan baru;
- 11) Evaluasi permohonan pemasukan obat melalui mekanisme jalur khusus;
- 12) Jasa inspeksi sarana produksi impor, yaitu
 - a) Evaluasi dokumen pra inspeksi sarana produksi;
 - b) Audit sarana produksi;
 - c) Evaluasi dokumen hasil inspeksi luar negeri.
- 13) Pengujian;
- 14) Kalibrasi;
- 15) Pelatihan laboratorium;

16) Uji profesiensi;

17) Pembelian hewan uji dan baku pembanding.

- c. Pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan termin adalah pendapatan yang diakui sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan termin. Pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pekerjaan dan termin berlaku pada layanan jasa sebagai berikut:

1) Pendaftaran dan evaluasi obat dan produk biologi;

2) Jasa inspeksi sarana produksi impor-evaluasi dokumen hasil inspeksi luar negeri;

3) Sertifikasi dan/atau resertifikasi

a) Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);

b) Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);

c) Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);

d) Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);

e) Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);

f) Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB).

4) Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama

Pengakuan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau termin sesuai dengan proses bisnis masing-masing jasa layanan yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan jasa/layanan Pendaftaran dan Evaluasi Obat dan Produk Biologi:

i. Pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data pra registrasi yang telah memenuhi persyaratan telah diterima oleh BPOM, dengan output berupa tanda terima berkas yang telah diberi nomor ID;

ii. Pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data telah dievaluasi oleh evaluator dan dibahas oleh Komite Nasional (KOMNAS), dengan output berupa hasil evaluasi;

iii. Pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen apabila jasa/layanan telah diterima oleh pengguna layanan yaitu berupa:

- Hasil pra registrasi; atau
- Persetujuan nomor izin; atau
- Persetujuan (*approvable letter*); atau
- Persetujuan impor dalam bentuk ruahan; atau
- Persetujuan impor khusus ekspor; atau

- Persetujuan khusus ekspor; atau
 - Persetujuan registrasi variasi berupa persetujuan izin edar atau surat persetujuan perubahan yang merupakan addendum dari persetujuan izin edar yang telah diterbitkan; atau
 - Penolakan
- b) Sertifikasi dan/atau resertifikasi CDOB, CPOB, CPPOB, dan Surat Persetujuan Pendaftaran Produsen Bahan Tambahan Pangan, CPOTB, CPKB dan CPBBAOB:
- i. Pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila berkas yang telah memenuhi persyaratan diterima oleh BPOM, dengan *output* berupa tanda terima berkas, surat perintah bayar atau dokumen lainnya;
 - ii. Pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila dalam tahap monitoring dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA), dengan *output* berupa hasil evaluasi;
 - iii. Pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif bila:
 - Sertifikat diterbitkan berupa sertifikat CDOB, CPOB, CPPOB, dan surat persetujuan pendaftaran produsen bahan tambahan pangan, CPOTB, CPKB dan CPBBAOB dan atau surat penolakan;
 - Surat pembatalan dari pihak ketiga.
- c) Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama
- i. Pendapatan diakui sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data yang telah memenuhi persyaratan telah diterima oleh BPOM, dengan *output* berupa tanda terima berkas, surat perintah bayar atau dokumen lainnya;
 - ii. Pendapatan diakui sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari tarif apabila berkas/data telah dievaluasi oleh evaluator, dengan *output* berupa hasil evaluasi;
 - iii. Pendapatan diakui sebesar 100 (seratus) persen dari tarif apabila surat persetujuan/penolakan penggunaan fasilitas bersama (obat tradisional, kosmetik, makanan) diterbitkan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset Lancar

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- 3) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 1. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 2. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 3. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 1. Harga pembelian
 2. Biaya pengangkutan
 3. Biaya penanganan
 4. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
- b) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 1. Potongan harga
 2. Rabat dan lainnya yang serupa.
 3. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
- c) Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 Akuntansi Persediaan.

Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang

terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:

- a) Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
- b) Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- 1) Tanah
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap Semester selama masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Atas KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan,	50 tahun

Hak Ekonomi Produser Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

BPOM memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.354.321.946.000,00. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal BPOM yang disebabkan realokasi anggaran belanja modal ke belanja pegawai karena pagu minus dan realokasi anggaran belanja modal ke belanja barang untuk pemenuhan kebutuhan belanja operasional. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2024		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
	Pendapatan			
1	Pendapatan PNB	228.845.990.000,00	228.845.990.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	228.845.990.000,00	228.845.990.000,00	0,00
	Belanja			
2	Belanja Pegawai	803.971.235.000,00	802.168.468.000,00	(1.802.767.000,00)
3	Belanja Barang	1.247.181.488.000,00	1.252.694.112.000,00	5.512.624.000,00
4	Belanja Modal	303.090.426.000,00	299.459.366.000,00	(3.631.060.000,00)
	Jumlah Belanja	2.354.243.149.000,00	2.354.321.946.000,00	78.797.000,00

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.802.767.000,00 disebabkan Perubahan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja Desember 2024 yang dibayarkan pada Januari tahun berikutnya sesuai dengan SK Kepala BPOM Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPOM, sehingga terdapat sisa anggaran yang dioptimalisasikan ke belanja barang serta adanya kebijakan pemusatan anggaran belanja pegawai di Satker Sekretariat utama sehingga terdapat efisiensi dan digunakan untuk optimalisasi anggaran.
2. Kenaikan Anggaran Belanja Barang sebesar Rp5.512.624.000,00 disebabkan adanya pergeseran dari belanja modal dan belanja pegawai ke belanja barang karena adanya optimalisasi sisa anggaran belanja modal yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja operasional dan non operasional seperti Rincian Output baru terkait Standar Biaya Keluaran, Pelaksanaan pengujian laboratorium untuk penyelenggaraan Haji, kebutuhan belanja tenaga alih daya, pemeliharaan

dan suku cadang alat laboratorium, kegiatan Saka POM serta peningkatan kompetensi lainnya.

3. Penurunan Belanja Modal sebesar Rp3.631.060.000,00 disebabkan kelebihan sisa anggaran karena realisasi kontrak yang dibawah pagu anggaran, yang dioptimalisasi melalui pergeseran anggaran dari belanja modal ke belanja barang.
4. Selisih pagu anggaran sebesar Rp78.797.000,00 berasal dari selisih anggaran awal sebesar Rp2.354.243.149.000,00 kemudian dilakukan revisi menjadi Rp2.354.321.946.000,00. Selisih ini terjadi karena terdapat tambahan belanja barang yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri untuk kegiatan Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Realisasi Pendapatan
Rp271.957.247.499,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp271.957.247.499,00 atau mencapai 118,84% dari estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp228.845.990.000,00. Perincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan BPOM adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	MAP	Uraian	31 Desember 2024		
			Anggaran	Realisasi	%
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	577.496.755,00	-
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	526.046.488,00	-
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	129.935.000,00	234.030.213,00	180,11
4	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	228.716.055.000,00	267.201.206.741,00	116,83
5	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	838.738,00	-
6	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.290.873.563,00	-
7	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	342.258.955,00	-
8	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	322.391.828,00	-
9	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	1.475.673.218,00	-
10	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	6.000.000,00	-
11	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	431.000,00	-
Jumlah Kotor			228.845.990.000,00	271.977.247.499,00	118,85
Pengembalian Pendapatan				20.000.000,00	-
Pendapatan Bersih			228.845.990.000,00	271.957.247.499,00	118,84

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,15% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan kenaikan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, kenaikan pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan, kenaikan Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan Pendapatan anggaran lain-lain.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

NO	MAK	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	577.496.755,00	693.860.480,00	(16,77)
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	526.046.488,00	998.524.037,00	(47,32)
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	234.030.213,00	154.523.987,00	51,45
4	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	267.201.206.741,00	244.741.330.000,00	9,18
5	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	838.738,00	0,00	-
6	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.290.873.563,00	940.571.667,00	37,24
7	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	342.258.955,00	408.480.011,00	(16,21)
8	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	322.391.828,00	513.336.306,00	(37,20)
9	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	1.475.673.218,00	3.026.259.291,00	(51,24)
10	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.000.000,00	8.646.540,00	(30,61)
11	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	431.000,00	50.000,00	762,00
Pendapatan Bruto			271.977.247.499,00	251.485.582.319,00	8,15
Pengembalian Pendapatan			20.000.000,00	18.420.370,00	8,58
Pendapatan Netto			271.957.247.499,00	251.467.161.949,00	8,15

Penjelasan atas perbandingan realisasi pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp577.496.755,00 dan Rp693.860.480,00, bila dibandingkan dengan realisasi yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 16,77%. Realisasi pendapatan penjualan peralatan dan mesin yang berakhir 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7
Perincian Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	94.051.000,00
2	Deputi II	62.611.000,00
3	PPSDM	18.084.000,00
4	Balai Besar POM di Bandung	6.456.600,00
5	Balai Besar POM di Semarang	78.853.000,00
6	Balai Besar POM di Banda Aceh	13.825.600,00
7	Balai Besar POM di Medan	6.105.655,00
8	Balai Besar POM di Pekanbaru	51.436.000,00
9	Balai Besar POM di Palembang	7.362.000,00
10	Balai Besar POM di Pontianak	5.271.100,00
11	Balai Besar POM di Manado	2.522.000,00
12	Balai Besar POM di Makassar	1.225.000,00
13	Balai Besar POM di Denpasar	18.883.000,00
14	Balai Besar POM di Mataram	5.953.000,00
15	Balai Besar POM di Jayapura	7.553.000,00
16	Balai POM di Jambi	46.500.000,00
17	Balai POM di Palu	110.754.000,00
18	Balai POM di Kendari	23.682.000,00
19	Balai POM di Bengkulu	2.090.000,00
20	Balai POM di Mamuju	4.643.000,00
21	Loka POM di Kabupaten Banyumas	793.000,00
22	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	837.000,00
23	Loka POM di Kabupaten Tabalong	5.458.800,00
24	Loka POM di Kota Balikpapan	1.302.000,00
25	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	545.000,00
26	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	700.000,00
	TOTAL	577.496.755,00

Perincian terkait pendapatan penjualan peralatan dan mesin per satuan kerja dijelaskan pada lampiran 1.

- Realisasi Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp526.046.488,00 dan Rp998.524.037,00, bila dibandingkan dengan realisasi yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 47,32% disebabkan pada tahun 2024 terjadi penurunan lelang pengadaan BMN. Realisasi Pendapatan dari

pemindahtanganan BMN lainnya yang berakhir 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8
Perincian Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	43.913.000,00
2	Inspektorat Utama	32.662.000,00
3	Deputi I	29.772.000,00
4	Deputi III	37.508.500,00
5	PPPOMN	199.311.500,00
6	PUSAKOM	17.109.000,00
7	Balai Besar POM di Jakarta	6.951.500,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	14.139.000,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	2.759.000,00
10	Balai Besar POM di Medan	3.231.031,00
11	Balai Besar POM di Padang	49.775.000,00
12	Balai Besar POM di Samarinda	2.948.500,00
13	Balai Besar POM di Manado	194.240,00
14	Balai Besar POM di Makassar	9.250.000,00
15	Balai Besar POM di Serang	12.772.567,00
16	Balai POM di Jambi	11.168.000,00
17	Balai POM di Kendari	364.000,00
18	Balai POM di Kupang	33.572.950,00
19	Balai POM di Bengkulu	11.383.700,00
20	Balai POM di Pangkal Pinang	1.279.000,00
21	Balai POM di Sofifi	215.000,00
22	Balai POM di Gorontalo	3.825.000,00
23	Loka POM di Kabupaten Ende	424.000,00
24	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1.518.000,00
TOTAL		526.046.488,00

Perincian terkait Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya per satuan kerja dijelaskan pada lampiran 2.

3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp234.030.213,00 dan sebesar Rp154.523.987,00, bila dibandingkan realisasi yang berakhir pada 31 Desember 2023, maka mengalami kenaikan 51,45% yang disebabkan antara lain meningkatnya pendapatan sewa untuk kantin. Pendapatan sewa Tanah, Gedung,

dan Bangunan yang berakhir 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9
Perincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	103.346.500,00
2	Balai Besar POM di Semarang	2.630.616,00
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	34.638.000,00
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.885.000,00
5	Balai Besar POM di Padang	28.987.110,00
6	Balai Besar POM di Pekanbaru	20.643.444,00
7	Balai Besar POM di Bandar Lampung	6.544.752,00
8	Balai Besar POM di Palangkaraya	1.319.175,00
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.439.640,00
10	Balai Besar POM di Mataram	4.272.840,00
11	Balai Besar POM di Jayapura	5.830.116,00
12	Balai POM di Jambi	1.115.000,00
13	Balai POM di Palu	1.195.368,00
14	Balai POM di Kendari	4.500.000,00
15	Balai POM di Kupang	2.796.234,00
16	Balai POM di Bengkulu	4.229.280,00
17	Balai POM di Mamuju	788.250,00
18	Loka POM di Kabupaten Merauke	2.868.888,00
TOTAL		234.030.213,00

Perincian terkait Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per satuan kerja dapat dilihat pada lampiran 3.

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik BPOM yaitu Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi dan Evaluasi, Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian, Jasa Kalibrasi, Jasa Pelatihan Laboratorium, Jasa Uji Profisiensi dan Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji serta Kontrak kerjasama. Realisasi yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp267.201.206.741,00 dan Rp244.741.330.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,18%.

- a. Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan per satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 10
Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Deputi I	54.794.450.000,00
2	Deputi II	130.987.550.008,00
3	Deputi III	53.551.650.084,00
4	PPOMN	5.254.873.060,00
5	Balai Besar POM di Jakarta	46.230.000,00
6	Balai Besar POM di Bandung	817.440.000,00
7	Balai Besar POM di Semarang	735.195.000,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	220.870.000,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	2.513.970.000,00
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	197.510.000,00
11	Balai Besar POM di Medan	1.795.775.000,00
12	Balai Besar POM di Padang	1.049.450.716,00
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	654.846.641,00
14	Balai Besar POM di Palembang	193.175.000,00
15	Balai Besar POM di Bandar Lampung	375.439.494,00
16	Balai Besar POM di Pontianak	550.622.708,00
17	Balai Besar POM di Palangkaraya	931.801.094,00
18	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.349.805.103,00
19	Balai Besar POM di Samarinda	550.673.177,00
20	Balai Besar POM di Manado	124.320.000,00
21	Balai Besar POM di Makassar	796.865.704,00
22	Balai Besar POM di Denpasar	837.250.000,00
23	Balai Besar POM di Mataram	1.346.263.234,00
24	Balai Besar POM di Jayapura	667.727.326,00
25	Balai Besar POM di Serang	193.110.000,00
26	Balai POM di Jambi	928.178.124,00
27	Balai POM di Palu	823.670.596,00
28	Balai POM di Kendari	813.262.594,00
29	Balai POM di Ambon	321.825.258,00
30	Balai POM di Kupang	222.755.000,00
31	Balai POM di Bengkulu	643.931.787,00
32	Balai POM di Batam	1.458.890.625,00
33	Balai POM di Pangkal Pinang	588.154.408,00
34	Balai POM di Gorontalo	390.075.000,00
35	Balai POM di Manokwari	231.390.000,00
36	Balai POM di Mamuju	118.770.000,00
37	Loka POM di Kabupaten Ende	123.440.000,00
NILAI BRUTO		267.201.206.741,00
	Pengembalian	20.000.000,00
NILAI NETTO		267.181.206.741,00

- b. Perincian Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan sesuai tupoksi per jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 11
Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
sesuai tupoksi per jenis layanan

(dalam rupiah)

No	Nama Layanan	Nilai
1	Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi dan Evaluasi	185.493.000.008
2	Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor	260.000.000
3	Jasa Sertifikasi	58.834.400.084
4	Jasa Pengujian	18.379.280.549
5	Jasa Kalibrasi	76.025.000
6	Jasa Pelatihan Laboratorium	158.250.000
7	Jasa Uji Profisiensi	18.500.000
8	Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji	3.140.795.000
9	Kontrak Kerjasama	840.956.100
Nilai Bruto		267.201.206.741,00
	Pengembalian	20.000.000,00
Nilai Netto		267.181.206.741,00

Perincian Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan per jenis layanan per satuan kerja dapat dilihat pada lampiran 4.

- c. Terdapat pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp20.000.000,00 sebagai berikut :

Tabel 12
Perincian Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi II	1.500.000,00
2	Deputi III	10.650.000,00
3	Balai Besar POM di Semarang	1.880.000,00
4	Balai Besar POM di Bandar Lampung	730.000,00
5	Balai Besar POM di Makassar	4.240.000,00
6	Balai Besar POM di Jayapura	250.000,00
7	Balai POM di Bengkulu	750.000,00
Nilai Netto		20.000.000,00

Perincian pengembalian jasa pengawasan obat dan makanan dapat dilihat pada lampiran 5.

5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp838.738,00 dan Rp0,00. Pendapatan ini terdapat pada satker Deputi IV yang merupakan pendapatan bunga hasil kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Sujiyo berupa barang bukti dalam bentuk uang yang disimpan di bank. Pendapatan ini telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN 0F15E0NA055JBRT3 tanggal 31 Desember 2024.

Pendapatan ini sebelumnya tercatat sebagai Pendapatan dari Pelaksanaan *Treasury National Pooling (TNP)* dan sudah dilakukan perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai dengan Surat Kepala KPPN Jakarta VI Nomor S-775/KPN.1206/3035 tanggal 25 April 2025.

6. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.290.873.563,00 dan Rp940.571.667,00, bila dibandingkan realisasi yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 37,24%. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 13
Perincian Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	11.181.920,00
2	Inspektorat Utama	498.105,00
3	Deputi III	5.346.000,00
4	PPOMN	3.458.452,00
5	PUSDATIN	13.892.023,00
6	Balai Besar POM di Jakarta	1.331.059,00
7	Balai Besar POM di Semarang	10.726.661,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.862.557,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	7.875.953,00
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.759.826,00
11	Balai Besar POM di Medan	2.428.670,00
12	Balai Besar POM di Padang	89.377.555,00
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	501.916,00
14	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.548.475,00
15	Balai Besar POM di Pontianak	13.305.450,00
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	309.461,00
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.382.916,00
18	Balai Besar POM di Samarinda	2.259.831,00
19	Balai Besar POM di Manado	2.484.968,00
20	Balai Besar POM di Makassar	5.290.470,00
21	Balai Besar POM di Denpasar	4.855.101,00
22	Balai Besar POM di Mataram	890.100,00
23	Balai Besar POM di Jayapura	3.913.059,00
24	Balai Besar POM di Serang	2.006.434,00
25	Balai POM di Jambi	861.661,00
26	Balai POM di Palu	2.067.960,00
27	Balai POM di Kendari	6.301.110,00
28	Balai POM di Ambon	6.149.531,00
29	Balai POM di Kupang	11.226.304,00
30	Balai POM di Bengkulu	76.368,00
31	Balai POM di Batam	1.959.114,00
32	Balai POM di Sofifi	618.291.760,00
33	Balai POM di Mamuju	6.723.301,00
34	Balai POM di Pangkal Pinang	1.043.814,00
35	Balai POM di Gorontalo	1.303.300,00
36	Balai POM di Manokwari	6.762.411,00
37	Balai POM di Surakarta	1.100.577,00
38	Balai POM di Tasikmalaya	8.992.363,00
39	Balai POM di Kediri	681.183,00
40	Balai POM di Bogor	2.263.812,00
41	Balai POM di Tangerang	1.085.650,00
42	Balai POM di Tarakan	2.206.238,00
43	Balai POM di Payakumbuh	11.569.340,00
44	Loka POM di Kabupaten Ende	117.849,00
45	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	288.914.650,00
46	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1.635.000,00
47	Loka POM di Aceh Tengah	115.567.568,00
48	Loka POM di Kota Tanjungbalai	38.500,00
49	Loka POM di Kabupaten Merauke	1.288.288,00
50	Loka POM di Kabupaten Belitung	158.949,00
TOTAL		1.290.873.563,00

Perincian informasi pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah per satuan kerja dapat dilihat pada lampiran 6.

7. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp342.258.955,00 dan Rp408.480.011,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,21%. Penerimaan ini merupakan pengembalian gaji, tunjangan, uang lembur dan uang makan PNS tahun anggaran yang lalu karena sesuai peraturan langkah-langkah akhir tahun 2023 agar permintaan tunjangan kinerja bulan Desember 2023 sebesar 100%, sehingga apabila terdapat potongan/pengembalian dibayarkan pada tahun berikutnya tahun 2024 serta ada juga pengembalian yang disebabkan karena temuan pengembalian uang makan/tunjangan kinerja dan pegawai yang telah tidak menjabat sebagai struktural/fungsional dll. Perincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu per Satker dapat dilihat pada Lampiran 7.
8. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp322.391.828,00 dan Rp513.336.306,00 atau mengalami penurunan sebesar 37,20%. Penerimaan ini berasal dari pengembalian belanja barang atas pekerjaan tahun 2023 yang tidak selesai/wanprestasi dengan mencairkan jaminan pembayaran serta pengembalian perjalanan dinas pada tahun yang lalu, honorarium narasumber, moderator dan belanja barang lain-lain. Perincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu per Satker dapat dilihat pada Lampiran 8.
9. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.475.673.218,00 dan Rp3.026.259.291,00 atau mengalami penurunan sebesar 51,24%. Penerimaan ini berasal dari penyetoran ke kas negara atas temuan BPK berupa bangunan gedung lainnya yang tidak ditemukan, pengembalian atas jaminan pelaksanaan bank garasi, kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/renovasi gedung dan kekurangan volume pekerjaan konstruksi. Rincian Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun

Anggaran Yang Lalu per Satker beserta keterangannya dapat dilihat pada Lampiran 9.

10. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp8.646.540,00 atau mengalami penurunan sebesar 30,61%. Pendapatan ini terdapat pada satuan kerja Settama yang merupakan setoran kas negara non KAI dari PT Taspen Persero Bulan Januari s.d. Desember 2024.

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 14
Perincian Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	NTPN		
		Tanggal	Nomor	Nilai
1	Setoran kas negara non KAI bulan Januari dari PT Taspen Persero	10 Januari 2024	A537155DF903D8EJ	500.000,00
2	Setoran kas negara non KAI bulan Februari dari PT Taspen Persero	07 Februari 2024	202C52G4VPBQJKHL	500.000,00
3	Setoran kas negara non KAI bulan Maret dari PT Taspen Persero	8 Maret 2024	D409961QV3OCTQ42	500.000,00
4	Setoran kas negara non KAI bulan April dari PT Taspen Persero	05 April 2024	808243CIFK44DG4K	500.000,00
5	Setoran kas negara non KAI bulan Mei dari PT Taspen Persero	08 Mei 2024	53E8D55DF9BVLCT	500.000,00
6	Setoran kas negara non KAI bulan Juni dari PT Taspen Persero	10 Juni 2024	9DDBA6U8EUNQ5TS	500.000,00
7	Setoran kas negara non KAI bulan Juli dari PT Taspen Persero	10 Juli 2024	709E755DF9HVEUK2	500.000,00
8	Setoran kas negara non KAI bulan Agustus dari PT Taspen Persero	09 Agustus 2024	AE1EB7QLUPC282RG	500.000,00
9	Setoran kas negara non KAI bulan September dari PT Taspen Persero	10 September 2024	6DE6E55DF9NUJRR	500.000,00
10	Setoran kas negara non KAI bulan Oktober dari PT. Taspen Persero	10 Oktober 2024	B4C1E2G4VQ3OT7N0	500.000,00
11	Setoran kas negara non KAI bulan November dari PT. Taspen Persero	8 November 2024	BDD327QLUPL0SQF6	500.000,00
12	Setoran kas negara non KAI bulan Desember dari PT. Taspen Persero	10 Desember 2024	62E447QLUPO1RP03	500.000,00
Nilai Netto				6.000.000,00

11. Pendapatan Anggaran Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp431.000,00 dan Rp50.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 762%. Pendapatan ini terdapat pada satuan kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas berupa Setoran ke Negara berupa barang bukti uang Tunai Perkara Anak (Diversi) a.n Dicky Fandika Margiono, sesuai NTPN : 76AD65229QM5RLP0 Tanggal 20 Mei 2024 dan Kode Billing Nomor 702405200926496 yang dibayarkan pada Tanggal 20 Mei 2024.

Realisasi Belanja Negara
Rp2.192.782.718.683,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja BPOM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.192.782.718.683,00 atau 93,14% dari anggaran belanja sebesar Rp2.354.321.946.000,00.

Tabel 15
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Anggaran
Belanja Pegawai	802.168.468.000,00	800.547.731.413,00	99,80
Belanja Barang	1.252.694.112.000,00	1.166.993.956.515,00	93,16
Belanja Modal	299.459.366.000,00	228.589.716.320,00	76,33
Total Belanja Bruto	2.354.321.946.000,00	2.196.131.404.248,00	93,28
Pengembalian Belanja		3.348.685.565,00	
Total Belanja Neto	2.354.321.946.000,00	2.192.782.718.683,00	93,14

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,08% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 10,65% karena adanya tambahan formasi CASN pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.
2. Penurunan Belanja Barang sebesar 5,93% karena turunnya belanja operasional, non operasional, serta belanja Perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2024.
3. Penurunan Belanja Modal sebesar 0,76% karena terdapat Pemblokiran anggaran serta beberapa pengadaan dengan nilai tender lebih rendah dari HPS dan pagu sehingga dilakukan optimalisasi kepada belanja lainnya.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Pegawai	799.476.921.775,00	722.558.060.480	10,65
Belanja Barang	1.164.716.080.588,00	1.238.148.571.087	(5,93)
Belanja Modal	228.589.716.320,00	230.351.781.008	(0,76)
Jumlah	2.192.782.718.683,00	2.191.058.412.575,00	0,08

Perincian Realisasi Belanja per satker per jenis belanja dapat dilihat dalam lampiran 10.

Belanja Pegawai
Rp799.476.921.775,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp799.476.921.775,00 dan Rp722.558.060.480,00. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS, Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 10,65% karena adanya tambahan formasi CASN pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	356.192.612.706,00	334.079.897.207,00	6,62
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29.778.477.350,00	4.160.413.364,00	615,76
Belanja Lembur	4.569.382.182,00	2.794.542.281,00	63,51
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	410.007.259.175,00	382.035.796.092,00	7,32
Jumlah Belanja Kotor	800.547.731.413,00	723.070.648.944,00	10,72
Pengembalian Belanja Pegawai	1.070.809.638,00	512.588.464,00	108,90
Jumlah Belanja Netto	799.476.921.775,00	722.558.060.480,00	10,65

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp1.070.809.638,00 karena adanya kelebihan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur dan tunjangan kinerja yang disebabkan karena perubahan status kepegawaian pegawai atau terlambat masuk kerja. Perincian Pengembalian Belanja Pegawai per satker dapat dilihat dalam lampiran 11.

Belanja Barang
Rp1.164.716.080.588,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.164.716.080.588,00 dan Rp1.238.148.571.087,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,93%, hal ini disebabkan karena turunnya belanja operasional, non operasional, serta belanja perjalanan dinas dalam negeri selama tahun 2024.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Barang Operasional	92.471.063.759,00	132.415.364.947	(30,17)
Belanja Barang Non Operasional	154.828.894.126,00	176.656.897.010	(12,36)
Belanja Barang Persediaan	94.360.398.082,00	94.270.773.980	0,10
Belanja Jasa	244.212.541.140,00	214.474.698.101	13,87
Belanja Pemeliharaan	90.392.358.963,00	76.325.782.915	18,43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	472.922.824.257,00	535.236.987.890	(11,64)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	17.805.876.188,00	11.094.604.830	60,49
Jumlah Belanja Kotor	1.166.993.956.515,00	1.240.475.109.673,00	(5,92)
Pengembalian Belanja	2.277.875.927,00	2.326.538.586	(2,09)
Jumlah Belanja Netto	1.164.716.080.588,00	1.238.148.571.087,00	(5,93)

Pengembalian belanja barang sebesar Rp2.272.455.927,00 merupakan pengembalian belanja tahun berjalan yang terdapat pada satker di lingkungan BPOM disebabkan antara lain kelebihan biaya perjalanan dinas, kelebihan pembayaran honor, kelebihan belanja sewa dll. Perincian Pengembalian Belanja Barang per satker dapat dilihat dalam lampiran 11.

Belanja Modal
Rp228.589.716.320,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp228.589.716.320,00 dan Rp230.351.781.008,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,76% karena terdapat pemblokiran anggaran serta beberapa pengadaan dengan nilai tender lebih rendah dari HPS dan pagu sehingga dilakukan optimalisasi kepada belanja lainnya. Perincian belanja modal disajikan sebagai berikut :

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Tanah	1.061.373.700,00	39.394.700,00	2.594,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.436.457.759,00	178.498.117.061,00	4,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.867.913.587,00	41.991.873.841,00	(19,35)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	215.944.732,00	0,00	-
Belanja Modal Lainnya	7.008.026.542,00	9.823.845.406,00	(28,66)
Jumlah Bruto	228.589.716.320,00	230.353.231.008,00	(0,77)
Pengembalian belanja	0,00	1.450.000,00	
Jumlah Belanja Netto	228.589.716.320,00	230.351.781.008,00	(0,76)

Belanja Modal Tanah
Rp1.061.373.700,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.061.373.700,00 dan Rp39.394.700,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2.694,20%. Kenaikan tersebut karena pada tahun 2024 terdapat belanja tanah untuk pematangan lahan. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Tanah	1.061.373.700,00	0,00	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0,00	39.394.700,00	-
Jumlah Belanja Modal tanah Kotor	1.061.373.700,00	39.394.700,00	2.694,20
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Modal Tanah Bersih	1.061.373.700,00	39.394.700,00	2.694,20

Belanja Modal tanah senilai Rp1.061.373.700,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sorong berupa pematangan tanah Loka POM di Kabupaten Sorong yang berada pada Jalan Pemda KM.24 Kecamatan Aimas, Kelurahan Aimas dengan Luas 15.000 M².

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp186.436.457.759,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp186.436.457.759,00 dan Rp178.498.117.061,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,45%. Kenaikan belanja Modal Peralatan dan Mesin terjadi karena pemenuhan alat laboratorium untuk beberapa satker yang meningkat statusnya dari Loka menjadi Balai serta pemenuhan alat laboratorium untuk regionalisasi Lab.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.300.963.927,00	173.413.044.129,00	2,82
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	8.135.493.832,00	5.085.072.932,00	59,99
Jumlah Belanja Kotor	186.436.457.759,00	178.498.117.061,00	4,45
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	
Jumlah Belanja	186.436.457.759,00	178.498.117.061,00	4,45

Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 per Satuan kerja dapat dilihat pada lampiran 12.

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp33.867.913.587,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp33.867.913.587,00 dan Rp41.991.873.841,00 atau mengalami penurunan sebesar 19,35%. Penurunan belanja terjadi karena terdapat pemblokiran anggaran.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.386.826.365,00	19.649.145.686,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0,00	1.995.000,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	60.920.000,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	14.420.167.222,00	22.340.733.155,00
Jumlah Belanja Kotor	33.867.913.587,00	41.991.873.841,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	33.867.913.587,00	41.991.873.841,00

Perincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.386.826.365,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 23
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Satuan Kerja
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Settama	181.128.024,00	Pekerjaan renovasi tempat sampah
2	Balai Besar Pom Di Makassar	591.922.596,00	Pekerjaan pembangunan Gedung Laboratorium Kimia
3	Balai POM di Ambon	5.185.217.318,00	Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Publik
4	Balai POM di Pangkal Pinang	108.530.550,00	Pekerjaan rehabilitasi pagar halaman kantor belakang, jasa konsultasi perencana dan Jasa Konsultasi pengawas.
5	Balai POM di Manokwari	1.493.135.550,00	Pekerjaan Pengembangan KDP Gedung laboratorium dan pelayanan publik serta parkir
6	Balai POM di Mamuju	723.046.812,00	Pekerjaan pengadaan bangunan Rumah Genset, pagar dan parkir
7	Balai POM di Tasikmalaya	434.337.597,00	Pembangunan Gedung Laboratorium.
8	Balai POM di Payakumbuh	8.257.490.320,00	Pekerjaan perencanaan konstruksi dan pembayaran Pembangunan Gedung Laboratorium.
9	Balai POM di Kediri	586.273.119,00	Pekerjaan pembangunan pagar permanen pada tanah Balai POM di Kediri yang merupakan hibah dari Pemkab Kediri
10	Loka POM di Kota Dumai	308.665.962,00	Pengadaan Konsultan Perancang Konstruksi pembangunan Gedung kantor dan Laboratorium
11	Loka POM di Kota Baubau	115.000.000,00	Pekerjaan Bangunan Rumah Genset
12	Loka POM di Kabupaten Ende	197.888.000,00	pekerjaan pengembangan Gedung Kantor Permanen berupa renovasi Ruang Laboratorium
13	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	795.941.400,00	Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor dan pelayanan publik
14	Loka POM di Aceh Tengah	18.408.666,00	Pembayaran honor dan rapat pemeliharaan gedung laboratorium
15	Loka POM di Kabupaten Belitung	89.336.700,00	Pekerjaan Pembangunan Pagar pengamanan tanah Loka POM di Kabupaten Belitung
16	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	300.503.751,00	Pekerjaan perancangan konstruksi gedung laboratorium
	Jumlah	19.386.826.365,00	

- b. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan sebesar Rp60.920.000,00 terdapat pada satker Loka POM di Kabupaten Ende merupakan pekerjaan pengembangan Gedung Kantor Permanen berupa perencanaan renovasi Ruang Laboratorium.
- c. Belanja Penambah Nilai Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.420.167.222,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 24
Realisasi Belanja Penambah Nilai Modal Gedung dan Bangunan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
1	Settama	2.627.386.173,00	Penggantian paving block mesjid, Renovasi toilet, renovasi Pagar, Kusen Masjid, Tangga darurat gedung Athena, dan Renovasi TPA, renovasi creativity zone, ruang rapat Sestama.
2	PPPOMN	124.725.150,00	Pengadaan Penambahan Jaringan Listrik pada Laboratorium Gedung Eureka II dengan NUP 13.
3	Balai Besar POM di Semarang	374.700.000,00	Pekerjaan pengadaan panel sinkron dan instalasi atas pengadaan Generator Set (Lab Scale)
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	89.670.151,00	Pekerjaan pengadaan penyambungan dan tenaga ahli pelaksanaan pekerjaan panel genset
5	Balai Besar POM di Padang	283.832.529,00	Pekerjaan jasa konsultansi perancangan renovasi saluran air dalam gedung beserta jasa konsultan perancangan dan pengawasannya
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	987.127.486,00	Uang muka dalam rangka rehabilitasi jaringan pada Gedung Laboratorium.
7	Balai Besar POM di Di Palangkaraya	142.858.000,00	Pekerjaan rehabilitasi pembangunan gedung dan laboratorium
8	Balai Besar POM di Makassar	1.050.743.800,00	Pekerjaan penambahan nilai terhadap Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Renovasi toilet Masjid
9	Balai Besar POM di Denpasar	365.008.134,00	pekerjaan renovasi pagar tembok penyengker
10	Balai Besar POM di Jayapura	1.187.362.496,00	Pekerjaan Renovasi Rabat Lantai 1 dan pekerjaan rehabilitasi Laboratorium mikrobiologi
11	Balai POM di Palu	1.133.252.427,00	Pekerjaan Renovasi Gedung pertemuan dan Gedung pertemuan
12	Balai POM di Kendari	50.000.000,00	Renovasi Gedung utama, aula kantor Balai POM Kendari (pemasangan Paving Blok).
13	Balai POM di Ambon	263.972.650,00	Pekerjaan pembangunan halaman gedung kantor
14	Balai POM di Kupang	3.209.708.776,00	Pekerjaan Renovasi Gedung Laboratorium Kimia, gedung kantor utama dan Aula
15	Balai POM di Pangkal Pinang	84.204.550,00	Pekerjaan Rehabilitasi halaman belakang kantor dan jasa konsultasi perencana dan jasa konsultasi pengawas
16	Balai POM di Manokwari	1.303.170.000,00	Pekerjaan Renovasi gedung administrasi dan gedung laboratorium serta renovasi pagar
17	Balai POM di Sofifi	578.469.900,00	Pekerjaan pembangunan kelanjutan laboratorium Tahap I, pekerjaan mekanikal elektrik dan pekerjaan pengawasan MEP
18	Balai POM di Mamuju	234.100.000,00	Pekerjaan Rabat beton terhadap parkiran terbuka, rabat beton jalan belakang gedung dan perluasan parkiran
19	Loka POM di Kabupaten Ende	48.025.000,00	Perbaikan panel listrik pada bangunan kantor permanen
20	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	281.850.000,00	Pekerjaan konstruksi pembangunan pagar kantor Loka POM.
Jumlah		14.420.167.222,00	

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp215.944.732,00

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp215.944.732,00 dan Rp0,00.

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jaringan
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Jaringan	120.000.000,00	0,00	-
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	40.005.732,00	0,00	-
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	55.939.000,00	0,00	-
Jumlah Belanja Modal tanah Kotor	215.944.732,00	0,00	-
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Modal Tanah Bersih	215.944.732,00	0,00	-

Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp215.944.732,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp120.000.000,00 terdapat pada satker Balai Besar POM di Palembang berupa Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya sebanyak 1 unit.
2. Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan sebesar Rp40.005.732,00 terdapat pada satker Balai Besar POM di Serang berupa pekerjaan pengadaan renovasi parkiran barat.
3. Belanja Penambahan Nilai Jaringan sebesar Rp55.939.000,00 terdapat pada satker Balai Besar POM di Surabaya merupakan pengembangan langsung dengan renovasi instalasi pembuangan air limbah (IPAL) berupa penambahan fasilitas-fasilitas pendukung operasional IPAL seperti pembuatan bak kontrol, kanopi, dan lain-lain terhadap Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang.

Belanja Modal Lainnya
Rp7.008.026.542,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.008.026.542,00 dan Rp9.823.845.406,00 atau mengalami penurunan sebesar 28,66%. Penurunan terjadi karena turunnya pagu anggaran belanja Modal Lainnya.

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Lainnya	1.333.405.536,00	968.660.006,00	37,65
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap lainnya	5.674.621.006,00	8.855.185.400,00	(35,92)
Jumlah Belanja Kotor	7.008.026.542,00	9.823.845.406,00	(28,66)
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	7.008.026.542,00	9.823.845.406,00	(28,66)

Perincian Realisasi Belanja Modal lainnya Tahun 2024, yaitu:

- a. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp1.333.405.536,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 27
Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Satuan Kerja
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Satuan Kerja	Realisasi Belanja Modal Lainnya	Keterangan
1	Settama	79.365.000,00	Pengadaan pembuatan Aplikasi Display dan kontrol
2	Deputi I	27.483.668,00	Pembelian bahan perpustakaan tercetak
3	Deputi II	125.000.000,00	Pekerjaan Instalasi Jaringan LAN
4	PPPOMN	29.131.321,00	Pengadaan Pustaka Digital (e book)
5	PUSDATIN	276.569.820,00	Pembelian 87 Monografi dan pembangunan Aplikasi Back End BCC
6	Balai Besar POM di Padang	15.000.000,00	pengadaan sebuah lukisan
7	Balai Besar POM di Di Serang	2.429.443,00	Pembelian Bahan Perpustakaan Cetak.
8	Balai POM di Surakarta	148.374.230,00	Pekerjaan Renovasi Gedung berupa pembuatan partisi gedung untuk laboratorium dan pekerjaan perubahan daya listrik untuk operasional gedung laboratorium.
9	Balai POM di Kediri	311.366.854,00	Pembelian TC Color File , Penyelesaian pembangunan Ruang aula dan renovasi ruang layanan publik
10	Balai POM di Jember	292.500.000,00	Renovasi gedung laboratorium karena Gedung bukan milik Badan POM sehingga Menjadi Aset Tetap Renovasi dan pembelian bahan perpustakaan tercetak
11	Loka POM di Kota Dumai	555.000,00	Pembelian Monografi
12	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.000.000,00	Pembelian Monografi
13	Loka POM di Kabupaten Ende	14.999.200,00	Belanja perjadi, honor narasumber untuk renovasi Ruang Laboratorium di Gedung dan Bangunan
14	Loka POM di Kota Balikpapan	1.440.000,00	Pembelian Monografi
15	Loka POM di Kota Bima	2.650.000,00	Pembelian Buku Lainnya (TC Color)
16	Loka POM di Kabupaten Merauke	1.221.000,00	Pembelian TC Color File
17	Loka POM di Kabupaten Sorong	3.130.000,00	Pembelian Monografi
18	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	3.130.000,00	Pembelian Monografi
	Jumlah	1.335.345.536,00	

- b. Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.674.621.006,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 28
Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Realisasi Belanja Modal Penambahan Aset Tetap Lainnya	Keterangan
1	Sekretariat Utama	548.528.000,00	Pengembangan Aplikasi SIMPEL, SIMESTRIS, RHPK dan SIMETRIS BPOM
2	Inspektorat Utama	138.224.206,00	Pengembangan Aplikasi SAPA APIP untuk penambahan fitur
3	Deputi I	301.302.700,00	Pengembangan <i>Web Portal for Online Consultation and Live Chat</i> , Pengembangan Aplikasi SISOBAT dan Pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB.
4	Deputi II	129.980.000,00	Pengembangan Aplikasi ASROT
5	Deputi III	777.754.500,00	Pengembangan Aplikasi Klubpompri, Aplikasi GKPD Online, Aplikasi SIAPSAPA, Aplikasi Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen, Sertifikat Persetujuan, dan Izin Edar Pangan Olahan Berbasis Risiko, Aplikasi Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Software RMP, Aplikasi SPPIRT, Aplikasi Istana Umkm, Aplikasi SIPAMAN, dan Aplikasi <i>Risk Based Quality Assurance System</i> merupakan penambahan fitur/modul pada aplikasi tersebut
6	PPOMN	530.000.000,00	Pengadaan <i>Upgrade Labsolution</i> versi terbaru
7	PUSAKOM	110.445.000,00	Pengembangan subsite sistem informasi Pusakom
8	PUSDATIN	2.930.460.950,00	Pengembangan Aplikasi yang terdapat di Pusdatin a.l. Aplikasi Notifikos, Aplikasi SMARTPOM, Aplikasi SIPT, Aplikasi Evortala, Redesign Website, Aplikasi E-Payment, Aplikasi EWAS, Aplikasi Peta Penindakan, Aplikasi PPID, Aplikasi TTAC, Aplikasi Standar Pangan, E-Sertifikasi, Aplikasi BPOM Mobile, Aplikasi Pendaftaran Iklan, Aplikasi Registrasi Obat, Pengembangan Dashboard BPOM Operatinal Center, Aplikasi Webreg, Dan Pengembangan Sistem Manajemen Reagensia.
9	PPSDM	160.165.000,00	Pengembangan aplikasi IDEAS dan Aplikasi LSP
10	Balai Besar POM di Padang	1.224.000,00	Pembelian Bingkai <i>Frame</i> Lukisan
11	Balai POM di Palu	6.560.000,00	Pengembangan aplikasi SIGA POM
12	Balai POM di Payakumbuh	39.976.650,00	Pembelian Sekat Kaca Laboratorium
	Jumlah	5.674.621.006,00	

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp142.464.268.747,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp142.464.268.747,00 dan Rp150.612.013.901,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas Di Bendahara
Pengeluaran*
Rp495.957,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp495.957,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji pada Laporan Keuangan ini terdapat pada Deputy I. Kas di Bendahara Pengeluaran pada Deputy 1 - Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP senilai Rp495.957,00 dalam bentuk tunai merupakan kuitansi yang belum dinihilkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terjadi penolakan dari KPPN pada saat proses kirim SPM tanggal 30 Desember 2024 dengan keterangan dana tidak tersedia/tidak cukup yang disebabkan belum dilakukannya pemutakhiran revisi POK terakhir.
2. Setelah dilakukan pemutakhiran revisi POK, pagu anggaran pada SPAN masih tidak sesuai dengan revisi POK (sedangkan pagu anggaran pada SAKTI telah sesuai) sehingga SPM tetap ditolak oleh KPPN.
3. Terkait hal tersebut dilakukan tindak lanjut berupa penyetoran sebesar Rp495.957,00 sesuai NTPN 4D9817NAS4JNKKTK tanggal 5 Februari 2025.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas*
Rp254.994.365,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp254.994.365,00 dan Rp176.400.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang

bukan berasal dari UP/TUP. Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:

Tabel 29
Perincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
BP Lain-lain	5.400,00	176.400.000,00
Setara Kas Lainnya	254.988.965,00	0,00
Jumlah	254.994.365,00	176.400.000,00

BP Lain-lain sebesar Rp5.400,00 terdapat pada Loka POM di Kab. Buleleng yang merupakan sisa kas di bendahara pengeluaran yang sebelumnya dibayarkan sebagai pajak namun gagal dan tertahan karena sistem bank bermasalah, atas kegagalan pembayaran pajak tersebut telah dilakukan pembayaran ulang secara tunai dengan uang talangan dari BP.

Setara Kas Lainnya sebesar Rp254.988.965,00 dikarenakan adanya pendelegasian wewenang dari KPA Deputy IV kepada Tim Pengelola Barang Bukti (TPBB) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (Deputy IV) yi. Surat Kuasa Nomor: KU.03.08.61.04.24.07 tanggal 17 April 2024 untuk melakukan transaksi pencetakan rekening koran, cetak mutasi, cek saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan, kepengurusan administrasi atas rekening Bank Mandiri Nomor 1230063243705 RPL 175 DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU.

Pada Balai POM di Mamuju terdapat rekening dana penampungan dengan nomor 1700010800591 Bank Mandiri, yang digunakan untuk menampung barang bukti lainnya berupa uang tunai dalam penindakan obat dan makanan. Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo rekening tersebut Rp0,00 karena kasus penindakan dengan barang bukti uang tunai telah selesai/*incracht* pada tahun 2022.

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp2.760.255.555,00

C.1.3 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.760.255.555,00 dan Rp1.152.528.423,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) yang terdapat pada

Laporan Keuangan ini berasal dari Belanja Barang Dibayar Dimuka yang terdiri dari:

Tabel 30
Perincian Belanja Barang Dibayar di Muka (Prepaid)
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sewa Rumah Dinas	1.109.218.715,00	323.701.291,00
Sewa Gedung Kantor	95.915.464,00	164.135.789,00
Sewa Gudang	188.835.652,00	229.989.357,00
Sewa Kendaraan	836.363.432,00	414.546.266,00
Langganan Zoom Meeting Zoho Google Drive dan aplikasi lainnya	529.922.292,00	20.155.720,00
Total Belanja Barang Dibayar Dimuka (prepaid)	2.760.255.555,00	1.152.528.423,00

Kenaikan Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa rumah dinas Kepala UPT dan/atau pejabat Eselon I dan II serta pengakuan Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Satker Deputy IV (pembelian lisensi dan langganan aplikasi). Penjelasan Belanja Barang Dibayar Di Muka (*prepaid*) per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran 13.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp399.462,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 31
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0,00	399.462,00
Jumlah	0,00	399.462,00

Piutang Bukan Pajak Rp487.727.240,00

C.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp487.727.240,00 dan Rp476.584.097,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Mutasi nilai piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam rupiah)

Saldo Piutang per 31 Desember 2023	476.584.097,00
Mutasi Tambah	791.864.990,00
a. Pengakuan Piutang	791.864.990,00
Mutasi Kurang	780.721.847,00
a. Pembatalan Pengakuan Piutang	780.721.847,00
Saldo per 31 Desember 2024	487.727.240,00

Perincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33
Perincian Piutang Bukan Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	487.727.240,00	167.416.648,00
2	Piutang Lainnya	-	309.167.449,00
	Total	487.727.240,00	476.584.097,00

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp487.727.240,00 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdapat pada Balai Besar POM di Bandung yang merupakan temuan atas audit BPK TA 2010 berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan rehabilitasi dan perluasan gedung pelayanan publik dengan penyedia PT Sartonia Agung. Piutang ini masuk kategori macet dan telah diserahkan ke PUPN Bandung sesuai surat penyerahan nomor PR.02.03.94.02.14.1138 tanggal 25 Februari 2014.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak
(Rp487.727.240,
00)

C.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp487.727.240,00) dan (Rp2.382.920,00). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas masing-masing debitur. Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 34
Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet	487.727.240,00	100%	487.727.240,00
Jumlah	487.727.240,00		487.727.240,00

Pemilihan kualitas macet didasarkan pada PMK Nomor 07/PMK.06/2019 dimana penyedia tidak melunasi piutang dalam jangka waktu 1 bulan

terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga dan piutang telah diserahkan ke PUPN.

Piutang Bukan
Pajak (netto)
Rp0,00

C.1.7 Piutang Bukan Pajak (*Netto*)

Saldo Piutang Bukan Pajak (*Netto*) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp474.201.177,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Persediaan
Rp139.448.522.870,00

C.1.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp139.448.522.870,00 dan Rp148.808.484.839,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 35
Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024

Saldo per 31 Desember 2023	148.808.484.839,00
Mutasi Tambah	164.257.680.446,00
Mutasi Kurang	173.617.642.415,00
Saldo per 31 Desember 2024	139.448.522.870,00

Tabel 36
Perincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Barang Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	9.719.391.619,00	11.627.002.345,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	354.031.404,00	476.809.812,00
3	Suku Cadang	45.003.434.774,00	50.028.692.631,00
4	Bahan Baku	83.386.121.573,00	85.709.870.615,00
5	Persediaan Lainnya	985.543.500,00	966.109.436,00
	Total	139.448.522.870,00	148.808.484.839,00

Perincian Persediaan per Satker dapat dilihat pada lampiran 14.

Nilai barang persediaan yang dalam kondisi usang sebesar Rp 512.263.833,00 dan tidak terdapat barang persediaan dalam kondisi rusak. Perincian per satuan kerja terdapat pada lampiran 15.

Aset Tetap
Rp3.379.465.824.426,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.379.465.824.426,00 dan Rp3.385.159.250.451,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah
Rp1.726.822.662.687,00

C.2.1 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.726.822.662.687,00 dan Rp1.688.380.858.025,00. Mutasi nilai tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		1.688.380.858.025,00
Mutasi Tambah		88.650.864.514,00
a.	Hibah Masuk	1.175.628.771,00
b.	Perolehan Lainnya	24.186.158.986,00
c.	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	47.341.925.000,00
d.	Pembelian	4.650.000,00
e.	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	14.548.495.057,00
f.	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.054.923.700,00
g.	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.800.000,00
h.	Reklasifikasi Masuk	337.283.000,00
Mutasi Kurang		50.209.059.852,00
a.	Transfer Keluar	47.341.925.000,00
b.	Hibah Keluar	2.275.401.852,00
c.	Koreksi Pencatatan	6.450.000,00
d.	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	248.000.000,00
e.	Reklasifikasi Keluar	337.283.000,00
Saldo per 31 Desember 2024		1.726.822.662.687,00

Perincian Aset Tetap Tanah per Satker pada lampiran 16.

Transaksi mutasi Tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp88.650.864.514,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hibah (masuk) sebesar Rp1.175.628.771,00 merupakan hibah dari Pemerintah Daerah kepada BPOM melalui Satuan Kerja Daerah, nilai tersebut merupakan nilai yang tercatat di neraca Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dihapuskan oleh Pemerintah Daerah terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 38
Hibah Tanah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai	Instansi Asal	Luas m ²	Progres Penilaian Ulang
1	Balai POM di Kupang	114.400.000,00	Pemerintah Kab. Belu	2.860	Telah diajukan penilaian ulang ke KPKNL dengan Surat Nomor B-PL.03.10.4B.07.24.839 Tanggal 23 Juli 2024.
2	Balai POM di Kediri	622.000.000,00	Pemerintah Daerah Kab. Kediri	6.604	Telah diajukan penilaian ulang ke KPKNL sesuai surat nomor B.PL.03.01.19B.10.24.833 tanggal 22 Oktober 2022, namun sampai dengan akhir pelaporan belum ada jawaban atas surat tersebut dari KPKNL.
3	Balai POM di Payakumbuh	328.800.342,00	Pemerintah Kota Payakumbuh	834	Telah diajukan penilaian ulang ke KPKNL dengan Surat Nomor B-PL.03.01.14B.08.24.388 tanggal 27 Agustus 2024 namun ditolak oleh KPKNL sesuai S-1533/KNL.0302/2024 24 September 2024 dengan alasan tanah sudah memiliki nilai perolehan sesuai BAST.
4	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	71.360.189,00	Pemerintah Kab. Sijunjung	5.700	Telah diajukan penilaian ulang ke KPKNL dengan Surat Nomor B-PL.03.01.5C.12.24.575 Tanggal 17 Desember 2024 namun ditolak oleh KPKNL sesuai Surat Nomor S-2232/KNL.0301/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan alasan tanah sudah memiliki nilai perolehan sesuai BAST.
5	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	39.068.240,00	Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Barat	3.301	Telah dinilai ulang oleh KPKNL sesuai Surat Nomor S-72/KNL.1202/2025 tanggal 6 Februari 2025 sehingga akan menambah nilai pada Semester 1 2025.
Jumlah		1.175.628.771,00			

b. Perolehan Lainnya sebesar Rp24.186.158.986,00 terdapat pada Satuan Kerja berikut:

1. Balai POM di Jambi sebesar Rp2.261.594.986,00 merupakan alih status penggunaan tanah dari Pertamina seluas 8.983m² yang telah ditetapkan status penggunaan oleh Kementerian Keuangan pada BPOM.
2. Balai POM di Tarakan sebesar Rp21.924.564.000,00 merupakan alih status penggunaan tanah seluas 2266m² dari Pertamina yang telah ditetapkan status penggunaan oleh Kementerian Keuangan pada BPOM.

c. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya sebesar Rp47.341.925.000,00 terdapat pada Sekretariat Utama yang

merupakan penggunaan kembali tanah di Kelapa Dua Wetan untuk dilakukan transfer ke Asisten Logistik (SLOG POLRI).

- d. Pembelian sebesar Rp4.650.000,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sorong berupa kesalahan pendetilan sebagai pembelian berupa jasa pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- e. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp14.548.495.057,00 merupakan pencatatan nilai bertambah karena penilaian wajar dari KPKNL yang terdapat pada Satuan Kerja berikut:

Tabel 39
Mutasi Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar POM di Pontianak	121.765.897,00
2	Balai POM di di Tarakan	1.955.984.160,00
3	Balai POM di Surakarta	10.149.045.000,00
4	Loka POM di Kabupaten Sorong	6.450.000,00
5	Loka POM di Kabupaten Bungo	2.315.250.000,00
	Jumlah	14.548.495.057,00

- f. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.054.923.700,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sorong berupa jasa konsultan perancangan, pengawasan, honor narasumber dan jasa konstruksi pematangan lahan terhadap Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
- g. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.800.000,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sorong berupa honor tim teknis jasa pematangan lahan.
- h. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp337.283.000,00 terdapat pada Satuan Kerja Balai Besar POM di Padang berupa tindak lanjut temuan audit karena kesalahan kodefikasi BMN.

Transaksi Mutasi Kurang Tanah sebesar Rp50.209.059.852,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transfer Keluar sebesar Rp47.341.925.000,00 terdapat pada Sekretariat Utama berupa transfer tanah seluas 9.988m² di Kelapa Dua Wetan kepada Asisten Logistik (SLOG POLRI).

- b. Hibah Keluar sebesar Rp2.275.401.852,00 terdapat pada Balai POM di Kabupaten Kediri yang merupakan hibah tanah seluas 2.760m² kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.
- c. Koreksi Pencatatan sebesar Rp6.450.000,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sorong berupa kesalahan pendetailan atas transaksi masuk tanah yang menghasilkan NUP baru.
- d. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp248.000.000,00 terdapat pada Loka POM di Kabupaten Bungo berupa kesalahan penginputan nilai perolehan Tanah.
- e. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp337.283.000,00 terdapat pada Satuan Kerja Balai Besar POM di Padang berupa tindak lanjut temuan audit karena kesalahan kodefikasi BMN.

Selain mutasi nilai tanah terdapat Koreksi Perubahan Kuantitas (m²) yang terdapat pada satuan kerja:

- 1. Balai POM di Kediri berupa penambahan luasan tanah sebesar 54 m² semula 6.604 m² menjadi 6.658 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai.
- 2. Loka POM di Kabupaten Banggai berupa pengurangan luasan tanah bangunan kantor pemerintah NUP 1 seluas 33m² dari 2.500m² menjadi 2.467m² dikarenakan terdapat perbedaan luasan antara sertifikat dan BAST pada bulan Februari 2024.
- 3. Balai Besar POM di Pontianak untuk Loka POM di Kabupaten Sambas berupa pengurangan luasan tanah sebesar 99m² semula 2.758m² menjadi 2.659m² senilai Rp0,00 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai.
- 4. Balai Besar POM di Banjarmasin berupa pengurangan luasan tanah sebesar 1m² semula 10.000m² menjadi 9.999m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai dan pengurangan luasan tanah sebesar 2m² semula 1.852m² menjadi 1.850m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai.

Peralatan dan Mesin
Rp3.209.368.070.471,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.209.368.070.471,00 dan Rp3.099.255.818.791,00. Mutasi nilai aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 40
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		3.099.255.818.791,00
Mutasi Tambah		243.674.302.162,00
a	Saldo Awal	8.684.167.586,00
b	Pembelian	175.086.568.168,00
c	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3.217.967.550,00
d	Perolehan Lainnya	1.180.793.925,00
e	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.653.538,00
f	Transfer Masuk	24.623.922.602,00
g	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	6.164.081.942,00
h	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.411.282.242,00
i	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.796.563.611,00
j	Reklasifikasi Masuk	12.498.805.998,00
k	Koreksi Susulan	8.495.000,00
Mutasi Kurang		133.562.050.482,00
a	Koreksi Pencatatan	7.209.088.112,00
b	Koreksi Susulan	2.990.000,00
c	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.907.616.112,00
d	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	127.276.401,00
e	Transfer Keluar	23.451.022.091,00
f	Reklasifikasi Keluar	13.785.859.048,00
g	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	83.078.198.718,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024		3.209.368.070.471,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		(2.489.361.468.240,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		720.006.602.231,00

Perincian aset tetap Peralatan dan Mesin per Satker pada lampiran 17.

Mutasi Tambah sebesar Rp243.674.302.162,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo Awal sebesar Rp8.684.167.586,00 merupakan pencatatan awal BMN yang belum tercatat namun bukan berasal dari pengadaan tahun berjalan yang berasal dari temuan Inspektorat, BPK atau sebab lainnya, terdapat pada Satuan Kerja:

Tabel 41
Perincian Mutasi Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	DEPUTI IV	5.668.755.300,00
2	Pusdatin	967.962.893,00
3	Balai Besar POM di Jakarta	14.550.000,00
4	Balai Besar POM di Bandung	72.724.000,00

No	Satuan Kerja	Nilai
5	Balai Besar POM di Semarang	147.210.600,00
6	Balai Besar POM di Surabaya	49.778.490,00
7	Balai Besar POM di Makassar	24.695.000,00
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	300.000,00
9	Balai Besar POM di Pontianak	19.517.000,00
10	Balai Besar POM di Samarinda	1.631.513.803,00
11	Balai Besar POM di Denpasar	27.479.000,00
12	Balai Besar POM di Jayapura	9.181.500,00
13	Balai POM di di Manokwari	49.500.000,00
14	Balai POM di Palu	1.000.000,00
	Jumlah	8.684.167.586,00

- b. Pembelian sebesar Rp175.086.568.168,00 merupakan pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 83 Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 42

Perincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	4.075.041.830,00
2	Ittama	433.774.300,00
3	Deputi I	1.777.044.500,00
4	Deputi II	1.852.059.240,00
5	Deputi III	1.928.097.050,00
6	Deputi IV	1.220.560.060,00
7	PPPOMN	4.764.492.976,00
8	PPSDM	543.192.710,00
9	Pusakom	224.730.000,00
10	Pusdatin	8.280.318.999,00
11	Balai Besar POM di Jakarta	2.574.543.320,00
12	Balai Besar POM di Bandung	3.886.484.970,00
13	Balai Besar POM di Semarang	6.077.220.975,00
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	342.966.000,00
15	Balai Besar POM di Surabaya	10.550.368.498,00
16	Balai Besar POM di Makassar	3.129.553.500,00
17	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.131.591.760,00
18	Balai Besar POM di Medan	2.698.299.140,00
19	Balai Besar POM di Padang	2.414.794.130,00
20	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.962.766.499,00
21	Balai Besar POM di Palembang	3.171.799.500,00
22	Balai Besar POM di Bandar Lampung	388.799.250,00
23	Balai Besar POM di Pontianak	3.567.025.000,00
24	Balai Besar POM di di Palangkaraya	940.198.280,00
25	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.540.141.355,00
26	Balai Besar POM di Samarinda	3.874.881.302,00
27	Balai Besar POM di Manado	2.473.622.683,00
28	Balai Besar POM di Denpasar	3.869.845.000,00
29	Balai Besar POM di Mataram	2.457.910.942,00
30	Balai Besar POM di Jayapura	3.570.510.733,00

No	Nama Satker	Nilai
31	Balai Besar POM di Serang	3.240.987.220,00
32	Balai POM di Batam	1.960.249.000,00
33	Balai POM di Pangkal Pinang	3.592.119.500,00
34	Balai POM di Tarakan	1.986.174.310,00
35	Balai POM di Gorontalo	261.690.500,00
36	Balai POM di Manokwari	657.713.366,00
37	Balai POM di Bengkulu	2.521.042.400,00
38	Balai POM di Kendari	2.463.829.300,00
39	Balai POM di Ambon	2.635.589.838,00
40	Balai POM di Sofifi	3.470.426.100,00
41	Balai POM di Kupang	4.310.484.914,00
42	Balai POM di Jambi	6.209.599.770,00
43	Balai POM di Mamuju	5.436.977.400,00
44	Balai POM di Palu	2.562.430.102,00
45	Balai POM di Surakarta	2.714.622.310,00
46	Balai POM di Tasikmalaya	3.203.173.688,00
47	Balai POM di Kediri	3.382.224.266,00
48	Balai POM di Bogor	3.044.731.660,00
49	Balai POM di Tangerang	3.357.148.723,00
50	Balai POM di Payakumbuh	3.627.907.450,00
51	Balai POM di Jember	3.299.828.607,00
52	Balai POM di Palopo	3.183.994.477,00
53	Loka POM di Kabupaten Bungo	277.839.226,00
54	Loka POM di Kabupaten Tabalong	246.006.000,00
55	Loka POM di Aceh Selatan	179.408.400,00
56	Loka POM di Aceh Tengah	388.963.175,00
57	Loka POM di Kabupaten Banggai	288.686.519,00
58	Loka POM di Kabupaten Banyumas	766.717.000,00
59	Loka POM di Kabupaten Belitung	566.867.998,00
60	Loka POM di Kabupaten Bima	307.857.660,00
61	Loka POM di Kabupaten Buleleng	250.391.000,00
62	Loka POM di Kabupaten Dhamasraya	256.499.670,00
63	Loka POM di Kabupaten Ende	2.228.569.196,00
64	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	618.152.318,00
65	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.124.552.566,00
66	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	336.199.558,00
67	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	840.740.813,00
68	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	554.549.000,00
69	Loka POM di Kabupaten Merauke	442.147.292,00
70	Loka POM di Kabupaten Mimika	442.917.063,00
71	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	410.000.000,00
72	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	473.594.422,00
73	Loka POM di Kabupaten Sanggau	286.246.400,00
74	Loka POM di Kabupaten Sorong	386.117.055,00
75	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	369.497.000,00
76	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	284.887.729,00
77	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	229.628.056,00
78	Loka POM di Kota Balikpapan	371.551.227,00
79	Loka POM di Kota Baubau	1.190.989.850,00
80	Loka POM di Kota Dumai	302.254.800,00
81	Loka POM di Kota Lubuklinggau	207.120.390,00
82	Loka POM di Kota Tanjungbalai	282.395.124,00
83	Loka POM di Kota Tanjungpinang	329.642.258,00
TOTAL		175.086.568.168,00

- c. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp3.217.967.550,00 terdapat pada Satuan Kerja berikut:

Tabel 43
Perincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai POM di Manokwari	2.065.394.550,00
2	Balai POM di Kota Tarakan	12.973.000,00
3	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	535.000.000,00
4	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	604.600.000,00
Total		3.217.967.550,00

- d. Perolehan Lainnya sebesar Rp1.180.793.925,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 44
Perincian Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi I	32.250.000,00
2	Balai Besar POM di Bandung	5.520.000,00
3	Balai Besar POM di Banjarmasin	133.752.480,00
4	Balai Besar POM di Denpasar	136.471.500,00
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.400.000,00
6	Balai Besar POM di Medan	34.000.000,00
7	Balai POM di Ambon	76.926.000,00
8	Balai POM di Batam	21.589.000,00
9	Balai POM di Kediri	141.955.000,00
10	Balai POM di Palopo	31.543.500,00
11	Balai POM di Pangkal Pinang	46.000.000,00
12	Balai POM di Tasikmalaya	255.661.375,00
13	Balai POM di Jambi	88.847.000,00
14	Balai POM di Kupang	11.888.070,00
15	Balai POM di Palu	2.990.000,00
16	Balai POM di Payakumbuh	5.000.000,00
17	Loka POM di Kabupaten Ende	148.000.000,00
TOTAL		1.180.793.925,00

- e. Reklasifikasi Masuk Dari Persediaan sebesar Rp1.653.538,00 terdapat pada Satuan Kerja Loka POM Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan
- f. Transfer Masuk sebesar Rp24.623.922.602,00 dengan perincian pada Satuan Kerja:

Tabel 45

Perincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Settama	291.494.704,00
2	Deputi I	453.255.188,00
3	Deputi II	62.670.000,00
4	Deputi III	62.502.994,00
5	Deputi IV	272.630.410,00
6	PPPOMN	2.200.000,00
7	PPSDM	511.361.730,00
8	PUSAKOM	517.534.400,00
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	114.900.000,00
10	Balai Besar POM di Bandung	98.043.667,00
11	Balai Besar POM di Jakarta	34.298.250,00
12	Balai Besar POM di Makassar	7.090.000,00
13	Balai Besar POM di Medan	12.938.406.543,00
14	Balai Besar POM di Pontianak	54.128.500,00
15	Balai Besar POM di Samarinda	5.528.915.175,00
16	Balai POM di Bogor	815.048.724,00
17	Balai POM di Jember	320.536.557,00
18	Balai POM di Surakarta	49.920.324,00
19	Balai POM di Tangerang	39.049.940,00
20	Balai POM di Tasikmalaya	242.999.000,00
21	Loka POM di Kabupaten Banyumas	112.581.785,00
22	Loka POM di Kabupaten Bima	903.854.200,00
23	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	4.950.000,00
24	Loka POM di Kabupaten Merauke	4.950.000,00
25	Loka POM di Kabupaten Sanggau	1.180.600.511,00
	Jumlah	24.623.922.602,00

- g. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp6.164.081.942,00 yang terdapat Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 46

Perincian Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.157.997.778,00
2	Deputi I	6.710.000,00
3	PUSDATIN	1.259.054.660,00
4	Balai Besar POM di Bandar Lampung	243.631.985,00
5	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.125.000,00
6	Balai Besar POM di Manado	38.155.700,00
7	Balai Besar POM di Padang	2.191.500,00
8	Balai Besar POM di Pontianak	1.428.319.541,00
9	Balai POM di Di Batam	2.100.000,00
10	Balai POM di Di Manokwari	1.659.827.000,00
11	Balai POM di Kendari	364.968.778,00
TOTAL		6.164.081.942,00

- h. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp8.411.282.242,00 terdapat pada Satuan Kerja berikut:

Tabel 47
Perincian Pembangunan Nilai Aset (Langsung) per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi I	22.500.000,00
2	Deputi III	253.500.000,00
3	Deputi IV	155.500.000,00
4	PPOMN	2.201.250.750,00
5	Balai Besar POM di Banda Aceh	72.287.031,00
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	702.000.000,00
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	476.000.000,00
8	Balai Besar POM di Jayapura	38.600.000,00
9	Balai Besar POM di Makassar	542.500.000,00
10	Balai Besar POM di Manado	840.000.000,00
11	Balai Besar POM di Padang	525.000.000,00
12	Balai Besar POM di Pekanbaru	9.849.000,00
13	Balai Besar POM di Samarinda	75.000.000,00
14	Balai Besar POM di Semarang	591.133.500,00
15	Balai Besar POM di Surabaya	493.817.600,00
16	Balai Besar POM di Yogyakarta	89.670.151,00
17	Balai POM di Ambon	311.627.600,00
18	Balai POM di Bogor	2.499.000,00
19	Balai POM di Pangkal Pinang	53.998.725,00
20	Balai POM di Tarakan	19.800.000,00
21	Balai POM di Tasikmalaya	125.627.500,00
22	Balai POM di Jambi	156.726.020,00
23	Balai POM di Kendari	306.400.000,00
24	Balai POM di Sofifi	326.951.055,00
25	Loka POM di Kabupaten Belitung	12.011.310,00
26	Loka POM di Kabupaten Ende	5.951.000,00
27	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	1.082.000,00
Total		8.411.282.242,00

- i. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp3.796.563.611,00 disebabkan karena kesalahan penginputan pada modul komitmen dan upaya penertiban aset yang terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 48
Perincian Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi III	84.400.000,00
2	Ittama	1.240.000,00
3	PUSAKOM	52.547.400,00
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	315.875.600,00
5	Balai Besar POM di Bandar Lampung	10.312.500,00
6	Balai Besar POM di Bandung	2.181.192.000,00

No	Nama Satker	Nilai
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	68.882.000,00
8	Balai Besar POM di Jayapura	1.119.000,00
9	Balai Besar POM di Makassar	10.750.000,00
10	Balai Besar POM di Manado	1.850.000,00
11	Balai Besar POM di Samarinda	450.326.413,00
12	Balai Besar POM di Yogyakarta	40.215.927,00
13	Balai Besar POM di Medan	220.002.000,00
14	Balai POM di Ambon	280.822.490,00
15	Balai POM di di Pangkal Pinang	57.500.000,00
16	Balai POM di Kendari	7.896.700,00
17	Loka POM di Kabupaten Belitung	3.124.146,00
18	Loka POM di Kabupaten Buleleng	6.500.000,00
19	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	2.007.435,00
TOTAL		3.796.563.611,00

- j. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp12.498.805.998,00 merupakan transaksi perubahan kodefikasi aset sebagai upaya penertiban aset, tindak lanjut temuan Inspektorat dan/atau BPK yang terdapat pada Satuan Kerja berikut:

Tabel 49
Perincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.021.280.000,00
2	Deputi I	325.095.899,00
3	Deputi III	1.087.072.291,00
4	Deputi IV	2.080.000,00
5	Ittama	18.772.182,00
6	PPOMN	39.250.000,00
7	PPSDM	5.200.000,00
8	PUSDATIN	214.320.000,00
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.022.526.833,00
10	Balai Besar POM di Bandung	3.130.627.852,00
11	Balai Besar POM di Banjarmasin	140.944.800,00
12	Balai Besar POM di Serang	1.301.500,00
13	Balai Besar POM di Jayapura	9.100.000,00
14	Balai Besar POM di Makassar	911.000.000,00
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	44.300.000,00
16	Balai Besar POM di Samarinda	136.697.520,00
17	Balai Besar POM di Semarang	529.480.256,00
18	Balai POM di Ambon	64.494.908,00
19	Balai POM di Batam	130.427.500,00
20	Balai POM di Bogor	3.900.000,00
21	Balai POM di Jember	86.384.000,00
22	Balai POM di Kediri	828.916.900,00
23	Balai POM di Payakumbuh	493.417.800,00
24	Balai POM di Tarakan	10.500.000,00
25	Balai POM di Kupang	36.000.000,00
26	Balai POM di Palu	77.045.000,00
27	Loka POM di Aceh Selatan	33.850.000,00
28	Loka POM di Kabupaten Banggai	20.544.000,00
29	Loka POM di Kabupaten Bungo	11.100.000,00
30	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimba	17.472.075,00

No	Nama Satker	Nilai
31	Loka POM di Kabupaten Mimika	509.790.398,00
32	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	6.324.000,00
33	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	35.132.100,00
34	Loka POM di Kabupaten Tabalong	446.154.500,00
35	Loka POM di Kota Lubuklinggau	6.882.000,00
36	Loka POM di Kota Tanjungpinang	41.421.684,00
		12.498.805.998,00

- k. Koreksi Susulan sebesar Rp8.495.000,00 terdapat pada Satuan Kerja Balai POM di Kendari merupakan koreksi aset karena kesalahan MAK belanja yang kemudian dilakukan revisi SPM.

Mutasi Kurang sebesar Rp133.562.050.482,00 terdiri dari beberapa transaksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi Pencataan sebesar Rp7.209.088.112,00 terjadi karena kesalahan akun belanja, kesalahan penginputan aset dan tindak lanjut temuan audit Inspektorat Utama dan/atau BPK yang terdapat pada Satuan Kerja:

Tabel 50
Perincian Koreksi Pencatatan per 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	59.917.778,00
2	Deputi III	5.400.000,00
3	DEPUTI IV	5.668.755.300,00
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	315.875.600,00
5	Balai Besar POM di Bandar Lampung	10.312.500,00
6	Balai Besar POM di Palangkaraya	49.533.750,00
7	Balai Besar POM di Jayapura	1.000.000,00
8	Balai Besar POM di Makassar	10.750.000,00
9	Balai Besar POM di Manado	1.850.000,00
10	Balai Besar POM di Samarinda	450.326.413,00
11	Balai Besar POM di Semarang	29.438.000,00
12	Balai Besar POM di Medan	220.002.000,00
13	Balai POM di Ambon	19.309.190,00
14	Balai POM di Di Pangkal Pinang	105.500.000,00
15	Balai POM di Palu	246.480.000,00
16	Loka POM Di Kabupaten Belitung	3.124.146,00
17	Loka POM Di Kabupaten Buleleng	6.500.000,00
18	Loka POM Di Kabupaten Dharmasraya	2.007.435,00
19	Loka POM Di Kabupaten Tabalong	3.006.000,00
TOTAL		7.209.088.112,00

- b. Koreksi Susulan sebesar Rp2.990.000,00 terdapat pada Balai POM di Palu merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai dispenser NUP 24.

- c. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp5.907.616.112,00 terjadi karena koreksi pemecahan aset gabungan, kesalahan pencatatan nilai oleh operator aset tetap terdapat pada Satuan Kerja:

Tabel 51
Perincian Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Ittama	1.240.000,00
2	Deputi I	32.250.000,00
3	Deputi III	79.000.000,00
4	Balai Besar POM di Bandung	2.462.916.000,00
5	Balai Besar POM di Banjarmasin	271.395.805,00
6	Balai Besar POM di Denpasar	136.471.500,00
7	Balai Besar POM di Jakarta	14.550.000,00
8	Balai Besar POM di Jayapura	8.900.500,00
9	Balai Besar POM di Makassar	25.162.000,00
10	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.400.000,00
11	Balai Besar POM di Pontianak	19.517.000,00
12	Balai Besar POM di Samarinda	1.631.513.803,00
13	Balai Besar POM di Yogyakarta	129.886.078,00
14	Balai Besar POM di Medan	34.000.000,00
15	Balai POM di Ambon	261.513.261,00
16	Balai POM di Kediri	141.955.000,00
17	Balai POM di Palopo	27.540.000,00
18	Balai POM di Pangkal Pinang	111.008.720,00
19	Balai POM di Tasikmalaya	255.661.375,00
20	Balai POM di Jambi	88.847.000,00
21	Balai POM di Payakumbuh	5.000.000,00
22	Balai POM di Palu	1.000.000,00
23	BPOM Kupang	11.888.070,00
24	Loka POM di Kabupaten Ende	148.000.000,00
TOTAL		5.907.616.112,00

- d. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp127.276.401,00 terjadi karena kesalahan kodefikasi BMN terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 52
Perincian Reklasifikasi Keluar ke Persediaan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai Besar POM di Jayapura	79.771.401,00
2	Balai POM di Bogor	9.400.000,00
3	Balai POM di Kediri	36.900.000,00
4	Loka POM di Kabupaten Tabalong	1.205.000,00
TOTAL		127.276.401,00

- e. Transfer Keluar sebesar Rp23.451.022.091,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 53
Perincian Transfer Keluar per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	2.038.171.035,00
2	Ittama	44.004.510,00
3	Deputi I	109.244.704,00
4	Deputi III	50.974.610,00
5	Deputi IV	54.128.500,00
6	PPPOMN	474.611.000,00
7	Pusakom	2.200.000,00
8	Pusdatin	1.076.752.814,00
9	Balai Besar POM di Banda Aceh	6.359.616.800,00
10	Balai Besar POM di Banjarmasin	5.450.356.675,00
11	Balai Besar POM di Jayapura	4.950.000,00
12	Balai Besar POM di Mataram	903.854.200,00
13	Balai Besar POM di Padang	6.583.739.743,00
14	Balai Besar POM di Pontianak	7.700.000,00
15	Balai Besar POM di Yogyakarta	205.069.000,00
16	Balai POM di Manokwari	78.558.500,00
17	Balai POM di Mamuju	7.090.000,00
TOTAL		23.451.022.091,00

- f. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp13.785.859.048,00 merupakan transaksi perubahan kodefikasi aset sebagai upaya penertiban aset, tindak lanjut temuan Inspektorat dan/atau BPK yang terdapat pada Satuan Kerja berikut:

Tabel 54
Perincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.021.280.000,00
2	Ittama	18.772.182,00
3	Deputi I	325.095.899,00
4	Deputi III	1.087.072.291,00
5	Deputi IV	2.080.000,00
6	PPPOMN	39.250.000,00
7	PPSDM	5.200.000,00
8	PUSDATIN	214.320.000,00
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.022.526.833,00
10	Balai Besar POM di Bandung	3.130.627.852,00
11	Balai Besar POM di Banjarmasin	140.944.800,00
12	Balai Besar POM di Serang	1.301.500,00
13	Balai Besar POM di Jayapura	9.100.000,00
14	Balai Besar POM di Makassar	911.000.000,00

No	Nama Satker	Nilai
15	Balai Besar POM di Pekan Baru	44.300.000,00
16	Balai Besar POM di Samarinda	136.697.520,00
17	Balai Besar POM di Semarang	529.480.256,00
18	Balai Besar POM di Surabaya	637.000.000,00
19	Balai POM di Ambon	709.903.958,00
20	Balai POM di Bogor	3.900.000,00
21	Balai POM di Batam	130.427.500,00
22	Balai POM di Tarakan	10.500.000,00
23	Balai POM di Jember	89.128.000,00
24	Balai POM di Kediri	828.916.900,00
25	Balai POM di Kupang	36.000.000,00
26	Balai POM di Palu	77.045.000,00
27	Balai POM di Payakumbuh	493.417.800,00
28	Loka POM Di Aceh Selatan	33.850.000,00
29	Loka POM Di Kabupaten Banggai	17.545.000,00
30	Loka POM Di Kabupaten Bungo	11.100.000,00
31	Loka POM Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	17.472.075,00
32	Loka POM Di Kabupaten Mimika	509.790.398,00
33	Loka POM Di Kabupaten Pulau Morotai	6.324.000,00
34	Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong	35.132.100,00
35	Loka POM Di Kabupaten Tabalong	447.474.500,00
36	Loka POM Di Kabupaten Tulangbawang	1.999.000,00
37	Loka POM Di Kota Lubuklinggau	6.882.000,00
38	Loka POM Di Kota Tanjungpinang	43.001.684,00
TOTAL		13.785.859.048,00

- g. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp83.078.198.718,00 terdapat pada Satuan Kerja:

Tabel 55
Perincian Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	14.246.247.873,00
2	Ittama	398.859.310,00
3	Deputi I	1.105.147.953,00
4	Deputi II	1.101.709.947,00
5	Deputi III	975.667.282,00
6	Deputi IV	508.700.000,00
7	PPOMN	15.723.393.154,00
8	PPSDM	12.383.000,00
9	PUSAKOM	468.463.296,00
10	PUSDATIN	5.490.300.894,00
11	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.430.519.692,00
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung	5.304.694.883,00

No	Nama Satker	Nilai
13	Balai Besar POM di Bandung	37.807.605,00
14	Balai Besar POM di Banjarmasin	755.684.490,00
15	Balai Besar POM di Denpasar	3.676.674.778,00
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	331.677.700,00
17	Balai Besar POM di Serang	249.615.450,00
18	Balai Besar POM di Jakarta	1.539.689.087,00
19	Balai Besar POM di Jayapura	1.962.399.548,00
20	Balai Besar POM di Makassar	1.040.961.889,00
21	Balai Besar POM di Manado	1.081.579.749,00
22	Balai Besar POM di Mataram	491.421.450,00
23	Balai Besar POM di Medan	369.239.200,00
24	Balai Besar POM di Padang	180.913.454,00
25	Balai Besar POM di Palembang	1.318.609.799,00
26	Balai Besar POM di Pekanbaru	3.323.542.521,00
27	Balai Besar POM di Pontianak	2.528.446.285,00
28	Balai Besar POM di Samarinda	189.314.574,00
29	Balai Besar POM di Semarang	611.361.941,00
30	Balai Besar POM di Surabaya	1.894.018.833,00
31	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.715.050.455,00
32	Balai POM di Ambon	3.535.294.756,00
33	Balai POM di Batam	5.722.063.198,00
34	Balai POM di Sofifi	86.715.003,00
35	Balai POM di Gorontalo	266.103.859,00
36	Balai POM di Kediri	2.176.100,00
37	Balai POM di Palopo	22.066.500,00
38	Balai POM di Surakarta	10.727.000,00
39	Balai POM di Tarakan	99.096.894,00
40	Balai POM di Jambi	1.536.920.476,00
41	Balai POM di Kupang	188.991.505,00
42	Balai POM di Mamuju	340.968.934,00
43	Balai POM di Palu	808.593.113,00
44	Loka POM Di Kabupaten Banyumas	26.436.642,00
45	Loka POM Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	56.033.550,00
46	Loka POM Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	93.885.500,00
47	Loka POM Di Kabupaten Kotawaringin Barat	11.584.750,00
48	Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong	16.812.750,00
49	Loka POM Di Kabupaten Tabalong	105.727.500,00
50	Loka POM Di Kabupaten Tanah Bumbu	57.320.600,00
51	Loka POM Di Kota Balikpapan	26.583.996,00
TOTAL		83.078.198.718,00

Selain hal diatas dapat dijelaskan bahwa BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan memiliki aset berupa senjata api yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja dengan perincian pada Lampiran 18.

Gedung dan

Bangunan

Rp1.057.417.869.828,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.057.417.869.828,00 dan Rp991.271.337.416,00. Perincian Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Perincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo 31 Desember 2023		991.271.337.416,00
Mutasi Tambah		81.500.351.175,00
Saldo Awal	44.297.491,00	
Pembelian	386.128.024,00	
Hibah Masuk	813.480.399,00	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	47.439.889.700,00	
Reklasifikasi Masuk	6.225.066.150,00	
Transfer Masuk	7.018.106.275,00	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.784.913.444,00	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	8.044.672.481,00	
Koreksi Susulan	217.369.000,00	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	125.000.000,00	
Pengembangan Melalui KDP	8.401.428.211,00	
Mutasi Kurang		15.353.818.763,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	1.448.565.816,00	
Reklasifikasi Keluar	5.739.745.607,00	
Transfer Keluar	702.500.000,00	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	909.357.617,00	
Koreksi Pencatatan	6.553.649.723,00	
Saldo Akhir 31 Desember 2024		1.057.417.869.828,00
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024 2024		(183.427.489.812,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		873.990.380.016,00

Perincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada lampiran 19.

Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.500.351.175,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Saldo Awal sebesar Rp44.297.491,00 merupakan pencatatan Gedung Kantor Semi Permanen yang di peroleh dari sisa bongkaran besi Direksi Keet yang di bangun kembali menjadi gudang pada tahun 2023 terdapat pada Satker Balai POM di Mamuju.
- b. Pembelian sebesar Rp386.128.024,00 merupakan pengadaan bangunan rumah genset dan bangunan gedung terbuka terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 57
Perincian Pembelian Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	181.128.024,00
2	Balai POM di Mamuju	90.000.000,00
2	Loka POM di Kota Baubau	115.000.000,00
TOTAL		386.128.024,00

- c. Hibah Masuk sebesar Rp813.480.399,00 merupakan hibah masuk pagar permanen dari Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk Satker Loka POM di Kota Lubuklinggau dan hibah Bangunan Gedung Permanen dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Satker Balai POM di Kediri, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 58
Perincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai POM di Kediri	370.919.399,00
2	Loka POM di Kota Lubuklinggau	442.561.000,00
TOTAL		813.480.399,00

- d. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp47.439.889.700,00 merupakan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa Gedung Kantor Permanen , dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 59
Perincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai POM di Ambon	6.691.267.650,00
2	Balai POM di Kediri	587.087.791,00
3	Balai POM di Mamuju	760.943.041,00
4	Balai POM di Manokwari	11.539.499.872,00
5	Balai POM di Pangkal Pinang	192.735.100,00
6	Balai POM di Sofifi	11.844.920.047,00
7	Loka POM di Aceh Tengah	6.822.010.076,00
8	Loka POM di Kabupaten Belitung	89.336.700,00
9	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	8.912.089.423,00
TOTAL		47.439.889.700,00

- e. Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.225.066.150,00 merupakan transaksi perubahan kodefikasi aset yang disebabkan karena adanya kesalahan penginputan kodefikasi aset sehingga dilakukan penyesuaian dan tindak lanjut atas hasil temuan audit, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 60
Perincian Reklasifikasi Masuk
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	702.500.000,00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	81.188.000,00
3	Balai POM di Ambon	485.320.543,00
4	Balai POM di Mamuju	4.956.057.607,00
TOTAL		6.225.066.150,00

- f. Transfer Masuk sebesar Rp7.018.106.275,00 merupakan transfer masuk bangunan gedung laboratorium permanen dari PPPOMN ke Satker Settama dan transfer masuk bangunan dari Kementerian PUPR ke Loka POM Kabupaten Sanggau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 61
Perincian Transfer Masuk Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	702.500.000,00
2	Loka POM di Kabupaten Sanggau	6.315.606.275,00
TOTAL		7.018.106.275,00

- g. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp2.784.913.444,00 merupakan renovasi dan revitalisasi Bangunan Gedung Kantor, Gedung Laboratorium, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Tempat Parkir dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 62
Perincian Satker Pengembangan Nilai Aset (Langsung)
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.896.363.294,00
2	PPPOMN	124.725.150,00
3	Balai Besar POM di Makassar	57.000.000,00
4	Balai Besar POM di Semarang	374.700.000,00
5	Balai POM di Kendari	50.000.000,00
6	Balai POM di Mamuju	234.100.000,00
7	Loka POM di Kabupaten Ende	48.025.000,00
TOTAL		2.784.913.444,00

- h. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp8.044.672.481,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan aset dan tindak lanjut temuan audit yang terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 63
Perincian Satker Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	25.750.000,00
2	Balai Besar POM di Bandung	282.200.000,00
3	Balai Besar POM di Mataram	6.168.725.459,00
4	Balai Besar POM di Palangkaraya	49.533.750,00
5	Balai Besar POM di Serang	40.005.732,00
6	Balai Besar POM di Yogyakarta	89.670.151,00
7	Balai POM di Mamuju	610.364.013,00
8	Balai POM di Pangkal Pinang	349.784.550,00
9	Balai POM di Surakarta	268.804.112,00
10	Loka POM di Kabupaten Sanggau	159.834.714,00
TOTAL		8.044.672.481,00

- i. Koreksi Susulan sebesar Rp217.369.000,00 merupakan perbaikan pencatatan BMN terhadap Jembatan Lainnya sebanyak 2 (dua) unit yang seharusnya tergabung dengan nilai bangunan gedung kantor terdapat pada Satker Balai Besar POM di Jayapura.
- j. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp125.000.000,00 merupakan transfer masuk dari Deputi II berupa Instalasi Jaringan LAN pengganti yang menggunakan anggaran Deputi II namun Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Gedung milik satker Sekretariat Utama, pasca *re-layout* ruang kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dilakukan transfer ke Sekretariat Utama sesuai dengan BAST nomor B-PL.02.02.44.07.24.1171 tanggal 09 Juli 2024 terdapat pada Satker Settama.
- k. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp8.401.428.211,00 merupakan penyelesaian pekerjaan pengembangan nilai gedung kantor dan laboratorium terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 64
Perincian Satker Pengembangan Melalui KDP
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.110.648.800,00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	987.127.486,00
3	Balai Besar POM di Denpasar	398.553.734,00
4	Balai Besar POM di Jayapura	1.187.362.496,00
5	Balai Besar POM di Makassar	995.228.800,00
6	Balai Besar POM di Padang	283.832.529,00
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	142.858.000,00
8	Balai POM di Ambon	263.972.650,00
9	Balai POM di Kupang	605.468.513,00
10	Balai POM di Manokwari	737.465.576,00
11	Balai POM di Palu	1.133.252.427,00
12	Loka POM di Kabupaten Ende	273.807.200,00
13	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	281.850.000,00
TOTAL		8.401.428.211,00

Terdapat Mutasi Kurang untuk Gedung dan Bangunan Sebesar Rp15.353.818.763,00 yang terdiri dari:

- a. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp1.448.565.816,00 merupakan koreksi pencatatan nilai berkurang atas Bangunan Gedung Permanen dikarenakan pengembalian pekerjaan pembangunan Gedung atas temuan audit BPK dan APIP terdapat pada Satker Sebagai berikut:

Tabel 65
Perincian Satker Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	31.888.890,00
2	PUSDATIN	1.270.026.013,00
3	Balai Besar POM di Makassar	5.000.000,00
4	Balai Besar POM di Serang	40.005.732,00
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	8.943.570,00
6	Balai POM di Ambon	87.886.939,00
7	Balai POM di Kediri	814.672,00
8	Balai POM di Kupang	4.000.000,00
TOTAL		1.448.565.816,00

- b. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp5.739.745.607,00 merupakan perubahan kodefikasi aset yang disebabkan karena adanya kesalahan penginputan kodefikasi aset sehingga dilakukan penyesuaian terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 66
Perincian Satker Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	702.500.000,00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	81.188.000,00
3	Balai POM di Mamuju	4.956.057.607,00
TOTAL		5.739.745.607,00

- c. Transfer Keluar sebesar Rp702.500.000,00 merupakan transaksi transfer keluar Bangunan Gedung Laboratorium Permanen NUP 15 ke Satker Settama terdapat pada Satker PPPOMN.
- d. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp909.357.617,00 merupakan penghentian aset rusak berat berupa gedung dan bangunan kantor permanen terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 67
Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai Besar POM di Jayapura	377.506.087,00
2	Balai POM di Kendari	45.265.000,00
3	Loka POM di Kota Dumai	486.586.530,00
TOTAL		909.357.617,00

- e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp6.553.649.723,00 merupakan koreksi pencatatan atas temuan Audit karena pemisahan pencatatan yang seharusnya digabung terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 68
Perincian Satker Koreksi Pencatatan Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai Besar POM di Mataram	6.168.725.459,00
2	Balai POM di Pangkal Pinang	225.089.550,00
3	Loka POM di Kabupaten Sanggau	159.834.714,00
TOTAL		6.553.649.723,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp29.595.727.807,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp29.595.727.807,00 dan Rp29.151.311.568,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 69
Perincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian Akun	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Jaringan	Total
Saldo 31 Desember 2023	2.240.756.000,00	10.178.268.847,00	16.732.286.721,00	29.151.311.568,00
Mutasi Tambah	80.011.464,00	170.651.521,00	830.438.490,00	1.081.101.475,00
Pembelian			120.000.000,00	120.000.000,00
Transfer Masuk		10.563.014,00		10.563.014,00
Reklasifikasi Masuk		160.088.507,00	654.499.490,00	814.587.997,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)			55.939.000,00	55.939.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	80.011.464,00			80.011.464,00
Mutasi Kurang	257.374.732,00	22.258.014,00	357.052.490,00	636.685.236,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	40.005.732,00			40.005.732,00
Reklasifikasi Keluar		10.563.014,00	17.499.490,00	28.062.504,00
Koreksi Pencatatan	217.369.000,00	11.695.000,00		229.064.000,00
Penghentian Aset dari Penggunaan			339.553.000,00	339.553.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	2.063.392.732,00	10.326.662.354,00	17.205.672.721,00	29.595.727.807,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(1.984.072.818,00)	(1.955.447.516,00)	(5.217.703.465,00)	(9.157.223.799,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	79.319.914,00	8.371.214.838,00	11.987.969.256,00	20.438.504.008,00

Perincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 20.

Terdapat Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.081.101.475,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pembelian Jaringan sebesar Rp120.000.000,00 merupakan pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas Lainnya NUP 2 sebanyak 1 unit terdapat pada Satker Balai Besar POM di Palembang.
- Transfer Masuk Irigasi sebesar Rp10.563.014,00 merupakan transfer masuk dari Kementerian PUPR terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sanggau.
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp814.587.997,00 meliputi:
 - Reklasifikasi Masuk Irigasi sebesar Rp160.088.507,00 merupakan koreksi pencatatan karena adanya kesalahan kodefikasi Sumur Pemboran Air NUP 1, yang seharusnya dicatat sebagai Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air) NUP 2 pada Satker Balai POM di Ambon.

- Reklasifikasi masuk Jaringan sebesar Rp654.499.490,00 merupakan pencatatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut audit pemeriksaan BPK, yakni IPAL lebih baik dicatat sebagai jaringan daripada Peralatan dan Mesin. Maka Reklasifikasi Masuk ini dilakukan terhadap Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang sebanyak 1 unit dan perubahan kodefikasi menjadi instalasi listrik Laboratorium terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 70
Perincian Satker Reklasifikasi Masuk Jaringan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai Besar POM di Surabaya	637.000.000,00
2	Balai POM di Payakumbuh	17.499.490,00
TOTAL		654.499.490,00

- d. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Jaringan sebesar Rp55.939.000,00 merupakan pengembangan langsung dengan renovasi instalasi pembuangan air limbah (IPAL) berupa penambahan fasilitas-fasilitas pendukung operasional IPAL seperti pembuatan bak kontrol, kanopi, dan lain-lain sehingga terhadap Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang sebanyak 1 unit terdapat pada Satker Balai Besar POM di Surabaya.
- e. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Jalan dan Jembatan sebesar Rp80.011.464,00 merupakan koreksi nilai bertambah jalan khusus kompleks terdapat pada Satker Balai Besar POM di Serang.

Terdapat Mutasi Kurang pada Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp636.685.236,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp40.005.732,00 merupakan koreksi nilai berkurang jalan khusus kompleks pada Satker Balai Besar POM di Serang.
- Reklasifikasi keluar sebesar Rp28.062.504,00 merupakan reklasifikasi keluar irigasi sebesar Rp10.563.014 merupakan reklasifikasi keluar untuk perbaikan kodefikasi barang dan irigasi menjadi bangunan lainnya terdapat pada Loka POM di Kabupaten Sanggau dan reklas keluar jaringan sebesar Rp17.499.490,00 terdapat pada Loka POM di Payakumbuh.
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp229.064.000,00 meliputi :
 - Koreksi pencatatan Jalan dan Jembatan sebesar Rp217.369.000,00 merupakan perbaikan pencatatan terhadap Jembatan Lainnya yang seharusnya

tergabung dengan Bangunan Gedung Kantor terdapat pada Satker Balai Besar POM di Jayapura.

- Koreksi pencatatan Irigasi sebesar Rp11.695.000,00 merupakan koreksi atas tindaklanjut temuan APIP berupa koreksi terdapat Aset yang pencatatannya masih terpisah dengan Gedung dan Bangunan yaitu berupa Bak Penyimpanan/Tower Air Baku NUP 1 pada Satker Balai POM di Pangkalpinang.
- d. Penghentian Aset dari Penggunaan pada Jaringan sebesar Rp339.553.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan berupa instalasi air buangan domestik kapasitas sedang berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: B-PL.03.07.11A.05.24.1228 tanggal 3 Mei 2024 pada Satker Balai Besar POM di Surabaya.

Aset Tetap Lainnya
Rp15.618.156.541,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15.618.156.541,00 dan Rp18.600.793.300,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 71
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

Uraian Akun	Aset Tetap Renovasi	Aset Tetap Lainnya	Total
Saldo 31 Desember 2023	0,00	18.600.793.300,00	18.600.793.300,00
Mutasi Tambah	1.100.690.906,00	3.567.353.941,00	4.668.044.847,00
Saldo Awal		2.728.250,00	2.728.250,00
Pembelian	686.033.330,00	200.202.302,00	886.235.632,00
Transfer Masuk		2.346.357.955,00	2.346.357.955,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	153.810.001,00		153.810.001,00
Reklasifikasi Masuk	17.499.490,00	1.016.760.364,00	1.034.259.854,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	40.005.732,00		40.005.732,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	48.485.500,00	1.224.000,00	49.709.500,00
Pengembangan Melalui KDP	154.856.853,00		154.856.853,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif		81.070,00	81.070,00
Mutasi Kurang	294.985.732,00	7.355.695.874,00	7.650.681.606,00
Transfer Keluar	254.980.000,00	2.346.357.955,00	2.601.337.955,00
Reklasifikasi Keluar		1.150.411.164,00	1.150.411.164,00
Koreksi Pencatatan	40.005.732,00		40.005.732,00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan		3.858.926.755,00	3.858.926.755,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	805.705.174,00	14.812.451.367,00	15.618.156.541,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	-	(288.497.259,00)	(288.497.259,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp805.705.174,00	14.523.954.108,00	15.329.659.282,00

Perincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran 21.

Terdapat mutasi tambah nilai Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.668.044.847,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Saldo awal sebesar Rp2.728.250,00 merupakan pencatatan barang perolehan sebelum tahun pelaporan dan belum pernah tercatat sebelumnya berupa prasasti/ukiran batu dan sejenisnya terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 72
Perincian Satker Saldo Awal Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai Besar POM di Denpasar	1.000.000,00
2	Loka POM di Kota Balikpapan	1.728.250,00
TOTAL		2.728.250,00

- b. Transaksi Pembelian sebesar Rp886.235.632,00 meliputi:
 - Pembelian Aset Tetap Renovasi sebesar Rp686.033.330,00 merupakan pekerjaan penambahan nilai aset yang bukan merupakan aset Satuan Kerja terkait ataupun bukan merupakan aset BPOM dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 73
Perincian Satker Pembelian Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi II	254.980.000,00
2	Balai POM di Surakarta	148.374.230,00
3	Balai POM di Jember	242.702.450,00
4	Balai POM di Payakumbuh	39.976.650,00
TOTAL		686.033.330,00

- Pembelian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp200.202.302,00 merupakan pembelian antara lain Monografi, Tanaman Hias dan Buku Lainnya Terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 74
Perincian Satker Pembelian Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi I	27.483.668,00
2	PPPOMN	29.131.321,00
3	PUSDATIN	107.960.820,00
4	Balai Besar POM di Padang	15.000.000,00
5	Balai Besar POM di Serang	2.429.443,00
6	Balai POM di Jember	1.312.050,00
7	Balai POM di Kediri	2.700.000,00
8	Loka POM di Kabupaten Banggai	2.999.000,00
9	Loka POM di Kabupaten Bima	2.650.000,00
10	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1.190.000,00
11	Loka POM di Kabupaten Merauke	1.221.000,00
12	Loka POM di Kabupaten Sorong	3.130.000,00
13	Loka POM di Kota Balikpapan	1.440.000,00
14	Loka POM di Kota Dumai	555.000,00
15	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.000.000,00
TOTAL		200.202.302,00

- c. Transfer Masuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.346.357.955,00 merupakan Transfer Masuk dari Satker PUSDATIN berupa Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya, Monografi dan Buku Lainnya kepada Satker PPSDM.
- d. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Aset Tetap Renovasi sebesar Rp153.810.001,00 merupakan renovasi Laboratorium terdapat pada Satker Balai POM di Kediri.
- e. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.034.259.854,00 meliputi:
- Reklasifikasi masuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp17.499.490,00 merupakan perubahan kodefikasi terdapat pada Satker Balai POM di Payakumbuh.
 - Reklasifikasi masuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.016.760.364,00 karena kesalahan pemilihan kodefikasi berupa monografi terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 75
Perincian Satker Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	PPSDM	1.006.688.630,00
2	Balai POM di Jember	2.744.000,00
3	Loka POM di Kabupaten Belitung	550.000,00
4	Loka POM di Kabupaten Tabalong	1.320.000,00
5	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	1.999.000,00
6	Loka POM di Kota Tanjungpinang	3.458.734,00
Total		1.016.760.364,00

- f. Penyelesaian Pembangunan Langsung Aset Tetap Renovasi sebesar Rp40.005.732,00 merupakan penyelesaian pembangunan jalan khusus kompleks pada Satker Balai Besar POM di Serang.
- g. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp49.709.500,00 meliputi:
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) Aset Tetap Renovasi sebesar Rp48.485.500,00 merupakan pengembangan aset renovasi laboratorium terdapat pada Satker Balai POM di Jember.
 - Pengembangan Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.224.000,00 merupakan pembelian bingkai (frame) lukisan terdapat pada Satker Balai Besar POM di Padang.
- h. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp154.856.853,00 merupakan pengembangan Gedung dan Bangunan dalam renovasi berupa renovasi ruang unit layanan pengaduan dan informasi terdapat pada Satker Balai POM di Kediri.
- i. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp81.070,00 merupakan transaksi penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif berupa 1 unit buku karena adanya kesalahan pencatatan terdapat pada Satker Balai Besar POM di Semarang.

Terdapat Mutasi Kurang sebesar Rp7.650.681.606,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Transfer Keluar sebesar Rp2.601.337.955,00, meliputi:
- Transfer keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp254.980.000,00 merupakan transfer keluar berupa Jaringan LAN pengganti yang menggunakan anggaran Deputi II namun Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Gedung milik Satker Sekretariat Utama, pasca *re-layout* ruang kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

dilakukan transfer ke Sekretariat Utama berdasarkan BAST Nomor B-PL.02.02.44.07.24.1171 tanggal 09 Juli 2024 ke Satker Settama terdapat pada Satker Deputy II.

- Transfer Keluar Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.346.357.955,00 merupakan transfer keluar dari Satker PUSDATIN berupa bahan perpustakaan tercetak lainnya, monografi, buku lainnya, bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya terdapat pada Satker PPSDM.
- b. Reklasifikasi keluar Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp1.150.411.164,00 merupakan reklas keluar bahan perpustakaan dan monografi terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 76
Perincian Satker Reklasifikasi Keluar
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	PPSDM	1.145.533.430,00
2	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1.878.734,00
3	Loka POM di Kabupaten Banggai	2.999.000,00
Total		1.150.411.164,00

- c. Koreksi Pencatatan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp40.005.732,00 merupakan koreksi pencatatan berupa pembangunan jalan khusus kompleks pada Satker Balai Besar POM di Serang.
- d. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp3.858.926.755,00 merupakan penghentian aset tetap dari penggunaan antara lain berupa monografi, buku lainnya dan bahan kartografi lainnya pada Satker sebagai berikut:

Tabel 77
Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Settama	26.785.000,00
2	Deputi I	2.757.139.600,00
3	Deputi III	763.147.650,00
4	Ittama	12.389.250,00
5	PUSAKOM	41.034.600,00
6	Balai Besar POM di Banda Aceh	104.997.300,00
7	Balai Besar POM di Denpasar	21.077.880,00
8	Balai Besar POM di Jakarta	362.400,00
9	Balai Besar POM di Pontianak	122.143.205,00
10	Balai Besar POM di Semarang	2.648.070,00
11	Balai POM di Jambi	7.201.800,00
Total		3.858.926.755,00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp22.878.016.202,00

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp22.878.016.202,00 dan Rp48.419.791.693,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 78
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	KDP	Nilai
Saldo 31 Desember 2023		48.419.791.693,00
Mutasi tambah :		36.392.159.464,00
Perolehan/Penambahan KDP	2.159.209.253,00	
Pengembangan KDP	33.958.982.693,00	
Koreksi Nilai KDP Bertambah	258.657.517,00	
Reklasifikasi Masuk KDP	15.310.001,00	
Mutasi Kurang :		61.933.934.955,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	50.811.667.251,00	
Pengembangan Melalui KDP	8.556.285.064,00	
Penghapusan/Penghentian KDP	38.353.520,00	
Reklasifikasi Keluar KDP	15.310.001,00	
Koreksi Pencatatan KDP	26.710.000,00	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	2.485.609.119,00	
Saldo per 31 Desember 2024		22.878.016.202,00

Mutasi tambah KDP sebesar Rp36.392.159.464,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp2.159.209.253,00 merupakan pembayaran termin pengadaan peralatan dan mesin, gedung kantor, gedung laboratorium, pembayaran jasa konsultan perencana dan biaya pendukung perolehan aset antara lain pembayaran honor pengelola kegiatan, perjalanan dinas, konsumsi rapat yang terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 79
Perincian Satker Perolehan/Penambahan KDP
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	80.000.000,00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	58.813.600,00
3	Balai Besar POM di Denpasar	960.000,00
4	Balai Besar POM di Jayapura	2.700.000,00
5	Balai Besar POM di Makassar	22.400.000,00
6	Balai Besar POM di Padang	25.600.471,00
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	11.600.000,00
8	Balai POM di Ambon	27.359.280,00
9	Balai POM di Kediri	20.772.456,00
10	Balai POM di Kupang	269.998.207,00
11	Balai POM di Manokwari	446.797.362,00
12	Balai POM di Palu	80.160.826,00
13	Balai POM di Pangkal Pinang	19.769.100,00
14	Balai POM di Tarakan	9.500.000,00
15	Balai POM di Tasikmalaya	900.000,00
16	Loka POM di Kabupaten Belitung	83.336.700,00
17	Loka POM di Kabupaten Ende	30.557.500,00
18	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	782.003.751,00
19	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	181.380.000,00
20	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	1.000.000,00
21	Loka POM di Kota Dumai	3.600.000,00
Jumlah		2.159.209.253,00

2. Pengembangan KDP sebesar Rp33.958.982.693,00 merupakan transaksi pembayaran termin, pembayaran perencana konstruksi, konsultan perancangan konstruksi, pembayaran pengadaan KDP Peralatan dan Mesin, pembayaran KDP Gedung Kantor, pembayaran konsultan pengawas dan biaya penunjang kegiatan pengadaan yang terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 80
Perincian Satker Pengembangan KDP
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	945.096.374
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	928.313.886
3	Balai Besar POM di Denpasar	364.048.134
4	Balai Besar POM di Jayapura	1.184.662.496
5	Balai Besar POM di Makassar	1.563.266.396
6	Balai Besar POM di Padang	258.232.058
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	131.258.000
8	Balai POM di Ambon	5.421.830.688
9	Balai POM di Kediri	874.982.189
10	Balai POM di Kupang	2.828.359.330
11	Balai POM di Mamuju	633.046.812
12	Balai POM di Manokwari	4.193.847.888
13	Balai POM di Palu	1.053.091.601
14	Balai POM di Pangkal Pinang	172.966.000
15	Balai POM di Payakumbuh	5.311.811.497
16	Balai POM di Sofifi	3.102.556.019
17	Balai POM di Tarakan	3.473.000
18	Balai POM di Tasikmalaya	433.437.597
19	Loka POM di Aceh Tengah	2.446.875.666
20	Loka POM di Kabupaten Belitung	6.000.000
21	Loka POM di Kabupaten Ende	243.249.700
22	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	53.500.000
23	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	795.941.400
24	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	423.220.000
25	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	280.850.000
26	Loka POM di Kota Dumai	305.065.962
Jumlah		33.958.982.693,00

3. Koreksi Nilai KDP Bertambah sebesar Rp258.657.517,00 merupakan transaksi koreksi nilai pekerjaan fisik akibat kesalahan pencatatan KDP, koreksi pembangunan fisik dan pengerjaan konsultan pengawas terdapat pada Satker sebagai berikut :

Tabel 81
Perincian Satker Koreksi Nilai KDP Bertambah
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Settama	11.133.259,00
2	Balai Besar POM di Denpasar	960.000,00
3	Balai POM di Kupang	38.353.520,00
4	Balai POM di Manokwari	1.500.000,00
5	Balai POM di Sofifi	206.710.738,00
Total		258.657.517,00

4. Reklasifikasi Masuk KDP sebesar Rp15.310.001 merupakan kesalahan penginputan/memasukkan kode KDP, transaksi Ini berupa renovasi ruang laboratorium, sebelumnya dimasukkan ke gedung dan bangunan dalam

pengerjaan namun seharusnya masuk ke Aset Tetap lainnya dalam pengerjaan terdapat pada Satker Balai POM di Kediri

Terdapat Mutasi Kurang KDP sebesar Rp61.933.934.955,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp50.811.667.251,00 merupakan aset yang telah didefinisikan terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 82
Perincian Satker Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Balai POM di Ambon	6.691.267.650,00
2	Balai POM di Kediri	740.897.792,00
3	Balai POM di Mamuju	760.943.041,00
4	Balai POM di Manokwari	13.604.894.422,00
5	Balai POM di Pangkal Pinang	192.735.100,00
6	Balai POM di Sofifi	11.844.920.047,00
7	Balai POM di Tarakan	12.973.000,00
8	Loka POM di Aceh Tengah	6.822.010.076,00
9	Loka POM di Kabupaten Belitung	89.336.700,00
10	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	535.000.000,00
11	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	604.600.000,00
12	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	8.912.089.423,00
Jumlah		50.811.667.251,00

2. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp8.556.285.064,00 merupakan penyelesaian pekerjaan dan merupakan pendefinitifan menjadi bangunan terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 83
Perincian Satker Pengembangan Melalui KDP
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	1.110.648.800,00
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	987.127.486,00
3	Balai Besar POM di Denpasar	398.553.734,00
4	Balai Besar POM di Jayapura	1.187.362.496,00
5	Balai Besar POM di Makassar	995.228.800,00
6	Balai Besar POM di Padang	283.832.529,00
7	Balai Besar POM di Palangkaraya	142.858.000,00
8	Balai POM di Ambon	263.972.650,00
9	Balai POM di Kediri	154.856.853,00
10	Balai POM di Kupang	605.468.513,00
11	Balai POM di Manokwari	737.465.576,00
12	Balai POM di Palu	1.133.252.427,00
13	Loka POM di Kabupaten Ende	273.807.200,00
14	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	281.850.000,00
Jumlah		8.556.285.064,00

3. Penghapusan/Penghentian KDP sebesar Rp38.353.520,00 merupakan kesalahan pencatatan perolehan KDP terhadap Gedung sebanyak 4 unit terdapat pada Satker Balai POM di Kupang.
4. Reklasifikasi Keluar KDP sebesar Rp15.310.001 merupakan kesalahan penginputan/memasukkan kode KDP, transaksi Ini berupa renovasi ruang laboratorium, sebelumnya dimasukkan ke gedung dan bangunan dalam pengerjaan namun seharusnya masuk ke Aset Tetap lainnya dalam pengerjaan, terdapat pada Satker Balai POM di Kediri.
5. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp26.710.000,00 merupakan koreksi nilai pekerjaan fisik akibat kesalahan pencatatan KDP sebesar Rp960.000,00 terdapat pada Satker Balai Besar POM di Denpasar dan merupakan konsultan perencanaan KDP NUP 47 atas renovasi bangunan tempat bermain anak adanya kesalahan kodefikasi pekerjaan fisik sebesar Rp25.750.000,00 terdapat pada Satker Settama.
6. Koreksi Nilai KDP berkurang sebesar Rp2.485.609.119,00 merupakan hasil tindaklanjut atas temuan audit dan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai KDP terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 84
Perincian Satker Koreksi Nilai KDP Berkurang
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	167.883.473,00
2	Balai POM di Mamuju	610.364.013,00
3	Balai POM di Manokwari	388.184.424,00
4	Loka POM di Aceh Tengah	1.108.004.501,00
5	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	41.790.000,00
6	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	169.382.708,00
Jumlah		2.485.609.119,00

Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 85
Perincian Satker KDP
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	4.155.302.624,00
2	Balai Besar POM di Makassar	590.437.596,00
3	Balai Besar POM di Manado	63.974.636,00
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	56.289.000,00
5	Balai Besar POM di Semarang	35.948.000,00
6	Balai POM di Bengkulu	90.406.100,00
7	Balai POM di Gorontalo	1.018.824.790,00
8	Balai POM di Kupang	2.492.889.024,00
9	Balai POM di Mamuju	216.607.898,00
10	Balai POM di Manokwari	968.538.500,00
11	Balai POM di Pangkal Pinang	20.900.000,00
12	Balai POM di Payakumbuh	5.339.459.928,00
14	Balai POM di Tasikmalaya	434.337.597,00
15	Loka POM di Aceh Selatan	557.941.531,00
17	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1.197.104.737,00
18	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	300.503.751,00
19	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3.936.234.636,00
21	Loka POM di Kabupaten Sorong	484.646.536,00
22	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	528.094.356,00
23	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	80.909.000,00
24	Loka POM di Kota Dumai	308.665.962,00
Jumlah		22.878.016.202,00

Belum ada kejelasan status keberlanjutan KDP di BBPOM Pekanbaru yang disajikan di Neraca sejak tahun 2021 senilai Rp56.289.000,00.

- Nilai KDP tsb merupakan jasa perencanaan yg telah selesai 100% pada tahun 2021 atas pekerjaan renovasi laboratorium;
- Pada tahun 2022 dianggarkan untuk dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik laboratorium namun tidak ada calon penyedia yang mampu mengerjakan sesuai hasil perencanaan tahun 2021;
- Adanya Automatic Adjustment, maka pekerjaan renovasi ruangan laboratorium BSL-2 yang seharusnya dilaksanakan tahun 2021 dan 2022 tidak dapat direalisasikan. Pada tahun 2023 dan 2024, BBPOM Pekanbaru belum mendapat anggaran tersebut; dan
- Tahapan lelang konstruksi fisik belum dilakukan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran K/L tahun 2025 yang berdampak pada anggaran belanja modal renovasi laboratorium tersebut.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp2.682.234.679.110,00)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp2.682.234.679.110,00) dan (Rp2.489.920.660.342,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel 86
Perincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.726.822.662.687,00	0,00	1.726.822.662.687,00
2	Peralatan dan Mesin	3.209.368.070.471,00	2.489.361.468.240,00	720.006.602.231,00
3	Gedung dan Bangunan	1.057.417.869.828,00	183.427.489.812,00	873.990.380.016,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.595.727.807,00	9.157.223.799,00	20.438.504.008,00
5	Aset Tetap Lainnya	15.618.156.541,00	288.497.259,00	15.329.659.282,00
	TOTAL	6.038.822.487.334,00	2.682.234.679.110,00	3.356.587.808.224,00

Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada BPOM merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp1.327.337.564,00

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.327.337.564,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp1.327.337.564,00 berasal dari peserta tugas belajar luar negeri yang tidak

melaksanakan pengabdian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan a.n. Roseline Sitorus, S.Si., Apt., MSc terdapat pada Satker PPSDPM.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diatas telah diserahkan ke PUPN dan sebagian sedang dalam proses pengajuan penghapusan piutang negara bersyarat ke Kementerian Keuangan c.q. DJKN.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Rp1.327.337.564,00)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp1.327.337.564,00) dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi oleh kualitas masing-masing piutang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 87
Perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/TGR Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	1.327.337.564,00	100%	1.327.337.564,00
Jumlah	1.327.337.564,00		1.327.337.564,00

Aset Lainnya
Rp73.092.545.074,00

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp73.092.545.074,00 dan Rp116.665.802.432,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp134.552.580.264,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp134.552.580.264,00 dan Rp138.198.335.885,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 88
Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai ATB	Nilai
Saldo 31 Desember 2023		138.198.335.885,00
Mutasi tambah :		6.075.936.556,00
Pembelian	300.521.400,00	
Reklasifikasi Masuk	138.844.800,00	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	2.874.830.406,00	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	129.980.000,00	
Pengembangan Melalui KDP	2.631.759.950,00	
Mutasi Kurang :		9.721.692.177,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	3.150.000,00	
Koreksi Pencatatan	52.547.400,00	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	9.665.994.777,00	
Saldo 31 Desember 2024		134.552.580.264,00
Akumulasi Amortisasi Software s.d 31 Desember 2024		(80.353.473.148,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024		54.199.107.116,00

Perincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran 22.

Mutasi Tambah ATB sebesar Rp6.075.936.556,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pembelian ATB sebesar Rp300.521.400,00 merupakan pembelian software terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 89
Perincian Satker Pembelian Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	79.365.000,00
2	PUSAKOM	52.547.400,00
3	PUSDATIN	168.609.000,00
Jumlah		300.521.400,00

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp138.844.800,00 merupakan reklasifikasi masuk berupa buku digital karena adanya perpindahan pengelolaan Perpustakaan BPOM dari Satker PUDATIN ke Satker PPSDM.
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp2.874.830.406,00 merupakan penambahan modul/pengembangan pada Aplikasi pada Satker sebagai berikut:

Tabel 90
Perincian Satker Pengembangan Nilai Aset (Langsung)
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Settama	548.528.000,00
2	Deputi I	301.302.700,00
3	Deputi III	777.754.500,00
4	Ittama	138.224.206,00
5	PPOMN	530.000.000,00
6	PPSDM	160.165.000,00
7	PUSAKOM	110.445.000,00
8	PUSDATIN	298.701.000,00
9	Balai POM di Palu	9.710.000,00
Jumlah		2.874.830.406,00

- d. Penerimaan Aset Tetap Renovasi Aset tetap Tak Berwujud sebesar Rp129.980.000,00 merupakan Pengembangan Aplikasi ASROT dari Deputi II terdapat pada Satker PUSDATIN.
- e. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp2.631.759.950,00 merupakan pengembangan aplikasi terdapat pada Satker PUSDATIN.

Mutasi Kurang ATB sebesar Rp9.721.692.177,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp3.150.000,00 merupakan pemeliharaan server aplikasi siga sebelumnya menggunakan akun nilai pengembang dan revisi menjadi akun keperluan perkantoran pada Satker Balai POM di Palu.
- b. Koreksi Pencatatan sebesar Rp52.547.400,00 merupakan koreksi pencatatan atas pembelian *microsoft office* terdapat pada Satker PUSAKOM.
- c. Penghentian ATB dari Penggunaan sebesar Rp9.665.994.777,00 merupakan penghapusan aplikasi terdapat pada Satker sebagai berikut :

Tabel 91
Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan ATB
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai
1	Deputi II	420.636.000,00
2	Deputi III	477.204.000,00
3	Deputi IV	7.150.000,00
4	PPSDM	393.800.000,00
5	PUSDATIN	8.102.935.823,00
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	22.850.000,00
7	Balai Besar POM di Manado	9.240.000,00
8	Balai Besar POM di Pontianak	32.150.000,00
9	Balai Besar POM di Yogyakarta	118.628.954,00
10	Balai POM di Gorontalo	33.000.000,00
11	Loka POM di Kabupaten Sanggau	30.800.000,00
12	Loka POM di Kota Dumai	17.600.000,00
Jumlah		9.665.994.777,00

C.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya*Dana Yang Dibatasi**Penggunaannya**Rp18.051.733.311,00*

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp18.051.733.311,00 dan Rp11.064.623.482,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Adapun Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada Lampiran 23.

*Aset Lain-Lain**Rp9.454.353.280,00***C.4.3 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.454.353.280,00 dan Rp55.916.268.806,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 92
Perincian Mutasi Aset Lain-lain
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai Aset Lain-lain	Nilai
Saldo per 31 Desember 2023		55.916.268.806,00
Mutasi Tambah		102.129.504.846,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	97.852.030.867,00	
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	4.277.473.979,00	
Mutasi Kurang		148.591.420.372,00
Penghapusan	8.448.500,00	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	53.506.088.012,00	
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	95.076.883.860,00	
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024		9.454.353.280,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		(8.612.648.633,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		841.704.647,00

Mutasi tambah sebesar Rp102.129.504.846,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penghentian Aset dari Penggunaan merupakan Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp97.852.030.867,00 merupakan penambahan

BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintahan terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 93
Perincian Satker Penghentian Aset dari Penggunaan
Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Settama	14.273.032.873
2	Ittama	411.248.560
3	Deputi I	3.862.287.553
4	Deputi II	1.522.345.947
5	Deputi III	2.216.018.932
6	Deputi IV	515.850.000
7	PPPOMN	15.723.393.154
8	PPSDM	406.183.000
9	PUSAKOM	509.497.896
10	PUSDATIN	13.593.236.717
11	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.535.516.992
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung	5.327.544.883
13	Balai Besar POM di Bandung	37.807.605
14	Balai Besar POM di Banjarmasin	755.684.490
15	Balai Besar POM di Denpasar	3.697.752.658
16	Balai Besar POM di Jakarta	1.540.051.487
17	Balai Besar POM di Jayapura	2.339.905.635
18	Balai Besar POM di Makassar	1.040.961.889
19	Balai Besar POM di Manado	1.090.819.749
20	Balai Besar POM di Mataram	491.421.450
21	Balai Besar POM di Medan	369.239.200
22	Balai Besar POM di Padang	180.913.454
23	Balai Besar POM di Palangkaraya	331.677.700
24	Balai Besar POM di Palembang	1.318.609.799
25	Balai Besar POM di Pekanbaru	3.323.542.521
26	Balai Besar POM di Pontianak	2.682.739.490
27	Balai Besar POM di Samarinda	189.314.574
28	Balai Besar POM di Semarang	614.010.011
29	Balai Besar POM di Serang	249.615.450
30	Balai Besar POM di Surabaya	2.233.571.833
31	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.833.679.409
32	Balai POM di Ambon	3.535.294.756
33	Balai POM di Batam	5.722.063.198
34	Balai POM di Gorontalo	299.103.859
35	Balai POM di Jambi	1.544.122.276
36	Balai POM di Kediri	2.176.100
37	Balai POM di Kendari	45.265.000
38	Balai POM di Kupang	188.991.505
39	Balai POM di Mamuju	340.968.934
40	Balai POM di Palopo	22.066.500
41	Balai POM di Palu	808.593.113
42	Balai POM di Sofifi	86.715.003
43	Balai POM di Surakarta	10.727.000
44	Balai POM di Tarakan	99.096.894
45	Loka POM di Kabupaten Banyumas	26.436.642
46	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	56.033.550
47	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	93.885.500
48	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	11.584.750
49	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	16.812.750
50	Loka POM di Kabupaten Sanggau	30.800.000
51	Loka POM di Kabupaten Tabalong	105.727.500
52	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	57.320.600
53	Loka POM di Kota Balikpapan	26.583.996
54	Loka POM di Kota Dumai	504.186.530
Jumlah		97.852.030.867,00

- b. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp4.277.473.979,00 terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 94
Perincian Satker Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan
Aset Lain-lain 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Settama	1.112.980.000,00
2	PUSDATIN	1.259.054.660,00
3	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.125.000,00
4	Balai Besar POM di Pontianak	1.428.319.541,00
5	Balai POM di Kendari	364.968.778,00
6	Balai POM di Manokwari	111.026.000,00
Jumlah		4.277.473.979,00

Mutasi Kurang sebesar Rp148.591.420.372,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penghapusan sebesar Rp 8.448.500,00 merupakan penghapusan BMN yang dihentikan terdapat pada Satker Settama
- b. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp53.506.088.012,00 merupakan transaksi reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap terdapat pada Satker sebagai berikut :

Tabel 95
Perincian Satker Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan
Penggunaan Aktif- Aset Lain-lain
31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Settama	48.499.922.778
2	Deputi I	6.710.000
3	PUSDATIN	1.259.054.660
4	Balai Besar POM di Bandar Lampung	243.631.985
5	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.125.000
6	Balai Besar POM di Manado	38.155.700
7	Balai Besar POM di Padang	2.191.500
8	Balai Besar POM di Pontianak	1.428.319.541
9	Balai Besar POM di Semarang	81.070
10	Balai POM di Batam	2.100.000
11	Balai POM di Kendari	364.968.778
12	Balai POM di Manokwari	1.659.827.000
Jumlah		53.506.088.012,00

- c. Pencatatan Barang yang mau dihapuskan sebesar Rp95.076.883.860,00 terdapat pada Satker berikut:

Tabel 96
*Perincian Satker Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan
 Aset Lain-lain per 31 Desember 2024*
 (dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Settama	14.264.584.373
2	Ittama	411.248.560
3	PPOMN	15.723.393.154
4	PPSDM	198.800.000
5	PUSAKOM	509.497.896
6	PUSDATIN	13.593.236.717
7	Deputi I	3.855.577.553
8	Deputi II	1.522.345.947
9	Deputi III	2.211.288.932
10	Deputi IV	120.853.867
11	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.277.514.892
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung	6.622.696.699
13	Balai Besar POM di Bandung	37.807.605
14	Balai Besar POM di Banjarmasin	755.684.490
15	Balai Besar POM di Denpasar	3.697.752.658
16	Balai Besar POM di Jakarta	1.540.051.487
17	Balai Besar POM di Jayapura	2.339.905.635
18	Balai Besar POM di Makassar	1.040.961.889
19	Balai Besar POM di Manado	1.053.227.049
20	Balai Besar POM di Mataram	491.421.450
21	Balai Besar POM di Padang	544.502.527
22	Balai Besar POM di Palangkaraya	331.677.700
23	Balai Besar POM di Palembang	2.157.949.493
24	Balai Besar POM di Pekanbaru	135.900.000
25	Balai Besar POM di Pontianak	2.682.739.490
26	Balai Besar POM di Samarinda	189.314.574
27	Balai Besar POM di Semarang	617.775.941
28	Balai Besar POM di Serang	249.615.450
29	Balai Besar POM di Surabaya	2.233.571.833
30	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.715.050.455
31	Balai POM di Batam	5.978.888.698
32	Balai POM di Gorontalo	266.103.859
33	Balai POM di Jambi	1.544.122.276
34	Balai POM di Kediri	10.529.900
35	Balai POM di Kendari	1.330.714.693
36	Balai POM di Kupang	188.991.505
37	Balai POM di Mamuju	340.968.934
38	Balai POM di Manokwari	593.969.617
39	Balai POM di Palopo	22.066.500
40	Balai POM di Palu	808.593.113
41	Balai POM di Pangkal Pinang	771.007.409
42	Balai POM di Sofifi	86.715.003
43	Balai POM di Surakarta	17.152.500
44	Balai POM di Tarakan	121.724.469
45	Loka POM di Kabupaten Banyumas	26.436.642
46	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	56.033.550
47	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	93.885.500
48	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	16.812.750
49	Loka POM di Kabupaten Tabalong	105.727.500
50	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	57.320.600
51	Loka POM di Kota Balikpapan	26.583.996
52	Loka POM di Kota Dumai	486.586.530
Jumlah		95.076.883.860,00

Perincian Aset Lain-lain terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 97
Perincian Satuan Kerja Aset Lain-lain
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Deputi III	4.730.000
2	Deputi IV	397.600.000
3	PPSDM	207.383.000
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	118.628.954
5	Balai Besar POM di Banda Aceh	258.002.100
6	Balai Besar POM di Medan	369.239.200
7	Balai Besar POM di Palembang	87.247.999
8	Balai Besar POM di Pekanbaru	3.187.642.521
9	Balai POM di Ambon	4.619.868.756
10	Balai POM di Manokwari	111.026.000
11	Balai POM di Gorontalo	33.000.000
12	Loka POM di Dumai	17.600.000
13	Loka POM di Sanggau	30.800.000
14	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	11.584.750
Jumlah		9.454.353.280,00

C. 4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan/Amortisasi

Aset Lainnya

(Rp88.966.121.781,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp88.966.121.781,00) dan (Rp88.513.425.741,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan penyusutan untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi.

Tabel 98
Perincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1	Software	86.967.419.979,00	80.353.473.148,00	6.613.946.831,00
2	Hasil Kajiann/ Penelitian	47.446.315.485,00	0,00	47.446.315.485,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	138.844.800,00	0,00	138.844.800,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	134.552.580.264,00	80.353.473.148,00	54.199.107.116,00
B.	Aset Lain-lain			
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	9.052.174.326,00	8.245.373.617,00	806.800.709,00
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	402.178.954,00	367.275.016,00	34.903.938,00
	Jumlah Aset Lain-lain	9.454.353.280,00	8.612.648.633,00	841.704.647,00
	TOTAL per 31 Desember 2024	144.006.933.544,00	88.966.121.781,00	55.040.811.763,00

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp76.733.203.724,00

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp76.733.203.724,00 dan Rp36.954.381.865,00. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp50.692.133.248,00

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp50.692.133.248,00 dan Rp10.346.135.403,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 disebabkan karena pembayaran tunjangan kinerja terpusat dan perubahan periode *cut off* pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 290 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perincian Utang Pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

*Tabel 99
Perincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024*

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	32.702.061.671,00
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	3.077.130.518,00
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	14.657.952.094,00
4	Dana Pihak Ketiga	254.988.965,00
Jumlah		50.692.133.248,00

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp50.692.133.248,00 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp32.702.061.671,00 merupakan tagihan belanja pegawai yang sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp3.077.130.518.000,00 merupakan tagihan belanja barang yang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya belum terbit sampai dengan periode pelaporan.

3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp14.657.952.094,00 merupakan pengakuan utang atas pengajuan RPATA yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan 31 Desember 2024 dan pembayarannya dilakukan pada Januari 2025 atau sesuai aturan yang berlaku jika terdapat perpanjangan penyelesaian pekerjaan.
4. Dana Pihak Ketiga sebesar Rp254.988.965,00 dikarenakan adanya pendelegasian wewenang dari KPA Deputi IV kepada Tim Pengelola Barang Bukti (TPBB) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan (Deputi IV). Surat Kuasa Nomor: KU.03.08.61.04.24.07 tanggal 17 April 2024 untuk melakukan transaksi pencetakan rekening koran, cetak mutasi, cek saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan, kepengurusan administrasi atas rekening Bank Mandiri Nomor 1230063243705 RPL 175 DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU. Pembukaan rekening tersebut telah disetujui oleh KPPN pada 3 April 2024 dengan perlakuan Jasa Giro diikutkan pada program *Treasury Notional Polling* (TNP).

Perincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Satker tersaji pada lampiran 24.

Pendapatan Diterima Dimuka C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Dimuka

Rp26.040.574.519,00 Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.040.574.519,00 dan Rp26.608.246.462,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN dan Pendapatan Sewa. Perincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp185.522.666,00 merupakan pendapatan sewa Gedung dan Bangunan berupa sewa ruangan ATM, Kantin, Koperasi yang terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 100
Perincian Satker Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Settama	113.718.007,00
2	Balai Besar POM di Semarang	660.820,00
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	31.320.184,00
4	Balai Besar POM di Padang	22.187.613,00
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	10.601.162,00
6	Balai Besar POM di Denpasar	6.357.270,00
3	Balai POM di Mamuju	677.610,00
Jumlah		185.522.666,00

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka sebesar Rp25.855.051.853,00 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 101
Perincian Satker Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Deputi I	9.390.425.000,00
2	Deputi II	8.852.262.500,00
3	Deputi III	6.662.925.000,00
4	PPOMN	938.206.100,00
5	Balai Besar POM di Yogyakarta	800.000,00
6	Balai POM di Jambi	650.000,00
7	Balai POM di Ambon	9.783.253,00
Jumlah		25.855.051.853,00

Uang Muka Dari
KPPN Rp495.957,00

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp495.957,00 dan Rp0,00. Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp495.957,00 terdapat pada Satker Deputi I.

Ekuitas
Rp3.518.289.434.523
,00

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.518.289.434.523,00 dan Rp3.615.482.684.919,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp269.274.652.736,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp269.274.652.736,00 dan Rp241.658.193.456,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 102
Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

AKUN	URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	178.654.547,00	186.184.289,00	(4,04)
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	267.803.854.888,00	240.531.387.500,00	11,34
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	838.738,00	0,00	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.290.873.563,00	940.571.667,00	37,24
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	431.000,00	50.000,00	762,00
Jumlah		269.274.652.736,00	241.658.193.456,00	11,43

- a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp178.654.547,00 terdapat pada Satker sebagai berikut:

Tabel 103
Perincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
31 Des 2024

(dalam rupiah)

No.	Satker	Uraian	Nilai	Total
1	Sekretariat Utama	Sewa ATM BNI	4.807.639,00	85.693.365,00
		Sewa Kantin	21.693.333,00	
		Sewa Kantin Mezanine	27.708.717,00	
		Sewa ATM Mandiri	15.953.000,00	
		Sewa Kantin Mezanine	3.169.930,00	
		Sewa Kantin Pikulan	12.360.746,00	
2	Balai Besar POM di Semarang	Sewa Rumah Negara	2.630.616,00	3.782.332,00
		Sewa Kantin	1.151.716,00	
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	Sewa Koperasi	6.766.795,00	6.766.795,00
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	Sewa Rumah Dinas	3.885.000,00	3.885.000,00
5	Balai Besar POM di Padang	Sewa Koperasi (4 Agustus 2021-4 Agustus 2024)	1.881.787,00	22.438.742,00
		Sewa Koperasi (4 Agustus 2024-3 Agustus 2027)	1.452.740,00	
		Sewa ATM (Jan-Okt 2024)	13.757.458,00	
		Sewa Rumah Dinas	2.731.110,00	
		Sewa ATM (Nov-Des 2024)	2.615.647,00	
6	Balai Besar POM di Pekanbaru	Sewa Rumah Dinas	2.391.444,00	10.042.282,00
		Sewa ATM Bank Syariah Indonesia	7.650.838,00	
7	Balai POM di Jambi	Sewa Kantin	1.115.000,00	1.115.000,00
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Sewa Rumah Dinas	6.544.752,00	6.544.752,00
9	Balai Besar POM di Palangkaraya	Sewa Rumah Dinas	1.319.175,00	1.319.175,00
10	Balai Besar POM di Banjarmasin	Sewa Rumah Dinas	4.439.640,00	4.439.640,00
11	Balai POM di Palu	Sewa Rumah Dinas	1.195.368,00	1.195.368,00
12	Balai POM di Kendari	Sewa Kantin	4.500.000,00	4.500.000,00
13	Balai Besar POM di Denpasar	Sewa Koperasi	6.647.300,00	6.647.300,00
14	Balai Besar POM di Mataram	Sewa Rumah Dinas	4.272.840,00	4.272.840,00
15	Balai POM di Kupang	Sewa Rumah Dinas	2.396.772,00	2.396.772,00
16	Balai Besar POM di Jayapura	Sewa Rumah Dinas	5.830.116,00	5.830.116,00
17	Balai POM di Bengkulu	Sewa Rumah Dinas	4.229.280,00	4.229.280,00
18	Loka POM di Kab. Merauke	Sewa Rumah Dinas	2.868.888,00	2.868.888,00
19	Balai POM di Mamuju	Sewa Kantin	686.900,00	686.900,00
TOTAL			178.654.547,00	

- b. Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp267.803.854.888,00 merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pendapatan PNBP Fungsional BPOM berupa jasa registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi, jasa inspeksi sarana produksi produk impor, jasa sertifikasi, jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan laboratorium, jasa uji profesi, penjualan baku pembanding dan hewan uji, dan kerja sama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain pada satuan kerja sebagai berikut:

Tabel 104
Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
31 Des 2024

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai
1	DEPUTI I	55.539.475.000,00
2	DEPUTI II	130.720.662.508,00
3	DEPUTI III	54.448.925.084,00
4	PPOMN	4.418.671.960,00
5	Balai Besar POM di Jakarta	46.230.000,00
6	Balai Besar POM di Bandung	817.440.000,00
7	Balai Besar POM di Semarang	735.195.000,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	220.070.000,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	2.513.970.000,00
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	197.510.000,00
11	Balai Besar POM di Medan	1.795.775.000,00
12	Balai Besar POM di Padang	1.049.450.716,00
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	654.846.641,00
14	Balai Besar POM di Palembang	193.175.000,00
15	Balai Besar POM di Bandar Lampung	374.709.494,00
16	Balai Besar POM di Pontianak	550.622.708,00
17	Balai Besar POM di Palangkaraya	931.801.094,00
18	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.349.805.103,00
19	Balai Besar POM di Samarinda	550.673.177,00
20	Balai Besar POM di Manado	124.320.000,00
21	Balai Besar POM di Makassar	792.625.704,00
22	Balai Besar POM di Denpasar	837.250.000,00
23	Balai Besar POM di Mataram	1.346.263.234,00
24	Balai Besar POM di Jayapura	744.957.326,00
25	Balai Besar POM di Serang	193.110.000,00
26	Balai POM di Jambi	927.528.124,00
27	Balai POM di Palu	823.670.596,00
28	Balai POM di Kendari	813.262.594,00
29	Balai POM di Ambon	312.042.005,00
30	Balai POM di Kupang	225.915.000,00
31	Balai POM di Bengkulu	643.181.787,00
32	Balai POM di Batam	1.458.890.625,00
33	Balai POM di Pangkal Pinang	588.154.408,00
34	Balai POM di Gorontalo	390.075.000,00
35	Balai POM di Manokwari	231.390.000,00
36	Balai POM di Mamuju	118.770.000,00
37	Loka POM DI Kab Ende	123.440.000,00
	TOTAL	267.803.854.888,00

Perincian Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan per jenis layanan pada aplikasi *e-payment* per 31 Desember 2024 per jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 105
Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
per jenis layanan 31 Des 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Layanan	Nilai
1	Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi dan Evaluasi	185.493.000,008
2	Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor	260.000.000
3	Jasa Sertifikasi	58.834.400,084
4	Jasa Pengujian	18.379.280,549
5	Jasa Kalibrasi	76.025.000
6	Jasa Pelatihan Laboratorium	158.250.000
7	Jasa Uji Profisiensi	18.500.000
8	Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji	3.140.795.000
9	Kontrak Kerjasama	840.956.100,00
Total		267.201.206.741,00

Perincian Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan per jenis layanan per satuan kerja pada Lampiran 4.

Terdapat selisih Pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sebesar Rp622.648.147,00 yang merupakan jurnal Pendapatan Diterima Dimuka pada Satker sebagai berikut:

Tabel 106
Perincian Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka
31 Des 2024
(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Deputi I	745.025.000,00
2	Deputi II	(265.387.500,00)
3	Deputi III	907.925.000,00
4	PPOMN	(836.201.100,00)
5	Balai Besar POM di Semarang	1.880.000,00
6	Balai Besar POM di Yogyakarta	(800.000,00)
7	Balai Besar POM di Jayapura	77.480.000,00
8	Balai POM di Jambi	(650.000,00)
9	Balai POM di Ambon	(9.783.253,00)
10	Balai POM di Kupang	3.160.000,00
Total		622.648.147,00

Pada LK TA 2024 Audited terdapat terdapat koreksi antara lain sebagai berikut:

1. Satker Deputi 1 senilai Rp148.125.000,00 merupakan kurang saji atas sisa kewajiban jasa pengawasan obat dan makanan yang disebabkan row transaksi tidak terbaca (penjumlahan) pada data PNB
2. Satker Deputi 2 senilai Rp1.500.000,00 merupakan lebih saji atas sisa kewajiban jasa pengawasan obat dan makanan karena terdapat satu

sertifikat terbit tanggal 20/08/2024 (Nomor Aju PS2312-1796) dan tiga sertifikat terbit tanggal 21/08/2024

3. BPOM di Ambon senilai Rp9.783.253,00 karena kurang saji atas sisa kewajiban jasa pengawasan obat dan makanan
 4. BPOM di Kupang senilai Rp3.160.000,00 karena lebih saji atas sisa kewajiban jasa pengawasan obat dan makanan.
- c. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) senilai Rp838.738,00 terdapat pada Satker Deputy IV merupakan pendapatan bunga hasil kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Sujiyo berupa barang bukti dalam bentuk uang yang disimpan di bank. Pendapatan ini telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN 0F15E0NA055JBRT3 tanggal 31 Desember 2024.
- d. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp1.290.873.563,00 terdapat pada Satker:

Tabel 107
Perincian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
31 Des 2024

(dalam rupiah)

No.	Satker	Nilai
1	Settama	11.181.920,00
2	Ittama	498.105,00
3	Deputi III	5.346.000,00
4	PPOMN	3.458.452,00
5	Pusdatin	13.892.023,00
6	Balai Besar POM di Jakarta	1.331.059,00
7	Balai Besar POM di Semarang	10.726.661,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.862.557,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	7.875.953,00
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.759.826,00
11	Balai Besar POM di Medan	2.428.670,00
12	Balai Besar POM di Padang	89.377.555,00
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	501.916,00
14	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.548.475,00
15	Balai Besar POM di Pontianak	13.305.450,00
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	309.461,00
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.382.916,00
18	Balai Besar POM di Samarinda	2.259.831,00
19	Balai Besar POM di Manado	2.484.968,00
20	Balai Besar POM di Makassar	5.290.470,00
21	Balai Besar POM di Denpasar	4.855.101,00
22	Balai Besar POM di Mataram	890.100,00
23	Balai Besar POM di Jayapura	3.913.059,00
24	Balai Besar POM di Serang	2.006.434,00
25	Balai POM di Jambi	861.661,00
26	Balai POM di Palu	2.067.960,00
27	Balai POM di Kendari	6.301.110,00
28	Balai POM di Ambon	6.149.531,00
29	Balai POM di Kupang	11.226.304,00
30	Balai POM di Bengkulu	76.368,00
31	Balai POM di Batam	1.959.114,00
32	Balai POM di Pangkal Pinang	1.043.814,00
33	Balai POM di Gorontalo	1.303.300,00
34	Balai POM di Manokwari	6.762.411,00
35	Balai POM di Sofifi	618.291.760,00
36	Balai POM di Mamuju	6.723.301,00
37	Balai POM di Surakarta	1.100.577,00
38	Balai POM di Tasikmalaya	8.992.363,00
39	Balai POM di Kediri	681.183,00
40	Balai POM di Bogor	2.263.812,00
41	Loka POM di Tangerang	1.085.650,00
42	Balai POM di Tarakan	2.206.238,00
43	Loka POM di Kab. Ende	117.849,00
44	Loka POM di Kab. Tanimbar	288.914.650,00
45	Loka POM di Kab. Pulau Morotai	1.635.000,00
46	Loka POM di Aceh Tengah	115.567.568,00
47	Loka POM di Kota Tanjungbalai	38.500,00
48	Loka POM di Payakumbuh	11.569.340,00
49	Loka POM di Kab. Merauke	1.288.288,00
50	Loka POM di Kab. Belitung	158.949,00
TOTAL		1.290.873.563,00

Penjelasan dan perincian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada Lampiran 6.

- e. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp431.000,00 terdapat pada Satuan Kerja Loka POM di Kab. Banyumas yang merupakan Setoran ke Negara berupa Barang Bukti uang Tunai Perkara Anak (Diversi) Loka POM Kabupaten Banyumas a.n Dicky Fandika Margiono, sesuai No NTPN 76AD65229QM5RLP0 tanggal 20 Mei 2024.

Beban Pegawai
Rp828.968.108.436,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp828.968.108.436,00 dan Rp718.866.991.756,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi beban pegawai mengalami peningkatan disebabkan adanya pengangkatan CASN menjadi PNS dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 31 Desember 2024. Beban Pegawai terdiri dari:

Tabel 108
Perincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	248.481.126.150,00	230.464.268.382,00	7,82
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.446.830,00	3.480.479,00	(0,97)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15.332.689.892,00	13.845.667.098,00	10,74
511122	Beban Tunj. Anak PNS	4.231.913.249,00	3.805.895.951,00	11,19
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3.480.268.700,00	3.281.184.850,00	6,07
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36.636.579.146,00	34.211.892.791,00	7,09
511125	Beban Tunj. PPh PNS	3.176.886.792,00	1.298.523.392,00	144,65
511126	Beban Tunj. Beras PNS	11.802.486.480,00	11.763.710.390,00	0,33
511129	Beban Uang Makan PNS	29.768.154.621,00	30.656.423.069,00	(2,90)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	833.050.000,00	852.960.000,00	(2,33)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	991.008.725,00	1.707.092.645,00	(41,95)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	21.709.291.854,00	2.892.162.900,00	650,62
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	328.070,00	45.208,00	625,69
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	992.578.350,00	135.076.730,00	634,83
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	216.147.184,00	27.873.366,00	675,46
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	22.000.000,00	0,00	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.454.576.000,00	332.955.000,00	637,21
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	971.297.040,00	138.539.460,00	601,10
511628	Beban Uang Makan PPPK	3.285.178.850,00	623.066.400,00	427,26
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	74.800.000,00	14.875.000,00	402,86
512211	Beban Uang Lembur	4.282.669.332,00	2.794.243.131,00	53,27
512212	Beban Uang Lembur PPPK	363.212.200,00	34.550.000,00	951,27
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	409.578.799.755,00	375.542.050.114,00	9,06
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	30.279.619.216,00	4.440.455.400,00	581,90
	Jumlah	828.968.108.436,00	718.866.991.756,00	15,32

Pada LK TA 2024 Audited terdapat terdapat koreksi beban pegawai berupa koreksi tambah senilai Rp16.393.097.296,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- PPOMN senilai Rp522.181.874,00 terkait koreksi pengembalian Tenaga kerja (beban Gaji Pokok, tunj. dan uang makan) sesuai real perhitungan HPP
- Sekretariat utama senilai Rp198.184.000,00 terkait belanja pegawai yang masih harus dibayar (lembur PNS bulan Desember 2024, lembur PPPK bulan Oktober s.d Desember)
- BBPOM di Medan senilai Rp550.100,00 terkait kekurangan belanja pegawai karena kenaikan jenjang fungsional dan pengangkatan kembali jabatan fungsional
- BPOM Palopo senilai Rp360.652,00 terkait kurang catat utang belanja pegawai berupa Gaji Bulan Desember 2024
- BPOM di Payakumbuh senilai Rp4.166.321,00 terkait kekurangan gaji bulan Desember 2023, Bulan November 2023 s.d Maret 2024, gaji bulan 13 dan gaji PPPK Januari 2024

- f. BBPOM di kupang senilai Rp31.674.000,00 karena belanja uang makan PNS
- g. BPOM di Ambon senilai Rp423.000,00 terkait belanja kekurangan belanja uang makan dan tunjangan fungsional PNS
- h. Koreksi belanja pegawai di seluruh satker senilai Rp15.635.557.349,00 karena jurnal balik belanja dibayar dimuka.

Beban Persediaan
Rp79.009.988.033,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp79.009.988.033,00 dan Rp80.066.369.350,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Realisasi beban persediaan mengalami penurunan disebabkan menurunnya pemakaian barang persediaan yang digunakan dalam operasional perkantoran. Perincian beban persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 109
Perincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
593111	Beban Persediaan Konsumsi	20.090.974.799,00	26.051.563.894,00	(22,88)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	58.342.493.564,00	52.512.711.715,00	11,10
593149	Beban Persediaan Lainnya	576.519.670,00	1.502.093.741,00	(61,62)
Jumlah		79.009.988.033,00	80.066.369.350,00	(1,32)

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi tambah senilai Rp40.365.872,00 dan koreksi kurang senilai Rp835.589.097,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PPPOMN terdapat koreksi tambah senilai Rp40.365.872,00 karena koreksi pengembalian beban Bedding sesuai real perhitungan HPP. Dan terdapat koreksi kurang senilai Rp812.257.654,00 karena mengeluarkan sisa Hewan uji dengan HPP 2024 kemudian dimasukkan kembali dengan menu perolehan lainnya dengan HPP 2025
2. BPOM di Medan terdapat koreksi kurang senilai Rp2.831.443,00 karena terdapat koreksi stock opname
3. BPOM di Pekanbaru terdapat koreksi kurang senilai Rp20.500.000,00 karena koreksi persediaan barang konsumsi dari pengadaan tahun 2024 yang belum diinput dalam aplikasi persediaan (Menu SO).

Beban Barang dan jasa
Rp487.801.947.351,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp487.801.974.351,00 dan Rp521.934.926.500,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan terjadi karena penggunaan akun belanja terkait Covid tidak diperbolehkan lagi. Perincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 110
Perincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
521111 Beban keperluan perkantoran	72.308.915.207,00	106.257.835.599,00	(31,95)
521113 beban penambah daya tahan tubuh	6.586.741.199,00	6.259.140.443,00	5,23
521114 Beban pengiriman surat dinas pos pusat	1.523.561.013,00	2.163.977.410,00	(29,59)
521115 Beban honor operasional Satker	8.557.634.181,00	13.864.625.354,00	(38,28)
521119 Beban barang operasional lainnya	3.042.478.122,00	3.779.829.262,00	(19,51)
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	125.541.814,00	(100,00)
521211 Beban bahan	112.683.566.613,00	138.613.012.806,00	(18,71)
521213 Beban honor output kegiatan	9.861.913.000,00	11.646.338.000,00	(15,32)
521219 Beban barang non operasional lainnya	29.067.167.368,00	24.238.101.734,00	19,92
521252 Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	2.680.397.585,00	1.750.127.155,00	53,15
521253 Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	177.877.067,00	63.072.300,00	182,02
521254 Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomtabel	9.587.948,00	0,00	-
522111 Beban langganan listrik	38.564.579.739,00	38.211.610.713,00	0,92
522112 Beban Langganan Telepon	1.146.994.102,00	1.159.163.320,00	(1,05)
522113 Beban Langganan Air	1.045.872.015,00	1.103.798.519,00	(5,25)
522119 Beban langganan daya dan jasa lainnya	900.243.687,00	970.719.369,00	(7,26)
522121 Beban Jasa Pos dan Giro	22.586.200,00	0,00	-
522131 Beban Jasa Konsultan	8.391.729.037,00	7.777.766.239,00	7,89
522141 Beban sewa	36.500.788.014,00	34.486.161.051,00	5,84
522151 Beban jasa profesi	26.702.965.015,00	29.287.337.233,00	(8,82)
522191 Beban jasa lainnya	128.024.757.239,00	99.998.389.255,00	28,03
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	170.417.924,00	(100,00)
595112 Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin	1.620.000,00	7.961.000,00	(79,65)
Jumlah	487.801.974.351,00	521.934.926.500,00	(6,54)

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi tambah senilai Rp715.961.569,00 dan koreksi kurang Rp451.542.093,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PPPOMN

- Terdapat koreksi tambah senilai Rp696.888.606,00 karena koreksi pengembalian beban bahan (pakan dan obat) dan beban langganan listrik sesuai real perhitungan HPP
- Terdapat koreksi kurang senilai Rp35.522.500,00 karena pembelian persediaan menggunakan belanja bahan sehingga dilakukan koreksi beban pembeliannya

2. BPOM Tarakan terdapat koreksi tambah senilai Rp227.376,00 karena utang

- kepada Pihak Ketiga (LTGA) Bulan Desember 2024
3. Loka POM di Kotawaringin Barat terdapat koreksi tambah senilai Rp59.950,00 karena utang kepada Pihak Ketiga (LTGA) Bulan Desember 2024
 4. BBPOM di Medan terdapat koreksi tambah senilai Rp10.500,00 karena utang kepada pihak Ketiga (LTGA) bulan Desember 2024
 5. Deputi IV terdapat koreksi nilai kurang senilai Rp385.701.593,00 karena belanja dibayar dimuka lisensi Direktorat Siber
 6. Loka POM di Rejang Lebong terdapat koreksi tambah senilai Rp88.302,00 karena kurang catat utang belanja barang di Rejang Lebong berupa tagihan listrik bulan Desember 2024
 7. BPOM di Jambi terdapat koreksi tambah Rp859.625,00 karena kurang catat utang atas tagihan PDAM bulan Desember 2024.
 8. Deputi I terdapat koreksi kurang senilai Rp1.630.000,00 karena jurnal GLP untuk mengeliminasi akun pendapatan perolehan aset lainnya
 9. BPOM di Bengkulu terdapat koreksi tambah senilai Rp2.937.866,00 karena penjurnalan kekurangan jurnal tagihan langganan Telepon pada bulan desember 2024
 10. BPOM di Bogor terdapat koreksi tambah senilai Rp14.889.344,00 karena Kelebihan perhitungan atas belanja barang dibayar dimuka (Sewa gedung Lab)
 11. Pusat Data dan Informasi terdapat koreksi kurang senilai Rp28.688.000,00 karena jurnal manual untuk mengeliminasi pendapatan perolehan aset lainnya.

*Beban Pemeliharaan
Rp115.196.415.324,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp115.196.415.324,00 dan Rp94.715.472.478,00 atau mengalami kenaikan sebesar 21,77% dibanding tahun 2023. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan dan kenaikan pemeliharaan aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan. Perincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 111
Perincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.302.952.143,00	18.183.860.963,00	33,65
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	998.168.301,00	456.050.007,00	118,87
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	111.129.853,00	162.217.339,00	(31,49)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.582.859.813,00	34.884.442.420,00	24,93
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	259.700.230,00	(100,00)
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	29.405.700,00	102.453.000,00	(71,30)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	329.475.160,00	233.713.699,00	40,97
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2.408.970.775,00	3.142.459.615,00	(23,34)
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.290.352.218,00	978.175.510,00	31,91
593114	Beban Persediaan suku cadang	42.143.101.361,00	36.287.554.583,00	16,14
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	24.845.112,00	(100,00)
	Jumlah	115.196.415.324,00	94.715.472.478,00	21,62

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

Terdapat koreksi kurang beban pemeliharaan pada satker Deputy IV berupa beban pemeliharaan senilai Rp111.079.452,00 karena belanja dibayar dimuka lisensi Direktorat Siber.

Terdapat koreksi pada BPOM di Medan berupa beban persediaan suku cadang senilai Rp26.780.502,00 karena koreksi hasil stock opname persediaan suku cadang.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp488.682.948.379,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp488.682.948.379,00 dan Rp544.209.373.301,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,20% dibanding tahun 2023. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Terdapat penurunan beban perjalanan dinas karena adanya pemblokiran anggaran perjalanan dinas di akhir tahun anggaran 2024. Perincian beban perjalanan dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 112
Perincian Beban perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
524111	Beban perjalanan dinas biasa	200.478.084.442,00	224.598.111.697,00	(10,74)
524113	Beban perjalanan dinas dalam kota	36.506.453.568,00	47.747.367.709,00	(23,54)
524114	Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	86.611.896.038,00	82.310.149.624,00	5,23
524119	Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	147.411.114.587,00	178.937.414.562,00	(17,62)
524211	Beban perjalanan dinas biasa luar negeri	6.896.167.206,00	3.064.894.412,00	125,01
524219	Beban perjalanan dinas lainnya luar negeri	10.779.232.538,00	7.551.435.297,00	42,74
Jumlah		488.682.948.379,00	544.209.373.301,00	(10,20)

Terdapat selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan revisi SPM terkait belanja perjalanan dinas.

*Beban Barang untuk
diserahkan ke
Masyarakat
Rp1.903.696.800,00*

D.7 Beban Barang untuk diserahkan ke Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.903.696.800,00 dan Rp1.365.401.828,00 atau mengalami kenaikan sebesar 39,42% dibandingkan tahun 2023. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis BPOM. Dalam hal ini Persediaan hewan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa hewan mencit, tikus dan kelinci serta barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat berupa baku pembanding dan baku mikroba, dijual atau diserahkan kepada industri maupun Universitas. Terdapat kenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat karena tingginya permintaan kebutuhan baku pembanding/baku mikroba dari industri ataupun universitas. Perincian beban barang untuk diserahkan BPOM kepada masyarakat untuk periode yang berakhir pada Tahun 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 113
Perincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	574.535.074,00	219.040.363,00	162,30
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.329.161.726,00	1.146.361.465,00	15,95
Jumlah		1.903.696.800,00	1.365.401.828,00	39,42

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp275.424.589.584,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp275.424.589.584,00 dan Rp280.473.779.787,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 114
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236.429.298.859,00	242.441.528.543,00	(2,48)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.938.438.882,00	27.315.333.452,00	5,94
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	92.127.030,00	91.885.759,00	0,26
591312	Beban Penyusutan Irigasi	307.872.513,00	260.638.209,00	18,12
591313	Beban Penyusutan Jaringan	453.699.341,00	445.744.383,00	1,78
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.399.953,00	4.641.202,00	(5,20)
592115	Beban Amortisasi Software	9.041.603.352,00	9.722.004.617,00	(7,00)
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	34.903.938,00	0,00	-
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	122.245.716,00	192.003.622,00	(36,33)
JUMLAH		275.424.589.584,00	280.473.779.787,00	(1,80)

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Beban penyusutan peralatan dan mesin berupa koreksi tambah senilai Rp1.458.202.819,00 pada Satker sebagai berikut:
 - Deputi IV senilai Rp1.417.188.840,00 merupakan akibat pemecahan aset gabungan
 - Deputi III senilai Rp41.013.979,00 merupakan akibat dari reklasifikasi dari Data Loger
- Beban penyusutan peralatan dan mesin berupa koreksi kurang senilai

Rp1.449.865.314,00 pada Satker sebagai berikut:

- a. Deputi IV senilai Rp1.417.188.825,00 merupakan akibat pemecahan aset gabungan
 - b. Deputi III senilai Rp31.438.189,00 merupakan akibat dari reklasifikasi Autocleave
 - c. PPSDM senilai Rp1.238.300,00 merupakan akibat dari penghentian aset dari penggunaan berupa Camera Digital
3. Beban penyusutan gedung dan bangunan berupa koreksi tambah senilai Rp388.416.574,00 merupakan akibat dari pendefinitifan aset pada Satker sebagai berikut:
- a. Loka POM di Rejang Lebong senilai Rp89.120.894,00
 - b. Loka POM di Aceh Tengah senilai Rp68.220.101,00
 - c. BPOM di Sofifi senilai Rp118.449.200,00
 - d. BPOM di Manokwari senilai Rp112.626.379,00
4. Beban amortisasi berupa koreksi tambah dan kurang senilai Rp34.903.938,00 pada Satker sebagai berikut:
- a. BBPOM di Yogyakarta senilai Rp4.266.438,00 merupakan akibat dari penghentian aset tak berwujud berupa aplikasi hitung ING (Informasi Nilai Gizi)
 - b. PPSDM senilai Rp1.238.300,00 merupakan akibat dari penghentian aset tak berwujud berupa aplikasi penilaian angka kredit
 - c. Loka POM di Dumai senilai Rp2.200.000,00 merupakan akibat dari penghentian aset tak berwujud berupa aplikasi Silais.
5. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah berupa koreksi tambah senilai Rp1.238.300,00 pada Satker PPSDM merupakan akibat dari penghentian aset dari penggunaan Camera Digital.

*Beban Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0,00*

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.543.839,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 115
Perincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PNPB	0,00	(1.998,00)	-
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Lainnya	0,00	1.545.837,00	-
Jumlah		0,00	1.543.839,00	-

*Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
(Rp11.245.892.945,00)*

D.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp11.245.892.945,00) dan Rp24.975.999.744,00 dengan perincian sebagai berikut:

*Tabel 116
Perincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023*

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Kenaikan/ Penurunan
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(10.017.513.261,00)	(4.840.272.975,00)	106,96
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1.228.379.684,00)	29.816.272.719,00	(104,12)
	(11.245.892.945,00)	24.975.999.744,00	(145,03)

- Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp10.017.513.261,00) dan (Rp4.840.272.975,00) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 117
Perincian Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	% Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.103.543.243,00	1.692.384.517,00	(34,79)
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	577.496.755,00	693.860.480,00	(16,77)
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	526.046.488,00	998.524.037,00	(47,32)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11.121.056.504,00	6.532.657.492,00	70,24
596111 Beban Pelepasan Aset	11.121.056.504,00	6.532.657.492,00	70,24
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(10.017.513.261,00)	(4.840.272.975,00)	106,96

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.103.543.243,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp577.496.755,00 merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan lelang pada satker sebagai berikut:

Tabel 118
Perincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
31 Des 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Sekretariat Utama	94.051.000,00
2	Deputi II	62.611.000,00
3	PPSDM	18.084.000,00
4	Balai Besar POM di Bandung	6.456.600,00
5	Balai Besar POM di Semarang	78.853.000,00
6	Balai Besar POM di Banda Aceh	13.825.600,00
7	Balai Besar POM di Medan	6.105.655,00
8	Balai Besar POM di Pekanbaru	51.436.000,00
9	Balai Besar POM di Palembang	7.362.000,00
10	Balai Besar POM di Pontianak	5.271.100,00
11	Balai Besar POM di Manado	2.522.000,00
12	Balai Besar POM di Makassar	1.225.000,00
13	Balai Besar POM di Denpasar	18.883.000,00
14	Balai Besar POM di Mataram	5.953.000,00
15	Balai Besar POM di Jayapura	7.553.000,00
16	Balai POM di Jambi	46.500.000,00
17	Balai POM di Palu	110.754.000,00
18	Balai POM di Kendari	23.682.000,00
19	Balai POM di Bengkulu	2.090.000,00
20	Balai POM di Mamuju	4.643.000,00
21	Loka POM di Kab. Banyumas	793.000,00
22	Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	837.000,00
23	Loka POM di Kab. Tabalong	5.458.800,00
24	Loka POM di Kota Balikpapan	1.302.000,00
25	Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	545.000,00
26	Loka POM di Aceh Selatan	700.000,00
TOTAL		577.496.755,00

Penjelasan dan perincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada Lampiran 1.

- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp526.046.488,00 merupakan pendapatan dari lelang yang terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 119
Perincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	43.913.000,00
2	Ittama	32.662.000,00
3	Deputi I	29.772.000,00
4	Deputi III	37.508.500,00
5	PPPOMN	199.311.500,00
6	Pusakom	17.109.000,00
7	Balai Besar POM di Jakarta	6.951.500,00
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	14.139.000,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	2.759.000,00
10	Balai Besar POM di Medan	3.231.031,00
11	Balai Besar POM di Padang	49.775.000,00
12	Balai Besar POM di Samarinda	2.948.500,00
13	Balai Besar POM di Manado	194.240,00
14	Balai Besar POM di Makassar	9.250.000,00
15	Balai Besar POM di Serang	12.772.567,00
16	Balai POM di Jambi	11.168.000,00
17	Balai POM di Kendari	364.000,00
18	Balai POM di Kupang	33.572.950,00
19	Balai POM di Bengkulu	11.383.700,00
20	Balai POM di Pangkal Pinang	1.279.000,00
21	Balai POM di Gorontalo	3.825.000,00
22	Balai POM di Sofifi	215.000,00
23	Loka POM di Kab. Ende	424.000,00
24	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	1.518.000,00
TOTAL		526.046.488,00

Penjelasan dan perincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya pada Lampiran 2.

- c. Beban Pelepasan Aset sebesar Rp11.121.056.504,00 pada satker sebagai berikut:

Tabel 120
Perincian Beban Kerugian Pelepasan Aset
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	27.060.000,00
2	Ittama	12.389.250,00
3	Deputi I	2.800.836.219,00
4	Deputi II	5.699.000,00
5	Deputi III	775.628.400,00
6	PPPOMN	1.615.024.139,00
7	Pusakom	41.034.600,00
8	Pusdatin	318.193.860,00
9	Balai Besar POM di Jakarta	21.407.687,00
10	Balai Besar POM di Semarang	35.970.335,00
11	Balai Besar POM di Yogyakarta	105.617.426,00
12	Balai Besar POM di Surabaya	265.444.823,00
13	Balai Besar POM di Banda Aceh	112.529.537,00
14	Balai Besar POM di Padang	8.804.408,00
15	Balai Besar POM di Bandar Lampung	347.204.284,00
16	Balai Besar POM di Pontianak	184.841.011,00
17	Balai Besar POM di Palangkaraya	69.086.500,00
18	Balai Besar POM di Banjarmasin	61.550.343,00
19	Balai Besar POM di Samarinda	3.456.957,00
20	Balai Besar POM di Manado	30.333.453,00
21	Balai Besar POM di Makassar	86.344.474,00
22	Balai Besar POM di Denpasar	283.167.142,00
23	Balai Besar POM di Jayapura	568.157.679,00
24	Balai Besar POM di Serang	12.113.314,00
25	Balai POM di Jambi	263.913.985,00
26	Balai POM di Palu	85.978.224,00
27	Balai POM di Kendari	35.382.978,00
28	Balai POM di Batam	34.445.745,00
29	Balai POM di Pangkal Pinang	4.228.939,00
30	Balai POM di Gorontalo	5.839.650,00
31	Balai POM di Manokwari	13.249.600,00
32	Balai POM di Sofifi	15.881.664,00
33	Balai POM di Mamuju	115.399.501,00
34	Balai POM di Kediri	2.275.401.852,00
35	Balai POM di Palopo	1.320.000,00
36	Balai POM di Tarakan	1.743.090,00
37	Loka POM di Kota Dumai	471.988.935,00
38	Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	3.550.000,00
39	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	837.500,00
TOTAL		11.121.056.504,00

- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp1.228.379.684,00) dan Rp29.816.272.719,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 121
Perincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	% Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.495.348.471,00	34.841.651.218,00	(92,84)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	342.258.955,00	408.480.011,00	(16,21)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	322.391.828,00	513.336.306,00	(37,20)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	450.000.000,00	0,00	#DIV/0!
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	6.000.000,00	8.646.540,00	(30,61)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	258.428.324,00	33.749.666.045,00	(99,23)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.116.269.364,00	161.522.316,00	591,09
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.723.728.155,00	5.025.378.499,00	(25,90)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	154.593.522,00	412.662.360,00	(62,54)
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3.569.134.633,00	4.612.716.139,00	(22,62)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(Rp1.228.379.684,00)	29.816.272.719,00	(104,12)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.495.348.471,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp342.258.955,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 122
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	96.048.819,00
2	Ittama	90.590,00
3	PPPOMN	12.700.928,00
4	PUSAKOM	4.354.138,00
5	PUSDATIN	3.263.083,00
6	PPSDM	522.000,00
7	Balai Besar POM di Jakarta	33.133.389,00
8	Balai Besar POM di Bandung	11.025.754,00
9	Balai Besar POM di Semarang	9.361.242,00
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	2.638.238,00
11	Balai Besar POM di Surabaya	30.565.280,00
12	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.326.964,00
13	Balai Besar POM di Medan	9.695.176,00
14	Balai Besar POM di Padang	8.316.626,00
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	462.094,00
16	Balai Besar POM di Palembang	6.643.865,00
17	Balai Besar POM di Bandar Lampung	5.199.249,00
18	Balai Besar POM di Pontianak	982.700,00
19	Balai Besar POM di di Palangkaraya	2.721.996,00
20	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.449.550,00
21	Balai Besar POM di Samarinda	3.842.481,00
22	Balai Besar POM di Makassar	7.944.838,00
23	Balai Besar POM di Denpasar	10.235.320,00
24	Balai Besar POM di Jayapura	1.266.550,00
25	Balai Besar POM di di Serang	3.577.477,00
26	Balai POM di Jambi	17.169.725,00
27	Balai POM di Palu	5.042.962,00
28	Balai POM di Kendari	5.230.150,00
29	Balai POM di Ambon	10.239.096,00
30	Balai POM di Kupang	7.796.099,00
31	Balai POM di Bengkulu	241.750,00
32	Balai POM di di Batam	4.567.449,00
33	Balai POM di di Pangkal Pinang	228.176,00
34	Balai POM di di Gorontalo	893.555,00
35	Balai POM di di Manokwari	1.579.350,00
36	Balai POM di di Sofifi	1.270.821,00
37	Balai POM di di Mamuju	10.082.800,00
38	Balai Pom di Surakarta	89.688,00
39	Balai Pom di Tasikmalaya	252.410,00
40	Balai Pom di Palopo	1.095.180,00
41	Balai Pom di Bogor	409.026,00
42	Balai Pom di Tangerang	2.658.765,00
43	Loka Pom di Kota Lubuklinggau	555.000,00
44	Loka Pom di Kab. Ende	723.737,00
45	Loka Pom di Kab. Kepulauan Tanimbar	70.000,00
46	Loka Pom di Aceh Tengah	1.084.000,00
47	Loka Pom di Kota Tanjungbalai	111.000,00
48	Loka Pom di Kab. Sanggau	716.367,00
49	Loka Pom di Kab. Rejang Lebong	621.399,00
50	Loka Pom di Kab. Belitung	70.200,00
51	Loka Pom di Kab. Toba Samosir	91.903,00
TOTAL		342.258.955,00

Penjelasan dan perincian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu pada Lampiran 7.

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp322.391.828,00, terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 123
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	87.619.019,00
2	Ittama	500.000,00
3	PPPOMN	3.939.341,00
4	PPSDM	46.997.051,00
5	Balai Besar POM di Jakarta	59.068.490,00
6	Balai Besar POM di Semarang	650.000,00
7	Balai Besar POM di Surabaya	668.000,00
8	Balai Besar POM di Padang	50.000,00
9	Balai Besar POM di Pekanbaru	2.897.552,00
10	Balai Besar POM di Palembang	12.179.670,00
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3.056.310,00
12	Balai Besar POM di Pontianak	2.464.000,00
13	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.835.000,00
14	Balai Besar POM di Samarinda	6.200.000,00
15	Balai Besar POM di Denpasar	730.000,00
16	Balai Besar POM di Jayapura	13.560.746,00
17	Balai Besar POM di Di Serang	11.595.274,00
18	Balai POM di Jambi	1.365.000,00
19	Balai POM di Palu	1.174.535,00
20	Balai POM di Kendari	10.725.823,00
21	Balai POM di Ambon	5.223.520,00
22	Balai POM di Kupang	4.269.003,00
23	Balai POM di Batam	1.115.000,00
24	Balai POM di Pangkal Pinang	8.683.100,00
25	Balai POM di Gorontalo	4.861.108,00
26	Balai POM di Manokwari	985.675,00
27	Balai POM di Mamuju	12.175.675,00
28	Balai POM di Tarakan	887.600,00
29	Balai POM di Surakarta	157.500,00
30	Balai POM di Palopo	3.097.957,00
31	Balai POM di Bogor	8.955.083,00
32	Loka POM di Aceh Tengah	1.859.600,00
33	Loka POM di Kab. Sanggau	869.300,00
34	Loka POM di Kab. Belitung	1.310.000,00
35	Loka POM di Kab. Toba Samosir	665.896,00
TOTAL		322.391.828,00

Penjelasan dan perincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Lampiran 8.

- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp450.000.000,00 terdapat pada satker Balai POM di Sofifi yang merupakan pengembalian belanja modal atas jaminan pelaksanaan bank garansi pembangunan fisik gedung Balai POM di Sofifi TA 2023 sesuai NTPN 53F601JNFUVNLANO tanggal 23 April 2024.

- d. Pendapatan Setoran dari sisa utang non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp6.000.000,00 terdapat pada satker Settama.
- e. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp258.428.324,00 merupakan transaksi atas tindak lanjut karena adanya kesalahan pencatatan yang tidak berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah, penyelesaian pembangunan, reklasifikasi dan pembatalan penghapusan. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 124
Perincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI	Keterangan
1	Deputi I	32.250.000,00	Pendapatan perolehan lainnya karena adanya pemisahan nama/kode barang dan koreksi perubahan nilai berkurang berupa Meja kerja kayu menjadi Laci Box
2	PPPOMN	14.999.999,00	Perolehan yang berasal dari bahan baku yang diterima dari Laboratorium
3	Balai Besar POM di Bandung	5.520.000,00	Perolehan berupa Uninterrupted Power Supply (UPS) sebagai tindak lanjut temuan audit
4	Balai Besar POM di Medan	34.000.000,00	Perolehan karena adanya pemisahan aset gabungan berupa Micro Pippetes
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.400.000,00	Perolehan karena koreksi pencatatan atas kardex kayu (laci kayu) yang terpisah dari partisi meja
6	Balai Besar POM di Banjarmasin	137.643.325,00	Perolehan berupa barang persediaan yaitu Biological Indicator for steam sterilization, Chemical indicator, H2O2 dan gloves bemer cytotoxix
7	Balai Besar POM di Denpasar	22.500,00	Perolehan karena penambahan selisih lebih pada hasil stock opname fisik dimana barang tersebut adalah bonus berupa pulpen
8	Balai POM di Batam	21.589.000,00	Perolehan berupa UPS (1 unit) karena pengadaan Automatic Developing Chamber
9	Balai POM di Palopo	4.003.500,00	Perolehan karena koreksi penambahan jumlah aset berupa kursi
TOTAL		258.428.324,00	

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PPPOMN koreksi tambah senilai Rp1.294.958.852,00 dan koreksi kurang senilai Rp1.259.436.352,00 merupakan akibat dari koreksi perhitungan HPP
2. BBPOM di Palangkaraya koreksi tambah dan kurang senilai Rp1.127.000,00 merupakan akibat dari koreksi pencatatan saat penginputan.

3. Deputi I senilai Rp1.630.000,00 merupakan akibat dari koreksi pencatatan persediaan
 4. Pusdatin senilai Rp28.688.000,00 merupakan akibat pencatatan persediaan
 5. Loka POM di Kediri senilai Rp141.955.000,00 merupakan akibat dari koreksi pencatatan jumlah aset.
- f. Pendapatan Penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp1.116.269.364,00 merupakan pendapatan dari transaksi koreksi tambah di aplikasi persediaan terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 125
Perincian Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	PPPOMN	546.175.450,00
2	Balai Besar POM di Jakarta	21.936.820,00
3	Balai Besar POM di Manado	22.323.560,00
4	Balai Besar POM di Denpasar	2.025.000,00
5	Balai POM di Palu	5.600.000,00
6	Balai POM di Kupang	506.116.579,00
7	Balai POM di Batam	3.698.875,00
8	Balai POM di Manokwari	8.393.080,00
TOTAL		1.116.269.364,00

Pada LK TA 2024 Audited terdapat pada Satker PPPOMN senilai Rp447.178.698,00 merupakan akibat dari koreksi perhitungan HPP.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.723.728.155,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp154.593.522,00 terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 126
Perincian Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	PPPOMN	50.664.334,00
2	Balai Besar POM di Jakarta	21.936.820,00
3	Balai Besar POM di Palangkaraya	1.122.500,00
4	Balai Besar POM di Manado	22.323.560,00
5	Balai Besar POM di Denpasar	2.025.000,00
6	Balai POM di Palu	5.600.000,00
7	Balai POM di Batam	3.014.500,00
8	Balai POM di Manokwari	8.393.080,00
9	Balai POM di Tasikmalaya	128.000,00
10	Balai POM di Jember	37.115.000,00
11	Loka POM di Kab. Banggai	2.270.728,00
TOTAL		154.593.522,00

- b. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp3.569.134.633,00 merupakan persediaan yang telah dikeluarkan dari pencatatan karena tidak dapat digunakan lagi untuk mendukung tugas dan fungsi BPOM dan selanjutnya akan dan atau sudah dilakukan penghapusan, terdapat pada satker sebagai berikut:

Tabel 127
Perincian Beban Persediaan Rusak/Usang
31 Des 2024

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI
1	Settama	7.550.000,00
2	Ittama	183.600,00
3	Deputi III	23.307.900,00
4	PPOMN	65.386.273,00
5	Pusdatin	1.294.000,00
6	Balai Besar POM di Jakarta	45.018.612,00
7	Balai Besar POM di Bandung	65.462.384,00
8	Balai Besar POM di Semarang	6.727.000,00
9	Balai Besar POM di Surabaya	281.109.124,00
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	7.026.215,00
11	Balai Besar POM di Medan	59.127.363,00
12	Balai Besar POM di Padang	38.506.772,00
13	Balai Besar POM di Pekanbaru	214.724.084,00
14	Balai Besar POM di Palembang	26.560.690,00
15	Balai Besar POM di Pontianak	80.937.246,00
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	14.979.500,00
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	12.865.600,00
18	Balai Besar POM di Samarinda	20.361.680,00
19	Balai Besar POM di Manado	30.869.115,00
20	Balai Besar POM di Makassar	809.309.186,00
21	Balai Besar POM di Denpasar	40.967.399,00
22	Balai Besar POM di Mataram	415.447.126,00
23	Balai Besar POM di Jayapura	477.441.617,00
24	Balai Besar POM di Di Serang	23.246.043,00
25	Balai POM di Jambi	74.785.681,00
26	Balai POM di Palu	68.396.454,00
27	Balai POM di Kendari	27.026.985,00
28	Balai POM di Ambon	397.423.992,00
29	Balai POM di Kupang	101.785.743,00
30	Balai POM di Batam	15.473.120,00
31	Balai POM di Gorontalo	14.672.620,00
32	Balai POM di Manokwari	1.155.000,00
33	Balai POM di Pangkal Pinang	46.192.284,00
34	Balai POM di Mamuju	5.970.200,00
35	Balai POM di Tarakan	600.000,00
36	Balai POM di Tasikmalaya	6.050.000,00
37	Balai POM di Jember	2.952.600,00
38	Balai POM di Bogor	9.514.575,00
39	Balai POM di Tangerang	6.275.990,00
40	Loka POM di Kab. Buleleng	22.450.860,00
TOTAL		3.569.134.633,00

Pada LK TA 2024 Audited terdapat koreksi senilai Rp59.488.494,00 pada Satker PPPOMN merupakan akibat dari penginputan barang usang rusak persediaan.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp3.615.482.684.919,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.615.482.684.919,00 dan Rp3.623.992.256.883,00.

Defisit LO
Rp2.018.958.961.116,00

E.2 Defisit LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.018.958.961.116,00 dan Rp1.974.999.665.639,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp1.339.812.429,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Jumlah Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.339.812.429,00 dan Rp1.080.482.259,00. Perincian koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah:

Tabel 128
Perincian Koreksi Nilai Persediaan Sampai Dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan Kerja	Nilai Koreksi
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	40.388.800,00
2	Balai Besar POM di Banjarmasin	151.024.070,00
3	Balai Besar POM di Jayapura	(3.825.000,00)
4	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	1.099.195.980,00
5	Balai POM di Tasikmalaya	128.000,00
6	Balai POM di Jember	13.797.780,00
7	Loka POM di Kabupaten Ende	22.455.590,00
8	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	7.622.481,00
9	Loka POM di Belitung	6.629.000,00
10	Loka POM di Banggai	2.270.728,00
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	125.000,00
	JUMLAH	1.339.812.429,00

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp40.362.816,00

E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp40.362.816,00 dan (Rp10.387.409,00). Perincian koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah:

Tabel 129
Perincian Koreksi Atas Reklasifikasi Sampai Dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Satuan kerja	Nilai Koreksi
1	Balai Besar POM di Jakarta	289.000,00
2	Balai Besar POM di Jayapura	49.857.126,00
3	Loka POM di Kabupaten Bogor	(277.500,00)
4	Loka POM di Kabupaten Sanggau	(9.506.710,00)
	Jumlah	40.361.916,00

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp14.724.517.398,00

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.724.517.398,00 dan Rp20.237.439.464,00. Koreksi ini berasal dari transaksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Perincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 130
Perincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	(%)
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.780.214.798,00	20.492.723.163,00	(27,88)
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(55.697.400,00)	(255.283.699,00)	(78,18)
JUMLAH		14.724.517.398,00	20.237.439.464,00	27,24

Perincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp14.780.214.798,00 sesuai lampiran 24.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp55.697.400,00) terdapat pada :

1. Satker Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan senilai Rp52.547.400,00
2. Satker Balai POM di Palu senilai Rp3.150.000,00

Koreksi Lain-lain
(Rp474.201.177,00)

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp474.201.177,00) dan (Rp16.480.000,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara (BMN), antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Perincian koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah:

1. Satker Balai Besar POM di Banjarmasin senilai Rp307.621.612,00
2. Satker Balai Besar POM di Samarinda senilai Rp166.579.565,00

Transaksi Antar Entitas
Rp1.906.135.219.254,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.906.135.219.254,00 dan Rp1.945.199.039.361,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal BPOM, antar BPOM maupun BPOM dengan BUN. Perincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut :

Tabel 131
Perincian Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian		TA 2024	TA 2023	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.192.703.921.683,00	2.187.377.744.765,00	0,24
313121	Diterima dari Entitas Lain	(271.957.247.499,00)	(251.467.161.949,00)	8,15
313211	Transfer Keluar	(66.517.032.909,00)	(59.356.298.299,00)	12,06
313221	Transfer Masuk	49.418.637.818,00	60.499.915.594,00	(18,32)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	2.486.940.161,00	8.321.712.310,00	(70,12)
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	(176.873.060,00)	-
JUMLAH		1.906.135.219.254,00	1.945.199.039.361,00	(2,01)

DDEL/DKEL
(Rp271.957.247.499,00)/
Rp2.192.703.921.683,00

E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain/Ditagihkan Ke Entitas Lain

Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada BPOM yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DDEL sebesar (Rp271.957.247.499,00) sedangkan DKEL sebesar Rp2.192.703.921.683,00

Transfer Masuk/Transfer
Keluar
Rp49.418.637.818,00/
(Rp66.517.032.909,00)

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal BPOM, antar Kementerian/Lembaga dan Antar BPOM dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.418.637.818,00 dan (Rp66.517.032.909,00) terdiri dari:

Tabel 132
Perincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar Sampai Dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tranfer Masuk	Tranfer Keluar	Selisih
1	Barang Konsumsi	88.525.270,00	88.525.270,00	0,00
2	Bahan Baku	1.602.947.069,00	1.602.947.069,00	0,00
3	Suku Cadang	91.919.514,00	91.919.514,00	0,00
4	Tanah	0,00	47.341.925.000,00	47.341.925.000,00
5	Gedung dan Bangunan	7.143.106.275,00	702.500.000,00	(6.440.606.275,00)
6	Irigasi	10.563.014,00	0,00	(10.563.014,00)
7	Peralatan dan Mesin	24.623.922.602,00	23.451.022.091,00	(1.172.900.511,00)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(620.954.388,00)	(115.705.884,00)	505.248.504,00
9	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(1.056.304,00)	0,00	1.056.304,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.315.898.931,00)	(10.380.504.862,00)	935.394.069,00
11	Aset Tetap Renovasi	0,00	254.980.000,00	254.980.000,00
12	Aset Tetap Lainnya	2.346.357.955,00	2.346.357.955,00	0,00
13	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.133.066.756,00	1.133.066.756,00	0,00
14	Software	129.980.000,00	0,00	(129.980.000,00)
15	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	24.186.158.986,00	0,00	(24.186.158.986,00)
Total		49.418.637.818,00	66.517.032.909,00	17.098.395.091,00

Perincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar per Satker pada Lampiran 25.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar, sebesar Rp17.098.395.091,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Transaksi Transfer Masuk dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Satker Loka POM di Kabupaten Sanggau, sesuai BAST Nomor B-PL.03.01.2.06.24.487 tanggal 10 Juni 2024, berupa :
 - Peralatan dan Mesin senilai Rp1.172.900.511,00
 - Gedung dan Bangunan senilai Rp6.315.606.275,00
 - Irigasi senilai Rp10.563.014,00
 - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp935.394.069,00
 - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp505.248.504,00
 - Akumulasi Penyusutan Irigasi senilai Rp1.056.304,00
- Transaksi Transfer Keluar dari Satker Sekretariat Utama BPOM ke Satker SLOG POLRI senilai Rp47.341.925.000,00, berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 4 s.d. 7 sesuai dengan BAST Nomor PL.03.07.2.25.05.24.10 tanggal 15 Mei 2024 sebagai tindaklanjut dari Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN.

3. Selisih Transfer Masuk Gedung dan Bangunan senilai (Rp125.000.000,00), terjadi karena adanya penerimaan atas Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi (ATR) dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berupa Instalasi Jaringan LAN sesuai dengan BAST nomor B-PL.02.02.44.07.24.1171 tanggal 09 Juli 2024 senilai Rp125.000.000,00.
4. Selisih Transfer Masuk Software senilai (Rp129.980.000,00), hal tersebut terjadi karena adanya penerimaan atas Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi (ATR) dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berupa Pengembangan Aplikasi ASROT sebanyak 1 unit sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.07.44.12.24.2751 tanggal 19 Desember 2024.
5. Transaksi Transfer Masuk dari Satker BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina ke Satker Balai POM di Jambi berupa tanah senilai Rp2.261.594.986,00 sesuai dengan BAST No. BA-9/KN.4/2024 tentang Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina yang Telah Ditetapkan Status Penggunaannya pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Transaksi Transfer Masuk dari Satker BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina ke Satker Balai POM di Tarakan berupa tanah senilai Rp21.924.564.000,00 sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 34/KM.6/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Eks Pertamina pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2024.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp2.486.940.161,00

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.486.940.161,00 dan Rp8.321.712.310,00. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung BPOM dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat pada Satker:

Tabel 133
Perincian Pengesahan Hibah Langsung Sampai Dengan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai POM di Kupang	(114.400.000,00)
2	Deputi I	(497.830.991,00)
3	Loka POM di Lubuklinggau	(442.561.000,00)
4	Balai POM di Payakumbuh	(328.800.342,00)
5	Loka POM di Kotawaringin Barat	(39.068.240,00)
6	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	(71.360.189,00)
7	Balai POM di Kabupaten Kediri	(992.919.399,00)
TOTAL		(2.486.940.161,00)

Ekuitas Akhir
Rp3.518.289.434.523,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.518.289.434.523,00 dan Rp3.615.482.684.919,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, terdapat peningkatan klasifikasi terhadap 2 (Dua) Balai POM Menjadi Balai Besar POM dan 4 (Empat) Loka POM Menjadi Balai POM mulai berlaku per 13 Januari 2025, sebagai berikut:

Tabel 134
Perincian Peningkatan Klasifikasi UPT

No	Nama UPT Lama	Nama UPT Baru
1	Balai POM di Banjarmasin	Balai Besar POM di Banjarbaru
2	Balai POM di Gorontalo	Balai Besar POM Gorontalo
3	Loka POM di Kota Tanjung Balai	Balai POM di Tanjung Balai
4	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Balai POM di Indragiri Hulu
5	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	Balai POM di Tulang Bawang

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Rekapitalisasi hasil status pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran 27.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup BPOM 31 Desember 2024 sebanyak 115 rekening. Daftar rekening pemerintah lingkup BPOM sebagaimana terlampir dalam lampiran 28.

F.2.3 Alat Gelas Kualitatif

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang tidak difungsikan sebagai pengukur secara akurat. Setelah keluar dari gudang, alat gelas tersebut dianggap habis. Pengendaliannya menggunakan catatan manajerial sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada lingkungan BPOM 31 Desember 2024 adalah sejumlah 369.558 dengan rincian masing-masing UAPPA-Wilayah dan Satker Pusat pada Lampiran 29.

F.2.4 Penerimaan Hibah

1. Deputi I mendapatkan hibah uang dari WHO dengan Nomor Register 23LNGDLA untuk kegiatan *Joint Work Plan WHO Biennium 2022-2024* Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sebesar Rp4.242.000.000,00 (kurs \$282.800,00) sesuai dengan perjanjian Nomor KS. 02.02.3.31.04.22.01 tanggal 1 April 2022.

Tabel 135

*Perincian Pengesahan Pendapatan Hibah Tahun 2022 s.d. 2024 Deputi I
(dalam rupiah)*

Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	No. Register	No. Pengesahan	Nilai
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	WHO	Uang	23LNGDLA	221400000000079 31 Desember 2022	177.018.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000008 12 Juni 2023	459.213.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000021 11 September 2023	374.656.160
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000043 1 Desember 2023	93.664.040
Direktorat Registrasi Obat	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000008 12 Juni 2023	295.482.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000021 11 September 2023	362.954.400
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000043 1 Desember 2023	230.487.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000063 29 Desember 2023	55.207.347
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	WHO	Uang	23LNGDLA	221400000000079 31 Desember 2022	315.188.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000021 11 September 2023	221.871.200
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000043 1 Desember 2023	49.994.711
	WHO	Uang	23LNGDLA	241400000000001 26 Januari 2024	78.797.000
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000021 11 September 2023	89.555.200
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000043 1 Desember 2023	486.045.920
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000063 29 Desember 2023	96.070.247
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000021 11 September 2023	88.951.200
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400000000043 1 Desember 2023	22.014.212
Total					3.497.169.637

Tabel 136
Perincian Pengesahan Belanja Hibah Tahun 2022-2024 pada Deputi I
(dalam rupiah)

Penerima Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	No. Register	No. Pengesahan	Nilai
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	WHO	Uang	23LNGDLA	221400000000079 31 Desember 2022	177.018.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560004 23 Oktober 2023	301.503.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560010 31 Desember 2023	146.920.320
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560013 31 Desember 2023	187.542.200
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560014 31 Desember 2023	280.378.000
Direktorat Registrasi Obat	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560008 31 Desember 2023	158.375.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560007 31 Desember 2023	89.765.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560009 31 Desember 2023	224.336.700
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560012 31 Desember 2023	400.208.747
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560001 14 September 2023	256.025.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560002 26 September 2023	221.835.911
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560005 11 Desember 2023	50.030.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560006 31 Desember 2023	59.163.000
	WHO	Uang	23LNGDLA	241400600680001 8 Maret 2024	78.797.000
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560015 31 Desember 2023	667.841.247
Direktorat Pengawasan Produksi Obat,	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560011 31 Desember 2023	110.965.412
Total Belanja					3.410.704.537
Pengembalian ke WHO	WHO	Uang	23LNGDLA	231400600560016 31 Desember 2023	86.465.100
Total					3.497.169.637

Rincian Penggunaan Hibah dapat dilihat pada lampiran 30.

F.2.5 Pinjam pakai gedung kantor dan kendaraan dilingkungan Badan POM

Pinjam Pakai Aset antar Satker di lingkungan BPOM atau antara satker BPOM dengan Kementerian/Badan/Pemerintah daerah lainnya 30 September 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Semarang

Peminjaman kendaraan operasional BBPOM di Semarang pada Tahun 2024 kepada Loka POM di Kabupaten Banyumas berupa 1 Unit Mobil Laboratorium Keliling Type NHR 55 Merk Isuzu dari Balai Besar POM di Semarang, untuk menunjang kegiatan operasional Loka POM Banyumas sesuai BAST Peminjaman No : PL.03.03.9A.01.24.06 Tanggal 12 Januari 2024.

2. Balai Besar POM di Jayapura

Terdapat aset berupa bangunan Gedung kantor permanen NUP 11 yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 63 saat ini sedang dalam penggunaan sementara oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor B-PL.03.06.120.1201.20.12.5195 dan Nomor B/1362/Xii/KA/HK.02/2020/BNNP tanggal 16 Desember 2020 selama 5 Tahun.

3. Balai POM di Tarakan

Laboratorium Balai POM di Tarakan yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat menempati tanah seluas kurang lebih 455 m² yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Tarakan dengan status Pinjam Pakai No. 032/Aset-X/002/2030, KS.01.01.31B.31B5.06.23.41 tanggal 20 Oktober 2024 dengan Berita Acara Serah Terima Obyek Pinjam pakai Nomor : 500.17/2442/BPKPAD/BAST/IX/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dengan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) Tahun hingga tanggal 12 Juni 2025.

4. Balai POM di Sofifi

Balai POM di Sofifi saat ini menempati Tanah dan Gedung Bangunan untuk Kantor Pos POM Ternate dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 137

Perincian Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan Balai POM di Sofifi

Lokasi	Luas Tanah	Nilai	Status Tanah	No. BAST/ Perjanjian Pinjam Pakai	Keterangan
Ternate	500 m2	-	Pinjam Pakai	593/40/2004	Terdapat surat balasan dari Dinas Perumahan dan pemukiman sesuai surat nomor 590/253/DPRKPP/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan bahwa proses hibah tanah masih dalam proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Ternate dan selanjutnya akan ditindak lanjuti proses balik nama Pemerintah Kota Ternate ke Balai POM di Sofifi

Penjelasan/Kronologis terkait Tanah yang bermasalah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan Pemerintah kota Ternate (BPKAD) yang akan menghibahkan tanah tersebut sesuai surat keterangan yang ditandatangani Sekretaris Daerah nomor 593.3/40/2021 tanggal 30 Juni 2021
- Awal Januari 2024 BPKAD Kota Ternate memberikan draf naskah dan berita acara hibah tanah POS POM Ternate,
- Balai POM di Sofifi bersurat ke Sekretaris Utama cq Biro Umum sesuai nomor B-RT.04.11B.01.24.12 tanggal 25 Januari 2024 untuk Permintaan Kaji Ulang Draft Naskah dan Berita Acara Hibah Tanah POS POM Ternate,

- d. Setelah proses bersurat ke Sekertaris Utama, Balai POM di Sofifi mendapat Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi sesuai nomor HK.06.02.22.02.24.329 tanggal 19 Februari 2024.
 - e. Tanggal 8 Maret 2024 berkoordinasi dengan Dinas Perkim Kota Ternate (notulen terlampir) dan tanggal 5 April menyerahkan sertifikat asli tanah ke Dinas Perkim Kota Ternate untuk dibalik nama atas nama Pemerintah Kota Ternate,
 - f. Balai POM di Sofifi bersurat ke Dinas Perkim sesuai nomor surat B-PL.03.01.11B.06.24.37 tanggal 3 Juni 2024 tetapi sampai 30 Juni 2024 belum ada surat balasan.
 - g. Terdapat surat balasan dari Dinas Perkim sesuai surat nomor 590/253/DPRKPP/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang menyatakan bahwa proses hibah tanah masih dalam proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Ternate dan selanjutnya akan ditindak lajuti proses balik nama Pemerintah Kota Ternate ke Balai POM di Sofifi.
 - h. Balai POM di Sofifi bersurat ke Dinas Perkim sesuai nomor surat B-PL.03.01.11B.12.24.68 tanggal 17 Desember 2024 tetapi, surat balasan nomor 590/605/DPRKPP/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Dinas PERKIM masih proses balik nama sertifikat dari an pribadi ke Dinas PERKIM di BPN Kota ternate tetapi masih kekurangan berkas berupa ktp dan kartu keluarga ahli waris sertifikat induk.
5. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
- Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan meminjam Aset berupa Tanah dan Bangunan Kantor dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah, yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m², dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m². Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai sesuai dengan Berita Acara Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Nomor 035/04/BAP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 dengan jangka waktu 2 (dua) Tahun.

6. Balai POM di Jember

Balai POM di Jember meminjam Aset berupa Tanah dan Bangunan kantor yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan Nomor 40 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari seluas +/- 661 m². Status kepemilikan tanah Balai POM di Kabupaten Jember masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sejak Tahun 2021, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Jember untuk Kantor Balai POM di Kabupaten Jember Nomor: 028/2422/35.09.412/2021 tanggal 02 November 2021 untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak 02 November 2021 hingga 02 November 2026.

7. Balai POM di Kediri

Balai POM di Kediri meminjam Aset berupa Tanah dan Bangunan Kantor yang terletak di Jalan PK. Bangsa Kelurahan Banjaran Kediri seluas +/- 995 m². Status kepemilikan tanah Balai POM di Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Balai POM di Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk Tahun 2021, Balai POM di Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 9 Maret 2026 untuk jangka waktu lima Tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

8. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

- a. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang meminjam Aset berupa Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tulang Bawang, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Status kepemilikan gedung dan

bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan diperpanjang sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan Loka POM Kabupaten Tulang Bawang tentang Pinjam Pakai Gedung Kantor Milik Satuan Polisi Pamong Praja untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 028/331/IV/IX/TB/2020 dan Nomor: HM.03.01.135.07.20.200 tanggal 07 Juli 2020 untuk jangka waktu lima Tahun dari 12 september 2020 sampai 12 september 2025 ;

- b. Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang meminjam Kendaraan Dinas/bermotor dari BBPOM di Bandar Lampung dengan Merk Mitsubishi Maven GLS M/T/Maven GLS M/T sesuai dengan BAST Pinjam Pakai BMN Nomor BAST PL.03.06.8A.8A5.08.23.254 : tanggal 25 Januari 2023 dengan waktu pemakaian selama 1 Tahun atau sampai 31 Desember 2023 serta dilakukan perpanjangan “pinjam pakai” sesuai nomor BAST PL.03.06.6A.02.24.34 tanggal 06 Februari 2024 dengan waktu pemakaian sampai dengan 31 Desember 2024.
9. Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk Bangunan Kantor dan Kendaraan Operasional yaitu dengan sewa, berikut perincian terkait sewa Loka POM di Kota Lubuklinggau: Gedung kantor yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Pada tanggal 22 Februari 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau pindah lokasi kantor yang berlokasi di Jl. Yosudarso No. 9C Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau dikarenakan kondisi pada kantor lama sudah tidak dapat menampung operasional kantor.
10. Loka POM di Kabupaten Belitung
Bangunan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Operasional yaitu dengan sewa, berikut rincian terkait sewa Loka POM di Kabupaten Belitung berupa Bangunan kantor Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Belitung disewa selama 1 Tahun dari tanggal 02 Januari s.d 31 Desember 2024 sesuai SPK No: B-PL.02.02.12C.01.24.0001 Tanggal 02 Januari 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp176.000.000,00. yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 28 E-F Pangka lalang, Tanjungpandang.
11. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
Loka POM di Kotawaringin Barat melakukan perjanjian pinjam pakai dengan Balai Besar POM di Palangka Raya berupa 1 Unit Mini bus yang digunakan

sebagai Mobil Laboratorium Keliling berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mobil Laboratorium Keliling Nomor B- RT.03.16A.16A1.01.24.01 tanggal 2 Januari 2024 dengan masa pinjam pakai dari tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 30 Desember 2024.

12. Balai POM di Payakumbuh

Balai POM di Payakumbuh meminjam Tanah seluas 819 m² dan Gedung Kantor seluas 273 m² untuk Balai POM di Payakumbuh dengan status pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, Yang berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani No.18 Labuah Baru, Kota Payakumbuh. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Balai POM Payakumbuh Nomor 03/SP/WK-Pinjampakai/2024 dan PL.03.14B.04.24.06 tanggal 22 April 2024 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Gedung Kantor milik Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan masa pinjam pakai dari 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2028

13. Loka POM di Kota Balikpapan

Kantor Loka POM di Kota Balikpapan saat ini menempati tanah seluas 578 m², dengan 2 bangunan yang masing-masing luas bangunannya seluas 32 m² dan 162 m² yang merupakan eks Sekretariat KORPRI kota Balikpapan milik pemerintah Kota Balikpapan dengan status pinjam pakai Nomor 032//BPKD tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2028;

14. Balai POM di Tarakan

Balai POM di Tarakan saat ini menempati Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Tarakan dengan status pinjam pakai. Gedung Laboratorium Balai POM di Tarakan yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat menempati tanah seluas kurang lebih 455 m² yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Tarakan dengan status Pinjam Pakai dengan luas bangunan dua lantai sebesar 140 m². No.032/ASET-X/002/2023, KS.01.01.31B.31B5.06.23.41 tanggal 20 Oktober 2023 dengan Berita Acara Serah Terima Objek Pinjam pakai Nomor: 500017/2442/BPKPAD/BAST/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) Tahun hingga tanggal 12 Juni 2025.

15. Loka POM di Kabupaten Merauke

- Tanah tempat berdirinya gedung dan bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Merauke beralamat di Jl. Garuda Mopah Lama, Leproseri, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan;
- Penggunaan tanah atas gedung dan bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 151 Tahun 2009 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kantor Pos POM di Kabupaten Merauke Seluas 2.500 m² dan Surat Kepala BPKAD Nomor 593.1/222 tanggal 19 September 2020 Perihal Keterangan Kepengurusan Tanah;
- Berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor PR.05.02.110.09.15.2697 tanggal 2 September 2015 perihal Permohonan Alih Status/Hibah, dibuat Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 032/445 tanggal 15 Februari 2016 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke dengan Kepala Balai Besar POM di Jayapura yang berlaku selama 5 Tahun (hingga 2021);
- Pada Tahun 2017, Kepala Balai Besar POM di Jayapura kembali mengirimkan Surat Nomor PR.05.02.110.01.17.0175 tanggal 16 Januari 2017 perihal Permohonan Alih Status/Hibah yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Merauke. Pada Tahun 2018, Plt. Kepala Balai Besar POM di Jayapura kembali mengirimkan Surat Nomor PR.05.02.120.07.18.2576 tanggal 3 Juli 2018 perihal yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Merauke;
- Pada Tahun 2021, Kepala BPOM RI mengirimkan Surat Nomor B.PL.03.07.1.2.07.21.167 tanggal 6 Juli 2021 perihal Permohonan Hibah Tanah Kantor UPT BPOM Merauke yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Merauke;
- Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke juga mengirimkan Surat Nomor HM.03.01.39B.39B5.11.23.249 tanggal 2 November 2023 perihal Permohonan Hibah Tanah Loka POM di Kabupaten Merauke kepada Bupati Kabupaten Merauke. Terkait surat ini belum ada balasan dari surat tersebut.
- Progres hingga 27 Mei 2024 belum ada informasi Hibah dari Bupati Kabupaten Merauke dan BA Perpanjangan Pinjam Pakai juga masih ada di BPKAD kab. Merauke dan belum Tanda tangan Bupati.

- Terkait Berita Acara Terkait Berita Acara Perpanjangan Pinjam Pakai saat ini masih di BPKAD Kabupaten Merauke menunggu tanda tangan dari Bupati Kabupaten Merauke. Progress terakhir pada tanggal 23 September Loka POM di Kabupaten Merauke sudah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Aset (BPKAD) dan informasi terakhir yang didapat bahwa, BPKAD belum mendapat tanda tangan Bupati di Berita Acara Perpanjangan Pinjam Pakai dan akan tetap di proses ke Bupati, sehingga akan diinformasikan kemudian.
- Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke mengajukan surat permohonan hibah kepada Bupati Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat THM.03.01.30C.09.24.216 tanggal 24 September 2024 dengan tembusan Sekda Kabupaten Merauke, BPKAD Kabupaten Merauke, Biro Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Hingga saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan.

16. Balai POM di Surakarta

Balai POM di Surakarta terletak di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan Surakarta 57143, merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² dengan status pinjam pakai sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/61 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kantor Loka POM di Wilayah Kota Surakarta oleh Balai Besar POM dengan Cara Pinjam Pakai yang berlaku selama lima Tahun berlaku mulai 31 Agustus 2023 – 30 Agustus 2028.

17. Balai Besar POM di Serang

Lahan yang digunakan Balai Besar POM di Serang saat ini berstatus pinjam pakai milik Provinsi Banten cq. Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sejak Tahun 2008. Dasar Hukum Pinjam Pakai saat ini yang digunakan adalah Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Propinsi Banten dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 032/752-BPKAD/2021 (Propinsi Banten) dan nomor PL.03.06.2.25.04.23.140 tanggal 3 maret 2023

jangka waktu pinjam pakai berlaku 2 Tahun terhitung tanggal 01 febuari 2023 s.d 31 januari 2025

F.2.6 Sewa Gedung Kantor

1. Balai POM di Tarakan

Kantor Balai POM yang terletak di Jalan Jendral Sudirman RT 03 No.16 Kota Tarakan menempati gedung sewa milik Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan luas sebesar 436 m² dengan luas tanah 1000 m² yang berlaku hingga 31 Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor PL.02.03.13B.02.24.49 tanggal 01 Februari 2024.

Rumah dinas Pimpinan Balai POM di Tarakan merupakan rumah dinas yang disewa dari perorangan atas nama Frendy Hermawan dengan luas bangunan 9x12m yang terletak di jalan Ladang Dalam RT.10, Kota Tarakan berlaku hingga 31 Desember 2024 sesuai dengan BAST No.PL.02.02.13B.13B1.01.24.02 tanggal 01 Januari 2024

2. Balai POM di Surakarta

Bangunan Kantor Balai POM di Surakarta terletak di Jalan Siwalan No. 59d, Kerten, Laweyan, Surakarta, merupakan bangunan sewa dengan luas tanah 100 m² dan Luas Bangunan 195 m² sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.02.02.18B.18B1.03.24.06 Tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp150.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan sewa Tanggal 1 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

3. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Status bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masih berstatus sewa yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, RT 001/RW 007, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024, periode sewa kantor berlangsung selama 12 (dua belas) bulan yang terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024 yang dibayarkan secara lumsum. Bangunan memiliki ketinggian 2 (dua) lantai dengan luas tanah / luas bangunan yaitu 502 M² / ± 300 M² yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Sewa Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor PL.02.02.7C.01.24.002 tanggal 01 Januari 2024.

4. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat

Gedung dan bangunan Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Jalan Utama Pasir Panjang No.08, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun. Bangunan Loka POM di Kabupaten

Kotawaringin Barat sampai saat ini masih berstatus sewa dengan luas bangunan 210 m².

5. Loka POM di Kota Dumai

Gedung dan Bangunan kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai saat ini masih berstatus sewa dengan pihak ketiga. Luas bangunan yang digunakan untuk kantor tersebut adalah 270 M². Bangunan kantor Loka POM di Kota Dumai terdiri dari bangunan ruko 3 pintu dengan 2 lantai. Masa sewa kantor dari 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

F.2.7 Kesalahan Penggunaan Akun

1. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB

- Balai POM di Kediri muncul dikarenakan kesalahan pencatatan kode aset pada BMN. Kode akun belanja yang digunakan untuk renovasi laboratorium yaitu 536111 sedangkan untuk kode BMN yang di pakai adalah 7010101003 (Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan) seharusnya kode BMN yang digunakan adalah 7010101005 (Aset Tetap Lainnya dalam Pengerjaan). Balai POM di Kediri telah berkonsultasi dengan KPPN Kediri terkait ketidaksesuaian akun tersebut dan penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu melakukan reklasifikasi kode akun BMN. Maka Balai POM di Kediri melakukan reklasifikasi berdasarkan surat keterangan nomor B-PL.03.01.19B.10.24.739 tanggal 21 Oktober 2024.
- Balai Besar POM di Yogyakarta akibat adanya kesalahan pencatatan atas pekerjaan penyambungan panel genset (Vol:1 Paket) senilai Rp74.740.651,00 dan pekerjaan jasa konsultasi konstruksi tenaga ahli pelaksanaan pekerjaan penyambungan panel genset (Vol:1 Paket) senilai Rp14.929.500,00 yang salah mendetailkan kode barang ke akun 532121 yakni penambahan nilai peralatan dan mesin yang seharusnya di detailkan ke akun 533121 yakni penambahan nilai Gedung dan bangunan. Koreksi Kesalahan Kode Barang tersebut Tidak akan Menghilangkan dari To Do List. Kesalahan pencatatan nilai tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi sesuai dengan Surat Keterangan nomor PL.03.02.10A.12.24.048M pada tanggal 02 Desember 2024.
- PPSDM Terdapat Pembelian Kursi Sebanyak 40 Unit dengan Harga satuan Rp845.595,00 transaksi menggunakan kode MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). Namun di dalam rincian barang terdapat barang ekstrakomptabel yang mana tidak dapat dikategorikan sebagai Aset dikarenakan

nilai tersebut di bawah nilai Kapitalisasi. PPSDM telah melakukan upaya perbaikan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan KPPN dan juga Kanwil terkait ketidaksesuaian tersebut, rekomendasi yang diberikan yaitu revisi DIPA yang dilanjutkan dengan koreksi SPM, namun dikarenakan sisa anggaran tidak mencukupi maka tidak dapat dilakukan proses perbaikan. Satker PPSDM POM juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat APK Kementerian Keuangan, namun hasilnya tetap tidak dapat dilakukan perbaikan karena sisa anggaran tidak mencukupi.

- Balai POM di Bogor Terdapat Pembelian belanja modal dengan nilai dibawah kapitalisasi dengan jumlah Rp3.146.300,00 dengan rincian 2 buah kompor listrik, 11 buah thermohigrometer digital dan 2 buah blender transaksi menggunakan kode MAK 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin). Namun di dalam rincian barang terdapat barang ekstrakomptabel yang mana tidak dapat dikategorikan sebagai Aset dikarenakan nilai tersebut di bawah nilai Kapitalisasi . Balai POM bogor berupaya melakukan Revisi Atas Ketidaksesuaian Kode Akun tersebut ditolak karena merupakan output Program Nasional dan sudah melewati periode Revisi DJA
- Loka POM Kabupaten Ende terdapat kesalahan akun untuk belanja modal renovasi gedung, yang mana item pengelolaan kegiatan menggunakan akun 536111 (belanja modal lainnya) yang seharusnya menggunakan akun 533111. Untuk itu telah dilakukan tindak lanjut dengan konsultasi dengan Eselon 1, KPPN, dan Kanwil setempat namun belum dapat diperbaiki secara sistem dikarenakan proses perbaikan dari internal kanwil sudah ditutup.
- Loka POM di Kabupaten Banggai, Hal ini berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.999.000 sesuai BAST No. PL.02.01.25C.09.24.137 tanggal 31 Desember 2024 berupa pengadaan TC Color Guide yang didetailkan dengan kode barang Aset Tetap Lainnya. Atas ketidaksesuaian ini telah dilakukan reklasifikasi ke kode barang yang seharusnya, yaitu dari yang semula Monografi dengan kode barang 6010101001 direklasifikasi menjadi Alat Laboratorium Umum Lainnya dengan kode barang 3080111999.

F.2.8 Barang Bukti

Dalam melaksanakan fungsinya, BPOM melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHAP, barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barang sitaan/ bukti dalam perkara tindak pidana obat dan makanan yang masih berada di BPOM seluruh Indonesia 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 138

Perincian Barang Bukti 31 Desember 2024

NO	proses	KLASIFIKASI								Total
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN	
1	Proses SPDP/SPDP	647.396	451.741	1.076	956	44.355	198.163	55	985,0	1.344.727
2	Tahap 1	36.141	2.626	0	1.842	0	30.148	12	7,0	70.776
3	P-18/P-19	21.015	15.232	4.015	67	1.285	449.090	37	317,0	491.058
4	P-20				0					0
5	P-21	478.775	143.641	9	4.096	2.732	37.205	91	1.813,0	668.362
6	Tahap 2	38.859	55.615	7.583	40	8.855	14.136	21	71,5	125.180,5
7	Proses Persidangan	1.564	36.611	0	1	0	16.349	6	447,0	54.978
8	SP3	27.814	56.040	0	1.633	1	612.917	0	2,0	698.407
9	Non Pro Justicia	19.374	1.024	0	0	0	182	0	46,0	20.626
TOTAL (pcs)		1.270.938	762.530	12.683	8.635	57.228	1.358.190	222	3.688,5	3.474.114,5

Perincian barang bukti per satker pada Lampiran 31.

Barang Bukti di atas termasuk barang bukti Uang Sejumlah Rp.254.988.965,71 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu Rupia) Pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penindakan yang disimpan di rekening rekening dana penampungan Bank Mandiri Nomor 1230063243705 RPL 175 DEP IV BID PENIDKN BPOM untuk TPPU dan rekening tersebut telah diakui sebagai *treasury national pooling* dan disetujui oleh KPPN tanggal 17 april 2024.

F.2.9 Hasil Inventarisasi Aset

Masih terdapat hasil inventarisasi Aset yang tidak ditemukan yang belum selesai ditindaklanjuti pada Satuan Kerja:

1. Sekretariat Utama

Berdasarkan hasil inventarisasi aset Peralatan dan Mesin, pada Settama sesuai dengan Nota Dinas Reviu APIP Nomor PL.03.01.7.71.05.22.01 tanggal 11 Mei 2022 perihal Reviu APIP terhadap inventarisasi barang yang tidak ditemukan pada Settama dengan sisa barang yang belum ditemukan berupa 2 unit kendaraan berupa 1 unit Sepeda Motor sebesar Rp14.900.000,00 dan 1 unit mobil wagon station sebesar Rp96.760.000,00. Progres terakhir Satker Settama telah menelusuri kembali secara fisik maupun secara administratif. Hasil penelusuran tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Barang Milik Negara Nomor PL.03.02.25.2513.12.22.828 tanggal 7 Desember 2022 dengan hasil belum ditemukan dan diindikasikan mengarah kepada kesalahan pencatatan pada masa lampau karena tidak ada data ataupun dokumen yang mengarah bahwa kendaraan tersebut pernah ada secara fisik di Satker Settama.

Satker Settama telah melakukan koordinasi dengan bersurat kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Surat: BPL.03.01.25.251.07.23.251 tanggal 17 Juli 2023, dan telah mendapatkan surat balasan Nomor 2485/UD.0201 tanggal 23 Agustus 2023 dengan hasil bahwa kendaraan tersebut tidak teregister sebagai objek pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 unit Sepeda Motor sebesar Rp14.900.000,00 dan 1 unit Station Wagon sebesar Rp96.760.000,00.

Pada tanggal 31 Agustus 2023 Satker Settama bernodin ke Plt. Inspektur I perihal Permohonan Reviu Kendaraan Tidak Ditemukan sesuai Nota Dinas Nomor PL.03.01.25.251.23.637. dan mengajukan surat permohonan reviu kembali sesuai Surat Nomor PL.03.01.25.251.12.23.142 tanggal 7 Desember 2023 tentang permohonan Reviu Kendaraan Tidak Ditemukan telah mendapat nodin balasan dengan Nomor PL.03.01.7.71.01.24.08 pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana dijelaskan secara rinci pada Lampiran 11 dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Melakukan penatausahaan terhadap 1 unit station wagon perolehan Tahun 1986 dengan kode barang 3020101003, 1 unit sepeda motor perolehan Tahun 2005 dengan kode barang 3020104001, dan 1 unit micro bus perolehan Tahun 2005 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Menyampaikan data dukung bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu yang telah disampaikan oleh Inspektorat Utama sebelumnya untuk minibus dengan kode barang 3.02.01.02.003 NUP 8, antara lain:
- Hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Penelusuran Aset Tidak Ditemukan pada satker Settama yang dilengkapi dengan kronologis ditemukannya fisik Minibus tersebut pada Balai Besar POM di Bandar Lampung, dan analisa terkait perbedaan merek/tipe dan Tahun pembuatan antara fisik minibus dan pencatatan pada aplikasi.
 - Penjelasan atas perbedaan kondisi antara BAST BMN dalam kondisi baik dengan penjelasan dalam surat KPB Settama kepada Inspektorat Utama yang menyatakan bahwa BMN dimaksud dalam kondisi rusak berat, dilengkapi dengan data dukung yang memadai atas kondisi fisik BMN tersebut.
- c) Sekretariat Utama telah melakukan permohonan penghapusan BMN dikarenakan sebab-sebab lain berdasarkan poin 2 diatas sesuai dengan surat nomor B-PL.03.09.25.02.24.106 tanggal 12 Februari 2024 ke KPKNL Jakarta VI.
- d) Berdasarkan surat KPKNL Jakarta IV nomor S-740/KNL.0704/2024 tanggal 22 April 2024 bahwa BMN secara fisik memang tidak ditemukan, karena semestinya tidak terdapat BMN dimaksud/semestinya sudah tidak dicatat sebagai akibat aset sudah dihibahkan, dialihstatuskan, atau dihapuskan tetapi masih tercatat, maka perlu dilakukan penghapusan atas BMN tidak ditemukan tersebut melalui mekanisme Koreksi Pencatatan.
- e) Berdasarkan nota dinas Inspektorat Utama nomor PL.03.11.7.71.03.24.80 tanggal 19 Maret 2024 Minibus dapat diusulkan penghapusan dengan adanya surat pernyataan KPB yang menyatakan kesalahan pencatatan dan dalam rangka pemindahtanganan BMN pada Sekretariat Utama bahwa Minibus tersebut bukan objek pajak kendaraan di DKI Jakarta.
- f) Berdasarkan poin 5 minibus NUP 8 telah dilakukan transfer ke BBPOM Bandar Lampung berdasarkan BAST nomor PL.03.07.25.2513.12.21.166 tanggal 10 Desember 2021. Sebagai tindak lanjut penghapusan dilakukan BBPOM Bandar Lampung sedang proses lelang oleh BBPOM Bandar Lampung.
- g) Telah melakukan pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa 1 unit Station Wagon NUP 8 dan 1 unit Sepeda Motor NUP 11 kepada KPKNL

Jakarta IV dengan nomor surat B-PL.03.09.25.02.24.106 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Penghapusan BMN dikarenakan Sebab-sebab Lain;

- h) KPKNL telah memberikan balasan terkait poin 7 sesuai dengan surat nomor S-740/KNL.07.04/2024 tanggal 22 April 2024 Hal Permohonan Penghapusan BMN dikarenakan Sebab-sebab Lain menurut poin 5a bahwa Dalam hal BMN secara fisik memang tidak ditemukan, karena semestinya tidak terdapat BMN dimaksud/semestinya sudah tidak dicatat sebagai akibat aset sudah dihibahkan, dialihstatuskan, atau dihapuskan tetapi masih tercatat, maka perlu dilakukan penghapusan atas BMN tidak ditemukan tersebut melalui mekanisme Koreksi Pencatatan.

2. Balai Besar POM di Banjarmasin

Masih terdapat hasil inventarisasi aset peralatan dan mesin yang tidak ditemukan yang belum selesai ditindaklanjuti pada Balai Besar POM di Banjarmasin dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Terdapat 17 BMN tidak ditemukan berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi tim BMN Banjarmasin dan Reviu APIP Nomor B-PL.03.02.7.72.12.22.393 tanggal 19 Desember 2022 dengan perincian berikut.
 - 1) 7 (tujuh) BMN merupakan Tahun perolehan relatif lama (2004 s.d 2009) yang tidak mampu telusur dengan nilai perolehan sebesar Rp22.308.000,00. Seluruh barang tersebut nilai bukunya Rp0,00;
 - 2) 10 (sepuluh) BMN merupakan Tahun perolehan dari Tahun 2011 s.d 2018 dengan nilai perolehan sebesar Rp32.634.200,00.
- b) Balai Besar POM di Banjarmasin menindaklanjuti poin a) dengan Mengajukan surat permohonan persetujuan penghapusan BMN tidak ditemukan (penghapusan dengan sebab-sebab lain) terhadap 7 barang dengan surat permohonan Nomor B- PL.03.09.22A.22A5.12.1044 tanggal 31 Desember 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp22.308.000,00. Permohonan persetujuan penghapusan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Sestama sesuai Surat Nomor B- PL.03.09.2.25.03.23.198 tanggal 9 Maret 2023. Penghapusan barang tidak ditemukan dengan sebab-sebab lain berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor HK.02.02.22A.22A5.04.23.120 tanggal 10 April 2023;
- c) Untuk poin a) Balai Besar POM di Banjarmasin menindaklanjuti dengan bersurat kepada Sestama BPOM Nomor B-PL.03.02.22A.22A5.12.22.992

tanggal 22 Desember 2022 dan bersurat ke Inspektur Utama BPOM Nomor B.PL.03.02.22A.22A5.04.23.292 tanggal 10 April 2023 (Tim TGR) untuk penyelesaian Kerugian Negara dengan nilai perolehan sebesar Rp32.634.200,00 dan nilai buku sebesar Rp804.920,00; dan

- d) Balai Besar POM di Banjarmasin menyampaikan kembali perkembangan tindak lanjut Barang Tidak Ditemukan ke Sekretaris Utama dan Plt. Inspektur Utama dengan surat Nomor B-PL.03.02.22A.22A5.12.23.1269 tanggal 20 Desember 2023 hal Laporan Tindak Lanjut Barang Tidak Ditemukan Balai Besar POM di Banjarmasin.

3. Balai POM di Ambon

a. Tanah Rumah Dinas

Tanah seluas 300 m² yang terletak di Jl. Dewi Sartika Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang di dalamnya berdiri 1 buah bangunan rumah dinas atas nama Badan POM belum bersertifikat. Status kepemilikan tanah atas nama Isak Soplanit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 169/PDT.G/2011/PN.AB tanggal 17 September 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 17/PDT/2013/PT.MAL tanggal 4 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3121/k/PDT/2013 tanggal 29 September 2014.

Kemudian terkait tanah tersebut, terdapat perkara gugatan lain dari pihak ketiga (Tan Kho Hang Hoat) kepada ahli waris Izak Soplanit (Alm) dan dimenangkan oleh pihak ketiga dengan putusan nomor: 187/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 10 Maret 2023 (Tingkat Pertama) dan putusan tingkat banding (Masih menunggu salinan putusan). Perkembangan terbaru putusan dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Kasasi.

Pada tanggal 30 Agustus 2023, BPOM Ambon telah melakukan koordinasi lanjutan dengan KPKNL Ambon dan PN Ambon terkait status tanah rumah negara dan hasil koordinasi telah dilaporkan pada Sekretaris utama melalui surat Nomor: B-PL.03.02.29A.29A5.08.23.847 perihal Laporan Koordinasi Balai POM di Ambon dengan Instansi terkait dalam rangka Penyelesaian sengketa kepemilikan aset tetap tanah dan bangunan. BPOM Ambon juga telah bersurat ke Inspektorat Utama Nomor: B-PL.03.02.29A.29A5.09.23.940 tanggal 15 September 2023 perihal Permintaan Reviu Aset BMN Rumah Negara Balai POM di Ambon.

Balai POM Ambon telah menerima hasil reviu aset BMN Rumah Negara dari Inspektorat Utama nomor: B-PL.01.01.7.02.24.54 tanggal 15 Februari 2024. Koordinasi telah dilakukan ke KPKNL Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, dan Dinas Kesehatan Prov Maluku dalam rangka tindak lanjut rekomendasi permasalahan tanah rumah negara. Balai POM Ambon telah bersurat kepada Sekretaris daerah Maluku nomor: B-PL.03.01.7B.05.24.614 tanggal 31 Mei 2024 perihal permintaan data pencatatan aset berupa tanah.

b. Tanah Bangunan Kantor

Tanah seluas 4.450 m² yang terletak di Jl. Dr. Kayadoe SK.20 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh Balai POM di Ambon sesuai sertifikat nomor buku tanah 45 atas nama Pemerintah RI cq. Badan POM RI, didalam sertifikat tanah tersebut telah terbit 3 buah sertifikat baru (hak milik) atas nama pribadi. Balai POM di Ambon telah melakukan usaha-usaha dalam rangka pengamanan Aset BMN tersebut. BPOM Ambon juga telah melakukan komunikasi dengan Kemenkes, Kementerian ATR/ BPN, Kementerian PUPR Pusat, Direktorat BMN Kemenkeu, dan PUPR bidang Cipta Karya Provinsi Maluku. Pada tanggal 12 April 2023 Badan POM RI menerima surat dari DJKN Kementerian Keuangan nomor S-48/KN.2/2023 perihal pembatalan terhadap 3 SHM diatas SHP BPOM Kota Ambon, dan Balai POM Ambon pada tanggal 08 Juli 2023 telah berkoordinasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Ambon terkait tindak lanjut surat tersebut serta telah mengirimkan “Laporan Koordinasi Balai POM di Ambon terkait Tanah Kantor ke KPKNL” Ke Biro Umum Badan POM RI berdasarkan surat nomor : B-PL.03.01.29A.29A5.07.22.750 tanggal 12 Juli 2023. Saat ini Balai POM di Ambon berkoordinasi dengan Biro umum dan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI terkait tindak lanjut pengajuan gugatan Terhadap pemilik 3 SHM.

F.2.10 Transaksi Resiprokal

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Transaksi resiprokal di BPOM berupa saker *intraco*, nilai rupiah, skema pembayaran (uang persediaan/pembayaran langsung)/ skema penyetoran (Setor ke kas negara/potong SPM), serta penjelasan umum atas pekerjaan pada Lampiran 32.

F.2.11 Capaian Output per Fungsi APBN Tahun 2024

Pelaksanaan APBN pada BPOM dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi yaitu Kesehatan (07). Capaian output utama per 31 Desember 2024 per fungsi APBN pada BPOM pada Lampiran 33.

F.2.12 Capaian Program Prioritas Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP pada **BPOM** terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada **BPOM** sesuai Nota Kesepakatan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 Nomor NK-063/COPN/2025 tanggal 17 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

a. **PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp9.295.905.000,00** dan realisasi sebesar **Rp8.491.367.530,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 139

Perincian PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

(dalam ((Dalam Rupiah)

Program/Kegiatan/Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	5.558.304.000	5.045.742.522	90,78	UMKM	1.208	1.284	106,29
Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	3.737.601.000	3.445.625.008	92,19	Orang	245	252	102,86
Total	9.295.905.000	8.491.367.530	91,35				

b. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pelaksanaannya diantaranya melalui **33 (tiga puluh tiga) Program** prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp627.944.850.000,00** dan realisasi sebesar **Rp564.291.651.068,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 140
Perincian PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing

Program/Kegiatan/Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar	21.703.819.000	21.187.363.125	97,62	Orang	1.000	1.004	100,40
Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi	25.927.362.000	23.491.193.993	90,60	Sistem Informasi	1	1	100,00
Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	31.840.432.000	28.347.830.460	89,03	Perkara	261	276	105,75
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22.688.412.000	22.055.171.306	97,21	Sampel	22.815	23.339	102,30
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	39.693.130.000	38.669.229.340	97,42	Sampel	58.678	59.060	100,65
Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	1.801.291.000	1.656.587.154	91,97	Sampel	3.005	3.089	102,80
Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	30.172.065.000	26.218.501.141	86,90	Sekolah	3.424	3.478	101,58
Desa Pangan Aman	42.027.694.000	36.713.511.984	87,36	Desa	1.106	1.117	100,99
Pasar aman dari bahan berbahaya	10.735.146.000	9.644.065.066	89,84	Pasar	453	472	104,19
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8.074.241.000	7.422.325.024	91,93	Sarana	5.996	6.380	106,40
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	50.759.630.000	42.978.152.752	84,67	Sarana	34.056	36.052	105,86
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	89.665.613.000	85.420.468.173	95,27	Lembaga	73	73	100,00
Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	149.465.124.000	123.906.410.524	82,90	Paket	73	73	100,00
Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	6.307.343.000	5.787.276.292	91,75	Industri	183	183	100,00
Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar	4.109.831.000	3.568.317.801	86,82	Prov/Kab/Kota	350	350	100,00
Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi	1.677.378.000	1.463.488.380	87,25	Laporan	3	3	100,00
Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan	5.874.961.000	5.430.332.539	92,43	Keputusan	240	258	107,50
Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	1.122.354.000	1.056.452.242	94,13	Dokumen	935	1.106	118,29

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Program/Kegiatan/Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	12.605.341.000	12.053.205.341	95,62	Kebijakan	7	7	100,00
Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.074.858.000	1.012.504.081	94,20	Dokumen	22.500	22.500	100,00
Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan	1.606.045.000	1.478.670.921	92,07	Produk	60.800	60.800	100,00
Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	6.609.554.000	6.444.148.136	97,50	Perkara	7	8	114,29
Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	2.905.580.000	2.399.870.669	82,60	laporan	20	22	110,00
Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	2.176.811.000	2.141.833.659	98,39	Lembaga	14	15	107,14
Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	2.155.589.000	2.042.937.275	94,77	Lembaga	1	1	100,00
Laboratorium BB/BPOM yang meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	2.952.347.000	2.567.625.963	86,97	Lembaga	31	31	100,00
Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	6.499.676.000	6.243.812.697	96,06	Prov/Kab/Kota	380	380	100,00
Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar	5.390.473.000	4.958.283.851	91,98	Prov/Kab/Kota	350	363	103,71
Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	3.026.119.000	2.933.234.992	96,93	Lembaga	215	236	109,77
Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	8.279.920.000	7.926.597.497	95,73	Keputusan	62.000	70.583	113,84
Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	11.215.579.000	10.665.200.410	95,09	Keputusan	8.100	14.207	175,40
Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	10.897.024.000	10.003.633.005	91,80	Keputusan	73.154	132.584	181,24
Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.904.108.000	6.403.423.275	92,75	Orang	169	169	100,00
Total	627.944.850.000	564.291.659.068	89,86				

c. **PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp952.177.000,00** dan realisasi sebesar **Rp952.071.402,00** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 141

*Perincian PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
dan Transformasi Pelayanan Publik*

(Dalam Rupiah)

Program/Kegiatan/Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	952.177.000	952.071.402	99,99	Negara	2,00	2,00	100,00
Total	952.177.000	952.071.402	99,99				

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATB	: Aset Tak Berwujud
BA-BUN	: Bagian Anggaran – Bendahara Umum Negara
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BI	: Bank Indonesia
BMN	: Barang Milik Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPN	: Badan Pertanahan Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CAPA	: Corrective Action and Preventive Action
CASN	: Calon Aparatur Sipil Negara
CDOB	: Cara Distribusi Obat yang Baik
CPBBAOB	: Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
CPOB	: Cara Pembuatan Obat yang Baik
CPOTB	: Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
CPPOB	: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GS	: Gas Chromatograph
HPLC	: High Performance Liquid Chromatography
HPP	: Harga Pokok Produksi
HS	: Higiene dan Sanitasi
KDP	: Kontruksi Dalam Pengerjaan
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KOMNAS	: Komite Nasional
KPB	: Kuasa Pengguna Barang
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUN	: Kas Umum Negara
LHIP	: Laporan Hasil Inventasasi dan Penilaian
LO	: Laporan Operasional
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
NTB	: Nomor Transaksi Bank
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara

NUP	: Nomor Urut Pendaftaran
ONAPPZA	: Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
ONPP	: Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
PCR	: Polymerase Chain Reaction
PN	: Prioritas Nasional
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POM	: Pengawas Obat dan Makanan
POKJA	: Kelompok Kerja
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPUB	: Persetujuan Protokol Uji Bioekivalensi
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
RPATA	: Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RUTR	: Rencana Umum Tata Ruang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKE	: Surat Keterangan Ekspor
SKI	: Surat Keterangan Impor
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP2HL	: Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SP4HL	: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
TP/TGR	: Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP	: Uang Persediaan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis



BADAN POM

LAMPIRAN - LAMPIRAN

REKAPITULASI PENDAPATAN PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	94.051.000,00	94.051.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan risalah lelang nomor RL-33/07.04/2024-01 tanggal 07 Februari 2024 dengan NTPN 0919E1JNFUPKCC6M tanggal 12 Februari 2024
2	Deputi II	62.611.000,00	62.611.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan risalah lelang nomor 431/07.04/2024-01 tanggal 01 Oktober 2024 dengan NTPN C3F776U8EUVG74DI tanggal 2 Oktober 2024
3	PPSDM	18.084.000,00	18.084.000,00	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin berupa 6 buah P.C Unit, 2 buah Laptop, 2 Buah Printer, 1 buah Mobile Modem sesuai Risalah Lelang Nomor 03/07.04/2024-01 tanggal 5 Januari 2024 dan NTPN 35F7648VVEDJKABK tanggal 5 Januari 2024
4	Balai Besar POM di Bandung	6.456.600,00	6.456.600,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin ini sesuai Risalah Lelang no 1488/08.01/2024-01 tanggal 2 Juli 2024 dengan NTPN No 7697261QVA47H7BD tanggal 04 Juli 2024
5	Balai Besar POM di Semarang	78.853.000,00	6.353.000,00	Pendapatan lelang 1 (satu) paket inventaris kantor kondisi rusak berat sesuai risalah lelang Nomor 1500/09.01/2024-01 Tanggal 02 Oktober 2024 senilai Rp6.353.000,00 dengan NTPN No. 542D655DF9QSU165 Tanggal 8 Oktober 2024.
			72.500.000,00	Pendapatan Lelang 1(satu) Unit Kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova, sesuai Risalah Lelang No. 1631/09.01/2024-01 Tanggal 23 Oktober 2024 senilai Rp72.500.000,00 dengan NTPN No. 79E5248VVF8UUVVHI Tanggal 23 Oktober 2024.
6	Balai Besar POM di Banda Aceh	13.825.600,00	8.370.000,00	Pendapatan dari lelang atas 1 paket peralatan dan mesin dengan Risalah Lelang Nomor 315/01.01/2024-01 tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor NTPN: C9E073CIFKAAGD3Q tanggal 19 Juni 2024
			5.455.600,00	Pendapatan penjualan peralatan dan mesin berupa lelang atas 1 paket Inventaris Kantor berupa alat Laboratorium dengan Risalah Lelang Nomor 706/01.01/2024-01 tanggal 5 Desember 2024 dan Nomor NTPN: 0D61448VVFekkJCC tanggal 13 Desember 2024
7	Balai Besar POM di Medan	6.105.655,00	854.000,00	Pendapatan dari Lelang peralatan dan mesin sesuai risalah lelang No. 1171/02.01/2024-01 tanggal 24 Juli 2024 dan Nomor NTPN: 31F3F48VVF07S9LQ tanggal 30 Juli 2024
			5.251.655,00	Pendapatan dari lelang peralatan dan mesin dengan risalah lelang No. 1172/02.01/2024-01 tanggal 24 Juli 2024 dan Nomor NTPN: C42F87QLUP9PGABN tanggal 30 Juli 2024
8	Balai Besar POM di Pekanbaru	51.436.000,00	51.436.000,00	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa penjualan dari lelang mobil kijang grand long KF 82 dengan nomor polisi BM-1709-AP dengan risalah lelang nomor SP-947/KNL.0303/2024 tanggal 22 Nopember 2024, NTPN nomor 8895F2G4VQ6NHV4M tanggal 8 Nopember 2024.
9	Balai Besar POM di Palembang	7.362.000,00	7.362.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) paket inventaris kantor alat laboratorium dalam kondisi rusak berat nomor risalah lelang: 1163/04.02/2024-01 tanggal 11 Desember 2024 dan nomor NTPN: 3C36C6U8EV5S3S08
10	Balai Besar POM di Pontianak	5.271.100,00	509.100,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp509.100,00 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dengan risalah lelang nomor 1103.11.01/2024-01 tanggal 6 desember 2024 dengan NTPN BB9AA48VVEID9M8 tanggal 11 Desember 2024
			4.762.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.762.000,00 merupakan pendapatan dari penjualan peralatan dengan risalah lelang nomor 1103.11.01/2024-01 tanggal 6 desember 2024 dengan NTPN 1E19C0NA0550PD11 tanggal 11 Desember 2024
11	Balai Besar POM di Manado	2.522.000,00	2.522.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.522.000,00 berupa lelang peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat, dengan NTPN No.96BB9IJNFV11GKO1 tanggal 31 Oktober 2024 dengan Risalah Lelang No.615/16.01/2024.01 tanggal 30 Oktober 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
12	Balai Besar POM di Makassar	1.225.000,00	1.225.000,00	Pendapatan dari Penjualan Mesin dan Peralatan sebesar Rp1.225.000,00 berupa hasil bersih lelang atas Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dengan Risalah Lelang No. RL-2063/15.02/2024-01 tanggal 09 Desember 2024
13	Balai Besar POM di Denpasar	18.883.000,00	8.643.000,00	- Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin berupa 1 Paket Barang Inventaris Kantor senilai Rp8.643.000,00 dengan Risalah Lelang nomor: 214/14.01/2024-01 tanggal 25 Maret 2024 dan Nomor NTPN: DD3410NA04AKJSBG tanggal 26 Maret 2024
			840.000,00	- Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin berupa 2 Unit UPS dan Video Conference senilai Rp840.000,00 dengan Risalah Lelang nomor: 132/14.01/2024-01 tanggal 1 Maret 2024 dan Nomor NTPN: 69B827QLUOT3FTAC tanggal 5 Maret 2024
			5.400.000,00	- Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin terdiri dari 3 Unit Motor senilai Rp5.400.000,00 dengan Risalah Lelang nomor: 205/14.01/2024-01 tanggal 21 Maret 2024 dan Nomor NTPN: 2797061QV3OQRPFR tanggal 22 Maret 2024
			4.000.000,00	- Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin senilai Rp4.000.000,00 dengan Risalah Lelang nomor: 1175/14.01/2024-01 tanggal 15 November 2024 berupa 1 paket peralatan dan mesin (Alat Laboratorium).
14	Balai Besar POM di Mataram	5.953.000,00	5.953.000,00	Pendapatan dari Pelepasan Aset Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Sebesar 5.953.000 berdasarkan risalah lelang nomor 678/14.03/2024-01 tanggal 29 November 2024.
15	Balai Besar POM di Jayapura	7.553.000,00	7.241.000,00	Pendapatan dari lelang inventaris kantor berdasarkan risalah lelang nomor 416/17.02/2024-01 tanggal 02 September 2024 sesuai NTPN 5508C61QV4AC54GL tanggal 10 September 2024
			312.000,00	Pendapatan dari lelang bongkaran renovasi kantor berdasarkan risalah lelang nomor 492/17.02/2024-01 tanggal 29 Oktober 2024 sesuai NTPN 010D32G4VQ4DTDQD tanggal 31 Oktober 2024
16	Balai POM di Jambi	46.500.000,00	46.500.000,00	Pendapatan penjualan peralatan dan mesin dari pemindaan BMN berupa kendaraan operasional roda empat sesuai dengan risalah lelang nomor 1423/04.01/2024-01 tanggal 28 November 2024 Sesuai No NTPN : D622C7QLUPLL8PAQ Tanggal 29 -11-2024
17	Balai POM di Palu	110.754.000,00	103.780.000,00	Pendapatan atas penjualan 2 unit peralatan dan mesin yang memiliki kondisi rusak berat sesuai dengan risalah lelang nomor 167 Balai POM di Palu tgl 8 Mei 2024, NTPN 8454961QV3UHB5VT tanggal 13 Mei 2024
			6.974.000,00	Pendapatan atas penjualan 1 paket inventaris kantor dengan kondisi rusak berat sesuai dengan risalah lelang nomor 526/16.03/2024-01 tgl 6 November 2024, NTPN FC48561QV4G6UFG8 tgl 6 November 2024
18	Balai POM di Kendari	23.682.000,00	23.682.000,00	Pendapatan dari penjualan kendaraan roda 4 DT 1126 sesuai risalah lelang No : 341/15.05/2024/01Tanggal 25 Juli 2024 dengan No. NTPN :172E07QLUP9PMVMC tanggal 31 Juli 2024
19	Balai POM di Bengkulu	2.090.000,00	2.090.000,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa 1 Paket inventaris kantor alat laboratorium BPOM Bengkulu sesuai salinan Risalah Lelang Nomor 289/05.01/2024-01 NTPN 5AFC61JNFV8R26A2 tanggal 22 Juli 2024
20	Balai POM di Mamuju	4.643.000,00	4.643.000,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa peralatan dan mesin (AC Split, Scanner, Printer, Kursi dan Water Distillation Purifier) dengan kondisi rusak berat dan apa adanya sesuai salinan risalah lelang Nomor 320/15.01/2024-01 tanggal 04 November 2024
21	Loka POM di Kabupaten Banyumas	793.000,00	793.000,00	Pendapatan dari lelang atas Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 973/09.06/2024-01 Tanggal 18 September 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dan telah disetorkan ke Kas Negara sesuai Kode NTP : D35AE48VVF5S1PUP Pada Tanggal 19 September 2024
22	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	837.000,00	837.000,00	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dengan kondisi rusak berat berupa 1 (satu) Paket Inventaris Kantor sesuai dengan NTPN: 444C13CIFKMAODDR tanggal 15 Oktober 2024.

REKAPITULASI PENDAPATAN PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
23	Loka POM di Kabupaten Tabalong	5.458.800,00	5.458.800,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa Lelang 1 Paket Barang Milik Negara berupa barang inventaris sesuai Risalah Lelang Nomor : 968/12.03/2024-01 tanggal 23 Oktober 2024 dengan no NTPN 8A5983CIFKMJM39D tgl 24 Oktober 2024
24	Loka POM di Kota Balikpapan	1.302.000,00	1.302.000,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa Lelang 1 Paket barang terdiri dari 6 unit peralatan dan mesin berupa kursi besi/metal, notebook dan external hardisk sesuai Risalah Lelang Nomor : 694/13.01/2024-01 tanggal 5 November 2024 dengan no NTPN CBE861JNFVKDBIQG tgl 11 November 2024
25	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	545.000,00	545.000,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa 1 paket Peralatan dan Mesin berupa inventaris kantor dengan nilai Rp 56.233.550 yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 762/16.01/2024-01 tanggal 25 November 2024 dengan No NTPN B65272G4VQ77FJ5R Tanggal 25 November 2024
26	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	700.000,00	700.000,00	- Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin berupa 1 Paket Peralatan, Mesin dan Inventaris Kantor dengan berbagai merek/jenis kondisi rusak berat senilai Rp700.000,00 dengan risalah lelang nomor 427/01.01/2024-01 tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor NTPN: 6C1EF61QV473TARM tanggal 01 Agustus 2024
TOTAL		577.496.755,00	577.496.755,00	

REKAPITULASI PENDAPATAN PEMINDAHTANGANAN BMN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	43.913.000,00	43.913.000,00	Pendapatan dari hasil lelang 1 paket inventaris kantor dan sisa bongkaran kondisi scrap (Notebook, kursi, meja kayu, pavling blok, dan besi hollow). Risalah lelang Nomor: 408/07.04/2024-01 tanggal 19 September 2024dengan NTPN F345648VVF5S5AEI tanggal 19 September 2024
2	Inspektorat Utama	32.662.000,00	32.662.000,00	Pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari Lelang BMN sesuai Risalah Lelang Nomor 347/07.04/2024-01 Tanggal 15 Agustus 2024 dan sesuai NTPN B39F01JNFVBPM8SS tanggal 22 Agustus 2024
3	Deputi I	29.772.000,00	29.772.000,00	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (inventaris kantor)sesuai dengan NTPN 38A401JNFUMHJNIF tanggal 8 Januari 2024 dengan risalah lelang nomor 01/07.04/2024.01 tanggal 3 Januari 2024
4	Deputi III	37.508.500,00	13.666.500,00	Pendapatan atas penjualan lelang 1 Paket Inventaris Kantor berdasarkan risalah lelang Nomor: 061/07.04/2024-01 tanggal 5 Maret 2024 diterima dengan NTPN DEE9148VVEJHTM97 pada tanggal 5 Maret 2024
			23.842.000,00	Pendapatan atas penjualan lelang 1 Paket Inventaris Kantor berdasarkan risalah lelang Nomor:545/07.04/2024-01 tanggal 04 Desember 2024 diterima dengan NTPN9DB7155DFA0VSV0H tanggal 04 Desember 2024
5	PPPOMN	199.311.500,00	86.475.000,00	1 Paket Scrap Alat Laboratorium dengan kondisi rusak berat dengan risalah lelang nomor 496/07.04/2024-01 NTPN No C3DA861QV4GG0AES NTB No 417769253167
			24.936.500,00	1 Paket Inventaris Kantor dan Alat Laboratorium dengan kondisi rusak berat dengan risalah lelang nomor 500/07.04/2024-01 NTPN no E741948VVFBC83G NTB no 445701461935
			87.900.000,00	1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Kuda dan 1 unit kendaraan roda empat merk Suzuki APV dengan risalah lelang nomor 549/07.04/2024-01 NTPN no 3E86F61QV4J8V3LV NTB no 398348012781
6	PUSAKOM	17.109.000,00	17.109.000,00	Pendapatan berupa penjualan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya sesuai risalah lelang nomor 395/07.04/2024-01 tanggal 12 September 2024 sesuai NTPN nomor CF6AE55DF9O1UIP9 tanggal 12 September 2024
7	Balai Besar POM di Jakarta	6.951.500,00	5.010.000,00	Pendapatan berupa lelang kendaraan bermotor dengan Risalah Lelang Nomor 227/07.04/2024-01 tanggal 12 Juni 2024 dan NTPN Nomor 78A772GAVPNV71KA tanggal 13 Juni 2024.
			1.941.500,00	Pendapatan berupa lelang bongkaran pagar dengan Risalah Lelang Nomor 476/07.04/2024-01 tanggal 25 Oktober 2024 dan NTPN Nomor B003061QV4DS73NE tanggal 28 Oktober 2024.
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	14.139.000,00	14.139.000,00	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp14.139.000,00 sesuai NTPN 2A4947QLUPIEC577 Tanggal 21 Oktober 2024 Atas Lelang barang 1 paket Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 836/09.05/2024-01 Tanggal 18 Oktober 2024
9	Balai Besar POM di Surabaya	2.759.000,00	2.759.000,00	Pendapatan Aset berasal dari nilai penawaran pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp2.759.000,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1865/10.01/2024-01 tanggal 15 Agustus 2024 barang bergerak yang merupakan satu paket BMN berupa instalasi air buangan/kotor domestik dalam keadaan rusak berat dengan bukti setor NTPN DC5A17QLUPCE7EEI tanggal 20 Agustus 2024.

REKAPITULASI PENDAPATAN PEMINDAHTANGANAN BMN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
10	Balai Besar POM di Medan	3.231.031,00	3.231.031,00	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa lelang BMN lelang alat laboratorium berupa 1 unit Rotary Evaporator dan 1 unit High Performance Liquid Chromatography dengan Risalah Lelang No 310/0201/2024-01 tanggal 18 Maret 2024 dengan bukti setor NTPN DBFFF48VVEJVNJBA tanggal 20 Maret 2024
11	Balai Besar POM di Padang	49.775.000,00	33.605.000,00	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya berupaq penjualan satu unit mini bus berdasarkan risalah lelang No.364/03.01/2024-01 tanggal 28 Agustus 2024 dan NTPN No.B119155DF9LIVUEF tanggal 30 Agustus 2024
			16.170.000,00	pendapatan dari Pemindahtanganan BMN berupa satu paket inventaris kantor sesuai risalah lelang 520/03.01/2024-01 tanggal 8 November 2024 dan NTPN No. 3E4F53CIFKP3VJVJ tanggal 8 November 2024
12	Balai Besar POM di Samarinda	2.948.500,00	2.214.500,00	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 30 September 2024 sebesar Rp2.214.500,00 merupakan Lelang BMN dalam kondisi rusak berat dengan No Risalah Lelang No.584/13.02/2024-01 tanggal 11 September 2024 NTPN No.A78B72G4VQ0SMB02.
			734.000,00	Merupakan Lelang BMN dalam kondisi rusak berat dengan No Risalah Lelang No.932/13.02./2024 tanggal 27 Desember 2024
13	Balai Besar POM di Manado	194.240,00	194.240,00	Lelang peralatan dan mesin dalam keadaan kondisi rusak berat NTPN No. 216B06U8EUPMLUOD tanggal 7 Agustus 2024 dengan Risalah Lelang No 411/16.01/2024-01 tanggal 6 Agustus 2024
14	Balai Besar POM di Makassar	9.250.000,00	9.250.000,00	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp9.250.000,00 dengan NTPN No. 1115B61QV4DS5O11 tanggal 28 Oktober 2024 berupa hasil bersih lelang atas Bongkaran Bangunan Gedung B dengan Risalah Lelang No. L-1659/15.02/2024-01 tanggal 28 Oktober 2024
15	Balai Besar POM di Serang	12.772.567,00	12.772.567,00	lelang atas lelang non eksekusi wajib bmn berupa 1 paket barang inventaris kantor sesuai dengan risalah lelang no:790/06.01/2024-01 tanggal 12 November 2024, NTPN No: 347D07QLUPL6HGPG tgl 13 November 2024
16	Balai POM di Jambi	11.168.000,00	11.168.000,00	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp 11.168.000,00 berasal dari penjualan BMN berupa aset tetap dan aset tetap lainnya sesuai dengan risalah lelang nomor 1158/04.01/2204-01 tanggal 15 Oktober 2024 Sesuai No NTPN : 6AFE648VVF8PFK1 Pada Tanggal 17-10-2024.
17	Balai POM di Kendari	364.000,00	364.000,00	Lelang Atas Bongkahan gedung rumah dinas Ka. BPOM Kendari dengan Nomor Risalah Lelang:673/15.05/2024.01 tanggal 5 Desember 2024 dengan No NTPN :7731F6U8FV518FIR tanggal 6 Desember 2024
18	Balai POM di Kupang	33.572.950,00	33.572.950,00	Hasil Lelang BMN Balai POM di Kupang berupa 1 unit Kendaraan Roda 4 dengan Risalah Lelang nomor: 8/14.05/2024-01 Tanggal 9 Januari 2024 sesuai NTPN 41F721JNFUMOD8LP tanggal 16 Januari 2024
19	Balai POM di Bengkulu	11.383.700,00	11.383.700,00	Pendapatan dari penjualan hasil lelang berupa 1 paket Barang Inventaris Milik Kantor BPOM Bengkulu sesuai NTPN 8DBE561QV3OU08SP tanggal 25 Maret 2024, Risalah Lelang Nomor 87/05.01/2024-1 tanggal 18 Maret 2024
20	Balai POM di Pangkal Pinang	1.279.000,00	1.129.000,00	lelang peralatan dan mesin sejumlah 67 unit sebesar Rp1.129.000 NTPN no 8FAE748VVF93G5IK tanggal 28 Oktober 2024, Risalah Lelang Nomor: 659/04.04/2024-01 Tanggal 28 Oktober 2024
			150.000,00	lelang peralatan dan mesin sebanyak 1 unit NTPN no ED2E92G4VQ9QU1MP tgl 13 Desember 2024, Risalah Lelang Nomor: 810/04.04/2024-01 Tanggal 13 Desember 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN PEMINDAHTANGANAN BMN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
21	Balai POM di Sofifi	215.000,00	215.000,00	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp 215.000,00 merupakan Penghapusan Lelang BMN sesuai risalah lelang nomor 226/16.04/2024-01 tanggal 21 November 2024 dengan NTPN: C56340NA054Q3D7N Tanggal 04 Desember 2024
22	Balai POM di Gorontalo	3.825.000,00	2.965.000,00	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (inventaris kantor) Nomor Risalah Lelang 51/16.02/2024-01 tanggal 27 Februari 2024 nomor NTPN 2157F61QV3OBOAB5 tanggal 6 Maret 2024
			860.000,00	Pendapatan dari penjualan alat laboratorium berupa digester heating dalam kondisi rusak berat Nomor Risalah Lelang 395/16.02/2024-01 tanggal 21 Oktober 2024 nomor NTPN F3B651JNFVHU4GES tanggal 28 Oktober 2024
23	Loka POM di Kabupaten Ende	424.000,00	424.000,00	Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor: 191/14.05/2024-01 tanggal 19 Juni 2024 dan NTPN 305FC3CIFKAMAL1O tanggal 24 Juni 2024
24	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1.518.000,00	1.518.000,00	Pendapatan dari Lelang Peralatan dan Mesin dengan Risalah Lelang nomor: 153/14.05/2024-01 tanggal 04 Juni 2024 dan NTPN 557AF0NA04GM7GNQ tanggal 29 Mei 2024
TOTAL		526.046.488,00	526.046.488,00	

REKAPITULASI PENDAPATAN SEWA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	103.346.500,00	32.605.000,00	Pendapatan sewa kantin Meizanin NTPN 96C266U8EV35FP5G tanggal 26 November 2024
			70.741.500,00	pendapatan sewa kantin Pikoelan sesuai NTPN A1C047QLUPIGI31H tanggal 29 Oktober 2024
2	Balai Besar POM di Semarang	2.630.616,00	2.630.616,00	Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Januari- Desember 2024
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	34.638.000,00	34.638.000,00	Sewa ruangan untuk usaha Toko dan Kantin Koperasi Bina Bakti OMKA selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 10 Juli 2024 sd 10 Juli 2029
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.885.000,00	3.885.000,00	Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Januari- Desember 2024
5	Balai Besar POM di Padang	28.987.110,00	2.731.110,00	Pendapatan atas sewa rumah dinas Balai Besar POM di Padang bulan Januari-Oktober 2024
			10.605.000,00	Pendapatan atas sewa lahan oleh KPRI Balai Besar POM di Padang sesuai NTPN 229746U8EUSV0EB8 tanggal 17 September 2024
			15.651.000,00	Pendapatan atas sewa tempat ATM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai NTPN 4DB9455DFA1E4O30 tanggal 31 Desember 2024
6	Balai Besar POM di Pekan Baru	20.643.444,00	20.643.444,00	Pendapatan atas sewa rumah dinas Balai Besar POM di Pekanbaru bulan Januari- Desember 2024
7	Balai Besar POM di Bandar Lampung	6.544.752,00	6.544.752,00	pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari- Desember 2024
8	Balai Besar POM di Palangkaraya	1.319.175,00	1.319.175,00	pendapatan sewa rumah dinas bulan januari 2024
9	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.439.640,00	4.439.640,00	Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari- Desember 2024
10	Balai Besar POM di Mataram	4.272.840,00	4.272.840,00	Pendapatan sewa rumah negara (rumah dinas) bulan Januari- Desember 2024
11	Balai Besar POM di Jayapura	5.830.116,00	5.830.116,00	Penerimaa Sewa Rumah Dinas bulan Januari- Desember 2024
12	Balai POM di Jambi	1.115.000,00	1.115.000,00	pendapatan sewa kantin Balai POM di Jambi bulan Januari- Desember 2024
13	Balai POM di Palu	1.195.368,00	1.195.368,00	Pendapatan atas sewa rumah dinas Balai POM di Palu bulan Januari-Desember 2024
14	Balai POM di Kendari	4.500.000,00	4.500.000,00	Pendapatan sewa gedung (kantin) bulan Januari- Desember 2024
15	Balai POM di Kupang	2.796.234,00	2.796.234,00	Pendapatan sewa rumah negara Kepala Balai POM di Kupang
16	Balai POM di Bengkulu	4.229.280,00	4.229.280,00	Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Januari- Desember 2024
17	Balai POM di Mamuju	788.250,00	788.250,00	Pendapatan Sewa kantin Balai POM di Mamuju November 2024 - 2025
18	Loka POM di Kabupaten Merauke	2.868.888,00	2.868.888,00	Penerimaa Sewa Rumah Dinas bulan Januari- Desember 2024
TOTAL		234.030.213,00	234.030.213,00	

REALISASI PNBP FUNGSIONAL PER SATKER PERIODE S.D 31 DESEMBER 2024
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Unit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Grand Total
		I. Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi dan Evaluasi	II. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor	III. Jasa Sertifikasi	IV. Jasa Pengujian	V. Jasa Kalibrasi	VI. Jasa Pelatihan Laboratorium	VII. Jasa Uji Profisiensi	VIII. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji	IX. Kontrak Kerjasama	
1	Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif										54.794.450.000
	Direktorat Registrasi Obat	40.049.000.000		513.600.000							40.562.600.000
	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor		260.000.000	2.985.400.000							3.245.400.000
	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor			8.058.500.000							8.058.500.000
	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	665.600.000		2.262.350.000							2.927.950.000
2	Deputi II Bidang Pengawasan OT SK dan Kosmetik										130.987.550.008
	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	106.272.400.008									106.272.400.008
	Direktorat Pengawasan Kosmetik			23.240.900.000							23.240.900.000
	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan			1.474.250.000							1.474.250.000
3	Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan										53.551.650.084
	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	38.506.000.000									38.506.000.000
	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			112.000.084							112.000.084
	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			14.933.650.000							14.933.650.000
4	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional				1.020.346.960	76.025.000	158.250.000	18.500.000	3.140.795.000	840.956.100	5.254.873.060
	BALAI-BALAI										22.612.683.589
5	Balai Besar POM di Banda Aceh			2.350.000	195.160.000						197.510.000
6	Balai Besar POM di Medan			1.149.950.000	645.825.000						1.795.775.000
7	Balai Besar POM di Padang			10.700.000	1.038.750.716						1.049.450.716
8	Balai Besar POM di Pekanbaru			53.350.000	601.496.641						654.846.641
9	Balai POM di Jambi				928.178.124						928.178.124
10	Balai Besar POM di Palembang			2.800.000	190.375.000						193.175.000
11	Balai POM di Bengkulu				643.931.787						643.931.787
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung			20.600.000	354.839.494						375.439.494
13	Balai POM di Batam			997.200.000	461.690.625						1.458.890.625
14	Balai POM di Pangkalpinang				588.154.408						588.154.408
15	Balai Besar POM di Jakarta				46.230.000						46.230.000
16	Balai Besar POM di Bandung			47.800.000	769.640.000						817.440.000
17	Balai Besar POM di Semarang			393.650.000	341.545.000						735.195.000
18	Balai Besar POM di Yogyakarta			850.000	220.020.000						220.870.000
19	Balai Besar POM di Surabaya			2.495.050.000	18.920.000						2.513.970.000
20	Balai Besar POM di Serang				193.110.000						193.110.000
21	Balai Besar POM di Denpasar			61.900.000	775.350.000						837.250.000
22	Balai Besar POM di Mataram				1.346.263.234						1.346.263.234
23	Balai POM di Kupang			550.000	222.205.000						222.755.000
24	Balai Besar POM di Pontianak			100.000	550.522.708						550.622.708
25	Balai Besar POM di Palangkaraya				931.801.094						931.801.094
26	Balai Besar POM di Banjarmasin				1.349.805.103						1.349.805.103
27	Balai Besar POM di Samarinda				550.673.177						550.673.177
28	Balai Besar POM di Manado			5.700.000	118.620.000						124.320.000
29	Balai POM di Palu			250.000	823.420.596						823.670.596
30	Balai Besar POM di Makassar			10.950.000	785.915.704						796.865.704
31	Balai POM di Kendari				813.262.594						813.262.594
32	Balai POM di Gorontalo				390.075.000						390.075.000
33	Balai POM di Ambon				321.825.258						321.825.258
34	Balai Besar POM di Jayapura				667.727.326						667.727.326
35	Balai POM di Manokwari				231.390.000						231.390.000
36	Balai POM di Mamuju				118.770.000						118.770.000
37	Loka POM di Kabupaten Ende				123.440.000						123.440.000
	Grand Total	185.493.000.008	260.000.000	58.834.400.084	18.379.280.549	76.025.000	158.250.000	18.500.000	3.140.795.000	840.956.100	267.201.206.741

REKAPITULASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN JASA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	SATKER	NILAI TOTAL	DIKEMBALIKAN KE PEMOHON	NTPN SETORAN AWAL	NILAI BAYAR	NILAI PENGEMBALIAN	NO SP2D	TANGGAL SP2D	ALASAN PENGEMBALIAN
1	Deputi II	1.500.000,00	PT Beautimax Kosmetika berjaya	FD0FC6U8EUN6GH6M	1.500.000,00	1.500.000,00	241751301053675	11 Desember 2024	Kesalahan pada sistem Registrasi Kosmetik dalam penentuan tarif PNPB
2	Deputi III	10.650.000,00	PT SINERGI ABADI SENTOSA	B2B453CIFB0020S9	300.000,00	300.000,00	241751301000678	25 Januari 2024	Produk harus didaftarkan sebagai Pangan Berkaim karena adanya pencantuman klaim
			PT GLOBAL GOURMET INDONESIA	78FD31JNFLU809CA	200.000,00	200.000,00	241751301000679	25 Januari 2024	Produk seharusnya didaftarkan sebagai Pangan Iradiasi
			PT MAHAKARYA SENTRA NABATI	3D03D0NA0472R53D	3.000.000,00	3.000.000,00	241751301021911	21 Juni 2024	Produk yang didaftarkan salah diinput dan didaftarkan sebagai pangan berkaim
			CV. AGRINDO SUPRAFOOD	A29FA1JNFLUTOVJ9	300.000,00	1.200.000,00	241751301031683	7 Agustus 2024	Kategori Pangan produk perlu disesuaikan dari KP 14 ke KP 04
				6B7B76U8ELDDFAHL	300.000,00				
				F81F20N9VRCLMDJ8	300.000,00				
				C11CE0N9VRCLMCSO	300.000,00				
			PT GIZITATAPANGAN SEJAHTERA	4C3A93CIFATEC2P3	150.000,00	150.000,00	241751301041854	4 Oktober 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 14, seharusnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 04 untuk 4 produk yang diajukan
			PT TANATA HERBALINDO UTAMA	900E26U8ELG66ENV	150.000,00	150.000,00	241751302050354	8 Oktober 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 14, seharusnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 01
			PT HEINZ ABC INDONESIA	9ADFD3CIFB5VVJGG	200.000,00	200.000,00	241751301042448	8 Oktober 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi dan ING) dalam Kategori Pangan 12 dan Perubahan Desain Label, seharusnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi) dan Minor (Perubahan Masa Simpan dan Nama Jenis) dalam Kategori Pangan 12, serta Perubahan Desain Label
			PT INTERNUSA FOOD	5B0200N9VRLE41AM	200.000,00	200.000,00	241751302055628	4 November 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi variasi Minor (Pencantuman Logo Halal dan Perubahan Berat Bersih) dalam Kategori Pangan 05 dan Perubahan Desain Label, seharusnya didaftarkan registrasi variasi Minor (Pencantuman Logo Halal dan Perubahan Berat Bersih) dan Mayor (Perubahan ING) dalam Kategori Pangan 05, serta Perubahan Desain Label
			PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	9F3012G4VPF4MCKP	1.600.000,00	1.600.000,00	241751301047203	4 November 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi variasi Minor (Pencantuman Logo Halal) dalam Kategori Pangan 13 dan Perubahan Desain Label dengan tarif Rp 1.600.000,-, seharusnya didaftarkan registrasi variasi Minor (Pencantuman Logo Halal) dalam Kategori Pangan 13 dan Perubahan Desain Label dengan tarif Rp 200.000,- karena adanya kesalahan aplikasi dalam menerbitkan SPB awal
			PT. Mannasatria Kusumajaya Perkasa	B39A01JNFM4HVMIB	300.000,00	300.000,00	241751301051885	5 Desember 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 14, seharusnya didaftarkan registrasi baru dalam Kategori Pangan 04
			PT Afis Prima Perdana	9E18348VVEGEVJPC	1.500.000,00	1.500.000,00	241751303051651	5 Desember 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi) dalam Kategori Pangan 07, seharusnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi) dan Minor (Perubahan Nama Dagang) dalam Kategori Pangan 07, serta Perubahan Desain Label
			PT Goldensnack Mas Sejahtera	ABFDB2G4VPRF7US1	1.850.000,00	1.850.000,00	241751301051884	5 Desember 2024	Sebelumnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi) dan Minor (Pencantuman Logo Lainnya) dalam Kategori Pangan 15 serta Perubahan Desain Label dengan tarif Rp 1.850.000,-, seharusnya didaftarkan registrasi variasi Mayor (Perubahan Komposisi) dan Minor (Pencantuman Logo Lainnya) dalam Kategori Pangan 15 serta Perubahan Desain Label dengan tarif Rp 350.000,- karena adanya kesalahan aplikasi dalam menerbitkan SPB awal
3	Balai Besar POM di Semarang	1.880.000,00	Dinas Kesehatan Kota Magelang	5EA438N3EAK8801L	1.880.000,00	1.880.000,00	241341303005001	29 April 2024	Produk uji sampel batal diujikan karena pihak ketiga tidak menyerahkan barang
4	Balai Besar POM di Bandar Lampung	730.000,00	Gogo Widhiarta, SH	AFB3E0NA04UTSF5J	730.000,00	730.000,00	240171301027299	20 November 2024	Alat GCMS yang akan digunakan untuk pengujian sampel mengalami kerusakan
5	Balai Besar POM di Makassar	4.240.000,00	Dinas Kesehatan Kab. Enrekang	63AAE55DF96IL61U	1.330.000,00	4.240.000,00	241361302007345	12 August 2024	Terdapat pengkategorian sampel yang kurang tepat yang mengakibatkan biaya pengujian menjadi lebih besar dari yang seharusnya
				430EB6U8EBBF7KF	1.030.000,00				
				BC13948VVEK6881H	1.880.000,00				
6	Balai Besar POM di Jayapura	250.000,00	PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) an. Victor petrus dirk siahay	8271261QV4APAV19	2.105.000,00	250.000,00	240631303005783	21 November 2024	disebabkan oleh kesalahan perekaman parameter uji
7	Balai POM di Bengkulu	750.000,00	Ahmad Zulfikri Nasution	60CFA61QV44FB616	750.000,00	750.000,00	240161301011532	07 Agustus 2024	pemohon telah membayar kode billing namun setelah di cek di SIPT nomor kode billing berbeda
TOTAL		20.000.000,00			21.855.000,00	20.000.000,00			

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	11.181.920,00	4.589.780,00	denda keterlambatan pekerjaan renovasi pagar BPOM berupa potongan SPM Nomor 00219T tanggal 29 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 249991302002276 tanggal 30 Januari 2024
			1.290.630,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa potongan SPM Nomor 02935T tanggal 15 Juli 2024 dengan SP2D Nomor 241751302031692 tanggal 17 Juli 2024
			711.243,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan meubelair penunjang kinerja pegawai berupa potongan SPM Nomor 03203T tanggal 24 Juli 2024 dengan SP2D Nomor 241751301029217 tanggal 26 Juli 2024
			52.388,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan meubelair aula BTI berupa potongan SPM Nomor 03180T tanggal 24 Juli 2024 dengan SP2D Nomor 241751302034328 tanggal 26 Juli 2024
			4.537.879,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan pakaian kaos HUT RI berupa potongan SPM Nomor 03746T tanggal 2 September 2024 dengan SP2D Nomor 241751302043389 tanggal 04 September 2024.
2	Inspektorat Utama	498.105,00	498.105,00	Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian kontrak Pengembangan Aplikasi SAPA APIP oleh PT MORA TEKNOLOGI INDONESIA (dipotong dari SPM). Nomor SPM 00852T/433005/2024 Tgl 26/07/2024
3	Deputi III	5.346.000,00	2.277.000,00	Denda Keterlambatan Kerja Pengembangan Aplikasi PMR DitwasprodPO 2024 oleh CV. PRATAMA JAYA MANGGALA sesuai dengan no Kontrak PL.02.01.53.08.24.01280 tanggal 30 Agustus 2024 SPM no 03358T
			3.069.000,00	Denda Keterlambatan Kerja Pengembangan Aplikasi RB-QAS DitwasprodPO 2024 oleh CV. PRATAMA JAYA MANGGALA sesuai dengan no Kontrak PL.02.01.53.08.24.01279 tanggal 30 Agustus 2024 SPM no 03503T
4	PPPOMN	3.458.452,00	473.000,00	Keterlambatan atas pengadaan media biologi/kultur sel paket 1 PT Indofa Utama Multi Core sesuai kontrak no PL.02.01.10.03.24.PPK1.023.SP tgl 13 Maret 2024 SPM no 0729
			306.306,00	Keterlambatan atas pengadaan modul pengatur suhu PT Gaiascience Indonesia sesuai adendum kontrak no PL.02.01.06.24.PPK1.044.SP.ADM1 tgl 2 Agustus 2024 SPM no 0995
			117.677,00	Keterlambatan atas Pengadaan Jasa CS, Security, & Pengemudi Paket 1 PT Vidya Artha Tama sesuai Adendum Kontrak no PL.02.01.10.07.24.PPK3.002.ADD Tgl 22/07/24 (SPM no 01213T)
			132.280,00	Keterlambatan atas Pengadaan Jasa CS, Security, & Pengemudi Paket 2 PT Vidya Artha Tama sesuai Adendum Kontrak no PL.02.01.10.07.24.PPK3.003.ADD Tgl 22/07/24 (SPM no 01214T)
			2.429.189,00	Keterlambatan atas Pengadaan Refrigerator Laboratory/Freezer Paket 2 PT Esco Farma Lab sesuai Adendum Kontrak no PL.02.01.10.08.24.PPK1.061.SP.ADM1 tgl 5/9/24 (SPM no 01313T)
5	PUSDATIN	13.892.023,00	150.186,00	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Phinisi Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan PT Bayu Berlian Mandiri sebesar Rp150.186,00 telah disetorkan ke negara pada 9 Januari 2024 dengan Bukti Penerimaan Negara berupa potongan SP2D nomor 249991302001461
			2.516.837,00	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Phinisi Satker PUSDATIN TA 2023 CV Dearindo Utama Persada sebesar Rp2.516.837,00 telah disetorkan ke negara pada 9 Januari 2024 dengan Bukti Penerimaan Negara berupa potongan SP2D nomor 249991303002958
			5.612.500,00	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Langganan Koneksi Internet PT Indosat Tbk sebesar Rp5.612.500,00 telah disetorkan ke negara tanggal 15 Juli 2024 dengan Bukti Penerimaan Negara berupa potongan SP2D nomor 241751302030839.

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			5.612.500,00	Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Langganan Koneksi Internet Utama PT Indosat Tbk sebesar Rp5.612.500,00 telah disetorkan ke negara tanggal 15 November 2024 dengan Bukti Penerimaan Negara berupa potongan SP2D nomor 241751302057607.
6	Balai Besar POM di Jakarta	1.331.059,00	143.021,00	Denda Penyelesaian Pekerjaan atas keterlambatan pengadaan makanan minuman PDTT termin 1 Tahun 2023 dari CV. Alya Berkah Sentosa dengan NTPN Nomor 11C2C6U8EU5FTN0J Tanggal 29 Januari 2024
			717.338,00	Denda keterlambatan atas pekerjaan alih daya dari PT Dasatama sesuai SPM No. 01524T Tanggal 15 November 2024
			470.700,00	Denda keterlambatan atas Pengadan Alat laboratorium dari PT Pasifik dengan NTPN A2C077QLUPOKE1J3 Tanggal 30 Desember 2024.
7	Balai Besar POM di Semarang	10.726.661,00	2.918.919,00	Denda keterlambatan Pengadaan Perlengkapan Peserta KIE CV Tiga Pilar Utama Sejahtera berupa potongan SPM Nomor 00255T tanggal 20 Februari 2024 dengan SP2D Nomor 241341301001524 tanggal 22 Februari 2024
			375.420,00	Denda keterlambatan Pengadaan Suku Cadang (PNP) PT Kromtekindo Utama berupa potongan SPM Nomor 00801T tanggal 15 Mei 2024 dengan SP2D Nomor 241341303006305 tanggal 17 Mei 2024
			4.245.500,00	Denda keterlambatan Pengadaan Alat Laboratorium PT Elo Karsa Utama berupa potongan SPM Nomor 01099T tanggal 24 Juni 2024 dengan SP2D Nomor 241341303008731 tanggal 26 Juni 2024
			106.920,00	Denda keterlambatan Pengadaan Reagen Pengujian Sampel Makanan PT Intralab Ekatama berupa potongan SPM Nomor 01589T tanggal 27 Agustus 2024 dengan SP2D Nomor 241305002268 tanggal 29 Agustus 2024
			48.620,00	Denda keterlambatan Pengadaan Reagen Pengujian Sampel Makanan PT Intralab Ekatama dengan NTPN 947160NA04UOCBQ0 Tanggal 2 Oktober 2024
			391.500,00	Denda keterlambatan Pengadaan Baku Pembanding PT. Summa Proserpi dengan NTPN C03A548WF8B071P Tanggal 4 Oktober 2024
			16.882,00	Denda keterlambatan Pengadaan Reagen CRMs PT. New Praktika Alkesindo dengan NTPN D294455DFA19U23N Tanggal 23 Desember 2024
			2.622.900,00	Denda keterlambatan Pengadaan Panel Sinkron dan Instalasi CV. Super Teknologi Indonesia berupa potongan SPM Nomor 02312T tanggal 24 Desember 2024 dengan SP2D Nomor 241303022919 tanggal 29 Desember 2024
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	1.862.557,00	30.348,00	Denda Pengadaan sarana penunjang Laboratorium SPM Nomor 00516A tanggal 03/05/2024 dan SP2D Nomor 240301303007089 tanggal 07/05/2024 penyedia BERCA NIAGA MEDIKA
			574.325,00	Denda Pengadaan Kithen Inspection Kit berupa ATP Swab Test sesuai SPM 00666A tanggal 04/06/2024 dan SP2D 240301303009107 tanggal 05/06/2024 penyedia LABORINDO SARANA PT
			127.649,00	Denda Pengadaan Penyelenggaraan Kalibrasi sesuai SPM 00936A Tanggal 11/07/2024 SP2D 240301303012540 Tanggal 15/07/2024 penyedia ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO
			129.662,00	Denda Pengadaan Bahan Baku Primer/sekunder sesuai SPM 01006A Tanggal 19/07/2024 SP2D 240301303013241 Tanggal 23/07/2024 penyedia INDOFA UTAMA MULTI CORE
			803.461,00	Denda Pengadaan Baku Pembanding terkait Regionalisasi sesuai SPM 01161A Tanggal 14-08-2024 dan SP2D 240301303015342 Tanggal 16/08/2024 penyedia INDOFA UTAMA MULTI CORE

**REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			48.060,00	Denda Pengadaan Suply/perlengkapan komputer sesuai SPM 01450A Tanggal 26-09-2024 dan SP2D 240301303018850 Tanggal 30-Sep24 penyedia CV.COMPUTA
			128.136,00	Denda senilai Rp128.136,00 sesuai SPM 01480A Tanggal 27/09/2024 SP2D 240301302014068 Tanggal 02/10/24 Pengadaan Reagen Sampel Makanan
			20.916,00	Denda senilai Rp20.916,00 sesuai SPM 01785A Tanggal 22/11/24 SP2D 240301303024473 Tanggal 26/11/24 Pengadaan Reagen uji sampel pihak ketiga
9	Balai Besar POM di Surabaya	7.875.953,00	68.237,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan Pendukung Preparasi Sampel PT. Biotek Prima Indoplus sesuai No.SPM 00370A Tanggal 25 Maret 2024 dengan SP2D No.241351301004954 Tanggal 27 Maret 2024
			38.919,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan ATK PT. Makadata sesuai No.SPM 00370A Tanggal 25 Maret 2024 dengan SP2D No.241351301004954 Tanggal 27 Maret 2024
			341.136,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan Paket Fullboard Meeting dan Paket Fullday Meeting Balai Besar POM di Surabaya PT. Mirama Wasata dari SPM Nomor 00728A Tanggal 31 Mei 2024 dengan SP2D No. 241351301009366 Tanggal 04 Juni 2024
			985.552,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas pekerjaan Pengadaan Baku Pembanding Kimia Paket 2 pada PT. Laborindo Sarana dari SPM Nomor 01473A Tanggal 11 September 2024 dengan SP2D No. 241351301017329 Tanggal 13 September 2024.
			4.993.200,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas Pengadaan Alat Laboratorium pada PT. Esco Farma Lab dari SPM Nomor 01530A Tanggal 11 September 2024 dengan SP2D No. 241351301018209 Tanggal 25 September 2024
			199.774,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas Pengadaan Perlengkapan Penunjang Bimbingan Teknis Pengujian pada CV.Gatita dari SPM Nomor 01520A Tanggal 11 September 2024 dengan SP2D No. 241351302009896 Tanggal 26 September 2024
			211.351,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas Pendukung Preparasi Sampel pada PT Pasifik Saintifindo dari SPM No. 01649A Tanggal 10 Oktober 2024 dengan SP2D No. 241351301019674 Tanggal 14 Oktober 2024
			54.000,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas Pengadaan Suku Cadang (PNP) pada PT. Kromtekindo Utama dari SPM No. 01738A Tanggal 22 Oktober 2024 dengan SP2D No. 241351301020616 Tanggal 24 Oktober 202
			983.784,00	Pendapatan Denda Keterlambatan atas Pembelian Baku Kimia pada PT. Multi Eka Chemicalindo dari SPM No. 02009A Tanggal 28 November 2024 dengan SP2D No. 241351302012828 Tanggal 02 Desember 2024
10	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.759.826,00	262.500,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Filling Cabinet pada PT. Irshan Bersaudara Abbasy SP2D No 230011301002558 tanggal 3 Mei 2024
			305.670,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Media Mikrobiologi Paker RID-P2403-8749874 PT. Multi Medika Laboratory NTPN No 9669861QV41OFVE8 tanggal 21 Juni 2024
			14.595,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Fasilitas Perkantoran berupa Meja Stainless PT. Airmas Perkasa Ekspres SP2D No 230011302000476 tanggal 5 Maret 2024
			275.645,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Reagensia pada PT. Enigma Saitia Solusindo SP2D No 240011301003850 tanggal 22 Mei 2024
			2.338,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas pengadaan Reagensia CV. Anugrah Cahaya NTPN No 9E66B7QLUPIGKNU tanggal 24 Oktober 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			81.081,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Alat Laboratorium PT.Ghonim Eshan Permata NTPN No 8701048VVFBPDI9U tanggal 18 November 2024
			740.922,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Suku Cadang PT. WIRA LAB SP2D No 240011301010588 tanggal 28 November 2024
			68.426,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Suku Cadang PT. Ditek Jaya SP2D No 240011303000535 tanggal 17 Desember 2024
			8.649,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PT. Dynata NTPN No F48C56U8EV63QMG4 tanggal 24 Desember 2024
11	Balai Besar POM di Medan	2.428.670,00	350.000,00	denda keterlambatan Pengadaan Roll O Pack yang langsung PT. PRIMAJAYA MULTI TECHNOLOGY dengan SP2D No SP2D No 240041304000963 tanggal 02 April 2024
			98.080,00	denda keterlambatan untuk Pengadaan Bahan Fungsional Pengujian INDOLAB UTAMA yang langsung dipotong SP2D No 240041302003302 tanggal 27 Mei 2024
			307.360,00	denda keterlambatan Pengadaan reagensia CV ANUGRAH CAHAYA ABADI dengan SP2D no. 240041305000122 tanggal 7 feb 2024
			1.180.430,00	denda keterlambatan pengadaan kolom PT .BERCA NIAGA MEDIKA' dengan SP2D no. 2400413040003076 tanggal 14 Agustus 2024 '
			263.520,00	denda keterlambatan pengadaan kolom PT. BATUWARIS DINAMIKA sesuai SP2D no. 240041303005891 tanggal 13 September 2024
			180.000,00	denda keterlambatan pengadaan kamera PT. TECH NOVA NUSANTARA sesuai SP2D no. 240041304003791 tanggal 26 September 2024
			380,00	Denda Pengadaan Laptop dan Smart TV DELTA PASIFIC No Sp2d 240041304005939 Tanggal 16 Desember 2024
			48.900,00	Denda Termin II Belanja Barang Glassware PT.PRIMAJAYA MULTI TECHNOLOGY No Sp2d 240041302009829 Tanggal 10 Desember 2024
12	Balai Besar POM di Padang	89.377.555,00	20.130.383,00	Kekurangan Denda Keterlambatan atas pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium dari PT. Emy Chemlab sesuai NTPN 899F66U8EU4S19V1 tanggal 10 Januari 2024
			205.143,00	Denda Keterlambatan atas PDTT sesuai SP2D no. 240101305002610 tanggal 7 Juni 2024
			72.248,00	Denda Keterlambatan Pengadaaan Reagensi/Media Mikrobiologi untuk DAK sesuai SP2D no. 240101301014184 tanggal 18 September 2024
			310.208,00	Denda Keterlambatan Pengadaan Reagensia an Arasains sesuai NTPN 5D5687QLUPFCKS54 tanggal 19 September 2024
			61.832.469,00	Denda Keterlambatan Pengadaan Alat Laboratorium Utama sesuai SP2D no. 240101303005729 tanggal 30 September 2024
			50.531,00	Denda Keterlambatan atas PDTT Termin 7 sesuai SP2D no. 240101305004933 tanggal 30 September 2024
			33.922,00	Denda Keterlambatan Pengadaan Reagensia Pihak Ketiga RID-P2403-8843917 sesuai SP2D no. 240101304009004 tanggal 23 Oktober 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			6.056.596,00	Denda Keterlambatan Pengadaan an PT Wiralab Analitika Solusindo sesuai NTPN 20E7C55DF9TQJ5FP tanggal 06 November 2024
			174.840,00	Denda Keterlambatan Pembayaran Belanja Barang Pengadaan Suku Cadang ALE P2409-10288407 sesuai SP2D no 240101304010338 tanggal 26 November 2024
			511.215,00	Denda Keterlambatan Pengadaan an PT.Wira Agung Jaya Abadi sesuai NTPN 8DF873CIFKSOEIR8 tanggal 30 Desember 2024
13	Balai Besar POM di Pekan Baru	501.916,00	211.338,00	Denda Pengadaan Penunjang Pengujian Agilent PT Berca Niaga Medika NTPN 3BE1161QV4GDRA0L14/11/2024
			121.500,00	denda keterlambatan Pengadaan suku cadang PT. Kromtekindo Utama SPM /SP2D 664/240081301018894 tanggal 11/11/2024
			169.078,00	denda keterlambatan Pengadaan penunjang pengujian PT Berca Niaga Medika SPM /SP2D 665/240081301018893 tanggal 11/11/2024
14	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2.548.475,00	212.756,00	denda keterlambatan atas PDTT sesuai SP2D no. 240171303003097 tanggal 22 Mei 2024 penyedia CV.ELYNAZ INDOMASR GLOBAL no SPM. 00636A
			7.333,00	denda keterlambatan pengadaan reagen dan media mikrobiologi sesuai SP2D no. 240171305000543 08 Maret 2024 penyedia INTRALAB EKATAMA no SPM. 00241A
			553.700,00	denda keterlambatan pengadaan reagen dan bahan biologi khusus sesuai SP2D no. 240171303004272 05 Juli 2024 penyedia PT ARASAINS no SPM. 00960A
			490.350,00	denda keterlambatan pengadaan suku cadang sesuai SP2D no. 240171302004493 23 Juli 2024 penyedia SPEKTRAKROM INDONESIA no SPM. 01043T
			764.650,00	denda keterlambatan pengadaan reagen sampel makanan sesuai SP2D no. 240171303004613 18 Juli 2024 penyedia WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO no SPM. 01023T
			5.400,00	denda keterlambatan pengadaan jasa konsultasi dan pendampingan SMAP SNI ISO 37001 sesuai SP2D no. 240171303005262 13 Agustus 2024 penyedia RINJANI SEMESTA SOLUSINDO no SPM.01160T
			109.808,00	Denda PENGADAAN ALAT REAGEN UJI PROFISIENSI penyedia BERCA NIAGA MEDIKASP2D 240171303006479 tanggal 03 Oktober 2024
			26.240,00	Denda PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANA REHABILITASI JARINGN LISTRIK penyedia SKILLAND TECHNICALSP2D 240171303006903 tanggal 17 Oktober 2024
			238.150,00	Denda PENGADAAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (PDTT) penyedia ELYNAZ INDOMASR GLOBALSP2D 240171303006944 tanggal 17 Oktober 2024
			140.088,00	Denda PENGADAAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH (PDTT) penyedia ELYNAZ INDOMASR GLOBALSP2D 240171303009448 tanggal 20 Desember 2024
15	Balai Besar POM di Pontianak	13.305.450,00	4.383.450,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp4.383.450,00 berupa Denda Pengadaan Alat Pengolah Data berupa Printer, Scanner dan Personal Computer (PC) dengan Nomor SP2D 240421304002365 tanggal 29 Mei 2024.
			8.800.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp.8.800.000,00 berupa Denda Pengadaan Refreshment Alat Laboratorium dengan Nomor SP2D 240421303004945 tanggal 10 Desember 2024.

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			122.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp122.000,00 berupa Denda Pengadaan Optimalisasi Suku Cadang dengan NTPN 5D3F72G4VQA1CT5P tanggal 19 Desember 2024
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	309.461,00	234.234,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pengadaan alat pengolah data berupa Laptop pada PT. Solusi Arya Prima sesuai Nomor SP2D 240431303003375 Tanggal 22 Mei 2024
			54.054,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pengadaan Laptop pada MRA Trading Corp sesuai SP2D nomor 240431302004628 Tanggal 3 Juli 2024
			3.423,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pengadaan reagen pada PT. Harvan Nusaguna Indotama sesuai SP2D nomor 240431303005512 Tanggal 18 Juli 2024
			17.750,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pengadaan media mikro pada PT. Matelab Trifa Solusindo sesuai SP2D nomor 240431305002600 tanggal 22 November 2024
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.382.916,00	75.465,00	PendapatanDenda keterlambatan pengadaan paket edukasi / produk informasi keamanan pangan Pada CV. Mulia yana Mandiri sesuai SP2D Nomor 240451302004450 tanggal 5 Juni 2024
			3.454.054,00	Pendapatan Denda keterlambatan pengadaan alat laboratorium pada PT Gaiascience Indonesia sesuai SP2D Nomor 240451301013798 tanggal 26 Juni 2024
			237.391,00	Pendapatan Denda keterlambatan pengadaan alat laboratorium pada Sartotech Indonesia PT sesuai SP2D Nomor 240451301012689 tanggal 12 Juni 2024
			39.558,00	Pendapatan Denda keterlambatan pengadaan media mikrobiologi sterilitas Mega Tirta Teknologi CV sesuai Sp2D Nomor 240451301015616 tanggal 11 Juli 2024
			9.216,00	Pendapatan denda keterlambatan pengadaan gantungan kunci CV Mulia Yana Mandiri sesuai SP2D Nomor 240451302006493 tanggal 30 Juli 2024
			201.599,00	Denda keterlambatan pengadaan reagensia pengujian lab, sampel, obat, ot, kos dan sk pasa PT Smartlab Indonesia sesuai SP2D Nomor 240451301021966 Tanggal 12 September 2024
			6.468,00	Denda pengadaan reagensia pengujian lab sampel makanan SP2D 240451301021964 tgl 12 sept 2024
			8.108,00	Denda Pengadaan reagensia sampel makanan pada CV Anugerah Cahaya Abadi sesuai SP2D 240451302011630 tgl 10 Desember 2024
			97.297,00	Denda pengadaan glassware pada PT. Maja Bintang Indonesia SP2D 240451301028107 tgl 7 November 2024
			253.760,00	Denda Pengadaan media mikrobiologi pada CV Setya Jaya Abadi pengujian lab sampel obat, OT, Kos dan suplemen makanan SP2D 240451301024647 tgl 9 Okt 2024
18	Balai Besar POM di Samarinda	2.259.831,00	1.307.903,00	Denda Atas pengadaan alat laboratorium SPM Nomor 725 tanggal 31 Desember 2024 pada PT.Emy Chemlab Perdana NTPN No.00B883CIFKSNUS8 tanggal 31 Desember 2024
			828.018,00	Denda Atas pengadaan alat laboratorium SPM Nomor 722 tanggal 31 Desember 2024 pada PT.Emy Chemlab Perdana NTPN No.44F6C3CIFKSNH08I tanggal 31 Desember 2024
			123.910,00	Denda Atas pengadaan alat laboratorium SPM Nomor 639 tanggal 09 Desember 2024 pada PT.Esco Utama SP2D No. 240461302026646 tanggal 11 Desember 2024

**REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
19	Balai Besar POM di Manado	2.484.968,00	786.245,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp786.245,00 berasal dari denda keterlambatan pekerjaan pemeliharaan laboratorium BSL-2 , SPM No.00172A/432901/2024 tanggal 15 Mei 2024, SP2D No.240491303002867 tanggal 17 Mei 2024
			140.400,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan media mikrobiologi , NTPN No. 10F85 6U8EUQ42PLU
			142.959,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat gelas , SPM No.00356A/432901/2024 tanggal 4 September 2024, SP2D No 40491302016376 tanggal 6 September 2024.
			1.415.364,00	denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat gelas , SPM No.00363A/432901/2024 tanggal 9 September 2024, 240491302016376 tanggal 11 September 2024
20	Balai Besar POM di Makassar	5.290.470,00	3.796.396,00	Denda keterlambatan pengadaan jasa pemeliharaan alat PCB, sesuai Nomor SP2D 241361302004038 tanggal 20 mei 2024 an Penyedia PT. Maja Bintang Indonesia
			102.960,00	Denda keterlambatan pengadaan operasional penyelenggara laboratorium sesuai Nomor SP2D 241361302004544 tanggal 31 mei 2024 an Penyedia PT Laborindo Sarana
			301.262,00	Denda keterlambatan pengadaan paket edukasi keamanan pangan PJAS sesuai Nomor SP2D 241361302004582 tanggal 03 Juni 2024 an Penyedia CV Kuncup Mekar
			356.596,00	Denda keterlambatan pengadaan Lakban, Dus Barang Bukti dan Dus Arsip sesuai Nomor SP2D 241361302007506 tanggal 13 Agustus 2024 an Penyedia CV Kuncup Mekar
			68.824,00	Denda keterlambatan pengadaan Reagensia / Media dan PP sesuai Nomor SP2D 241361302008020 tanggal 27 agustus 2024 an Penyedia PT Indolab Utama
			664.432,00	Denda keterlambatan pengadaan Alat Lab (Oven) sesuai Nomor NTPN A30A66U8EV66VCM1 tanggal 27 Desember 2024 an Penyedia PT Emy Chemlab Perdana
21	Balai Besar POM di Denpasar	4.855.101,00	225.000,00	Denda Pengadaan Suku Cadang sesuai dengan SPM No.00375A tanggal 25 April 2024 an. Penyedia PT. Wiralab Analitika Solusindo.
			88.312,00	Denda Pengadaan Operasioal Peyelenggaraan Laboratorium sesuai dengan SPM No.00476A tanggal 28 Mei 2024 an. Penyedia PT. Arasains.
			361.000,00	Denda Pengadaan Alat Gelas sesuai dengan SPM No.00522A tanggal 7 Juni 2024 an. Penyedia PT. Triandar Jastektama
			207.072,00	Denda Pengadaan Baku Pembanding sesuai dengan SPM No.00813A tanggal 13 Agustus 2024 an. Penyedia PT. Multi Eka Chemicalindo.
			1.695,00	Denda Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sesuai dengan SPM No.00878A tanggal 27 Agustus 2024 an. CV. Kishan Digjaya.
			3.972.022,00	Denda Pekerjaan Renovasi Pagar Kantor dalam rangka Renovasi Tembok Penyengker sesuai dengan SPM No.01373T tanggal 17 Desember 2024 an. CV. Putra Catur Dewata.
22	Balai Besar POM di Mataram	890.100,00	46.800,00	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta CV. Kuncup Mekar SP2D 240381302003183 tanggal 6 Maret 2024
			480.000,00	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta CV. Kuncup Mekar SP2D 240381302003184 tanggal 6 Maret 2024

**REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			280.800,00	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta CV. Kuncup Mekar SP2D 240381302003185 tanggal 6 Maret 2024
			82.500,00	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian atas pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta CV. Kuncup Mekar NTPN CAB387QLUPCO2PDS tanggal 3 September 2024
23	Balai Besar POM di Jayapura	3.913.059,00	877.066,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan Sarana Gedung Tahap I an. PT Ayooklik Airmas Perkasa dengan SPM nomor 00007A dan Sp2d nomor 249991303002452 tgl 8 Januari 2024
			29.941,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan reagen sampel obat tahap VI tahun 2023 an PT. New Praktika Alkesindo dengan NTPN nomor E8D2C48VVEDMQS12 tanggal 08 Januari 2024
			266.400,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan reagen gas helium tahun 2023 an PT. Samator Gas Industri dengan NTPN nomor B21220NA04456Q01 tanggal 08 Januari 2024
			54.500,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan suku cadang an. PT. Kromtekindo Utama dengan SPM nomor 00190A dan sp2d nomor 240631304001765 tgl 17 Mei 2024
			20.250,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan seragam PPNPN an. CV. Mas Textile dengan SPM nomor 00229A dan sp2d nomor 240631302005485 tgl 3 Juni 2024
			542.700,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan seragam Pegawai Balai Besar POM di Jayapura an. CV. Mas Textile dengan SPM nomor 00230A dan sp2d nomor 240631302005432 tgl 3 Juni 2024
			49.104,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan suku cadang alat laboratorium berupa Grestel TriStar Syringe an. PT. Berca Niaga Medika dengan SPM nomor 00301A dan sp2d nomor 240631304002559 tgl 4 Juli 2024
			150.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan jasa alih daya tenaga kebersihan termin ke V an. PT.Griya Cendrawasih Mandiri dengan SPM nomor 00288A dan sp2d nomor 240631302006907 tgl 1 Juli 2024
			709.680,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pemeliharaan alat laboratorium an. PT. Genecraft Labs dengan SPM nomor 00289A dan sp2d nomor 240631304002484 tgl 1 Juli 2024
			150.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan jasa alih daya tenaga pengemudi termin ke VI an. PT. Griya Cendrawasih Mandiri dengan SPM nomor 00352A dan dp2d nomor 240631302008476 tgl 30 Juli 2024
			150.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan jasa alih daya tenaga kebersihan termin ke VII an. PT. Griya Cendrawasih Mandiri dengan SPM nomor 00417A dan sp2d nomor 240631302009932 tgl 26 Agustus 2024
			300.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan jasa alih daya tenaga kebersihan termin ke VIII an. PT. Griya Cendrawasih Mandiri dengan SPM nomor 00488A dan sp2d nomor 240631302011593 tgl 25 September 2024
			150.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan jasa alih daya tenaga kebersihan termin ke IX an. PT. Griya Cendrawasih Mandiri dengan SPM nomor 00546A dan sp2d nomor 240631302013065 tgl 21 Oktober 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			26.136,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan Reagen Pengujian Sampel Obat Tahap V an. PT. Smart Lab Indonesia dengan SPM nomor 00549A dan sp2d nomor 240631304004988 tgl 29 Oktober 2024
			437.282,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa pengadaan Suku Cadang Alat Laboratorium an. PT. Arasains dengan SPM nomor 00711A dan sp2d nomor 240631304006554 tgl 13 Desember 2024
24	Balai Besar POM di Serang	2.006.434,00	243.243,00	Denda keterlambatan pekerjaan sarana gedung, NTPN : A8A416U8EUDN220K, tgl 5 April 2024 a.n Penyedia CV. DAMAR HANJAYA ABADI
			30.270,00	Denda penyelesaian pekerjaan pengadaan reagen, NTPN : 2C6607QLUP3CDAKQ, tgl 15 Mei 2024 a.n penyedia PT. Triandar Jastektama
			99.643,00	denda penyelesaian pekerjaan pemerintahan pengadaan penunjang lab, NTPN : B2FE93CIFK7RF8IQ, tgl 4 Juni 2024 a.n penyedia PT Berca Niaga Medika
			428.829,00	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pengadaan Jasa Pemeliharaan Instrumen, SP2D : 240201303001427, tgl 17 Mei 2024 a.n Penyedia PT Ditek Jaya
			54.724,00	Denda Penyelesaian Termin 2 Pengadaan Media Mikro (QIA.005)(RID-P2405-9462596) sesuai BAST nomor:PL.02.01.12A.09.24.461 tanggal:5/9/2024 a.n Penyedia PT Triandar Jastektama
			392.074,00	Denda Penyelesaian Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sesuai BAST nomor:PL.02.01.12A.09.24.469 tanggal:9/9/2024 a.n penyedia CV. SHABUHA TAMA INDONESIA
			438.913,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan Jasa Kalibrasi Instrumen HPLC WATERS, NTPN No: 765B848VVF890V2 tanggal 6 November 2024, a.n penyedia PT. Kromtekindo Utama
			67.387,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Reagen , NTPN No: D0B5F1JNFVKELHPO tanggal 14 November 2024, a.n penyedia PT. Triandar Jastektama
			251.351,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Lab, NTPN No: 723A248VVFEIFQAC tanggal 24 Desember 2024 a.n penyedia PT. Has Aneuk Naggro
25	Balai POM di Jambi	861.661,00	407.715,00	Denda atas pembayaran belanja barang berupa pengadaan reagen dan media mikrobiologi laboratorium obat, otsk kos oleh PT. MUTIARA LABSAINS sesuai kontrak No. PL.02.02.1B.08.24.2912 Tgl. 08-08-2024, BAST No.PL.02.02.1B.09.24.3521 Tgl. 18-09-2024, BAP No. T-KU.01.02.1B.09.24.3591Tgl. 23-09-2024 Potongan Denda sesuai No SPM 00325A tanggal SPM 26 September 2024.
			453.946,00	Denda Pengadaan perawatan peralatan alat laboratorium TA.2024 Nama Penyedia PT ESCO UTAMA dan sesuai nomor dokumen B-PL.02.01.1B.08.24.3049 no spm 00411T
			909.150,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pengadaan Jasa Konsultasi Perancangan Renovasi Gedung Aula Balai POM di Palu dari CV Puji Pratama dengan nomor kontrak B-PL.02.02.5B.01.24.40 Tgl 24 Januari 2024, SP2D No 240511301004222 tanggal 15 Maret 2023

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
26	Balai POM di Palu	2.067.960,00	30.612,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Belanja Barang Berupa Pengadaan Bahan Habis Pakai Tahap VII dari PT Intralab Ekatama dengan nomor Kuitansi KW51976376/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024, SP2D No 240511305007066 tanggal 13 Desember 2024
			1.128.198,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium (Lemari Asam) dari PT Emy Chemlab Perdana dengan nomor kontrak PL.02.01.5B.10.24.290 Tanggal 15 Oktober 2024, SP2D No 249991302002787 tanggal 30 Desember 2024
27	Balai POM di Kendari	6.301.110,00	785.910,00	Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah keterlambatan pengadaan paket edukasi pada CV. Kuncup Mekar denda pemotongan SPM NO 99 tanggal 4 April 2024 dengan Nomor Kuitansi NO.09/KUI/03/2024 TGL 3 April 2024
			5.515.200,00	Denda pemotongan SPM berupa pembelian suku cadang Laboratorium pada PT.Wiralab Analitika Solusindo Jakarta dengan Nomor SPM : 440A Tanggal 16 Desember 2024
28	Balai POM di Ambon	6.149.531,00	25.200,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Paket Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Sesuai Kuintansi Nomer : 8035/ITS Tanggal 04 Juli 2024. Nomer SP2D : 240611301011916 Tanggal 02 Agustus 2024 (PT. ITS Sciences Indonesia)
			595.946,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Digital Signage Sesuai SPK No : PL.02.01.7B.10.24.1546 Tgl 29 Okt 2024, BAST No : PL.02.01.7B.12.24.299 Tanggal 19 Des 2024, BAP No : PL.02.01.7B.12.24.302 Ta nggal 20 Des 2024. Nomer SP2D : 240611302012554 Tanggal 24 Desember 2024 (PT. Citra Data Nusantara)
			810.811,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Modal Berupa Pengadaan Alat Pengolah Data (APD) Sesuai SPK No : PL.02.01.7B.11.24.1629 Tgl 01 Nov 2024, BAST No : PL.02.01.7B.12.24.301 Tgl 19 Des 2024, BAP No : PL.02.01.7B.12.24.3 03 Tgl 20 Des 2024. Nomer SP2D : 240611302012556 Tanggal 24 Desember 2024 (PT. Citra Data Nusantara)
			1.505.276,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Alat Laboratorium Sesuai Kuintansi Nomer : 438930 Tanggal 15 November 2024. Nomer SP2D : 240611301019691 Tanggal 28 November 2024 (PT. Berca Niaga Medika)
			2.540.398,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Pemeliharaan Alat Laboratorium BPOM di Ambon Sesuai Kuintansi Nomer : 8613/ITS Tanggal 01 Oktober 2024. Nomer SP2D : 240611301016199 Tanggal 10 Oktober 2024 (PT. ITS Sciences Indonesia)
			151.910,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Paket Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Sesuai Kuintansi Nomer : 8035/ITS Tanggal 04 Juli 2024. Nomer SP2D : 240611301015845 Tanggal 08 Oktober 2024 (PT. Arasains)
			482.997,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Paket Pengadaan Glassware BPOM di Ambon Sesuai SPK Nomer : B-PL.02.01.7B.09.24.1282 Tgl 23 September 2024, BAST Nomer : PL.02.01.7B.10.24.228 Tgl 24 Oktober 2024, BAP Nomer : B-PL.02.01.7B.10.24.229 Tgl 25 Oktober 2024. Nomer SP2D : 240611302009942 Tanggal 31 Oktober 2024 (CV. Rajawali)
			36.993,00	Pendapatan Denda dari Pembayaran Belanja Barang Berupa Pengadaan Glassware Sesuai Kuintansi Nomer : 2024/XII/RJ/293 Tanggal 13 Desember 2024. Nomer SP2D : 240611302012356 Tanggal 19 Desember 2024 (CV. Rajawali)
29	Balai POM di Kupang	11.226.304,00	1.337.850,00	Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konsultan perencana CV. Amorat Engineering renovasi Gedung Laboratorium Kimia sesuai dengan NTPN No.B36787QLUP6LLHV3 tanggal 26 Juni 2024
			6.440.000,00	Denda Keterlambatan pengadaan Alat Lab Multi Rotary Evaporator CV. Tamaro sesuai dengan SPM No. 00597T/432979/2024 tanggal 27 Agustus 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			610.470,00	Denda keterlambatan pengadaan Gas RMP CV Mulia Berkatama Abadi sesuai dengan SPM No. 00654T/432979/2024 tanggal 19 September 2024
			2.837.984,00	Denda Keterlambatan Pengadaan Reagen Media Obat dari PT. Tristanisa sesuai dengan NTPN F87503CIFKMKNP6B tanggal 29 Oktober 2024
30	Balai POM di Bengkulu	76.368,00	76.368,00	Denda keterlambatan Pembayaran denda pengadaan meubelair (Meja Partisi) tahun 2024 an CV. Daya Cipta Karima sesuai dengan NTPN Nomor 2317755DF93GOEC6 tanggal 26 Februar 2024
31	Balai POM di Batam	1.959.114,00	299.714,00	denda pembayaran pengadaan suku cadang dan penunjang laboratorium Balai POM di Batam Tahun 2024 PT. BERCA NIAGA MEDIKA SPM No 00275 tanggal 17 Mei 2024, SP2D nomor 241371302002546 tanggal 21 Mei 2024
			1.613.800,00	Denda keterlambatan Pengadaan paket produk informasi keamanan pangan desa CV. KUNCUP MEKAR SPM No 00495 tanggal 13 Agustus 2024 nomor SP2D 241371302004909 tanggal 15 agustus 2024
			45.600,00	Denda keterlambatan sebesar Rp.45.600,00 Pengadaan Test Kit Uji Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah BPOM Batam TA 2024, telah dibayarkan melalui potongan SPM No. 00783A Tanggal 14 November 2024
32	Balai POM di Sofifi	618.291.760,00	606.328.936,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas SPM RPATA Nihil pembangunan Gedung dan Bangunan Laboratorium An CV Nurkilawan sesuai SPM 197 SP2D 249991303005191 tanggal 05 April 2024
			9.941.529,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas SPM RPATA Nihil pengawas pembangunan Gedung dan Bangunan Laboratorium An PT Gremmy Mandiri Perkasa sesuai SPM 193 249991302002628 tanggal 05 April 2024
			525.000,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Paket Edukasi An CV Kuncup Mekar sesuai SPM 264 SP2D 240621301009725 tanggal 17 Mei 2024
			357.120,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Paket Edukasi An CV Kuncup Mekar sesuai SPM 282 SP2D 240621301010580 tanggal 30 Mei 2024
			785.400,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Seragam Pegawai Putih Khaki An Muji Jaya Putra Mandiri sesuai SPM 332 SP2D 240621303002594 tanggal 13 Juni 2024
			353.775,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Seminar Kit An CV Aneka Sumber Rezeki sesuai SPM 384 SP2D 240621302008523 tanggal 12 Juli 2024
33	Balai POM di Mamuju	6.723.301,00	908.714,00	Pendapatan Denda keterlambatan pekerjaan Pengadaan Edukasi Keamanan Pangan Sekolah Balai POM di Mamuju Sesuai Kontrak Nomor: PL.02.01.10B.04.24.32 tanggal 26 April 2024, senilai Rp908.714,00 yang dipotong melalui SPM No. 375 Tanggal 13 Agustus 2024
			3.655.054,00	Pendapatan Denda keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Gimmic Edukasi KP Balai POM di Mamuju, CV Kuncup Mekar senilai Rp3.655.054,00 (NTPN Nomor 820240827747450 Tanggal 27 Agustus 2024)

**REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			1.489.983,00	Pendapatan Denda keterlambatan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling BPOM di Manokwari TA. 2024, CV. Adika Dipamadaat Konstruksi sesuai BAPP No: PL.02.05.10B.11.24.301 Tgl 22 November 2024, BAP No: PL.02.05.10B.11.24.303 Tgl 22 November 2024 senilai Rp1.489.983,00 yang dipotong melalui SPM No 00651 tanggal 09 Desember 2024 (SP2D No.240501304004100 Tanggal 09 Desember 2024)
			669.550,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat lab desicator CV San Amerta Romora Senilai Rp669.550,00 (NTPN A6F876U8EV67050R tanggal 27 Desember 2024)
34	Balai POM di Pangkal Pinang	1.043.814,00	92.463,00	Pembayaran Denda Pengadaan Suku Cadang oleh PT.Gaiascience Nomor SPM 00698 Nomor SP2D 240151304002780 Tanggal 16 Agustus 2024
			951.351,00	pembayaran denda pengadaan chemical storage cabinet di PT Gaiascience Indonesia NTPN No.81D1548VVFEUM2DF tanggal 27 Desember 2024
35	Balai POM di Gorontalo	1.303.300,00	940.300,00	Pendapatan Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah atas Pengadaan Suku Cadang, PT Berca Niaga Medika, SP2D No.240501304000982 tanggal 5 Juni 2024
			363.000,00	Pendapatan Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah atas Pengadaan Suku Cadang, PT. WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO, SP2D No.240501304001769 tanggal 27 Agustus 2024
36	Balai POM di Manokwari	6.762.411,00	106.374,00	Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah akibat Keterlambatan Pengadaan Reagen Sesuai Kuitansi no 6360284150 Tanggal 25 Mei 2024 an PT MERCH sesuai dengan SPM nomor 00338T/689071/2024
			48.135,00	Denda keterlambatan pengadaan belanja barang sesuai kuitansi nomor: 2407631/24 tanggal 19 Juni 2024 PT, Abadi Nusa sesuai dengan SPM Nomor 00434T/689071/2024
			12.613,00	Denda keterlambatan pembayaran tagihan pengadaan jasa kalibrasi mikropipet II an PT. Nirmala Karya Sesuai dengan NTPN Nomor : A7EB00NA04M80K3C
			1.761.514,00	Denda keterlambatan belanja barang sesuai BAST Nomor:PL.02.01.12B.08.24.432 Tanggal 27 Agustus 2024 an Kuncup Mekar sesuai dengan SPM Nomor 00601T/689071/2024
			3.028.941,00	Denda keterlambatan pembayaran tagihan kontrak pengadaan meja laboratorium a.n CV. Kresna Putra Utama Sesuai dengan NTPN Nomor : 53B1B1JNFVEVOJ44
			264.117,00	Denda keterlambatan pembayaran Belanja Barang Termin II Reagensia an PT Fadil Damar Putra sesuai SP2D nomor 240651302014898
			445.946,00	Denda keterlambatan pembayaran Belanja Modal Termin II Sesuai BAPP Nomor:PL.02.02.12B.11.24.641 Tanggal 20 November 2024 sesuai SP2D nomor 240651303004640
			795.041,00	Denda keterlambatan pembayaran tagihan pengadaan suku cadang kosmetik a.n PT. Berca Niaga Medika sesuai NTPN nomor 53AE56U8EV5DN3G6
			34.865,00	Denda keterlambatan Pembayaran Tagihan Pengadaan Rompi Dinas Fungsi Infokom BPOM di Manokwari TA. 2024 a.n CV. Mas Textile sesuai NTPN Nomor E88693CIFKSF1PET
			264.865,00	Denda keterlambatan Pembayaran Belanja Barang Sesuai BAST Nomor:PL.02.01.12B.12.24.744 Tanggal 23 Desember 2024 sesuai SP2D nomor 240651302018854
37	Balai POM di Surakarta	1.100.577,00	1.100.577,00	Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah atas pengadaan Chemical Storage an PT Esco Farma Lab Nomor NTPN 94FD11JNFV11JUO1 Tanggal 31 Oktober 2024
38	Balai POM di Tasikmalaya	8.992.363,00	1.052.363,00	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp1.052.363 PT. Sartotech Indonesia pengadaan alat laboratorium (Anak Timbang) sesuai SP2D Nomor 240251302007046 tanggal 27 Desember 2024.

**REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			7.940.000,00	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai Rp7.940.000 PT.GalaScience Indonesia pengadaan alat laboratorium (Meja Timbang, Autoclave, Waterbath, Oven dan Inkubator) sesuai SP2D Nomor 240251302006556 tanggal 9 Desember 2024
39	Balai POM di Kediri	681.183,00	45.238,00	Pengadaan Alat Tulis Kantor Arsip pada PT.E-LM HAURATA SOLUSINDO dengan SPM No. 00050A Tanggal 5 Maret 2024 dan SP2D No. 240341302000294 Tanggal 5 Maret 2024
			40.000,00	Keterlambatan atas pekerjaan pemerintah berasal dari Pengadaan Reagen Mikrobiologi pada PT ASWINDO CATUR PERKASA dengan SPM No 00588 Tanggal 26 November 2024 dan SP2D No 240341303001129 tanggal 28 November 2024
			104.054,00	Keterlambatan atas pekerjaan pemerintah berasal dari Pengadaan Alat Laboratorium Smart Cutter,Smart Alert,Pippete Work Station pada PT ABADINUSA USAHASEMESTA dengan SPM No 00668 Tanggal 10 Desember 2024 dan SP2D No 240341301013435 Tanggal 10 Desember 2024
			194.594,00	Keterlambatan atas pekerjaan pemerintah berasal dari Pengadaan Reagen Mikrobiologi pada CV SEKAR MANDIRI dengan SPM No 00669 Tanggal 10 Desember 2024 dan SP2D No 240341301013504 tanggal 10 Desember 2024
			297.297,00	Keterlambatan atas pekerjaan pemerintah berasal dari Pengadaan Peralatan Laboratorium Incubator PT EMY CEMLAB PERDANA dengan NTPN 695331JNFVHNGRAO Tanggal 21 Oktober 2024
40	Balai POM di Bogor	2.263.812,00	1.143.861,00	Denda Keterlambatan Pengadaan Alat Lab PT. Sartotech NTPN E09EE6U8EV5NLNOQ
			890.270,00	Denda keterlambatan pengadaan meja alat lab PT. GaiaScience Indonesia NTPN 95D6748VVFF1NED8
			229.681,00	Denda pengadaan reagensia PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO NTPN 240231302022176
41	Balai POM di Tangerang	1.085.650,00	631.750,00	Pendapatan denda pengadaan printer tahun 2024 pada PT Aghnia Putri Utama No SPM 00111 Tanggal 24 Juni 2024, No SP2D 241271302007460 Tanggal 26 Juni 2024
			453.900,00	Pendapatan denda pengadaan scanner tahun 2024 pada PT Aghnia Putri Utama No SPM 00110 Tanggal 24 Juni 2024, No SP2D 241271302007459 Tanggal 26 Juni 2024
42	Balai POM di Tarakan	2.206.238,00	106.838,00	merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah an. PT Summa Prosperi atas pengadaan Reagen Pangan Fortifikasi dan Bahan Laboratorium (Consumable) untuk pengujian sampel fortifikasi Balai POM di Tarakan sesuai dengan nomor SP2D 240481302003140 pada tanggal 09 Agustus 2024
			2.099.400,00	merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah an. PT. Esco Farma Lab atas pengadaan Belanja Modal berupa Alat Laboratorium (Lemari Asam) sesuai nomor SPM 00664T/672848/2024 dan nomor SP2D 240481302005053 pada tanggal 25 November 2024
43	Balai POM di Payakumbuh	11.569.340,00	10.139.610,00	Pendapatan denda Keterlambatan atas pekerjaan pemerintah berasal dari Konsultan Perencana Konstruksi pada :PT. Alocita Mandiri dengan Nomor SP2D 240111304002682 tanggal 05 Juli 2024
			1.429.730,00	Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Keterlambatan Pemasangan Alat Laboratorium pada PT. Robust Multilab Solusindo dengan Nomor NTPN : 8F08F6U8EV5T8O9M tanggal 18 Desember 2024

REKAPITULASI PENDAPATAN DENDA PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425811 Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
44	Loka POM di Kabupaten Ende	117.849,00	117.849,00	Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas surat pesanan dengan no B-PL.02.01.17C.09.24.997 Pengadaan Reagen Media Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Verifikasi Metode Tanggal 3 September 2024 pada PT Tristanisa Global Indonesi dengan SP2D no 240401303002806
45	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	288.914.650,00	288.914.650,00	Denda penyelesaian pekerjaan pemerintah akibat pelanggaran janji pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh CV. Karya Delon sesuai dengan NTPN 83ADA0NA04ALOS73 tanggal 28 Maret 2024.
46	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1.635.000,00	1.500.000,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah atas keterlambatan pekerja PT Esco Farma Lab senilai Rp1.500.000,00 dengan potongan SP2D 241121301003011 tanggal 18 Juli 2024
			135.000,00	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah atas keterlambatan pekerjaan PT GARDA JAYA MULYA senilai Rp135.000,00 dengan potongan SP2D 241121302002149 tanggal 28 November 2024
47	Loka POM di Aceh Tengah	115.567.568,00	115.567.568,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Denda keterlambatan pengerjaan pekerjaan pemerintah (Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Pada PT. Puga Mandiri Group SP2D No 249991302002292 tanggal 31 Januari 2024
48	Loka POM di Kota Tanjungbalai	38.500,00	38.500,00	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp38.500 dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman barang oleh penyedia PT. Sentral Lab Genetik yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dalam Surat Pesanan dengan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor PL.02.01.3C.10.24.97 tanggal 04 Oktober 2024 dan No SP2D 240761302000766 Tanggal 04 Oktober 2024. Denda keterlambatan sebesar Rp3.500,00 per hari dengan total hari keterlambatan 11 hari menjadi sebesar Rp38.500,00
49	Loka POM di Kabupaten Merauke	1.288.288,00	1.288.288,00	denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Ascent Opti Ductless Fume Hood oleh penyedia PT. ESCO FARMA LAB dengan nomor SP2D 240681304001111 tanggal 1 Agustus 2024
50	Loka POM di Kabupaten Belitung	158.949,00	158.949,00	Denda keterlambatan pengadaan kendaraan operasional yaitu sepeda motor sebesar Rp119.199,00 NTPN nomor 851212G4V/PK/LFLM tanggal 14 Mei 2024 dan Denda keterlambatan pengadaan Anak Timbangan senilai Rp39.750,00 SPM Nomor 00612T/690479/2024 dengan SP2D Nomor: 241071302001099 Tanggal 25 September 2024.
TOTAL		1.290.873.563,00	1.290.873.563,00	

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	96.048.819,00	945.600,00	berupa pengembalian Gaji Induk Januari 2024 untuk 242 Pegawai/ 539 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM Nomor 00002T tgl. 1/1/2024, SP2D 241751506000006 tgl. 1/1/2024
			652.658,00	berupa Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 124 pegawai/ 284 jiwa pada satker Deputy 4, SPM No.00003T tgl.1/1/2024, SP2D 241751506000005 tgl.1/1/2024
			361.886,00	berupa Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 260 pegawai/ 603 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No. 00009T tgl.1/1/2024, SP2D 241751506000004 tgl. 1/1/2024
			652.244,00	berupa Gaji Induk bulan Januari 2024 untuk 295 pegawai/659 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No. 00010T tgl. 1/1/2024, SP2D 241751506000002 tgl. 1/1/2024
			280.300,00	Pengembalian Uang Makan bl Desember 2023 (Ismu,Risna, Achy,Rifki, Fika, Adam) NTPN CBEA755DF8VSP64N tgl. 1/1/2024
			16.641.500,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Desember 2023 an Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si NTPN B3ADD3CIFJRH7SIP tgl. 16/1/2024
			4.170.100,00	Pengembalian Uang Makan Desember 2023 untuk 67 Pegawai pada Satker Deputy 2 NTPN D0E9755DF90GJD1B tgl. 22/1/2024
			1.019.831,00	berupa Gaji Induk Bulan Februari Tahun 2024 untuk 124 pegawai/ 286 jiwa pada satker Deputy 4, SPM No. 00049T tgl. 1/1/2024, SP2D 241751506000062 tgl. 1/2/2024
			945.600,00	berupa Gaji Induk Februari 2024 untuk 242 Pegawai/ 539 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No. 00046T tgl. 10/1/2024, SP2D 241751506000059 tgl.1/2/2024
			361.886,00	berupa Gaji Induk bulan Februari 2024 untuk 259 pegawai/603 jiwa pada satker Deputy 3, 00047T tgl. 12/1/2021, SP2D 241751506000060 tgl. 1/2/2024
			652.244,00	berupa Gaji Induk bulan Februari 2024 untuk 294 pegawai/655 jiwa pada satker Sekretariat Utama SPM No. 00045T tgl. 12/1/2024, SP2D 241751506000058 tgl. 1/2/2024
			103.391,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja PPPK Desember 2023 untuk 2 pegawai pada satker deputy 1 NTPN D7D5B3CIFJU70P6J tgl. 6/2/2024
			5.717.900,00	Pengembalian Uang Makan PNS Desember 2023 untuk 90 pegawai pada Satker Deputy NTPN 1 378261JNFUPE6QE7 tgl. 6/2/2024
			351.350,00	Pengembalian Uang Makan PPPK Desember 2023 untuk 8 pegawai pada satker Deputy 1 NTPN FBB9F6U8EU7OKPCI tgl. 6/2/2024
			3.752.650,00	Pengembalian Uang Makan PNS Desember 2023 untuk 52 pegawai pada satker deputy 4 NTPN 43D5C7QLUOQ51P7P tgl. 6/2/2024
			1.857.086,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS Desember 2023 untuk 17 Pegawai pada Satker Deputy 1 NTPN 580FA6U8EU7OKP5H tgl. 6/2/2024
			452.330,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS Desember 2023 untuk 6 pegawai pada satker Deputy 4 NTPN D7D1312G4VPBQJP3T tgl. 6/2/2024
			351.350,00	Pengembalian Uang Makan PPPK Desember 2023 untuk 7 pegawai pada satker deputy 4 NTPN A250B2G4VPBQJPQ5 tgl. 6/2/2024
			7.967.200,00	Pengembalian Uang Makan PNS dan PPPKbulan Desember 2023 untuk 114 pegawai satker Sekretariat Utama NTPN 8A14E48VVEGST1ME tgl. 16/2/2024
			7.635.634,00	Pengembalian Gaji Induk Agustus-September 2023 an. Selvy Rosa pada satker deputy 1 NTPN E5C4E7QLUOQO5CMO tgl. 29/2/2024
			652.244,00	berupa Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 295 pegawai/ 657 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No. 00373T tgl. 16/2/2024, SP2D 241751506000193 tgl. 1/3/2024
			652.658,00	berupa Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 123 pegawai/ 285 jiwa pada satker Deputy 4, SPM No.00312T tgl. 7/2/2024, SP2D 241751506000195 tgl.1/3/2024
			227.777,00	berupa Gaji Induk Maret 2024 untuk 241 Pegawai/538 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No. 00293T tgl. 7/2/2024,SP2D 241751506000192 tgl. 1/3/2024
			361.886,00	berupa Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 259 pegawai/ 603 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No. 00374T tgl. 16/2/2024, SP2D '241751506000194 tgl. 1/3/2024
			5.817.800,00	Pengembalian Uang Makan PNS bulan Desember 2023 untuk 81 pegawai pada satker Deputy 3 NTPN 884047QLUOT2ARPL tgl. 3/3/2024
			2.871.523,00	Pengembalian Gaji Induk Desember 2023 an. Dayana pada satker Deputy 1 NTPN BFD603CIFK1LH7RE tgl. 23/3/2024
			69,00	berupa Kekurangan Gaji Oktober-Desember 2023 untuk 2 pegawai/ 6 jiwa pada satker Deputy 1, SPM No. 00926T tgl. 22/3/2024, SP2D '241751302008341 tgl. 25/3/20254
			652.658,00	berupa Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 122 pegawai/ 283 jiwa pada satker Deputy 4, SPM No. 00647T tgl. 5/3/2024, SP2D '241751506000326 tgl. 1/4/2024
			227.777,00	berupa Gaji Induk April 2024 untuk 239 Pegawai/531 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No. 00645T tgl. 5/3/2024, SP2D 241751506000327 tgl. 1/4/2024
			361.886,00	berupa Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 260 pegawai/ 608 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No. 00675T tgl. 6/3/2024, SP2D 241751506000325 tgl. 1/4/2024
			652.244,00	berupa Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 296 pegawai/ 661 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM. No. 00690T tgl. 6/3/2024, SP2D 241751506000328 tgl.1/4/2024
			227.777,00	berupa Gaji Induk Mei 2024 untuk 238 Pegawai/535 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No. 01170T tgl. 2/4/2024, SP2D 241751506000592 tgl. 1/5/2024
			361.886,00	berupa Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 257 pegawai/ 599 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No.01175T tgl.2/4/2024 SP2D 241751506000594 tgl. 1/5/2024
			652.244,00	berupa Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 296 pegawai/ 663 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No.01171T tgl.2/4/2024, SP2D 241751506000593 tgl. 1/5/2024
			5.736.848,00	berupa Kekurangan Gaji Maret 2021-Desember 2023 untuk 1 pegawai/ 1 jiwa an. Nurul Affah pada satker Deputy 1 SP2D 241751302015379 tgl. 13/5/2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			227.777,00	pengembalian Gaji Induk Juni 2024 untuk 238 Pegawai/535 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM no. 01592T tgl. 7/5/2024, SP2D 241751506000756 tgl. 1/6/2024
			361.886,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Juni Tahun 2024 untuk 257 pegawai/ 601 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No.01566T tgl. 7/5/2024, SP2D 241751506000760 tgl. 1/6/2024
			652.244,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Juni Tahun 2024 untuk 296 pegawai/ 664 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No. 01569T tgl. 8/5/2024, SP2D 241751506000759 tgl. 1/6/2024
			10.609.830,00	Pengembalian Tunjangan Suami Juli 2022 sd Desember 2023 (bag. Gaji) NTPN 9693E2G4VPNV6V5M tgl. 13/6/2024
			227.777,00	pengembalian Gaji Induk Juli 2024 untuk 238 Pegawai/534 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No.02255T tgl.4/6/2024, SP2D 241751506000964 tgl. 1/7/2024
			361.886,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Juli Tahun 2024 untuk 258 pegawai/ 604 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No.02216T tgl. 4/6/2024, SP2D 241751506000961 tgl. 1/7/2024
			652.244,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Juli Tahun 2024 untuk 296 pegawai/ 665 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No. 02218T tgl. 4/6/2024, SP2D 241751506000963 tgl. 1/7/2024
			227.777,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Agustus 2024 untuk 235 Pegawai/530 Jiwa pada Satker Deputy 2, SPM No.02993T tgl.15/7/2024, SP2D 241751506001061 tgl. 1/8/2024
			361.886,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 258 pegawai/ 606 jiwa pada satker Deputy 3, SPM No. 02832T tgl. 4/7/2024, SP2D 241751506001059 tgl. 1/8/2024
			652.244,00	pengembalian Gaji Induk Bulan Agustus Tahun 2024 untuk 296 pegawai/ 672 jiwa pada satker Sekretariat Utama, SPM No.02833T tgl. 4/7/2024, SP2D 241751506001062 tgl. 1/8/2024
			2.563.700,00	Pengembalian gaji Induk Januari 2021 NTPN BDC5E7QLUP9PMVO0 tgl. 5/8/2024
			407.904,00	Pengembalian Gaji Induk bulan Desember 2023 an Yuniar Marpaung Dep 2 NTPN 525506U8EUQ1NUCV tgl. 19/8/2024
			1.021.072,00	Pengembalian Gaji Induk September untuk 1.023 pegawai/2.2784 jiwa pada satker Sestama, No. SPM 03392T tgl. 6/8/2024, SP2D 241751506001206 tgl. 1/9/2024
			325.000,00	Pengembalian Tunjangan Fungsional Desember 2023 an. Anselma NTPN 3D00C55DF9O8JGV9 tgl. 20/9/2024
			1.021.072,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Oktober Tahun 2024 pada satker Sestama sesuai SP2D No. 241751506001289 tgl.1/10/2024, SPM no.03787T tgl. 6/9/2024
			817,00	Pengembalian belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji KGB Periode Maret 2021- Desember 2023 untuk 4 pegawai/ 8 jiwa pada satker Sekretariat Utama dan Deputy 3 sesuai SP2D No. 241751302049257 tgl. 2/10/2024, SPM no. 04078T tgl. 1/10/2024
			320,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji November 2022-Desember 2023 pada Satker Sestama sesuai SP2D no. 241751302053459 tgl. 22/10/2024, SPM no. 04337T tgl. 21/10/2024
			1.021.072,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan November Tahun 2024 pada satker Sestama sesuai SP2D No. 241751506001384 tgl. 1/11/2024, SPM N0.04141T tgl. 4/10/2024
			1.021.072,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Desember Tahun 2024 pada satker Sestama sesuai SP2D no. 241751506001489 tgl. 1/12/2024
			1.222,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Desember 2022-Desember 2023 pada satker Sestama sesuai SP2D No. 241751302063866 tgl. 17/12/2024
2	Ittama	90.590,00	31.850,00	Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2023 sesuai NTPN 8E8A20NA0448MMR4 tanggal 12 Januari 2024
			58.740,00	Pengembalian Tukin Bulan Desember 2023sesuai NTPN BC87A48VVEDMUPAO tanggal 12 Januari 2024
3	PPOMN	12.700.928,00	10.619.550,00	Pengembalian uang makan bulan bulan desember 2023, NTPN No. F492755DF90N5I4D Tgl. 29-01-2024
			431.062,00	Pengembalian tunjangan kinerja bulan desember 2023, NTPN No. 0EF7F6U8EU5FVQ1T Tanggal 29-01-2024
			1.650.316,00	Pengembalian Gaji Pegawai bulan okt-des 2023 , SP2D No. 241751302001550 Tanggal 06-02-2024
4	PUSAKOM	4.354.138,00	699.850,00	pengembalian uang makan bulan Desember 2023, NTPN no DF047QLUONTL27Q tanggal 31 Januari 2024
			324.288,00	pengembalian tukin PNS bulan desember 2023, NTPN no 597E06U8EU5H82K9 tanggal 31 Januari 2024
			3.330.000,00	Pengembalian tunjangan umum PNS TAYL, potongan SPM nomor 00146 tanggal 19 Juni 2024 dan SP2D nomor 241751302024603
5	PUSDATIN	3.263.083,00	314.983,00	Pengembalian atas Tunjangan Kinerja Bulan Desember TA 2023 sebesar Rp314.983,00 telah disetorkan ke negara pada 18 Januari 2024, dengan kode NTPN 3F1D355DF90CBK6T
			2.948.100,00	Pengembalian atas Uang Makan Bulan Desember TA 2023 sebesar Rp2.948.100,00 telah disetorkan ke negara pada 18 Januari 2024, dengan kode NTPN 4AFE7QLUONHHS0
6	PPSDM	522.000,00	41.000,00	Pengembalian Uang Makan Anastasia Permata, S.Psi, M.Psi. dkk (8 orang) TA 2023 NTPN No. EC2F96U8EU4UDJGN Tgl 11/01/24
			481.000,00	Pengembalian Uang Makan Syamsidar Thamrin, ST, MBA TA 2023 NTPN No. 906AF7QLUON8EN74 Tgl 08/01/24
7	Balai Besar POM di Jakarta	33.133.389,00	1.831.139,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2023 dengan NTPN Nomor 4A1966U8EU8F0GH6 tanggal 29 Februari 2024
			31.302.250,00	Pengambalian Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2023 dengan NTPN Nomor EAB557QLUP006DF3 tanggal 2 April 2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
8	Balai Besar POM di Bandung	11.025.754,00	363.115,00	Pengembalian Tunjangan Istri Pegawai an. Nandan Kusnandar no SPM 00001 / SP2D 240951507000037 tanggal 1 januari 2024
			363.115,00	Pengembalian Tunjangan Istri Pegawai an. Nandan Kusnandar no SPM 00043 / SP2D 240951507000077 tanggal 1 februari 2024
			555.000,00	Pengembalian tunjangan umum atas Kekurangan Gaji Karena Menduduki Jabatan Fungsional Bulan Oktober-Desember 2023 an Wening Galih no SPM 00042 / SP2D 240951302000223 tanggal 12 januari 2024
			257.940,00	Pengembalian Belanja Pegawai 511122 Tunjangan Anak a.n. Salma Zahra Bulan Agustus-Desember 2023 no SSBP 4FC770NA0447KONG tanggal 18 januari 2024
			1.289.700,00	Pengembalian Belanja Pegawai 511121 Tunjangan Suami a.n. Salma Zahra Bulan Agustus-Desember 2023 SSBP DEF6D48VVEDP8M54 tanggal 18 januari 2024
			105.450,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan 29-31 Agustus 2023 an Komang Andaru Pradipta SSBP 62D240NA044FC42O tanggal 19 januari 2024
			3.276.058,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023 no SSBP EC6B148VVEH4C9IP tanggal 23 februari 2024
			22.976,00	Pengemblian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember 2023 no SSBP A20202G4VPCGV505 tanggal 29 februari 2024
			725.000,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Bulan Juli 2023 no SSBP 0754A6U8EUAJRN07 tanggal 1 maret 2024
			2.350.000,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Bulan Agustus dan September 2023 an Hendraningrum no SSBP 01E511JNFUS9DSO5 tanggal 1 maret 2024
			1.717.400,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Bulan Januari-Oktober 2023 no SSBP 8FCFB0NA04A3HC76 8 maret 2024
9	Balai Besar POM di Semarang	9.361.242,00	2.960.000,00	Pengembalian Tunjangan Umum TA 2023 berupa potongan SPM Nomor 00018T tanggal 12 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 241341303000130 tanggal 15 Januari 2024
			1.480.000,00	Pengembalian Tunjangan Umum TA 2023 berupa potongan SPM Nomor 00032T tanggal 16 Januari 2024 dengan SP2D Nomor 241341303000152 tanggal 16 Januari 2024
			2.676.442,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja TAYL Bulan Desember 2023 sesuai bukti setor dengan NTPN Nomor FC3B36U8EU5BPRN3 tanggal 26 Januari 2024
			2.244.800,00	Pengembalian Uang Makan TAYL Bulan Desember 2023 sesuai bukti setor dengan NTPN Nomor 774896IQV3J4KGE0 tanggal 30 Januari 2024
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	2.638.238,00	261,00	Pembayaran Belanja pegawai Kekurangan Gaji Bulan Desember 2023 sesuai SPM 00007A tanggal 09/01/2024
			164.324,00	pengembalian ;ebh bayar tunjangan kinerja pegawai Bulan November- desember 2023 NTPN E677D1JNFUMUSGRF
			685.503,00	pengembalian lebih bayar tunjangan kinerja Desember 2023 sesuai NTPN B8FAB3CIFJUB2TSQ
			1.788.150,00	pengembalian Lebih Bayar Uang Makan Desember 2023 Sesuai NTPN F8F802G4VPBULTO6
11	Balai Besar POM di Surabaya	30.565.280,00	22.976,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan Desember 2023 an Dhea Ardhyta dengan NTPN 7D9541JNFUN060DV tanggal 25 Januari 2024
			35.150,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai PPPK bulan Desember 2023 an M. Haris Pamungkas dengan NTPN 7D9541JNFUN060DV tanggal 25 Januari 2024
			671.458,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember 2023 an Hesti Sila R dkk dengan NTPN B854A1JNFFUN1ADA7 tanggal 25 Januari 2024
			666.350,00	Pembayaran Pengembalian Belanja berupa Uang Makan PNS bulan Desember 2023 dengan NTPN 37E2F6U8EU5CPQ7D tanggal 26 Januari 2024
			22.976,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2023 an Whima Lestari dengan NTPN 7884855df95U8BHS tanggal 5 Maret 2024
			29.146.370,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Pegawai berupa berupa Tunjangan Isteri dan Tunjangan Beras an Wiwin Winarto, A.Md dengan NTPN D5F3F7QLUPLHSJUO tanggal 26 November 2024
12	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.326.964,00	3.326.964,00	pengembalian uang makan dan Tunjangan Kinerja Desember 2023 dengan NTPN No 55BBA3CIFJRQ2P31 tanggal 25 Januari 2024
13	Balai Besar POM di Medan	9.695.176,00	231,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Tarif Baru bln Januari - Februari 2024 dan KGB bulan Feb 2023 - Des 2023 untuk 1 pegawai/4jiwa No Sp2d 240041301002420 Tgl 2 MJaret 2024
			203,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji KGB TMT 1 Agustus 2023 dan 1 Desember 2023 untuk 10 orang pegawai No Sp2d 24004130100548 Tgl 7 Februari 2024
			90,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji KGB TMT 1 Desember 2023 untuk 7 orang pegawai No Sp2d 240041305000122 Tgl 7 Februari 2024
			41,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji KGB bulan Desember 2023 untuk 2 pegawai 7 jiwa.No Sp2d 240041305001236 Tanggal 12 Juni 2024
			978,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Pokok bulan Januari - Februari 2024 , KGB bulan Nov 2022 - Des 2023 untuk 5 pegawai/15 jiwa No Sp2d 240041305000512 Tgl 26 Maret 2024
			555.150,00	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Tunjangan Fungsional bln Juli - September thn 2023 untuk 1 pegawai 1 jiwa No Sp2d 240041305000965 Tgl 15 Mei 2024
			472.700,00	Pengembalian Uang Makan bulan Desember 2023 No NTPN ACE9955DF99FVKHE
			361.881,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja bulan Desember 2023 No NTPN 4F2C555DF99FVKC5 Tanggal 25 April 2024
			4.891.902,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Periode Bulan Desember2023 No NTPN B3EE90NA04AJFCMP Tanggal 26 Maret 2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			3.412.000,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Periode Bulan Desember 2023 No NTPN 7593055DF96HGCEH Tanggal 26 Maret 2024
14	Balai Besar POM di Padang	8.316.626,00	1.482.476,00	Pengembalian Tukin PNS dan Tukin PPPK bulan Desember 2023 NTPN E6D9B48VVEGPJ2KG tgl 12 Februari 2024
			35.150,00	Pengembalian Uang Makan PPPK bulan Desember 2023 NTPN E21C87QLUOTMQ19S tgl 25 Maret 2024
			6.799.000,00	Pengembalian Uang Makan PNS bulan Desember 2023 NTPN 7712E61QV3OU00V5 tgl 25 Maret 2024
15	Balai Besar POM di Pekan Baru	462.094,00	462.094,00	pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2023 pegawai dengan NTPN 8EB9655DF9RDMLI0 tanggal 25 Oktober 2024
16	Balai Besar POM di Palembang	6.643.865,00	2.504.100,00	Pengembalian tunjangan jabatan PPPK dengan NTPN: 7924455DF905IRQP tanggal 12 Januari 2024
			503.765,00	Pengembalian pembayaran tunjangan kinerja dengan NTPN: 7A2C361QV3LD2DML tanggal 6 Februari 2024
			3.636.000,00	Pengembalian pembayaran tunjangan kinerja dengan NTPN: 902810NA047GI5G3 tanggal 21 Februari 2024
17	Balai Besar POM di Bandar Lampung	5.199.249,00	1.571.000,00	pengembalian belanja pegawai TAYL berupa uang makan PNS Bulan Desember 2023 dengan NTPN 813976U8EUBDP1G4 tanggal 28 maret 2024
			2.714.649,00	Pengembalian Belanja Pegawai TAYL (Pala Ratna Dewi) NTPN : 285AC7QLUPOMKHTT tanggal 31 Desember 2024
			913.600,00	Pengembalian belanja pegawai berupa uang makan bulan Desember 2023 NTPN : 7D76EN61QV4D9AOQF tanggal 08 Oktober 2024
18	Balai Besar POM di Pontianak	982.700,00	982.700,00	Pengembalian uang makan bulan Desember 2023 NTPN : BA3136U8U59C7N9 tanggal 22 Januari 2024
19	Balai Besar POM di Palangkaraya	2.721.996,00	68.297,00	pengembalian belanja tukin bulan desember tahun 2023 atas nama dijah NTPN 7EF196U8EU5G43K3 tanggal 30 januari 2024
			35.150,00	pengembalian belanja uang makan PPPK bulan desember 2023 atas nama mufti NTPN 0FAEE3CIFJRUG11F tanggal 30 januari 2024
			210.300,00	pengembalian belanja uang makan PNS sebanyak 5 orang bulan desember 2023 NTPN A79306U8EU5G43QV tanggal 30 januari 2024
			2.408.249,00	pengembalian belanja gaji bulan agustus atas nama romi NTPN 56D6461QV3M1FT4V tanggal 28 Februari 2024
20	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.449.550,00	1.449.550,00	Pengembalian uang makan bulan desember 2023 NTPN EF83B3CIFJU6NA9C tanggal 6 Februari 2024
			390.510,00	pengembalian Tunjangan Kinerja pegawai PNS bulan Desember 2023 NTPN No.572C0NA0477QU71 tanggal 13 Februari 2024
21	Balai Besar POM di Samarinda	3.842.481,00	3.015.700,00	· pengembalian Uang Makan pegawai PNS bulan Desember 2023 NTPN No.963034VVEGPF2E Tanggal 13 Februari 2024
			105.150,00	· pengembalian Uang Makan pegawai PNS bulan Desember 2023 NTPN No.2847A6aQV3UUCECS Tanggal 27 Mei 2024
			280.600,00	· merupakan pengembalian Uang Makan pegawai PNS bulan November 2023 NTPN No.44BE1JNFV30BFJM Tanggal 27 Mei 2024
			34.850,00	· pengembalian Uang Makan pegawai PNS bulan November 2023 NTPN No.906B82G4VPLEU6FA Tanggal 27 Mei 2024
			15.671,00	· pengembalian Tunjangan Kinerja pegawai PNS bulan Desember 2023 NTPN No.3480148VVEQ7O7D6 tanggal 29 Mei 2024.
22	Balai Besar POM di Makassar	7.944.838,00	5.148.600,00	Pengembalian kelebihan belanja uang makan bulan Desember TA 2023 sesuai NTPN 8F48D2CPQ8892S86 Tanggal 31 Mei 2024
			2.796.238,00	Pengembalian tukin bulan April-Desember 2023 Sesuai NTPN E4D7345KPUZG11FH Tanggal 31 Mei 2024
23	Balai Besar POM di Denpasar	10.235.320,00	386.650,00	Pengembalian Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023 a.n I Dewa Agung Ayu Istri Dhan Permata Dewi dkk dengan nomor NTPN E220B55DF95U91GI
			1.681.970,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja bulan Desember 2023 a.n Cok Istri Putra Nuriatini, S.Tp dkk dengan nomor NTPN F720B7QLUOT3G24H
			8.166.700,00	Pengembalian Uang Makan bulan Desember 2023 a.n A. A. Istri Puspitayani, SH dkk dengan nomor NTPN 0326C3CIFK15EVK4
24	Balai Besar POM di Jayapura	1.266.550,00	280.300,00	Pengembalian Kelebihan pembayaran uang makan PNS bulan Desember 2023 beradaskrn NTPN nomor 1B0841GCACGKDN2N tanggal 04 Januari 2024
			105.450,00	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan PPPK bulan Desember 2023 berdasarkan NTPN nomor DBEF28JO913NLN2B tanggal 04 Januari 2024
			155.800,00	Pengembalian kelebihan pembayaran uang lembur ASN bulan Desember 2023 berdasarkan NTPN nomor 16ED45UFPHCIN2S tanggal 04 Januari 2024
			725.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional a.n Rani Eka Kusuma bulan Desember 2023 berdasarkan NTPN nomor A4F7C48VVEPJ515F tanggal 04 Januari 2024
25	Balai Besar POM di Serang	3.577.477,00	735.050,00	Pengembalian Tunjangan Fungsional atas pembayaran kekurangan Gaji Bulan Desember 2023, spd no: 240201302000038 tgl.10/01/2024
			34.850,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Desember 2023 PPPK, NTPN No: AEED68N3EJA24VBF tgl.22/1/24
			202.658,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Desember 2023 PNS BSI, NTPN No: A2F1055DF90K0J5F tgl. 26/1/24
			2.243.450,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Desember 2023 PNS, ntpn no: FBA283CIFJRR6JM9 tgl.26/1/24
			361.469,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja Desember 2023 PNS MANDIRI, ntpn no: 6CD6855DF90K20UP tgl.26/1/24
26	Balai POM di Jambi	17.169.725,00	291.975,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember Tahun 2023 dengan NTPN 4D54961QV3J3HOA2 tanggal 29 Januari 2024
			16.877.750,00	Pengembalian Uang Makan Pegawai Bulan Desember Tahun 2023 Desember Tahun 2023 dengan NTPN No.1B25B3CIFJRUAMJA tanggal 29 Januari 2024
27	Balai POM di Palu	5.042.962,00	2.563.850,00	Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai TA 2023 (hasil temuan audit operasional), NTPN No. E6A4F3CIFK7C51R0 tanggal 14 Mei 2024
			528.762,00	Pengembalian kurang potong pembayaran tunjangan kinerja TA 2023 (hasil temuan audit operasional), NTPN No. F13A31JNFV2JB1MD tanggal 14 Mei 2024
			1.856.950,00	Pengembalian perhitungan kembali kelebihan pembayaran uang makan pegawai TA 2023, NTPN No. 6DB102G4VPRF8B87 tanggal 31 Juli 2024
			93.400,00	Pengembalian atas perhitungan kembali kekurangan potong tunjangan kinerja pegawai TA 2023, NTPN No. 793B02G4VPRF8EC0 tanggal 31 Juli 2024
28	Balai POM di Kendari	5.230.150,00	582.000,00	Pengembalian Kelebihan bayar Tunjangan Kinerja bulan Desember TA 2023 dengan No NTPN : AFD46QT9DQRU993 tgl setor 5 maret 2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			4.595.150,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai An. Galen bulan Desember 2023 dengan No NTPN : FF3E355DF9I66NN6 tgl setor 23 Juli 2024
			53.000,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai An. Gede Pari bulan Desember 2023 dengan No NTPN : 110C248VVEVJ6U08 tanggal setor 16 Juli 2024
			3.132.760,00	Pengembalian belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan Oktober-November 2023 TA 2023 a.n Sri Wahyuni, NTPN No : 12A562G4VP8U5TA8 Tanggal 09/01/24
29	Balai POM di Ambon	10.239.096,00	1.566.380,00	Pengembalian belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember 2023 a.n Sri Wahyuni, NTPN No : 1882B61QV3LBUCQ2 Tgl 05/02/24
			239.168,00	Pengembalian belanja tunjangan kinerja bulan Desember 2023 a.n Ninda T.Msihombing, NTPN No : 727F748VVEEC2K56 Tgl 07/02/24
			169.000,00	Pengembalian belanja pegawai berupa uang makan pegawai bulan Desember 2023, NTPN No : 9627948VVEH4DIEH Tgl 23/02/24
			5.131.788,00	Pengembalian belanja pegawai berupa kelebihan pembayaran tunjangan pegawai dan uang makan albertina dkk TA. 2023, NTPN No : 763B26U8EUPR218T Tgl 12/08/24
30	Balai POM di Kupang	7.796.099,00	4.658.000,00	Pengembalian Uang Makan PNS dan PPPK Bulan Desember 2023 dan telah disetorkan dengan NTPN DC79A7QLUONLSAJ2 tanggal 23 Januari 2024
			3.032.799,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Oktober 2023 dan telah disetorkan dengan NTPN F37027QLUOT3CNJC tanggal 5 Maret 2024
			105.300,00	Pengembalian Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 dan telah disetorkan dengan NTPN 04F0E6U8EUT90VKM tanggal 27 September 2024
31	Balai POM di Bengkulu	241.750,00	241.750,00	Pengembalian tunjangan kinerja bulan desember tahun 2023 an Nurussaumi sesuai nomor NTPN 362987QLUOQLVEEL tanggal 26 Februari 2024
32	Balai POM di Batam	4.567.449,00	3.204.900,00	Pengembalian Gaji Induk Bulan Agustus 2023 an Sri Endah Budi Astuti, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 16 Januari 2024 No NTPN 8FE9E55DF909U54T tanggal 15 Januari 2024
			413.799,00	Pengembalian Kelebihan Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2023, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 23 April 2024 no NTPN B35AB55DF99EN341 tanggal 23 April 2024
			210.900,00	Pengembalian Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 23 April 2024 No NTPN FA1C22G4VPT9G2HV
			737.850,00	Pengembalian Uang Makan PNS Bulan Desember 2023, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 23 April 2024 No NTPN 4957E2G4VPT9G2BS
33	Balai POM di Sofifi	1.270.821,00	175.750,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa uang makan bulan Desember tahun 2023 atas 1 pegawai hal ini berdasarkan temuan inspektorat NTPN AA43C1JNFB8DSBEA tanggal 09 Juli 2024
			175.150,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa uang makan bulan Desember tahun 2023 atas 3 pegawai hal ini berdasarkan temuan inspektorat NTPN 1B11F0NA04M1F97N tanggal 09 Juli 2024
			919.921,00	Pengembalian Belanja Pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember tahun 2023 atas 9 pegawai hal ini berdasarkan temuan inspektorat NTPN DCBB52G4VPQQ97F3 tanggal 09 Juli 2024
34	Balai POM di Mamuju	10.082.800,00	10.082.800,00	Pengembalian Uang Makan 44 orang pegawai (NTPN 4A6696U8EUN17P9D tanggal 18 Juli 2024)
35	Balai POM di Pangkal Pinang	228.176,00	228.176,00	pengembalian tunjangan kinerja bulan desember 2023 a.n Ririn Suprihanti, Nomor NTPN FE4B648VVEDO4ATV Tanggal 10 Januari 2024
36	Balai POM di Gorontalo	893.555,00	784.100,00	Pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran uang makan pada bulan Desember 2023 , Nomor NTPN 6E43361QV3M1HRM5 Tanggal 28 Februari 2024
			109.455,00	Pengembalian belanja pegawai atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2023 , Telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 7 Maret 2024, Nomor NTPN 53F9F7QLUOT5M3GI Tanggal 7 Maret
37	Balai POM di Manokwari	1.579.350,00	1.579.350,00	Pengembalian Uang Makan PNS Bulan Desember 2023, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 13 Februari 2024 sesuai dengan NTPN Nomor E85DDONA0478UTKU
38	Balai POM di Surakarta	89.688,00	89.688,00	Pengembalian Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2023 sesuai NTPN A756348VVEDSJKNA tanggal 16 Januari 2024
39	Balai POM di Tasikmalaya	252.410,00	35.150,00	Pengembalian uang makan bulan Desember 2024 an Adi Jati Purnama NTPN C41C46U8EU5AMEOD tanggal 25 Januari 2024
			217.260,00	Pengembalian Tunjangan Beras bulan Januari- Maret 2022 an Wheni Wentika NTPN A62AE1JNFVBA11SDI tanggal 5 Agustus 2024
40	Balai POM di Palopo	1.095.180,00	1.095.180,00	Pengembalian tunjangan fungsional umum atas pembayaran JFT untuk 2 orang Pegawai (Pembayaran kekurangan Tunjangan Fungsional Tahun 2023 untuk 2 orang pegawai) dengan No. SP2D 240581302000586 Tanggal 25 April 2024
41	Balai POM di Bogor	409.026,00	22.976,00	Pengembalian Belanja pegawai Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2023, NTPN B8F940JUQI2N3926 tanggal 19 Januari 2024
			386.050,00	Pengembalian Belanja pegawai Uang Makan Bulan Desember 2023, NTPN CE4952CPQ77FT91U tanggal 19 Januari 2024
42	Balai POM di Tangerang	2.658.765,00	80.415,00	Pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2023, dengan NTPN No C2AF82G4VPC4VSPN Tanggal 16 Februari 2024
			597.100,00	Pengembalian kelebihan uang makan PNS Tahun 2023, dengan NTPN No B3BBB55DF93A72PD Tanggal 16 Februari 2024
			1.981.250,00	Pengembalian tunjangan Istri tahun 2023, dengan NTPN No 5553361QV3LMLF9J Tanggal 16 Februari 2024
43	Loka POM di Kota Lubuklinggau	555.000,00	555.000,00	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL berupa tunjangan jabatan PNS dengan NTPN: FF70F1JNFV5C5S62 tanggal 6 Juni 2024
44	Loka POM di Kabupaten Ende	723.737,00	723.737,00	Pengembalian belanja pegawai tunjangan kinerja bulan Desember 2023 a.n Ni Made Dwi Permanasari, SE sesuai NTPN 312F745KPTA2FQ09 tanggal 19 Februari 2024
45	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	70.000,00	70.000,00	Pengembalian belanja pegawai tunjangan kinerja bulan Desember 2023 a.n Adhas Novita Rp70.000,00 sesuai dengan NTPN 223507QLUONAT2UU tanggal 12 Januari 2024
46	Loka POM di Aceh Tengah	1.084.000,00	1.084.000,00	Pengembalian belanja pegawai Gaji PPPK sebanyak 1 orang a.n Oktami Mulia Dewi sesuai dengan no SPM 0472 A
47	Loka POM di Kota Tanjungbalai	111.000,00	111.000,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan bulan Desember 2023 a.n Mega Gunawan Rp74.000,00 NTPN BA54755DF92VIB80 dan a.n Afriani Srimawati Br Sidauruk Rp37.000,00 NTPN 925B26U8EU7OCCSU

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
48	Loka POM di Kabupaten Sanggau	716.367,00	45.952,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja a.n Monica Silitonga bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor 8C8B155DF905IVJ5 tanggal 11 Januari 2024
			459.515,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja a.n Liesdayanti Resdiana bulan Oktober 2023 dengan NTPN nomor 3F0126U8EU4UCT6L tanggal 11 Januari 2024
			35.150,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Dany Dardanela bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor EFA707QLUONHGUDO tanggal 18 Januari 2024
			35.150,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Kukuh Budhi Prasetyo bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor EFA707QLUONHGUDO tanggal 18 Januari 2024
			105.450,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Dewi Apriyanti bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor EFA707QLUONHGUDO tanggal 18 Januari 2024
			35.150,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Ariella Lionna bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor EFA707QLUONHGUDO tanggal 18 Januari 2024
49	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	621.399,00	89.688,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Novi Hari Trianti bulan Februari 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			89.688,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Novi Hari Trianti bulan Mei 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			89.688,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Novi Hari Trianti bulan Agustus 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			89.688,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Novi Hari Trianti bulan Oktober 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			89.689,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Novi Hari Trianti bulan November 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			68.927,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Muhammad Gana Himamsyan bulan Mei 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			68.927,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Muhammad Gana Himamsyan bulan September 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
			35.104,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Arinto Nugraha Damara Tanjung bulan Desember 2023 dengan NTPN nomor 7E6140NA04AMQNFH Tanggal 28 Maret 2024
50	Loka POM di Kabupaten Belitung	70.200,00	35.100,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Asruddin bulan Desember 2023 sesuai NTPN DEC0A7QLUP3A3AEP/1 tanggal 31 Juli 2024
			35.100,00	Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan a.n Megi Okta Rizki bulan Desember 2023 sesuai NTPN DEC0A7QLUP3A3AEP/1 tanggal 31 Juli 2024
51	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	91.903,00	91.903,00	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Kinerja a.n Forlifson Marpaung bulan Desember 2023 sesuai NTPN 5A9E57QLUP01B830 tanggal 3 April 2024
TOTAL		342.258.955,00	342.258.955,00	

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	87.619.019,00	4.504.000	Pengembalian Perjadin an. Henri Agus dkk (Roum PBJ) NTPN 9236B61QV3IBDIL4 tgl. 4/4/2024
			361.000	Pengembalian Perjadin an. Henri Agus dkk (Rpum PBJ) NTPN 725FB3CIFJR66GQ9 tgl.4/1/2024
			7.410.361	Pengembalian perjadin an Tri Indarsih dkk (ROUM BMN) NTPN 7DE837QLUON47JUE tgl. 8/1/2024
			738.473	Perjalanan dinas ke Aceh Tengah, Semarang, dan Bogor an. Ichvan Hanny dkk (Roum) NTPN BAC4361QV3ICFVTE tgl. 8/1/2024
			1.037.000	Perjalanan Dinas ke Tangerang dan Bogor an. Ananda Sekar Rahmi NTPN 3ABCF55DF90032EV tgl. 8/1/2024
			20.400	Pengembalian Perjadin an. Henri Agus dkk NTPN 188A57QLUON5A19S tgl. 8/1/2024
			2.811.967	Perjalanan dinas ke Aceh Tengah, Semarang dan Yogyakarta an. Antonius Tarigan dkk NTPN 406C68N3EJ9HMPV5 tgl. 8/1/2024
			6.227.454	Pengembalian Perjadin an. Henri Agus dkk (Roum) 315518N3EJ9JUI2H tgl. 10/1/2024
			20.471.406	Pengembalian Perjadin Fullboard Meeting an Dra. Rita Mahyona (Roum) NTPN 185CA55DF96EB7NL tgl. 22/3/2024
			1.148.000	Pengembalian atas temuan Inspektorat TA 2023 berupa sewa mobil keg intelijen dan operasi Penindakan NTPN F81DD6U8EUDKTSIC tgl. 3/4/2024
			303.591	Pengembalian perjadin Sektama (seat charge dan asuransi perjalanan) TL BPK TA 2023 NTPN C82FD7QLUP3A5I90 tgl. 13/5/2024
			10.258.669	Pegembalian kelebihan bayar atas pekerjaan peresmian peningkatan klasifikasi dan pembentukan UPT BPOM TA 2023 (Hukor) NTPN AB2D461QV3UJGI9P tgl. 15/5/2024
			5.624.983	Pengembalian Penutupan KKP (Bayu Wibisono) NTPN 1E61D55DF9F7NCUU tgl. 16/6/2024
			16.000.000	Pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 3229D3CIFKABOHD3 tgl. 19/6/2024
			4.000.000	Pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 2132461QV41M9THA tgl. 24/6/2024
			6.701.715	Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan Sewa Gudang Barang Bukti 2023 NTPN 91C0F48VVEVNIA55 tgl. 18/7/2024
2	Ittama	500.000,00	500.000,00	Penerimaan kembali Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu Sesuai NTPN 076F455DF903C2ID tanggal 11 Januari 2024 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas atas penginapan di Banjarmasin tahun 2023
3	PPOMN	3.939.341,00	3.939.341,00	Pengembalian perjalanan dinas atas seat charge dan asuransi perjalanan (tindak lanjut temuan BPK TA 2023)
4	PPSDM	46.997.051,00	1.078.500,00	Pengembalian belanja barang atas SPM No. 01161T Biaya Riset Tugas Belajar NTPN No.1C11A6U8EU4NR1VP Tgl 01/01/24
			8.488.150,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 01248T Biaya Riset Tugas Belajar NTPN No.7F14C8N3EJ9KOV5 Tgl 08/01/24
			1.417.500,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 00783T Biaya Hidup a.n Nurhasanah Nihe NTPN No.6871C1JNFUMK008V Tgl 15/01/24
			13.475.604,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 01373T Perjalanan Dinas an Dra. Zeta Rina Puji Astuti, Apt, M.Kes. dkk (36 orang) tanggal 20 s.d 23 Desember 2023 NTPN No.072636U8EU4MKGL7 Tgl 03/01/24
			301.000,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 01258T Perjalanan Dinas a.n Heru Kristianto, S.T tanggal 18 s.d 20 Desember 2023 74D4C48VVEDHDGRM Tgl 03/01/24
			47.020,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 01373T Perjalanan Dinas an Dra. Zeta Rina Puji Astuti, Apt, M.Kes. dkk (36 orang) tanggal 20 s.d 23 Desember 2023 (pengembalian ke-2) E7FA961QV3IFIH6O Tgl 10/01/24
			1.417.500,00	Pengembalian belanja barang atas SPM Nomor 01155T Biaya Hidup a.n Ade Mahendra NTPN No.A07911JNFV8LLHGB Tgl 24/07/24
			4.390.421,00	Pengembalian belanja barang atas atas SPM Nomor 00444T a.n Lin Hofa NTPN No.811D25229SC46OTL Tgl 01/07/24

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			8.051.156,00	Pengembalian Negara Belanja Barang (Bantuan Biaya Riset/Tugas Akhir a.n MELANDA FITRIANA, S.FARM, APT) No SPP 01015T
			4.604.600,00	Pengembalian Negara Belanja Barang (Bantuan Biaya Riset/Tugas Akhir a.n TAUFIQ ALI
			3.725.600,00	Pengembalian Negara Belanja Barang (Bantuan Biaya Riset/Tugas Akhir a.n. Alvian Dumingan, S.Farm., Apt) No. SPP 00622T
5	Balai Besar POM di Jakarta	59.068.490,00	1.281.532,00	Pengembalian Kelebihan pembayaran perjalanan dinas an. Dewi shynta, Dra. Handini, Tenri, Triwagiyanti, Garneta dengan NTPN Nomor 6E38F0NA04454J5M tanggal 8 Januari 2024
			1.325.777,00	Pengembalian Kelebihan pembayaran perjalanan dinas an.Ika Muhti, Bernadhetha Eva dan Dewi Afriani dengan NTPN Nomor 0880E3CIFJRACECD tanggal 8 Januari 2024
			170.000,00	Pengembalian Kelebihan pembayaran perjalanan dinas an.Fatrina dkk dengan NTPN Nomor 616B62G4VP93QDJQ tanggal 16 Januari 2024
			734.181,00	Pengembalian Belanja Barang TA 2023 atas biaya perjalan dinas ST NO. 4685 TGL 08-12-2023 SPM NO. 1110 dengan NTPN Nomor B267E6U8EU7L9G1J tanggal 2 Februari 2024
			600.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang atas SPM No. 1125 TA 2023 dengan NTPN Nomor 8B36C55DF93CEEF0 tanggal 19 Februari 2024
			20.000.000,00	Kelebihan pembayaran belanja barang pengadaan jasa keamanan dan pengamanan lingkungan kantor TA 2021 dengan NTPN Nomor EB4FB55DF93FOR0A tanggal 23 Februari 2024
			600.000,00	Pengembalian belanja barang atas kelebihan pembayaran dinas workshop registrasi pangan olahan TA 2023 dengan NTPN Nomor 0D8136U8EUB3O2VR tanggal 18 Maret 2024
			2.544.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran BPJS kesehatan atas pekerjaan jasa keamanan dan pengamanan lingkungan kantor BBPOM Jakarta TA 2023 dengan NTPN Nomor B34951JNFUVUBO45 tanggal 25 April 2024
			20.000.000,00	Kelebihan pembayaran belanja barang pengadaan jasa keamanan dan pengamanan lingkungan kantor an. PT. Putra Naveez Indonesia TA 2021 dengan NTPN Nomor 316B37QLUPIFEMR2 Tanggal 23 Oktober 2024
			11.813.000,00	Kelebihan pembayaran belanja barang pengadaan jasa keamanan dan pengamanan lingkungan kantor an. PT. Putra Naveez Indonesia TA 2021 dengan NTPN Nomor 99A637QLUPKUL1LC Tanggal 5 November 2024
6	Balai Besar POM di Semarang	650.000,00	650.000,00	Pengembalian Perjalanan Dinas TAYL sesuai bukti setor dengan NTPN Nomor 40AED3CIFJUTEQ3T tanggal 1 Maret 2024
7	Balai Besar POM di Surabaya	668.000,00	56.000,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Barang berupa Lembur PPNPN bulan Desember 2023 dengan Nomor NTPN F229748VVEGG1A3K tanggal 2 Februari 2024
			612.000,00	Pembayaran Pengembalian Belanja Barang berupa Perjalanan Dinas Kegiatan Seminar Serving in Harmony Nomor NTPN 442931JNFUPAQ7UI tanggal 2 Februari 2024
8	Balai Besar POM di Padang	50.000,00	50.000,00	pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dalam kota tahun 2023 dengan NTPN D5C2F2CPQ78VJDH4 tanggal 24 Januari 2024
9	Balai Besar POM di Pekanbaru	2.897.552,00	197.500,00	Pengembalian belanja perjalanin SPM 620/2024 ST.218 NTPN 2E3C31JNFUQ3GKQC tanggal 28 Februari 2024
			4.240,00	Pengembalian belanja perjalanin SPM 646/23 ST.222 NTPN 5341B55DF93L4NFJ tanggal 28 Februari 2024
			40.380,00	Pengembalian belanja perjalanin perjalanin ST.1286 NTPN D346055DF93L6HC2 tanggal 28 Februari 2024
			2.655.432,00	Pengembalian perjalanin TA 2023 3165.BKB.001.051.U524111 NTPN 078755DFA138RE1 tanggal 16 Desember 2024
10	Balai Besar POM di Palembang	12.179.670,00	11.426.562,00	Pengembalian perjalanan dinas NTPN: 58F7048VVEDTLQJ2 tanggal 16 Januari 2024
			3.108,00	Pengembalian perjalanan dinas NTPN: BCD752G4VPBRECFFJ tanggal 6 Februari 2024
			750.000,00	Pengembalian perjalanan dinas NTPN: 0B21A48VVEGV6T6DB tanggal 20 Februari 2024
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3.056.310,00	750.000,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN 808876QT9C27P7HJ, tanggal 15/01/2024
			347.530,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN EDC1B5229MTEV7KV, tanggal 15/01/2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
			238.510,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN EDC1B5229MTEV7KV, tanggal 15/01/2024
			42.530,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN BD1115229MTEV7O3, tanggal 15/01/2024
			124.240,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN 077D30JUQ1GU7OS, tanggal 15/01/2024
			200.000,00	pengembalian belanja perjalanan dinas ,NTPN 077D30JUQ1GU7OS, tanggal 15/01/2024
			1.353.500,00	pengembalian Honor SAI dan PPK an Midarwati dkk NTPN : 6C26955DF9QSTNMO tanggal 08/10/2024
12	Balai Besar POM di Pontianak	2.464.000,00	2.464.000,00	Pengembalian Honorarium Pengelola PNBPN Bulan Januari s/d Desember 2023, NTPN : 15BB248VVEGSTHU5 tanggal 20 Februari 2024
13	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.835.000,00	1.590.000,00	Pengembalian belanja perjalanan dinas, NTPN 10E2055DF90OG219, Tanggal 01/02/2024
			245.000,00	Pengembalian belanja perjalanan dinas, NTPN 2832F48VVEDETE5LS, Tanggal 16/01/2024
14	Balai Besar POM di Samarinda	6.200.000,00	5.600.000,00	Pengembalian Belanja sewa kendaraan operasi intelijen tahun 2023 NTPN No.3E7643CIFK7P5E1A tanggal 27 Mei 2024
			600.000,00	Pengembalian Belanja honor Uang Representative tahun 2023 NTPN No.CBF193CIFK7QBMP5 tanggal 29 Mei 2024
15	Balai Besar POM di Denpasar	730.000,00	730.000,00	Pengembalian belanja barang berupa uang harian perjalanan dinas Bulan Desember 2023 an. Drs. I Wayan Eka Ratnata, dkk (2 orang) dengan nomor NTPN 0BF6F55DF9LHPVF2.
16	Balai Besar POM di Jayapura	13.560.746,00	445.946,00	Pengembalian Belanja Barang berupa kelebihan pembayaran APAR tahun 2023 berdasarkan NTPN nomor CD8AB61QV3LV9GRH tanggal 26 Februari 2024
			1.305.500,00	Pengembalian Belanja Barang berupa pembayaran honor SPK TA 2023 beedasarkan NTPN 2FAC48VVF084ERD tanggal 31 Juli 2024
			11.809.300,00	Pengembalian Belanja Barang atas pemeliharaan gedung berupa pengecatan dan pengerikan Gedung Kantor Balai Besar POM di Jayapura berdasarkanNTPN nomor 2437F55DF9LB4PGG tanggal 21 Agustus 2024
17	Balai Besar POM di Serang	11.595.274,00	602.810,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 872, NTPN no: A25D93CIFJR52G67, tgl 3/1/24
			1.620.040,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 874, NTPN no: 4299E61QV3IA9H0I, tgl 3/1/24
			2.031.500,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 883, NTPN no: CE8D748VVEDHFIGU, tgl 3/1/24
			3.133.170,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 875, NTPN no: E96B82G4VP8OLJES, tgl.3/1/24
			576.000,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 884, NTPN no:D84B02G4VP8OLKMI, tgl 3/1/24
			32.000,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 887, NTPN no:CF68155DF8VTSKTR, tgl 3/1/24
			1.064.316,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 871, NTPN no:61D982G4VP8OLLTU, tgl. 3/1/24
			2.535.438,00	Pengembalian Belanja Barang Perjadin SPM 869, NTPN no:5FC4561QV3IA9MD2, tgl.3/1/24
18	Balai POM di Jambi	1.365.000,00	600.000,00	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai BPOM di Jambi Tahun 2023 sesuai NTPN 002E12G4VP9ERCQM tanggal 26 Januari 2024
			765.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran honor PJ PNBPN per Agustus-Desember 2023 an Veramika Ginting Sesua NTPN 800B255DFA0N3UOB Tgl 03/12/2024
19	Balai POM di Palu	1.174.535,00	427.860,00	Kekurangan pungutan pajak belanja TA 2023 (hasil temuan Audit Operasional), NTPN No. D961A55DF9C4V21P tanggal 14 Mei 2024
			205.800,00	Kelebihan pembayaran biaya penginapan perjalanan dinas TA 2023 (hasil temuan Audit Operasional), NTPN No. A270B7QLUP3A61UU tanggal 14 Mei 2024
			540.875,00	Pengembalian terkait Temuan Audit Operasional terhadap perhitungan kembali kekurangan pungutan pajak belanja TA 2023, NTPN No. 30D0E3CIFKD01K12 tanggal 2 Juli 2024
			1.424.856,00	Pengembalian LS SPM No. 409 dengan No NTPN : A34FD2CPQ843GQOV tgl setor 15 Februari 2024
			5.850.000,00	Pengembalian LS SPM No. 458 dengan No NTPN : 250D32CPQ776C1GC tgl setor 18 Januari 2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
20	Balai POM di Kendari	10.725.823,00	863.650,00	Pengembalian LS SPM No. 392A dengan NO NTPN : 9BB9B0JUQJPRHR5H tgl setor 4 maret 2024
			4.000,00	Pengembalian LS SPM No.385 NTPN : 348CC5229NR8NQ70 tgl setor 15 Februari 2024
			168.008,00	Pengembalian LS SPM No. 392 NTPN : 467B548V/VET563KQ tgl setor 27 juni 2024
			1.650.000,00	Pengembalian LS Kegiatan dalam kota Infokom NTPN : 0DDFE61V41U0894 tgl setor 27 juni 2024
			765.309,00	Pengembalian LS SPM No. 357 A NTPN : 8B8E60NA04JJHQNBN tglsetor 27 juni 2024
21	Balai POM di Ambon	5.223.520,00	99.860,00	Pengembalian perjalanan dinas melaksanakan koordinasi di Makassar 2023 Efraim dkk, NTPN No : 3E1320NA044QEMFE Tgl 07/02/24
			193.000,00	Pengembalian biaya perjalanan dinas ke Makassar a.n Tamran dkk, NTPN No : 803053CIFJRVLOUS Tgl 07/02/24
			1.365.160,00	Pengembalian biaya perjalanan dinas melaksanakan studi tiru SMAP di Semarang Bidan dkk, NTPN No : 3DEF60NA044QEQVB Tgl 07/02/24
			1.540.500,00	Pengembalian biaya perjalanan dinas TA 2023 ke Sofifi Ninda dkk, NTPN No : F79993CIFJRVLO6T Tgl 07/02/24
			765.000,00	Pengembalian biaya honor narasumber kegiatan Bimtek kefarmasian Tahun 2023 NTPN : 3612D1JNFV92LH9J tgl setor 30 juli 2024
			1.260.000,00	Pengembalian kekurangan pemotongan PPh honor kegiatan intervensi keamanan PJAS TA 2023, NTPN No : A84326R6CJOAAPAN Tgl 09/08/24
22	Balai POM di Kupang	4.269.003,00	4.269.003,00	Pengembalian uang perjalanan dinas pegawai bulan Desember 2023 dan telah disetorkan dengan NTPN B5AE548VVF63Q1KH tanggal 27 September 2024
23	Balai POM di Batam	1.115.000,00	350.000,00	Pengembalian Kelebihan Trasnpot Perjalanan dinas an Melisa dan Indah Rosdiana, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 15 Januari 2024 No NTPN BCD4A8N3EJ9QJR35
			72.500,00	Pengembalian Kelebihan Penginapan an Indah Rosdiana, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 15 Januari 2024 No NTPN 8B7B248VVEDSIP54
			45.000,00	Pengembalian Kelebihan Penginapan an Rico, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 15 Januari 2024 No NTPN 8C1042G4VP93OPF2
			117.500,00	Pengembalian Kelebihan Penginapan an Therecy, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 15 Januari 2024 No NTPN FE7CE55DF909U7L7
			530.000,00	Pengembalian Kelebihan Penginapan an Maya dan Dormina, Telah disetorkan ke negara pada Tanggal 15 Januari 2024 No NTPN 5E8823CIFJRH48AD
24	Balai POM di Pangkal Pinang	8.683.100,00	5.586.000,00	Denda keterlambatan pengadaan suku cadang dan kolom a.n PT Maja Bintang no. NTPN 6A97D3CIFKGII4KH tanggal 29 Agustus 2024
			3.097.100,00	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas TA. 2023 Nomor NTPN B79030NA04JHBU9J Tanggal 26 Juni 2024 a.n Tiara Rani dkk (6 org)
25	Balai POM di Mamuju	12.175.675,00	12.175.675,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas tahun 2023 (NTPN 4A6696U8EUN17P9DTanggal 18 Juli 2024)
26	Balai POM di Tarakan	887.600,00	443.800,00	Pengembalian kelebihan atas klaim biaya tiket pesawat yang tidak dapat dilakukan refund untuk perjalanan atas nama Christine Natalia Panjaitan No. Kwitansi 1868 tgl 27 - 12 - 2023 dengan No. NTPN EFA627NAP8C25SH5 tanggal 07 Maret 2024
			443.800,00	Pengembalian kelebihan atas klaim biaya tiket pesawat yang tidak dapat dilakukan refund untuk perjalanan atas nama Octavianus Abriyadi No. Kwitansi 1869 tgl 27 - 12 - 2023 dengan No NTPN 892F27NAP8C25SJ8 tanggal 01 Maret 2024
27	Balai POM di Gorontalo	4.861.108,00	4.861.108,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas tahun 2023 , Nomor NTPN FF6EA61QV3M1HQRL Tanggal 28 Februari 2024
28	Balai POM di Manokwari	985.675,00	985.675,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas tahun 2023 , Telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 29 Januari 2024 sesuai dengan NTPN Nomor 4B7F02G4VP9HTKNM

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN YANG LALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
29	Balai POM di Surakarta	157.500,00	157.500,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas tahun 2023, NTPN A756348VVDJSJKNA Tanggal 16 Januari 2024
30	Balai POM di Palopo	3.097.957,00	3.097.957,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas tahun 2023, NTPN E0BD01JNFVBCE99B Tanggal 8 Agustus 2024
31	Balai POM di Bogor	8.955.083,00	57.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 722, NTPN 80C775UFPHFRC7BK tanggal 15 Januari 2024
			638.567,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 933, NTPN 61954397A1MSTRC1 tanggal 9 Januari 2024
			761.413,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1105, NTPN 800A12CPQ769O7KS tanggal 15 Januari 2024
			665.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1106, NTPN D6BAC2CPQ769O7HE tanggal 15 Januari 2024
			280.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1115, NTPN 50C367NAP6KK67G2 tanggal 15 Januari 2024
			3.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1116, NTPN 351025UFPHFRC7GK tanggal 15 Januari 2024
			555.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1117, NTPN B7A2D1GCACI43RF3 tanggal 9 Januari 2024
			82.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1140, NTPN 4B0645UFPHE24RG6 tanggal 9 Januari 2024
			100.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas ST NO 1142, NTPN 5FC5F0JUQI1GU7DK tanggal 15 Januari 2024
			5.813.103,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas Bidang Pemeriksaan, NTPN 43F977NAP6LQB91G tanggal 19 Januari 2024
32	Loka POM di Aceh Tengah	1.859.600,00	70.000,00	Pengembalian belanja barang perjalanan dinas a.n Pinta Veronica G berdasarkan ST No. HM.03.1B.1B4.11.23.205 tanggal 27 Nopember 2023 NTPN No 3021745KPU9LH3A0 tanggal 16 April 2024
			1.789.600,00	Pengembalian belanja barang berupa perjalanan dinas a.n Zulfah berdasarkan ST No.PKA.1B.1B5.11.23.256 tanggal 27 Nopember 2023 NTPN No 68DE11GCAEIGA38C tanggal 16 April 2024
33	Loka POM di Kabupaten Sanggau	869.300,00	689.300,00	Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 berupa Perjalanan Dinas an. Erik Budianto Tampubolon, Monica Silitonga. No Surat Tugas PB 657, dengan NTPN nomor 2C5977QLUON32OFK tanggal 3 Januari 2024
			180.000,00	Pengembalian belanja barang Perjalanan Dinas an Genesius Nova Ginting. No Surat Tugas HM 656 tanggal 11 Desember 2023 dengan NTPN nomor 9139555DF9007E7V tanggal 30 Januari 2024
34	Loka POM di Kabupaten Belitung	1.310.000,00	1.310.000,00	Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp1.310.000,00 dengan NTPN nomor DEC0A7QLUP3A3AEP/1 tanggal 31 Juli 2024 merupakan pengembalian Uang Harian a.n Megi Okta Rizki, Juliyardi, Ildayati, dan Asruddin.
35	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	665.896,00	665.896,00	Pengembalian belanja barang karena terdapat denda keterlambatan pihak ketiga atas kegiatan pemeriksaan kesehatan pegawai tahun 2023 sesuai NTPN DE6B12G4VPL69NDV tanggal 20 Mei 2024
TOTAL		322.391.828,00	322.391.828,00	

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Anggaran Tahun Yang Lalu

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
1	Settama	31.888.890,00	10.000.000,00	pengembalian pekerjaan renovasi entrance lobby Gedung A belakang Gedung A tangga lantai 2 TA 2021 (PT. Humbahas Permai) dengan NTPN 7A2497QLUP0FMEL2 tanggal 19 April 2024
			10.000.000,00	pengembalian pekerjaan renovasi Entrance Lobby Gedung A belakang Gedung A tangga Lantai 2 TA 2021 (PT. Humbahas Permai) dengan NTPN 763296U8EUGVTAVJ tanggal 22 Mei 2024
			11.888.890,00	pengembalian pekerjaan renovasi entrance lobby Gedung A belakang Gedung A tangga Lantai 2 TA 2021 dengan NTPN (PT. Humbahas Permai) (Roum) 2D9441JNFV5IUMVC tanggal 20 Juni 2024.
2	PUSDATIN	75.000.000,00	75.000.000,00	Pengembalian Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Phinisi Satker PUSDATIN oleh CV Dearindo Utama Persada PL.02.08.85.07.23.3583 tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp75.000.000,00 pada tanggal 28 Agustus 2024, Dengan Bukti Penerimaan Negara yaitu kode billing 820240827670931, kode NTB 983051686255, dan kode NTPN BABC32G4VPUBDOCJ
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	8.943.570,00	7.066.312,00	Pengembalian karena kemahalan harga pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan TA 2023 dengan No NTPN DA6C02G4VPFVQI5 tanggal 24 April 2024 penyedia CV KRIDA BHAKTI
			1.877.258,00	Pengembalian kelebihan bayar (kekurangan volume) pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan TA 2023 dengan No NTPN A5B0348VVEN8PLHC tanggal 30 April 2024 penyedia CV KRIDA BHAKTI
4	Balai POM di Kendari	1.279.500,00	1.279.500,00	Pembayaran TGR Atas reviu terhadap inventarisasi barang yang tidak ditemukan di BPOM Kendari yang tercatat sebagai bangunan gedung lainnya dengan setoran NTPN No: F2EF661OV450PVK3 tanggal 6 Agustus 2024
5	Balai POM di Ambon	10.960.939,00	10.960.939,00	Pengembalian kelebihan pembayaran tangga darurat Lab. Mikrobiologi 2023, NTPN No : 362A96U8EUND9HBD Tgl 31/07/24
6	Balai POM Kupang	4.000.000,00	2.000.000,00	Pengembalian Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Perencanaan Renovasi Gedung Kimia tahun 2022 PT. Azevedorpratama sesuai NTPN 9B84B3CIFKPGJBO tanggal 22 November 2024
			2.000.000,00	Pengembalian Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Perencanaan Renovasi Gedung Kimia tahun 2022 PT. Azevedorpratama sesuai NTPN 37D127QLUPOMJ3KV tanggal 31 Desember 2024
7	Balai POM di Pangkal Pinang	8.720,00	8.720,00	kelebihan bayar pengadaan Mic Wireless CV. Air Mas Perkasa, Nomor NTPN 7F16061QV3IAAK66 Tanggal 3 Januari 2024
			450.000.000,00	Pengembalian Belanja Modal atas jaminan pelaksanaan bank garansi pembangunan fisik gedung Balai Pom Sofifi TA. 2023 NTPN 53F601JNFUVNLANO tanggal 23 April 2024

REKAPITULASI PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN YANG LALU

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN : 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Anggaran Tahun Yang Lalu

(dalam rupiah)

NO	NAMA SATKER	NILAI		KETERANGAN
		TOTAL	RINCIAN	
8	Balai POM di Sofifi	1.139.208.891,00	311.104.691,00	Pengembalian atas Belanja Modal Berupa SPM Nihil RPATA TA. 2023 No. 198 SP2D 240620301000099 tanggal 16 April 2024
			378.104.200,00	Pengembalian atas Belanja Modal Berupa SPM Nihil RPATA TA. 2023 No. 199 SP2D 240620301000100 tanggal 16 April 2024
9	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	35.000.000,00	10.000.000,00	Pengembalian kekurangan volume pembangunan gedung kantor Loka POM di Aceh Tengah sesuai dengan NTPN EB8DC0NA04DN89ST tanggal 30 April 2024
			5.000.000,00	Pengembalian kekurangan volume pembangunan gedung kantor Loka POM di Aceh Tengah dengan NTPN DCAC81JNFV03QODP tanggal 30 April 2024
			10.000.000,00	Pengembalian kekurangan volume pembangunan gedung kantor Loka POM di Aceh Tengah dengan NTPN 63EED48VVF8HLN6D tanggal 9 Oktober 2024
			10.000.000,00	Pengembalian kekurangan volume pembangunan gedung kantor Loka POM di Aceh Tengah dengan NTPN A086F1JNFVHHTSH6 tanggal 16 Oktober 2024
10	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	169.382.708,00	169.382.708,00	Pengembalian kelebihan bayar (kekurangan volume) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong TA 2023 dan telah disetor dengan NTPN 84EC90NA04GEMS4U tanggal 22 Mei 2024
TOTAL		1.475.673.218,00	1.475.673.218,00	

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total		
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
1	432731 SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	237.625.153.000	237.416.011.985	(99.91%)	176.045.240.000	162.499.390.225	(92.31%)	11.340.463.000	7.511.449.027	(66.24%)	425.010.856.000	407.426.851.237	95,86%
2	433005 INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	8.191.750.000	8.177.024.409	(99.82%)	18.929.481.000	17.159.261.211	(90.65%)	572.000.000	571.998.506	(100.00%)	27.693.231.000	25.908.284.126	93,55%
3	445155 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	-	-	0.00%	52.337.449.000	48.723.195.629	(93.09%)	2.128.332.000	2.128.330.868	(100.00%)	54.465.781.000	50.851.526.497	93,36%
4	445161 DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	-	-	0.00%	51.394.022.000	48.086.096.350	(93.56%)	2.207.061.000	2.107.039.240	(95.47%)	53.601.083.000	50.193.135.590	93,64%
5	445170 DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	-	-	0.00%	64.183.526.000	59.136.668.175	(92.14%)	2.959.353.000	2.959.351.550	(100.00%)	67.142.879.000	62.096.019.725	92,48%
6	632437 DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	-	-	0.00%	36.692.609.000	34.784.087.693	(94.80%)	1.376.589.000	1.376.060.060	(99.96%)	38.069.198.000	36.160.147.753	94,99%
7	632420 PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	18.123.525.000	18.078.386.254	(99.75%)	43.708.883.000	40.356.550.051	(92.33%)	7.650.000.000	7.649.600.197	(99.99%)	69.482.408.000	66.084.536.502	95,11%
8	632441 PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	3.584.783.000	3.582.048.072	(99.92%)	14.765.635.000	13.443.176.468	(91.04%)	388.560.000	387.722.400	(99.78%)	18.738.978.000	17.412.946.940	92,92%
9	632458 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	6.384.472.000	6.383.690.000	(99.99%)	31.303.444.000	28.855.667.310	(92.18%)	11.570.547.000	11.487.349.769	(99.28%)	49.258.463.000	46.726.707.079	94,86%
10	672828 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.199.870.000	5.193.476.496	(99.88%)	45.782.622.000	42.012.409.328	(91.76%)	737.521.000	737.190.510	(99.96%)	51.720.013.000	47.943.076.334	92,70%
11	432747 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	19.180.731.000	19.159.627.750	(99.89%)	28.542.124.000	26.946.311.862	(94.41%)	2.902.421.000	2.574.543.320	(88.70%)	50.625.276.000	48.680.482.932	96,16%
12	432753 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	24.847.215.000	24.838.480.510	(99.96%)	35.567.905.000	33.145.386.406	(93.19%)	4.384.905.000	3.886.484.970	(88.63%)	64.800.025.000	61.870.351.886	95,48%
13	432762 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	22.502.222.000	22.482.383.762	(99.91%)	32.609.945.000	31.232.431.613	(95.78%)	8.682.187.000	7.015.254.475	(80.80%)	63.794.354.000	60.730.069.850	95,20%
14	432778 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	16.636.119.000	16.555.857.473	(99.52%)	19.463.939.000	18.396.334.235	(94.51%)	3.195.276.000	432.636.151	(13.54%)	39.295.334.000	35.384.827.859	90,05%
15	432784 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	21.179.591.000	21.022.607.815	(99.26%)	38.355.432.000	37.339.377.356	(97.35%)	12.082.363.000	11.100.125.098	(91.87%)	71.617.386.000	69.462.110.269	96,99%
16	432790 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	12.699.412.000	12.607.884.631	(99.28%)	14.100.336.000	13.287.983.420	(94.24%)	2.230.151.000	1.203.878.791	(53.98%)	29.029.899.000	27.099.746.842	93,35%
17	432804 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	18.964.852.000	18.884.366.289	(99.58%)	28.535.034.000	28.185.645.677	(98.78%)	3.790.660.000	2.698.299.140	(71.18%)	51.290.546.000	49.768.311.106	97,03%
18	432810 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	17.726.626.000	17.208.629.774	(97.08%)	23.018.308.000	21.479.869.572	(93.32%)	3.283.778.000	3.239.850.659	(98.66%)	44.028.712.000	41.928.350.005	95,23%
19	432829 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	15.698.720.000	15.688.309.337	(99.93%)	19.840.778.000	18.524.379.253	(93.37%)	10.615.220.000	8.972.615.499	(84.53%)	46.154.718.000	43.185.304.089	93,57%
20	432841 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	12.422.952.000	12.364.082.176	(99.53%)	18.329.012.000	17.982.234.055	(98.11%)	3.297.863.000	3.291.799.500	(99.82%)	34.049.827.000	33.638.115.731	98,79%
21	432850 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	13.261.834.000	13.219.780.208	(99.68%)	15.626.859.000	14.721.874.171	(94.21%)	4.143.749.000	2.077.926.736	(50.15%)	33.032.442.000	30.019.581.115	90,88%
22	432866 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	11.762.206.000	11.707.038.132	(99.53%)	15.151.016.000	13.884.355.645	(91.64%)	4.216.210.000	3.567.025.000	(84.60%)	31.129.432.000	29.158.418.777	93,67%
23	432872 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	9.890.678.000	9.864.933.067	(99.74%)	13.171.099.000	12.393.290.600	(94.09%)	1.716.416.000	1.559.056.280	(90.83%)	24.778.193.000	23.817.279.947	96,12%
24	432881 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	11.489.436.000	11.489.049.395	(100.00%)	15.692.343.000	14.816.940.982	(94.42%)	1.821.652.000	1.540.141.355	(84.55%)	29.003.431.000	27.846.131.732	96,01%
25	432897 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	12.323.365.000	12.301.454.363	(99.82%)	16.507.031.000	15.341.479.728	(92.94%)	3.949.962.000	3.949.881.302	(100.00%)	32.780.358.000	31.592.815.393	96,38%
26	432901 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	12.220.608.000	12.209.615.429	(99.91%)	20.781.723.000	19.904.532.490	(95.78%)	3.317.303.000	3.313.622.683	(99.89%)	36.319.634.000	35.427.770.602	97,54%
27	432923 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	19.008.331.000	18.781.008.832	(98.80%)	23.873.559.000	20.931.947.397	(87.68%)	6.404.766.000	5.314.719.896	(82.98%)	49.286.656.000	45.027.676.125	91,36%
28	432954 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	16.745.160.000	16.683.515.074	(99.63%)	20.909.320.000	18.461.304.309	(88.29%)	4.263.100.000	4.234.853.134	(99.34%)	41.917.580.000	39.379.672.517	93,95%
29	432960 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	11.558.264.000	11.553.783.248	(99.96%)	14.017.223.000	11.419.107.983	(81.46%)	2.458.300.000	2.457.910.942	(99.98%)	28.033.787.000	25.430.802.173	90,71%
30	432985 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	10.626.695.000	10.620.655.148	(99.94%)	15.036.882.000	11.589.266.637	(77.07%)	5.042.586.000	4.796.473.229	(95.12%)	30.706.163.000	27.006.395.014	87,95%
31	672821 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	12.137.408.000	12.081.040.082	(99.54%)	15.745.653.000	14.933.555.539	(94.84%)	3.291.109.000	3.283.422.395	(99.77%)	31.174.170.000	30.298.018.016	97,19%
32	432835 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	11.178.556.000	11.038.875.358	(98.75%)	16.540.637.000	14.698.606.250	(88.86%)	7.167.357.000	6.366.325.790	(88.82%)	34.886.550.000	32.103.807.398	92,02%
33	432917 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	10.361.781.000	10.310.666.139	(99.51%)	11.719.919.000	10.986.104.175	(93.74%)	3.614.933.000	3.455.762.529	(95.60%)	25.696.633.000	24.752.532.843	96,33%
34	432932 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	11.961.816.000	11.866.428.168	(99.20%)	11.992.003.000	11.455.333.340	(95.52%)	2.909.400.000	2.837.754.300	(97.54%)	26.863.219.000	26.159.515.808	97,38%
35	432948 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	9.695.786.000	9.673.075.201	(99.77%)	12.051.172.000	11.323.540.611	(93.96%)	8.825.661.000	8.396.407.406	(95.14%)	30.572.619.000	29.393.023.218	96,14%
36	432979 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	9.315.434.000	9.302.948.255	(99.87%)	18.406.964.000	18.025.573.348	(97.93%)	7.520.488.000	7.520.193.690	(100.00%)	35.242.886.000	34.848.715.293	98,88%
37	432991 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	11.094.669.000	11.093.744.939	(99.99%)	15.487.315.000	15.067.255.921	(97.29%)	2.909.000.000	2.521.042.400	(86.66%)	29.490.984.000	28.682.043.260	97,26%
38	672838 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	9.741.392.000	9.728.012.734	(99.86%)	14.732.372.000	13.829.993.643	(93.87%)	1.988.910.000	1.960.249.000	(98.56%)	26.462.674.000	25.518.255.377	96,43%
39	672842 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	7.129.367.000	7.109.847.706	(99.73%)	10.446.419.000	9.783.754.594	(93.66%)	4.603.133.000	3.838.853.325	(83.40%)	22.178.919.000	20.732.455.625	93,48%
40	672859 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	7.249.632.000	7.240.568.012	(99.87%)	11.435.584.000	10.650.765.326	(93.14%)	1.604.366.000	261.690.500	(16.31%)	20.289.582.000	18.153.023.838	89,47%
41	689071 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	6.491.193.000	6.483.191.989	(99.88%)	13.048.715.000	12.114.008.791	(92.84%)	8.557.407.000	5.496.958.916	(64.24%)	28.097.315.000	24.094.159.696	85,75%
42	419508 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	5.564.090.000	5.542.355.422	(99.61%)	8.230.805.000	7.690.582.215	(93.44%)	22.100.366.000	4.375.847.055	(19.80%)	35.895.261.000	17.608.784.692	49,06%
43	419578 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	6.044.758.000	6.043.890.314	(99.99%)	10.336.935.000	9.624.903.602	(93.11%)	9.703.828.000	6.394.124.212	(65.89%)	26.085.521.000	22.062.918.128	84,58%

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Kode Nama Satker	Pegawai			Barang			Modal			Total		
		Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%
44	672839 BALAI POM DI SURAKARTA	4.191.515.000	4.190.264.308	(99.97%)	3.784.047.000	3.611.010.729	(95.43%)	2.864.413.000	2.862.996.540	(99.95%)	10.839.975.000	10.664.271.577	98,38%
45	672840 BALAI POM DI TASIKMALAYA	3.105.951.000	3.104.778.454	(99.96%)	4.260.348.000	3.937.450.548	(92.42%)	3.782.102.000	3.763.138.785	(99.50%)	11.148.401.000	10.805.367.787	96,92%
46	672841 BALAI POM DI KEDIRI	3.957.002.000	3.941.837.563	(99.62%)	3.219.084.000	2.982.368.591	(92.65%)	4.358.194.000	4.279.864.239	(98.20%)	11.534.280.000	11.204.070.393	97,14%
47	672843 BALAI POM DI JEMBER	2.527.576.000	2.526.077.222	(99.94%)	3.330.852.000	3.042.770.398	(91.35%)	3.592.870.000	3.592.328.607	(99.98%)	9.451.298.000	9.161.176.227	96,93%
48	672844 LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	3.611.061.000	3.465.036.070	(95.96%)	2.475.016.000	2.317.868.688	(93.65%)	767.735.000	766.717.000	(99.87%)	6.853.812.000	6.549.621.758	95,56%
49	672845 BALAI POM DI PALOPO	3.190.817.000	3.190.730.012	(100.00%)	4.774.977.000	4.379.943.179	(91.73%)	3.204.570.000	3.183.994.477	(99.36%)	11.170.364.000	10.754.667.668	96,28%
50	672846 BALAI POM DI BOGOR	4.437.650.000	4.416.241.338	(99.52%)	5.059.333.000	4.870.415.476	(96.27%)	3.051.268.000	3.050.376.960	(99.97%)	12.548.251.000	12.337.033.774	98,32%
51	672847 BALAI POM DI TANGERANG	3.524.080.000	3.508.375.836	(99.55%)	4.054.824.000	3.851.769.294	(94.99%)	3.358.831.000	3.357.148.723	(99.95%)	10.937.735.000	10.717.293.853	97,98%
52	690465 BALAI POM DI PAYAKUMBUH	3.263.557.000	3.256.896.392	(99.80%)	4.236.024.000	3.751.921.890	(88.57%)	11.933.089.000	11.925.374.420	(99.94%)	19.432.670.000	18.934.192.702	97,43%
53	672848 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	3.309.782.000	3.299.425.930	(99.69%)	8.715.198.000	7.877.980.877	(90.39%)	3.295.051.000	2.018.947.310	(61.27%)	15.320.031.000	13.196.354.117	86,14%
54	672849 LOKA POM DI KOTA DUMAI	2.243.876.000	2.243.856.807	(100.00%)	3.152.179.000	3.013.181.059	(95.59%)	1.395.676.000	611.475.762	(43.81%)	6.791.731.000	5.868.513.628	86,41%
55	672850 LOKA POM DI KOTA BAUBAU	2.802.036.000	2.801.273.869	(99.97%)	2.813.378.000	2.625.185.250	(93.31%)	1.305.990.000	1.305.989.850	(100.00%)	6.921.404.000	6.732.448.969	97,27%
56	672851 LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	2.070.178.000	2.038.775.253	(98.48%)	2.198.412.000	2.065.529.538	(93.96%)	229.169.000	208.120.390	(90.82%)	4.497.759.000	4.312.425.181	95,88%
57	672852 LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	2.169.565.000	2.155.858.401	(99.37%)	2.690.855.000	2.481.905.246	(92.23%)	443.696.000	442.917.063	(99.82%)	5.304.116.000	5.080.680.710	95,79%
58	672853 LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	2.063.850.000	2.053.347.397	(99.49%)	3.315.966.000	3.135.740.771	(94.56%)	2.927.139.000	2.556.352.396	(87.33%)	8.306.955.000	7.745.440.564	93,24%
59	672854 LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	1.890.144.000	1.866.660.113	(98.76%)	2.872.895.000	2.690.843.842	(93.66%)	1.223.755.000	1.132.140.958	(92.51%)	5.986.794.000	5.689.644.913	95,04%
60	690462 LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	1.530.371.000	1.522.823.494	(99.51%)	2.216.390.000	2.015.381.438	(90.93%)	410.500.000	410.000.000	(99.88%)	4.157.261.000	3.948.204.932	94,97%
61	690463 LOKA POM DI ACEH TENGAH	2.217.927.000	2.216.345.996	(99.93%)	2.332.434.000	2.292.887.793	(98.30%)	512.076.000	407.371.841	(79.55%)	5.062.437.000	4.916.605.630	97,12%
62	690464 LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	1.962.031.000	1.959.660.434	(99.88%)	2.180.296.000	1.953.027.422	(89.58%)	282.436.000	282.395.124	(99.99%)	4.424.763.000	4.195.082.980	94,81%
63	690466 LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	1.914.117.000	1.913.265.944	(99.96%)	2.121.434.000	1.978.214.193	(93.25%)	278.550.000	277.839.226	(99.74%)	4.314.101.000	4.169.319.363	96,64%
64	690467 LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	1.839.318.000	1.833.859.633	(99.70%)	2.237.473.000	2.118.987.264	(94.70%)	637.000.000	229.628.056	(36.05%)	4.713.791.000	4.182.474.953	88,73%
65	690468 LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	1.831.877.000	1.831.676.881	(99.99%)	2.247.872.000	2.082.908.584	(92.66%)	286.248.000	286.246.400	(100.00%)	4.365.997.000	4.200.831.865	96,22%
66	690469 LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	1.813.124.000	1.812.904.658	(99.99%)	2.572.864.000	2.423.785.513	(94.21%)	840.758.000	840.740.813	(100.00%)	5.226.746.000	5.077.430.984	97,14%
67	690470 LOKA POM DI KABUPATEN TABALONG	2.060.037.000	2.059.927.674	(99.99%)	2.238.590.000	2.121.057.785	(94.75%)	243.000.000	243.000.000	(100.00%)	4.541.627.000	4.423.985.459	97,41%
68	690471 LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	2.090.255.000	2.066.594.212	(98.87%)	2.687.476.000	2.521.968.143	(93.84%)	1.392.490.000	372.991.227	(26.79%)	6.170.221.000	4.961.553.582	80,41%
69	690472 LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	1.854.968.000	1.844.493.762	(99.44%)	2.518.269.000	2.333.601.380	(92.67%)	1.125.540.000	1.124.552.566	(99.91%)	5.498.777.000	5.302.647.708	96,43%
70	690473 LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	1.864.885.000	1.847.400.210	(99.06%)	2.013.806.000	1.834.589.871	(91.10%)	316.696.000	291.685.519	(92.10%)	4.195.387.000	3.973.675.600	94,72%
71	690474 LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	2.255.303.000	2.240.659.337	(99.35%)	2.718.466.000	2.482.326.579	(91.31%)	11.012.011.000	250.391.000	(2.27%)	15.985.780.000	4.973.376.916	31,11%
72	690475 LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	1.941.312.000	1.929.984.072	(99.42%)	2.679.573.000	2.421.351.455	(90.36%)	311.000.000	310.507.660	(99.84%)	4.931.885.000	4.661.843.187	94,52%
73	690476 LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	2.400.858.000	2.400.202.517	(99.97%)	2.008.948.000	1.801.113.899	(89.65%)	455.000.000	443.368.292	(97.44%)	4.864.806.000	4.644.684.708	95,48%
74	690477 LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	2.518.393.000	2.506.893.454	(99.54%)	2.154.787.000	2.055.598.127	(95.40%)	758.620.000	755.444.422	(99.58%)	5.431.800.000	5.317.936.003	97,90%
75	690478 LOKA POM DI KABUPATEN TANJUNGPINANG	1.585.288.000	1.583.427.142	(99.88%)	2.458.982.000	2.219.923.123	(90.28%)	332.815.000	329.642.258	(99.05%)	4.377.085.000	4.132.992.523	94,42%
76	690479 LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	1.549.150.000	1.548.498.940	(99.96%)	2.141.356.000	2.035.979.252	(95.08%)	1.077.125.000	668.216.008	(62.04%)	4.767.631.000	4.252.694.200	89,20%
77	690480 LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	2.129.048.000	2.128.948.401	(100.00%)	3.704.475.000	3.328.228.612	(89.84%)	1.657.596.000	1.450.620.755	(87.51%)	7.491.119.000	6.907.797.768	92,21%
78	690481 LOKA POM DI ACEH SELATAN	1.643.987.000	1.640.781.179	(99.80%)	2.507.279.000	2.375.744.302	(94.75%)	233.000.000	179.408.400	(77.00%)	4.384.266.000	4.195.933.881	95,70%
79	690482 LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	1.978.311.000	1.973.069.743	(99.74%)	1.990.688.000	1.894.865.178	(95.19%)	298.000.000	285.969.729	(95.96%)	4.266.999.000	4.153.904.650	97,35%
80	690483 LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	1.380.312.000	1.379.011.431	(99.91%)	2.071.911.000	1.949.260.384	(94.08%)	256.500.000	256.499.670	(100.00%)	3.708.723.000	3.584.771.485	96,66%
81	690484 LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	1.667.160.000	1.667.047.492	(99.99%)	2.899.018.000	2.331.432.861	(80.42%)	1.453.661.000	1.453.656.069	(100.00%)	6.019.839.000	5.452.136.422	90,57%
82	690485 LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	2.323.155.000	2.320.118.957	(99.87%)	1.938.434.000	1.822.350.661	(94.01%)	8.869.500.000	369.497.000	(4.17%)	13.131.089.000	4.511.966.618	34,36%
83	690486 LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1.638.189.000	1.601.547.299	(97.76%)	2.652.631.000	2.461.078.207	(92.78%)	1.160.444.000	1.160.339.000	(99.99%)	5.451.264.000	5.222.964.506	95,81%
TOTAL		802.168.468.000	799.476.921.775	99,66%	1.252.694.112.000	1.164.716.080.588	92,98%	299.459.366.000	228.589.716.320	76,33%	2.354.321.946.000	2.192.782.718.683	93,14%

Lampiran 11. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 Per Satker
PENGEMBALIAN BELANJA PER SATKER
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai Pengembalian Belanja Pegawai	Nilai Pengembalian Belanja Barang	TOTAL
1	Settama	820.145.350,00	408.049.101,00	1.228.194.451,00
2	Inspektorat Utama	18.898.461,00	101.035.171,00	119.933.632,00
3	Deputi I	0,00	32.237.613,00	32.237.613,00
4	Deputi II	0,00	401.560.651,00	401.560.651,00
5	Deputi III	0,00	235.258.202,00	235.258.202,00
6	Deputi IV	0,00	0,00	0,00
7	PPPOMN	925.388,00	35.710.048,00	36.635.436,00
8	PUSAKOM	2.276.031,00	128.084.586,00	130.360.617,00
9	PUSDATIN	4.931.426,00	49.240.091,00	54.171.517,00
10	PPSDM	1.425.965,00	234.004.812,00	235.430.777,00
11	Balai Besar POM di Jakarta	980.980,00	160.157.032,00	161.138.012,00
12	Balai Besar POM di Bandung	6.663.837,00	87.980.499,00	94.644.336,00
13	Balai Besar POM di Semarang	2.470.431,00	13.839.500,00	16.309.931,00
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	8.922.849,00	0,00	8.922.849,00
15	Balai Besar POM di Surabaya	7.544.911,00	4.121.500,00	11.666.411,00
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	16.289.196,00	16.240.947,00	32.530.143,00
17	Balai Besar POM di Medan	11.845.685,00	8.832.000,00	20.677.685,00
18	Balai Besar POM di Padang	3.064.343,00	7.761.105,00	10.825.448,00
19	Balai Besar POM di Pekanbaru	377.934,00	6.841.465,00	7.219.399,00
20	Balai Besar POM di Palembang	742.177,00	15.654.109,00	16.396.286,00
21	Balai Besar POM di Bandar Lampung	27.113.037,00	22.009.266,00	49.122.303,00
22	Balai Besar POM di Pontianak	1.207.714,00	6.580.292,00	7.788.006,00
23	Balai Besar POM di di Palangkaraya	4.844.567,00	4.584.001,00	9.428.568,00
24	Balai Besar POM di Banjarmasin	372.364,00	3.404.153,00	3.776.517,00
25	Balai Besar POM di Samarinda	861.791,00	48.488.998,00	49.350.789,00
26	Balai Besar POM di Manado	413.315,00	0,00	413.315,00
27	Balai Besar POM di Makassar	40.952.501,00	18.172.159,00	59.124.660,00
28	Balai Besar POM di Denpasar	4.584.369,00	867.111,00	5.451.480,00
29	Balai Besar POM di Mataram	1.086.123,00	0,00	1.086.123,00
30	Balai Besar POM di Jayapura	1.267.542,00	3.399.000,00	4.666.542,00
31	Balai Besar POM di di Serang	2.166.724,00	3.925.251,00	6.091.975,00
32	Balai POM di Jambi	1.811,00	1.593.800,00	1.595.611,00
33	Balai POM di Palu	71.881,00	0,00	71.881,00
34	Balai POM di Kendari	10.983.730,00	39.847.666,00	50.831.396,00
35	Balai POM di Ambon	517.791,00	2.565.372,00	3.083.163,00
36	Balai POM di Kupang	12.397.783,00	8.271.802,00	20.669.585,00
37	Balai POM di Bengkulu	688.915,00	0,00	688.915,00
38	Balai POM di di Batam	1.356,00	1.035.400,00	1.036.756,00
39	Balai POM di di Pangkal Pinang	556.102,00	3.255.185,00	3.811.287,00
40	Balai POM di di Gorontalo	6.320.138,00	1.763.025,00	8.083.163,00
41	Balai POM di di Manokwari	1.541.990,00	20.871.124,00	22.413.114,00
42	Balai POM di Sofifi	1.424,00	11.675.375,00	11.676.799,00
43	Balai POM di Mamuju	833.504,00	108.646,00	942.150,00
44	Balai POM di Surakarta	6.534.498,00	795.000,00	7.329.498,00
45	Balai POM di Tasikmalaya	555.746,00	18.000,00	573.746,00

Lampiran 11. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2024 Per Satker

**PENGEMBALIAN BELANJA PER SATKER
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Nilai Pengembalian Belanja Pegawai	Nilai Pengembalian Belanja Barang	TOTAL
46	Balai POM di Kediri	2.255.651,00	7.500,00	2.263.151,00
47	Balai POM di Jember	78.909,00	1.810.000,00	1.888.909,00
48	Balai POM di Palopo	495,00	0,00	495,00
49	Balai POM di Bogor	215.677,00	45.683.395,00	45.899.072,00
50	Balai POM di Tangerang	1.980.370,00	0,00	1.980.370,00
51	Balai POM di di Tarakan	6.217.887,00	9.032.590,00	15.250.477,00
52	Balai POM di Payakumbuh	3.012.556,00	3.963.962,00	6.976.518,00
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	814,00	455.000,00	455.814,00
54	Loka POM di Kota Dumai	1.219.898,00	0,00	1.219.898,00
55	Loka POM di Kota Baubau	1.302.411,00	0,00	1.302.411,00
56	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.220.110,00	900.000,00	2.120.110,00
57	Loka POM di Kabupaten Mimika	522,00	430.000,00	430.522,00
58	Loka POM di Kabupaten Ende	358,00	1.828.500,00	1.828.858,00
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	30.414,00	4.038.560,00	4.068.974,00
60	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	40,00	2.390.000,00	2.390.040,00
61	Loka POM di Aceh Tengah	401,00	515.000,00	515.401,00
62	Loka POM di Kota Tanjungbalai	629.222,00	400.000,00	1.029.222,00
63	Loka POM di Kabupaten Bungo	740.446,00	0,00	740.446,00
64	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	703.653,00	0,00	703.653,00
65	Loka POM di Kabupaten Sanggau	71.296,00	2.550.000,00	2.621.296,00
66	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	2.951.170,00	1.696.000,00	4.647.170,00
67	Loka POM di Kabupaten Tabalong	1.084.362,00	28.500,00	1.112.862,00
68	Loka POM di Kota Balikpapan	2.809.388,00	465.200,00	3.274.588,00
69	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	370.889,00	0,00	370.889,00
70	Loka POM di Kabupaten Banggai	555.412,00	713.600,00	1.269.012,00
71	Loka POM di Kabupaten Buleleng	1.375.503,00	50.000,00	1.425.503,00
72	Loka POM di Kabupaten Bima	70.387,00	13.382.600,00	13.452.987,00
73	Loka POM di Kabupaten Merauke	333.423,00	0,00	333.423,00
74	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	487,00	0,00	487,00
75	Loka POM di Kota Tanjungpinang	414.504,00	6.287.810,00	6.702.314,00
76	Loka POM di Kabupaten Belitung	370.191,00	820.000,00	1.190.191,00
77	Loka POM di Kabupaten Sorong	38.512,00	13.768.068,00	13.806.580,00
78	Loka POM di Aceh Selatan	370.572,00	0,00	370.572,00
79	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	370.330,00	0,00	370.330,00
80	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	1.149.699,00	1.402.200,00	2.551.899,00
81	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	202,00	2.528.184,00	2.528.386,00
82	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	5.351.050,00	5.682.500,00	11.033.550,00
83	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	130.747,00	7.207.700,00	7.338.447,00
Total		1.070.809.638,00	2.277.875.927,00	3.348.685.565,00

REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PERSATKER

TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	TOTAL
1	Settama	4.075.041.830,00		4.075.041.830,00
2	Inspektorat Utama	433.774.300,00		433.774.300,00
3	Deputi I	1.777.044.500,00	22.500.000,00	1.799.544.500,00
4	Deputi II	1.852.059.240,00		1.852.059.240,00
5	Deputi III	1.928.097.050,00	253.500.000,00	2.181.597.050,00
6	Deputi IV	1.220.560.060,00	155.500.000,00	1.376.060.060,00
7	PPOMN	4.764.492.976,00	2.201.250.750,00	6.965.743.726,00
8	PUSAKOM	224.730.000,00	52.547.400,00	277.277.400,00
9	PUSDATIN	8.280.318.999,00		8.280.318.999,00
10	PPSDM	577.025.510,00		577.025.510,00
11	Balai Besar POM di Jakarta	2.574.543.320,00		2.574.543.320,00
12	Balai Besar POM di Bandung	3.886.484.970,00		3.886.484.970,00
13	Balai Besar POM di Semarang	6.049.420.975,00	591.133.500,00	6.640.554.475,00
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	342.966.000,00		342.966.000,00
15	Balai Besar POM di Surabaya	10.550.368.498,00	493.817.600,00	11.044.186.098,00
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	1.124.098.510,00	79.780.281,00	1.203.878.791,00
17	Balai Besar POM di Medan	2.698.299.140,00		2.698.299.140,00
18	Balai Besar POM di Padang	2.414.794.130,00	525.000.000,00	2.939.794.130,00
19	Balai Besar POM di Pekanbaru	8.972.615.499,00		8.972.615.499,00
20	Balai Besar POM di Palembang	3.171.799.500,00		3.171.799.500,00
21	Balai Besar POM di Bandar Lampung	388.799.250,00	702.000.000,00	1.090.799.250,00
22	Balai Besar POM di Pontianak	3.567.025.000,00		3.567.025.000,00
23	Balai Besar POM di di Palangkaraya	940.198.280,00	476.000.000,00	1.416.198.280,00
24	Balai Besar POM di Banjarmasin	1.540.141.355,00		1.540.141.355,00
25	Balai Besar POM di Samarinda	3.874.881.302,00	75.000.000,00	3.949.881.302,00
26	Balai Besar POM di Manado	2.471.772.683,00	841.850.000,00	3.313.622.683,00
27	Balai Besar POM di Makassar	3.129.553.500,00	542.500.000,00	3.672.053.500,00
28	Balai Besar POM di Denpasar	3.869.845.000,00		3.869.845.000,00
29	Balai Besar POM di Mataram	2.457.910.942,00		2.457.910.942,00
30	Balai Besar POM di Jayapura	3.570.510.733,00	38.600.000,00	3.609.110.733,00
31	Balai Besar POM di di Serang	3.240.987.220,00		3.240.987.220,00
32	Balai POM di Jambi	6.209.599.770,00	156.726.020,00	6.366.325.790,00
33	Balai POM di Palu	2.315.950.102,00		2.315.950.102,00
34	Balai POM di Kendari	2.452.654.300,00	335.100.000,00	2.787.754.300,00
35	Balai POM di Ambon	2.635.589.838,00	311.627.600,00	2.947.217.438,00
36	Balai POM di Kupang	4.310.484.914,00		4.310.484.914,00
37	Balai POM di Bengkulu	2.521.042.400,00		2.521.042.400,00
38	Balai POM di di Batam	1.960.249.000,00		1.960.249.000,00
39	Balai POM di di Pangkal Pinang	3.534.619.500,00	111.498.725,00	3.646.118.225,00
40	Balai POM di di Gorontalo	261.690.500,00		261.690.500,00
41	Balai POM di di Manokwari	2.700.653.366,00		2.700.653.366,00
42	Balai POM di Sofifi	3.797.377.155,00		3.797.377.155,00
43	Balai POM di Mamuju	5.436.977.400,00		5.436.977.400,00
44	Balai POM di Surakarta	2.714.622.310,00		2.714.622.310,00
45	Balai POM di Tasikmalaya	3.203.173.688,00	125.627.500,00	3.328.801.188,00
46	Balai POM di Kediri	3.382.224.266,00		3.382.224.266,00

REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PERSATKER

TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Satker	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	TOTAL
47	Balai POM di Jember	3.299.828.607,00		3.299.828.607,00
48	Balai POM di Palopo	3.183.994.477,00		3.183.994.477,00
49	Balai POM di Bogor	3.047.877.960,00	2.499.000,00	3.050.376.960,00
50	Balai POM di Tangerang	3.357.148.723,00		3.357.148.723,00
51	Balai POM di di Tarakan	1.999.147.310,00	19.800.000,00	2.018.947.310,00
52	Balai POM di Payakumbuh	3.627.907.450,00		3.627.907.450,00
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	766.717.000,00		766.717.000,00
54	Loka POM di Kota Dumai	302.254.800,00		302.254.800,00
55	Loka POM di Kota Baubau	1.190.989.850,00		1.190.989.850,00
56	Loka POM di Kota Lubuklinggau	207.120.390,00		207.120.390,00
57	Loka POM di Kabupaten Mimika	442.917.063,00		442.917.063,00
58	Loka POM di Kabupaten Ende	2.234.520.196,00		2.234.520.196,00
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	336.199.558,00		336.199.558,00
60	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	410.000.000,00		410.000.000,00
61	Loka POM di Aceh Tengah	388.963.175,00		388.963.175,00
62	Loka POM di Kota Tanjungbalai	282.395.124,00		282.395.124,00
63	Loka POM di Kabupaten Bungo	277.839.226,00		277.839.226,00
64	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	229.628.056,00		229.628.056,00
65	Loka POM di Kabupaten Sanggau	286.246.400,00		286.246.400,00
66	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	840.740.813,00		840.740.813,00
67	Loka POM di Kabupaten Tabalong	243.000.000,00		243.000.000,00
68	Loka POM di Kota Balikpapan	371.551.227,00		371.551.227,00
69	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.124.552.566,00		1.124.552.566,00
70	Loka POM di Kabupaten Banggai	291.685.519,00		291.685.519,00
71	Loka POM di Kabupaten Buleleng	243.891.000,00	6.500.000,00	250.391.000,00
72	Loka POM di Kabupaten Bima	307.857.660,00		307.857.660,00
73	Loka POM di Kabupaten Merauke	442.147.292,00		442.147.292,00
74	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	473.594.422,00		473.594.422,00
75	Loka POM di Kota Tanjungpinang	329.642.258,00		329.642.258,00
76	Loka POM di Kabupaten Belitung	563.743.852,00	15.135.456,00	578.879.308,00
77	Loka POM di Kabupaten Sorong	386.117.055,00		386.117.055,00
78	Loka POM di Aceh Selatan	179.408.400,00		179.408.400,00
79	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	285.969.729,00		285.969.729,00
80	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	256.499.670,00		256.499.670,00
81	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	1.153.152.318,00		1.153.152.318,00
82	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	369.497.000,00		369.497.000,00
83	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1.159.149.000,00		1.159.149.000,00
Total		178.300.963.927,00	8.135.493.832,00	186.436.457.759,00

DAFTAR SALDO AKRUAL BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)
PER 31 DESEMBER 2024 (*AUDITED*)

No	Jenis Sewa	Nama Satker	Kontrak		Tanggal Sewa		Nilai Kontrak	Belanja di Bayar Di	Keterangan		
			Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		Muka			
1	Sewa rumah dinas	Loka POM di Kabupaten Mimika	PL020231C032401	01 Maret 2024	01 Maret 2024	28 Februari 2025	33.000.000,00	5.334.247	Sewa Rumah Dinas Kepala Loka		
		Balai Besar POM di Jakarta	PL02017A0124148	15 Januari 2024	15 Januari 2024	14 Januari 2025	156.000.000,00	5.967.213	Sewa Rumah Dinas Kepala Balai Besar POM di Jakarta		
		Sekretariat Utama	PL02012508247862	22 Agustus 2024	23 Agustus 2024	23 Agustus 2025	882.000.000,00	566.311.475	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Kepala BPOM		
			PL0203251112410117	07 November 2024	07 November 2024	07 November 2025	251.100.000,00	213.366.393	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I Deputi II		
			PL02012511241421	14 November 2024	14 November 2024	13 November 2025	161.112.000,00	139.924.668	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I Sestama		
		Deputi IV	PL.02.01.615.01.24.0040	19 Januari 2024	01 Januari 2025	18 Januari 2025	107.994.500,00	5.311.205	Sewa Apartemen Eselon II Deputi IV		
		Balai POM Kendari	PL02026B012407	02 Januari 2024	30 Januari 2024	30 Januari 2025	50.000.000,00	4.087.193	Sewa rumah dinas Kepala Balai POM		
		Inspektorat Utama	PL0202730924327	30 September 2024	01 Oktober 2024	31 Juli 2025	184.550.000,00	128.699.342	Sewa Rumah Dinas		
		Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	PL02021C092401	27 September 2024	27 September 2024	27 September 2025	24.000.000,00	17.687.671	Sewa Rumah Dinas Kepala Loka POM		
		Balai POM di Mamuju	PL020210B032420	05 Maret 2024	04 Maret 2025	04 Maret 2025	53.000.000,00	9.169.745	Sewa rumah dinas Kepala Balai POM di Mamuju		
2	Sewa Gedung Kantor Loka	Balai POM di Surakarta	PL020218B18B10124636	15 Januari 2024	16 Januari 2024	15 Januari 2025	25.600.000,00	1.049.180	Sewa Rumah Dinas Kepala UPT Balai POM di Surakarta		
		Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	PL02022C092467	13 September 2024	13 September 2024	13 September 2025	17.600.000,00	12.310.383	Sewa Rumah Dinas Kepala Loka POM		
		Total Sewa Rumah Dinas						1.109.218.715			
		Loka POM di Kabupaten Mimika	PL020231C032402	01 Maret 2024	01 Maret 2024	28 Februari 2025	18.720.000.000,00	30.259.726	Sewa Gedung Kantor Loka		
		Balai POM di Bogor	PL020217B022411	19 Maret 2024	01 April 2024	31 Maret 2025	173.000.000,00	28.360.656	Sewa Gedung Laboratorium		
		Balai POM di Surakarta	PL020218B18B1032406	29 Maret 2024	01 April 2024	01 April 2025	15.000.000.000,00	37.295.082	Sewa Gedung Kantor		
		Total Sewa Gedung Kantor						95.915.464			
		3	Sewa Gudang	Sekretariat Utama	PL02012525210249484	14 Oktober 2024	14 Oktober 2024	13 Oktober 2025	18.300.000.000,00	143.391.781	Sewa Gudang Barang Bukti
				Deputi IV	PL0225251012491	05 Januari 2024	05 Januari 2024	04 Januari 2025	54.825.120.000,00	5.991.816	Sewa Bangunan/Gudang Furniture
					PL.02.01.644-PPK.03.24.10	14 Maret 2024	01 Januari 2025	13 Maret 2025	200.000.000,00	39.452.055	Sewa Gudang Barang Bukti Deputi IV
Total Sewa Gudang								188.835.652			
4	Sewa Kendaraan	Loka POM di Kabupaten Sanggau	PL020119C012410	24 Januari 2024	25 Januari 2024	24 Januari 2025	7.659.000.000,00	5.022.295	Sewa Kendaraan Pimpinan/Operasional		
		Sekretariat Utama	PL02012505243634	06 Mei 2024	07 Mei 2024	07 Mei 2025	39.720.000.000,00	137.826.230	Sewa Kendaraan Pimpinan/Operasional		
			PL020125106244682	07 Juni 2024	07 Juni 2024	07 Juni 2025	42.000.000.000,00	181.311.475	Sewa Kendaraan Pimpinan		
			PL02012509248470	11 September 2024	12 September 2024	12 Mei 2025	13.600.000.000,00	73.876.543	Sewa Kendaraan Pimpinan		
			PL020125110249970	30 Oktober 2024	06 November 2024	05 November 2025	17.400.000.000,00	147.304.110	Sewa Kendaraan Pimpinan		
			PL020125110249516	15 Oktober 2024	21 Oktober 2024	20 Oktober 2025	15.900.000.000,00	127.635.616	Sewa Kendaraan Pimpinan		
			PL020125110249068	01 Oktober 2024	02 Oktober 2024	02 Oktober 2025	21.120.000.000,00	158.688.525	Sewa Kendaraan Pimpinan		
		Balai POM di Surakarta	T-PL020118B18B1012441	12 Januari 2024	15 Januari 2024	15 Januari 2025	11.496.000.000,00	4.698.638	Sewa Kendaraan Dimas Jabatan		
		Total Sewa Kendaraan						836.363.432			
		5	Langganan Zoom Meeting, Zoho, Google Drive dan aplikasi lainnya	00038/KW/KKP/445170/2024	13 Februari 2024	13 Februari 2024	12 Februari 2025	7.918.050,00	932.811	Biaya Langganan Zoom One Pro Annual (3 Akun)	
00159/KW/KKP/445170/2024	29 Mei 2024			29 Mei 2024	12 Februari 2025	8.232.527,00	1.366.790	Biaya Langganan Zoom Kuota 500 orang (1 akun)			
00110/KW/KKP/445170/2024	04 September 2024			04 September 2024	09 April 2025	29.859,00	80.987	Biaya Langganan Google Drive 100 GB (inspeksisedangbtp@gmailcom)			
00150/KW/KKP/445170/2024	05 Juli 2024			05 Juli 2024	07 Mei 2025	29.859,00	103.893	Biaya Langganan Google Drive 100 GB (smkpo)			
00155/KW/KKP/445170/2024	28 Mei 2024			28 Mei 2024	28 Mei 2025	1.299.999,00	527.123	Biaya Langganan Microsoft office 365			
00274/KW/KKP/445170/2024	08 Juli 2024			08 Juli 2024	07 Agustus 2025	1.581.243,00	948.746	Biaya langganan Adobe Photoshop			
00274/KW/KKP/445170/2024	08 Juli 2024			08 Juli 2024	07 Agustus 2025	72.000,00	432.000	Biaya langganan video editor Capcut			
00364/KW/KKP/445170/2024	30 September 2024			30/09/2024	30 September 2025	1.033.368,00	772.903	Biaya langganan Freepik			
00365/KW/KKP/445170/2024	30 September 2024			10 September 2024	09 Oktober 2025	17.871,00	138.072	Biaya langganan Google Drive 100 GB (peredaranpangan@gmailcom)			
00399/KW/KKP/445170/2024	24 Oktober 2024			24 Oktober 2024	24 Oktober 2025	1.498.500,00	1.219.327	Biaya langganan google drive 2 TB (ditwasprts@gmailcom)			
00421/KW/KKP/445170/2024	11 Mei 2024			11 Mei 2024	05 November 2025	1.189.000,00	1.006.578	Biaya langganan Canva			
03080/KW/445170/2024	15 November 2024			15 November 2024	15 November 2025	17.871,00	156.188	Biaya Langganan Google Drive 100 GB (inrasff@gmailcom)			
00605/KW/445170/2024	29 Januari 2024			29 Januari 2024	28 Januari 2025	3.746.250,00	287.384	Biaya langganan Google Drive Premium 5TB			
-	26 Agustus 2024			26 Agustus 2024	26 Agustus 2025	88.332,00	575.970	Biaya Langanan Firewall Subsite			
00057/KW/KKP/445170/2024	25 Desember 2024			25 Desember 2024	24 Februari 2025	1.615.471,00	243.427	Langganan Zoom tahun 2024 kegiatan Implementasi RB			
00055/KW/KKP/445170/2024	20 Februari 2024			20 Februari 2024	19 Februari 2025	1.895.307,00	259.631	Biaya Langganan Canva tahun 2024 pada kegiatan Perkuatan Lintas Sektor dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan			
00063/KW/KKP/445170/2024	03 September 2024			03 September 2024	09 Maret 2025	1.615.471,00	300.964	Biaya langganan aplikasi zoom meeting pada kegiatan Pengembangan Pedoman dan Materi kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			
00065/KW/KKP/445170/2024	28 Februari 2024			28 Februari 2024	27 Februari 2025	1.189.000,00	188.937	Langganan Canva Design Pro tahun 2024 kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan			
00168/KW/KKP/445170/2024	19 Mei 2024			19 Mei 2024	19 Mei 2025	2.116.781,00	806.117	Langganan Aset Gambar Vector Online (freepik) tahun 2024 pada kegiatan Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS			
00294/KW/KKP/445170/2024	23 Agustus 2024			23 Agustus 2024	23 Agustus 2025	1.498.500,00	964.788	Cloud Storage tahun 2024 kegiatan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan			
00360/KW/KKP/445170/2024	25 September 2024			25 September 2024	25 September 2025	1.498.500,00	1.100.268	Langganan Cloud Storage tahun 2024 pada kegiatan Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS			

Lampiran 13. Belanja Barang Dibayar Dimuka (*prepaid*)

No	Jenis Sewa	Nama Saterker	Kontrak		Tanggal Sewa		Nilai Kontrak	Belanja di Bayar Di Muka	Keterangan	
			Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai				
			00393/KW/KKP/445170/2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2024	30 Agustus 2025	6.499.000,00	4.308.926	Langganan Survey Monkey pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tkl	
			00470/KW/KKP/445170/2024	27 November 2024	27 November 2024	27 November 2025	1.498.500,00	1.358.914	Biaya Langganan Storage Google Drive pada kegiatan Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	
			INV234764037	01 April 2024	01 April 2024	04 Januari 2025	18.360.614,00	200.662	Langganan Zoom One Pro Annual (3 akun) dan Kuota 500 Orang	
			SOP3335-3636-3942-077853	14 Januari 2024	14 Januari 2024	14 Januari 2025	47.730,00	18.257	Langganan Storage Google Drive (variasimayorpo@gmailcom)	
			INV-C-2024-5313963	02 Maret 2024	02 Maret 2024	03 Februari 2025	2.089.575,00	194.114	Langganan Freepik Premium	
			13998999	02 Maret 2024	02 Maret 2024	03 Februari 2025	3.116.284,00	289.491	Langganan Envato Elements	
			04081-21829932	03 Mei 2024	03 Mei 2024	05 Maret 2025	76.900,00	134.838	Langganan Canva Pro	
			SOP3318-9537-5276-084720	27 April 2024	27 April 2024	27 April 2025	47.730,00	152.998	Langganan Storage Google Drive (monevcpo@gmailcom)	
			01905/KW/445170/2024	07 Januari 2024	07 Januari 2024	01 Juli 2025	72.000,00	359.014	Langganan Capcut Premium	
			50/KU/KIT-BPOM/VI/2024	06 November 2024	06 November 2024	11 Juni 2025	24.000,00	10.652.055	Langganan Web Content Accessibility dan Responsive Voice	
			PL.02.01.63.631.09.24.178	20 September 2024	01 Oktober 2024	31 Maret 2025	549.400.000	271.681.319	Lisensi SAAS	
			PL.02.01.63.631.06.24.107	10 Juni 2024	01 Juli 2024	30 Juni 2025	224.000.000	111.079.452	Renewal Lisensi Cellebrite UFED 4PC	
			PL.02.01.63.631.12.24.235	09 Desember 2024	19 Desember 2024	18 Desember 2025	61.200.000	59.020.274	Lisensi Ms. Office	
			PL.02.01.63.631.12.24.240	16 Desember 2024	02 Januari 2025	01 Januari 2026	55.000.000	55.000.000	Lisensi PDF	
	Balai Besar POM di Serang	INV/20240301/MPL/3767975939	01 Maret 2024	9 Maret 2024	09 Maret 2025	805.900	150.140	Langganan Antivirus McAfee		
		INV/20240429/MPL/3877242121	29 April 2024	27 Mei 2024	27 Mei 2025	551.499	222.111	LanggananAntivirus McAfee		
		04265-17502145	05 September 2024	05 September 2024	05 September 2025	1.900.000	1.290.959	Langganan Akun Canva		
		00143/KW/KKP/433005/2024	19 Maret 2024	13 Maret 2024	12 Maret 2025	1.900.000	373.771	Langganan Akun Canva		
		00115/KW/KKP/433005/2024	23 Februari 2024	23 Februari 2024	22 Februari 2025	7.058.237	1.022.094	Langganan QR Code		
								529.922.292		
								2.760.255.555		

**DAFTAR SALDO AKRUAL PERSEDIAAN PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

No	Kode Satker	Satker	Barang Konsumsi	Suku Cadang	Bahan Baku	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya	Total
1	432731	Settama	1.544.480.479,00	-	-	46.432.384,00	-	1.590.912.863,00
2	433005	Ittama	165.617.743,00	-	-	-	-	165.617.743,00
3	445155	DEPUTI I	233.735.121,00	-	-	1.150.000,00	-	234.885.121,00
4	445161	DEPUTI II	17.947.000,00	-	-	-	-	17.947.000,00
5	445170	DEPUTI III	106.574.683,00	-	-	-	-	106.574.683,00
6	632437	DEPUTI IV	34.297.505,00	-	-	-	-	34.297.505,00
7	632458	PUSDATIN	24.458.620,00	79.585.000,00	-	-	-	104.043.620,00
8	632441	PUSAKOM	68.943.390,00	-	-	-	-	68.943.390,00
9	632420	PPPOMN	501.444.528,00	2.580.827.364,00	39.978.342.571,00	-	985.543.500,00	44.046.157.963,00
10	672828	PPSDM	155.602.978,00	-	-	-	-	155.602.978,00
11	432790	Balai Besar POM di Banda Aceh	162.418.045,00	581.313.773,00	684.050.091,00	7.633.630,00	-	1.435.415.539,00
12	432804	Balai Besar POM di Medan	175.077.223,00	1.108.300.638,00	1.186.944.568,00	14.274.903,00	-	2.484.597.332,00
13	432810	Balai Besar POM di Padang	221.137.208,00	1.675.227.251,00	1.939.823.539,00	6.773.515,00	-	3.842.961.513,00
14	432850	Balai Besar POM di Bandar Lampung	152.862.569,00	921.435.603,00	656.164.154,00	-	-	1.730.462.326,00
15	432829	Balai Besar POM di Pekanbaru	844.359.364,00	2.245.497.643,00	2.710.713.139,00	-	-	5.800.570.146,00
16	432841	Balai Besar POM di Palembang	187.202.953,00	959.181.338,00	1.161.261.947,00	-	-	2.307.646.238,00
17	432747	Balai Besar POM di Jakarta	233.867.383,00	973.469.184,00	1.623.439.029,00	16.316.159,00	-	2.847.091.755,00
18	432753	Balai Besar POM di Bandung	216.619.193,00	1.218.808.606,00	2.098.046.261,00	16.980.360,00	-	3.550.454.420,00
19	432762	Balai Besar POM di Semarang	192.896.219,00	1.347.355.393,00	713.707.177,00	-	-	2.253.958.789,00
20	432778	Balai Besar POM di Yogyakarta	173.538.630,00	1.106.582.977,00	906.693.705,00	446.850,00	-	2.187.262.162,00
21	432784	Balai Besar POM di Surabaya	126.947.107,00	3.305.829.264,00	2.419.070.026,00	8.270.433,00	-	5.860.116.830,00
22	432866	Balai Besar POM di Pontianak	25.880.339,00	783.791.032,00	1.180.633.800,00	10.413.789,00	-	2.000.718.960,00
23	432897	Balai Besar POM di Samarinda	13.898.330,00	1.481.924.874,00	1.141.004.480,00	-	-	2.636.827.684,00
24	432881	Balai Besar POM di Banjarmasin	20.803.380,00	1.674.712.776,00	681.206.864,00	23.596.408,00	-	2.400.319.428,00
25	432960	Balai Besar POM di Mataram	87.104.291,00	2.211.402.746,00	2.346.734.288,00	-	-	4.645.241.325,00
26	432954	Balai Besar POM di Denpasar	112.871.982,00	2.362.416.054,00	1.389.733.115,00	-	-	3.865.021.151,00
27	432901	Balai Besar POM di Manado	16.758.677,00	1.190.508.131,00	891.893.454,00	38.790,00	-	2.099.199.052,00
28	432923	Balai Besar POM di Makassar	296.585.979,00	1.087.316.763,00	1.340.848.941,00	15.576.198,00	-	2.740.327.881,00
29	432985	Balai Besar POM di Jayapura	292.775.948,00	1.426.650.260,00	760.525.052,00	28.781.728,00	-	2.508.732.988,00
30	672821	Balai Besar POM di di Serang	58.268.131,00	1.089.179.212,00	604.141.489,00	4.733.501,00	-	1.756.322.333,00
31	432872	Balai Besar POM di di Palangkaraya	154.263.937,00	707.534.350,00	1.353.896.834,00	27.828.485,00	-	2.243.523.606,00
32	672842	Balai POM di Pangkal Pinang	145.404.136,00	705.496.558,00	822.764.032,00	25.000,00	-	1.673.689.726,00
33	432991	Balai POM di Bengkulu	90.862.365,00	751.284.698,00	1.033.580.695,00	16.108.893,00	-	1.891.836.651,00
34	432835	Balai POM di Jambi	119.108.684,00	1.311.401.005,00	888.472.683,00	-	-	2.318.982.372,00
35	672838	Balai POM di di Batam	118.639.000,00	776.353.954,00	1.329.209.036,00	1.472.800,00	-	2.225.674.790,00
36	432979	Balai POM di Kupang	-	735.708.273,00	1.465.770.729,00	-	-	2.201.479.002,00
37	672859	Balai POM di di Gorontalo	111.207.298,00	936.846.809,00	1.252.827.796,00	3.243.985,00	-	2.304.125.888,00
38	432932	Balai POM di Kendari	133.135.843,00	666.135.102,00	487.654.640,00	38.000.920,00	-	1.324.926.505,00
39	432917	Balai POM di Palu	158.420.475,00	717.248.870,00	1.924.957.013,00	22.018.886,00	-	2.822.645.244,00
40	432948	Balai POM di Ambon	207.986.303,00	2.147.156.329,00	2.238.536.682,00	756.275,00	-	4.594.435.589,00
41	689071	Balai POM di di Manokwari	305.243.782,00	1.003.501.007,00	1.645.755.293,00	5.500.000,00	-	2.960.000.082,00
42	419508	Balai POM di Sofifi	172.039.151,00	376.371.936,00	513.060.648,00	-	-	1.061.471.735,00
43	419578	Balai POM di Mamuju	62.900.828,00	376.105.189,00	283.604.939,00	2.138.376,00	-	724.749.332,00
44	672848	Balai POM di di Tarakan	62.136.358,00	128.690.869,00	95.823.937,00	-	-	286.651.164,00
45	672839	Balai POM di Surakarta	34.041.155,00	166.754.305,00	185.264.438,00	1.930.500,00	-	387.990.398,00
46	672840	Balai POM di Tasikmalaya	27.010.790,00	164.737.075,00	-	-	-	191.747.865,00
47	672841	Balai POM di Kediri	8.504.350,00	212.246.970,00	132.758.909,00	-	-	353.510.229,00
48	672843	Balai POM di Jember	35.007.670,00	245.035.914,00	86.676.939,00	-	-	366.720.523,00
49	672845	Balai POM di Palopo	125.828.015,00	51.020.970,00	41.868.290,00	45.000,00	-	218.762.275,00

**DAFTAR SALDO AKRUAL PERSEDIAAN PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

No	Kode Satker	Satker	Barang Konsumsi	Suku Cadang	Bahan Baku	Bahan untuk Pemeliharaan	Persediaan Lainnya	Total
50	672846	Balai POM di Bogor	70.535.205,00	243.735.069,00	87.287.789,00	8.088.688,00	-	409.646.751,00
51	672847	Balai POM di Tangerang	63.118.160,00	160.264.345,00	23.452.672,00	7.737.123,00	-	254.572.300,00
52	690465	Balai POM di Payakumbuh	55.119.540,00	76.559.615,00	125.292.513,00	1.168.900,00	-	258.140.568,00
53	672844	Loka POM di Kabupaten Banyumas	12.723.875,00	14.989.530,00	18.418.580,00	-	-	46.131.985,00
54	672849	Loka POM di Kota Dumai	12.572.317,00	39.191.410,00	43.134.976,00	-	-	94.898.703,00
55	672850	Loka POM di Kota Baubau	36.241.225,00	79.500.876,00	-	-	-	115.742.101,00
56	672851	Loka POM di Kota Lubuklinggau	40.095.194,00	24.053.932,00	13.477.236,00	-	-	77.626.362,00
57	672852	Loka POM di Kabupaten Mimika	15.705.152,00	49.194.779,00	38.518.173,00	-	-	103.418.104,00
58	672853	Loka POM di Kabupaten Ende	11.916.325,00	106.479.589,00	140.867.115,00	-	-	259.263.029,00
59	672854	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13.504.750,00	17.693.580,00	114.784.989,00	-	-	145.983.319,00
60	690462	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25.508.250,00	38.656.124,00	16.170.905,00	-	-	80.335.279,00
61	690463	Loka POM di Aceh Tengah	45.704.206,00	2.338.240,00	-	-	-	48.042.446,00
62	690464	Loka POM di Kota Tanjungbalai	18.812.775,00	43.056.790,00	30.131.515,00	1.821.520,00	-	93.822.600,00
63	690466	Loka POM di Kabupaten Bungo	6.002.000,00	2.376.043,00	24.247.950,00	-	-	32.625.993,00
64	690467	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	26.819.840,00	21.129.680,00	20.539.570,00	275.000,00	-	68.764.090,00
65	690468	Loka POM di Kabupaten Sanggau	13.896.140,00	-	-	1.038.500,00	-	14.934.640,00
66	690469	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	104.957.619,00	38.070.700,00	22.045.100,00	131.500,00	-	165.204.919,00
67	690470	Loka POM di Kabupaten Tabalong	24.278.300,00	8.991.668,00	23.690.200,00	3.950.000,00	-	60.910.168,00
68	690471	Loka POM di Kota Balikpapan	16.947.233,00	25.852.333,00	9.495.495,00	102.700,00	-	52.397.761,00
69	690472	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	-	40.703.245,00	-	-	-	40.703.245,00
70	690473	Loka POM di Kabupaten Banggai	29.122.645,00	-	21.262.253,00	-	-	50.384.898,00
71	690474	Loka POM di Kabupaten Buleleng	38.865.180,00	12.474.700,00	199.800,00	1.165.500,00	-	52.705.180,00
72	690475	Loka POM di Kabupaten Bima	56.258.330,00	41.374.518,00	157.396.433,00	-	-	255.029.281,00
73	690476	Loka POM di Kabupaten Merauke	54.524.395,00	104.901.509,00	24.799.472,00	1.737.450,00	-	185.962.826,00
74	690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	70.218.039,00	53.322.101,00	69.757.883,00	2.621.105,00	-	195.919.128,00
75	690478	Loka POM di Kota Tanjungpinang	30.711.778,00	15.670.434,00	63.599.810,00	178.500,00	-	110.160.522,00
76	690479	Loka POM di Kabupaten Belitung	18.862.727,00	32.664.150,00	26.507.106,00	470.000,00	-	78.503.983,00
77	690480	Loka POM di Kabupaten Sorong	50.717.075,00	40.795.200,00	49.815.507,00	-	-	141.327.782,00
78	690481	Loka POM di Aceh Selatan	78.076.390,00	8.839.650,00	1.209.370,00	-	-	88.125.410,00
79	690482	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	11.350.274,00	19.050.340,00	-	-	-	30.400.614,00
80	690483	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	25.119.084,00	14.697.695,00	-	2.117.166,00	-	41.933.945,00
81	690484	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	64.510.148,00	7.710.830,00	15.823.050,00	-	-	88.044.028,00
82	690485	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	17.683.250,00	13.197.934,00	6.734.888,00	939.984,00	-	38.556.056,00
83	690486	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	22.199.060,00	14.952.100,00	-	-	-	37.151.160,00
			9.719.391.619,00	45.003.434.774,00	83.386.121.573,00	354.031.404,00	985.543.500,00	139.448.522.870,00

Lampiran 15. Persediaan Usang Rusak

**Daftar Persediaan Usang Rusak Per Satuan Kerja di BPOM
Per 31 Desember 2024 (Audited)**

No	Satker	Usang	Rusak	Total
1	Sekretariat Utama			0
2	Inspektorat Utama			0
3	Deputi I			0
4	Deputi II			0
5	Deputi III			0
6	Deputi IV			0
7	PUSDATIN			0
8	PPSDM			0
9	PPPOMN	59.488.494		59.488.494
10	PUSAKOM			0
11	BBPOM di Jakarta			0
12	BBPOM di Yogyakarta			0
13	BBPOM di Banda Aceh			0
14	BBPOM di Semarang			0
15	BBPOM di Banjarmasin			0
16	BBPOM di Makassar			0
17	BBPOM di Palembang			0
18	BBPOM di Padang			0
19	BBPOM di Surabaya			0
20	BBPOM di Pekanbaru	98.165.965		98.165.965
21	BBPOM di Mataram			0
22	BBPOM di Palangkaraya			0
23	BBPOM di Pontianak	18.432.247		18.432.247
24	BBPOM di Jayapura	41.707.668		41.707.668
25	BBPOM di Bandung			0
26	BBPOM di Medan	14.982.798		14.982.798
27	BBPOM di Lampung			0
28	BBPOM di Denpasar	18.892.879		18.892.879
29	BBPOM di Samarinda			0
30	BBPOM di Serang			0
31	BBPOM di Manado			0
32	BPOM di Jambi	22.961.127		22.961.127
33	BPOM di Batam	-		0
34	BPOM di Ambon			0
35	BPOM di Sofifi			0
36	BPOM di Palu	68.396.454		68.396.454
37	BPOM di Kendari			0
38	BPOM di Gorontalo			0
39	BPOM di Pangkal Pinang			0
40	BPOM di Bengkulu			0
41	BPOM di Mamuju			0
42	BPOM di Kupang	146.785.341		146.785.341
43	BPOM di Manokwari			0
44	Balai POM di Surakarta			0
45	Balai POM di Tarakan			0
46	Balai POM di Palopo			0
47	Balai POM di Kediri			0
48	Balai POM di Jember			0

Lampiran 15. Persediaan Usang Rusak

Daftar Persediaan Usang Rusak Per Satuan Kerja di BPOM
Per 31 Desember 2024 (Audited)

No	Satker	Usang	Rusak	Total
49	Balai POM di Bogor			0
50	Balai POM di Tasikmalaya			0
51	Balai POM di Tangerang			0
52	Balai POM di Payakumbuh			0
53	Loka POM di Banyumas			0
54	Loka POM di Lubuk Linggau			0
55	Loka POM di Kepulauan Tanimbar			0
56	Loka POM di Dumai			0
57	Loka POM di Baubau			0
58	Loka POM di Mimika			0
59	Loka POM di Aceh Tengah			0
60	Loka POM di Aceh Selatan			0
61	Loka POM di Bungo			0
62	Loka POM di Tanjung Pinang			0
63	Loka POM di Tabalong			0
64	Loka POM di Tanah Bumbu			0
65	Loka POM di Morotai			0
66	Loka POM di Banggai			0
67	Loka POM di Ende			0
68	Loka POM di Dharmasraya			0
69	Loka POM di Indragiri Hulu			0
70	Loka POM di Bima			0
71	Loka POM di Kotawaringin Barat			0
72	Loka POM di Sanggau			0
73	Loka POM di Belitung			0
74	Loka POM di Merauke			0
75	Loka POM di Rejang Lebong			0
76	Loka POM di Toba			0
77	Loka POM di Tanjung Balai			0
78	Loka POM di Tulang Bawang			0
79	Loka POM di Buleleng	22.450.860		22.450.860
80	Loka POM di Balikpapan			0
81	Loka POM di Manggarai			0
82	Loka POM di Sorong			0
83	Loka POM di Sangihe			0
	Total	512.263.833	0	512.263.833

**DAFTAR SALDO AKRUAL TANAH PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

No	KODE	NAMA SAKTER	NILAI
1	432731	Settama	619.414.000.000,00
2	432747	Balai Besar POM di Jakarta	9.607.263.000,00
3	432753	Balai Besar POM di Bandung	100.253.848.000,00
4	432762	Balai Besar POM di Semarang	84.158.768.000,00
5	432778	Balai Besar POM di Yogyakarta	37.339.782.000,00
6	432784	Balai Besar POM di Surabaya	162.362.199.600,00
7	432790	Balai Besar POM di Banda Aceh	11.555.607.000,00
8	432804	Balai Besar POM di Medan	31.569.958.000,00
9	432810	Balai Besar POM di Padang	4.528.982.000,00
10	432829	Balai Besar POM di Pekanbaru	26.373.470.000,00
11	432841	Balai Besar POM di Palembang	3.394.603.000,00
12	432850	Balai Besar POM di Bandar Lampung	59.614.817.926,00
13	432866	Balai Besar POM di Pontianak	12.055.395.000,00
14	432872	Balai Besar POM di Palangkaraya	27.684.393.000,00
15	432881	Balai Besar POM di Banjarmasin	34.017.046.069,00
16	432897	Balai Besar POM di Samarinda	18.274.398.000,00
17	432901	Balai Besar POM di Manado	2.565.585.000,00
18	432923	Balai Besar POM di Makassar	37.457.820.000,00
19	432954	Balai Besar POM di Denpasar	98.676.000.000,00
20	432960	Balai Besar POM di Mataram	26.237.077.000,00
21	432985	Balai Besar POM di Jayapura	23.140.675.100,00
22	432991	Balai POM di Bengkulu	16.642.376.000,00
23	432979	Balai POM di Kupang	5.453.559.000,00
24	419508	Balai POM di Sofifi	1.369.902.000,00
25	419578	Balai POM di Mamuju	9.999.646.414,00
26	432835	Balai POM di Jambi	11.724.837.986,00
27	432917	Balai POM di Palu	12.056.912.000,00
28	672838	Balai POM di Batam	10.514.396.000,00
29	672839	Balai POM di Surakarta	10.829.045.000,00
30	672840	Balai POM di Tasikmalaya	5.472.465.300,00
31	672842	Balai POM di Pangkal Pinang	3.202.708.111,00
32	432932	Balai POM di Kendari	32.102.564.836,00
33	432948	Balai POM di Ambon	6.229.043.000,00

**DAFTAR SALDO AKRUAL TANAH PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

No	KODE	NAMA SAKTER	NILAI
34	672859	Balai POM di Gorontalo	3.685.166.000,00
35	689071	Balai POM di Manokwari	13.333.226.000,00
36	672845	Balai POM di Palopo	1.399.915.120,00
37	672848	Balai POM di Tarakan	24.367.764.000,00
38	690465	Balai POM di Payakumbuh	7.753.800.342,00
39	672844	Loka POM di Kabupaten Banyumas	10.424.038.000,00
40	672849	Loka POM di Kota Dumai	24.550.714.000,00
41	672850	Loka POM di Kota Baubau	4.497.042.000,00
42	672851	Loka POM di Kota Lubuklinggau	6.065.021.000,00
43	672852	Loka POM di Kabupaten Mimika	2.801.456.000,00
44	672853	Loka POM di Kabupaten Ende	2.641.561.700,00
45	672854	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	257.017.000,00
46	690462	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1.090.652.000,00
47	690463	Loka POM di Aceh Tengah	4.406.474.500,00
48	690464	Loka POM di Kota Tanjungbalai	603.367.000,00
49	690466	Loka POM di Kabupaten Bungo	2.315.250.000,00
50	690467	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	607.338.000,00
51	690468	Loka POM di Kabupaten Sanggau	4.200.000.000,00
52	690469	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	660.163.240,00
53	690470	Loka POM di Kabupaten Tabalong	3.865.107.840,00
54	690471	Loka POM di Kota Balikpapan	8.673.500.000,00
55	690472	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	858.968.239,00
56	690473	Loka POM di Kabupaten Banggai	1.683.524.250,00
57	690474	Loka POM di Kabupaten Buleleng	7.638.357.000,00
58	690475	Loka POM di Kabupaten Bima	2.552.398.000,00
59	690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4.257.833.000,00
60	690479	Loka POM di Kabupaten Belitung	2.596.821.000,00
61	690480	Loka POM di Kabupaten Sorong	7.415.223.700,00
62	690481	Loka POM di Aceh Selatan	706.891.324,00
63	690482	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	5.034.668.901,00
64	690483	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	1.436.360.189,00
65	690484	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	1.246.580.000,00
66	690485	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1.286.840.000,00

DAFTAR SALDO AKRUAL TANAH PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

No	KODE	NAMA SAKTER	NILAI
67	690486	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	5.408.480.000,00
68	672841	Loka POM di Kabupaten Kediri	622.000.000,00
TOTAL			1.726.822.662.687,

Lampiran 17. Peralatan dan Mesin

**DAFTAR SALDO AKRUAL PERALATAN DAN MESIN PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

NO	KODE	NAMA SAKTER	NILAI
1	432731	Settama	120.776.460.236,00
2	433005	Ittama	4.863.985.456,00
3	445155	Deputi I	24.356.636.551,00
4	445161	Deputi II	16.830.712.018,00
5	445170	Deputi III	26.650.116.382,00
6	632420	PPPOMN	340.198.211.373,00
7	632437	Deputi IV	44.195.852.149,00
8	632441	PUSAKOM	3.828.447.169,00
9	632458	PUSDATIN	108.905.104.603,00
10	672828	PPSDM	4.847.670.710,00
11	432747	Balai Besar POM di Jakarta	81.277.128.336,00
12	432753	Balai Besar POM di Bandung	74.582.531.597,00
13	432762	Balai Besar POM di Semarang	104.115.831.569,00
14	432778	Balai Besar POM di Yogyakarta	98.739.624.280,00
15	432784	Balai Besar POM di Surabaya	111.683.894.126,00
16	432790	Balai Besar POM di Banda Aceh	69.316.302.094,00
17	432804	Balai Besar POM di Medan	105.408.992.050,00
18	432810	Balai Besar POM di Padang	76.044.471.721,00
19	432829	Balai Besar POM di Pekanbaru	95.708.023.218,00
20	432841	Balai Besar POM di Palembang	67.362.083.783,00
21	432850	Balai Besar POM di Bandar Lampung	56.507.823.320,00
22	432866	Balai Besar POM di Pontianak	66.474.695.912,00
23	432872	Balai Besar POM di Palangkaraya	62.089.689.091,00
24	432881	Balai Besar POM di Banjarmasin	59.828.931.574,00
25	432897	Balai Besar POM di Samarinda	79.319.577.327,00
26	432901	Balai Besar POM di Manado	104.964.530.056,00
27	432923	Balai Besar POM di Makassar	112.171.706.207,00
28	432954	Balai Besar POM di Denpasar	97.773.542.254,00
29	432960	Balai Besar POM di Mataram	85.019.322.212,00
30	672821	Balai Besar POM di Serang	71.111.784.955,00
31	432985	Balai Besar POM di Jayapura	60.961.200.970,00
32	432991	Balai POM di Bengkulu	57.969.849.272,00
33	432979	Balai POM di Kupang	66.912.831.553,00
34	419508	Balai POM di Sofifi	26.832.181.475,00
35	419578	Balai POM di Mamuju	34.663.194.020,00
36	432835	Balai POM di Jambi	67.025.388.425,00
37	432917	Balai POM di Palu	62.006.289.517,00
38	672838	Balai POM di Batam	60.086.393.766,00
39	672839	Balai POM di Surakarta	4.080.687.514,00
40	672840	Balai POM di Tasikmalaya	4.403.815.811,00
41	672841	Balai POM di Kediri	4.208.083.556,00
42	672842	Balai POM di Pangkal Pinang	53.915.829.866,00
43	432932	Balai POM di Kendari	54.873.741.592,00
44	432948	Balai POM di Ambon	60.604.202.901,00

Lampiran 17. Peralatan dan Mesin

**DAFTAR SALDO AKRUAL PERALATAN DAN MESIN PER SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)**

NO	KODE	NAMA SAKTER	NILAI
45	672843	Balai POM di Jember	4.455.397.494,00
46	672859	Balai POM di Gorontalo	59.525.521.336,00
47	689071	Balai POM di Manokwari	53.744.068.114,00
48	672845	Balai POM di Palopo	4.175.129.969,00
49	672846	Balai POM di Bogor	4.798.608.766,00
50	672847	Balai POM di Tangerang	4.733.727.832,00
51	672848	Balai POM di Tarakan	11.856.870.004,00
52	690465	Balai POM di Payakumbuh	4.842.506.079,00
53	672844	Loka POM di Kabupaten Banyumas	1.733.734.395,00
54	672849	Loka POM di Kota Dumai	2.757.598.125,00
55	672850	Loka POM di Kota Baubau	2.123.202.822,00
56	672851	Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.964.674.018,00
57	672852	Loka POM di Kabupaten Mimika	2.000.463.798,00
58	672853	Loka POM di Kabupaten Ende	9.328.560.737,00
59	672854	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.168.057.112,00
60	690462	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1.897.100.513,00
61	690463	Loka POM di Aceh Tengah	1.856.841.572,00
62	690464	Loka POM di Kota Tanjungbalai	1.334.167.258,00
63	690466	Loka POM di Kabupaten Bungo	1.578.829.497,00
64	690467	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	1.440.486.204,00
65	690468	Loka POM di Kabupaten Sanggau	2.990.874.859,00
66	690469	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	1.733.374.922,00
67	690470	Loka POM di Kabupaten Tabalong	1.380.506.741,00
68	690471	Loka POM di Kota Balikpapan	1.751.373.108,00
69	690472	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.171.244.301,00
70	690473	Loka POM di Kabupaten Banggai	1.795.458.875,00
71	690474	Loka POM di Kabupaten Buleleng	2.288.427.143,00
72	690475	Loka POM di Kabupaten Bima	2.986.940.281,00
73	690476	Loka POM di Kabupaten Merauke	2.272.650.389,00
74	690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	2.066.656.111,00
75	690478	Loka POM di Kota Tanjungpinang	1.703.815.930,00
76	690479	Loka POM di Kabupaten Belitung	1.756.233.703,00
77	690480	Loka POM di Kabupaten Sorong	2.115.533.783,00
78	690481	Loka POM di Aceh Selatan	1.461.397.700,00
79	690482	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	1.364.540.053,00
80	690483	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	1.585.391.033,00
81	690484	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	2.367.117.971,00
82	690485	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	1.752.798.263,00
83	690486	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	2.010.817.093,00
TOTAL			3.209.368.070.471,00

Lampiran 19. Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Nama Satuan Kerja	Nilai
1	Settama	250.211.245.569,
2	PPPOMN	46.707.269.846,
3	PUSDATIN	23.024.260.322,
4	Balai Besar POM di Banda Aceh	11.253.722.402,
5	Balai Besar POM di Bandar Lampung	14.502.845.543,
6	Balai Besar POM di Bandung	21.343.244.531,
7	Balai Besar POM di Banjarmasin	70.862.464.656,
8	Balai Besar POM di Denpasar	12.175.348.962,
9	Balai Besar POM di Jakarta	22.421.783.977,
10	Balai Besar POM di Jayapura	57.129.116.600,
11	Balai Besar POM di Makassar	21.592.623.798,
12	Balai Besar POM di Manado	13.951.815.941,
13	Balai Besar POM di Mataram	14.500.076.359,
14	Balai Besar POM di Medan	15.482.842.309,
15	Balai Besar POM di Padang	12.163.605.113,
16	Balai Besar POM di Palangkaraya	15.089.721.373,
17	Balai Besar POM di Palembang	22.677.908.811,
18	Balai Besar POM di Pekanbaru	19.043.989.708,
19	Balai Besar POM di Pontianak	11.672.257.500,
20	Balai Besar POM di Samarinda	23.401.574.772,
21	Balai Besar POM di Semarang	71.436.933.733,
22	Balai Besar POM di Serang	14.582.772.912,
23	Balai Besar POM di Surabaya	17.551.637.383,
24	Balai Besar POM di Yogyakarta	26.290.167.296,
25	Balai POM di Ambon	18.931.547.511,
26	Balai POM di Batam	20.460.366.542,
27	Balai POM di Bengkulu	15.880.143.200,
28	Balai POM di Gorontalo	12.871.166.700,
29	Balai POM di Jambi	10.289.523.625,
30	Balai POM di Kediri	957.192.518,
31	Balai POM di Kendari	19.273.640.142,
32	Balai POM di Kupang	12.914.712.466,
33	Balai POM di Mamuju	20.690.253.151,
34	Balai POM di Manokwari	24.855.636.800,
35	Balai POM di Palu	10.974.887.087,
36	Balai POM di Pangkal Pinang	8.002.296.350,
37	Balai POM di Sofifi	16.370.320.879,

Lampiran 19. Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Nama Satuan Kerja	Nilai
38	Balai POM di Surakarta	991.383.000,
39	Balai POM di Tarakan	574.064.000,
40	Loka POM di Aceh Tengah	6.822.010.076,
41	Loka POM di Kabupaten Belitung	89.336.700,
42	Loka POM di Kabupaten Bima	1.412.486.000,
43	Loka POM di Kabupaten Ende	1.227.163.200,
44	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	553.495.645,
45	Loka POM di Kabupaten Merauke	4.193.794.000,
46	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	9.420.039.423,
47	Loka POM di Kabupaten Sanggau	6.377.610.926,
48	Loka POM di Kabupaten Sorong	949.555.868,
49	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	511.766.503,
50	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	813.441.000,
51	Loka POM di Kota Baubau	1.498.246.100,
52	Loka POM di Kota Lubuklinggau	442.561.000,
TOTAL		1.057.417.869.828,00

Lampiran 20. Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Jalan dan Jembatan	Irigasi	Jaringan	Total JIJ
1	Settama	839.400.000,00	1.312.506.000,00	500.113.735,00	2.652.019.735,00
2	PPOMN		438.880.000,00		438.880.000,00
3	Balai Besar POM di Banda Aceh		53.887.000,00	347.020.000,00	400.907.000,00
4	Balai Besar POM di Bandar Lampung	166.282.000,00	69.037.000,00	168.577.000,00	403.896.000,00
5	Balai Besar POM di Banjarmasin		3.823.937.579,00	1.787.230.225,00	5.611.167.804,00
6	Balai Besar POM di Denpasar			484.773.000,00	484.773.000,00
7	Balai Besar POM di Jakarta	122.468.000,00	49.575.000,00		172.043.000,00
8	Balai Besar POM di Jayapura		296.534.000,00	671.832.500,00	968.366.500,00
9	Balai Besar POM di Makassar			463.074.700,00	463.074.700,00
10	Balai Besar POM di Manado		34.627.000,00	166.962.000,00	201.589.000,00
11	Balai Besar POM di Mataram		43.078.000,00	244.497.500,00	287.575.500,00
12	Balai Besar POM di Medan		23.504.115,00	644.427.137,00	667.931.252,00
13	Balai Besar POM di Padang			865.840.900,00	865.840.900,00
14	Balai Besar POM di Palangkaraya		79.183.000,00	462.771.000,00	541.954.000,00
15	Balai Besar POM di Palembang		70.313.000,00	680.031.500,00	750.344.500,00
16	Balai Besar POM di Pekanbaru		61.726.000,00	2.222.768.350,00	2.284.494.350,00
17	Balai Besar POM di Pontianak	130.659.000,00	120.515.000,00	350.888.950,00	602.062.950,00
18	Balai Besar POM di Samarinda		128.396.000,00	413.326.345,00	541.722.345,00
19	Balai Besar POM di Semarang		118.880.000,00	916.272.336,00	1.035.152.336,00
20	Balai Besar POM di Serang	347.226.732,00		37.040.000,00	384.266.732,00
21	Balai Besar POM di Surabaya		107.967.000,00	2.080.418.957,00	2.188.385.957,00
22	Balai Besar POM di Yogyakarta			922.642.528,00	922.642.528,00
23	Balai POM di Ambon		184.049.507,00	135.000.000,00	319.049.507,00
24	Balai POM di Batam		50.061.000,00	554.466.800,00	604.527.800,00
25	Balai POM di Gorontalo		169.654.000,00	8.494.695,00	178.148.695,00
26	Balai POM di Jambi		189.400.000,00	89.816.400,00	279.216.400,00
27	Balai POM di Kendari	457.357.000,00	36.177.000,00	249.877.700,00	743.411.700,00
28	Balai POM di Kupang		5.955.000,00	469.847.586,00	475.802.586,00
29	Balai POM di Mamuju		2.229.934.153,00		2.229.934.153,00
30	Balai POM di Manokwari		271.583.000,00	698.428.927,00	970.011.927,00
31	Balai POM di Palu		5.850.000,00	431.036.000,00	436.886.000,00
32	Balai POM di Pangkal Pinang		36.735.000,00	84.238.710,00	120.973.710,00
33	Loka POM di Kabupaten Ende		2.134.000,00	35.000.000,00	37.134.000,00
34	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe		154.223.000,00		154.223.000,00
35	Loka POM di Kabupaten Merauke		158.361.000,00		158.361.000,00
36	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang			18.957.240,00	18.957.240,00
	TOTAL	2.063.392.732,00	10.326.662.354,00	17.205.672.721,00	29.595.727.807,00

Lampiran 21. Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Aset Tetap Renovasi	Aset Tetap Lainnya	Total Aset Tetap Lainnya
1	Settama		853.791.382,00	853.791.382,00
2	Deputi I		2.626.411.698,00	2.626.411.698,00
3	Deputi II		302.765.200,00	302.765.200,00
4	Deputi III		284.112.693,00	284.112.693,00
5	Deputi IV		65.041.370,00	65.041.370,00
6	PPPOMN		1.947.243.423,00	1.947.243.423,00
7	PPSDM		4.330.773.655,00	4.330.773.655,00
8	Balai Besar POM di Banda Aceh		116.787.100,00	116.787.100,00
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung		72.459.889,00	72.459.889,00
10	Balai Besar POM di Bandung		177.561.703,00	177.561.703,00
11	Balai Besar POM di Banjarmasin		175.578.783,00	175.578.783,00
12	Balai Besar POM di Denpasar		135.829.203,00	135.829.203,00
13	Balai Besar POM di Jakarta		184.707.013,00	184.707.013,00
14	Balai Besar POM di Jayapura		97.405.399,00	97.405.399,00
15	Balai Besar POM di Makassar		309.830.100,00	309.830.100,00
16	Balai Besar POM di Manado		103.691.853,00	103.691.853,00
17	Balai Besar POM di Mataram		13.353.800,00	13.353.800,00
18	Balai Besar POM di Medan		109.079.878,00	109.079.878,00
19	Balai Besar POM di Padang		250.086.653,00	250.086.653,00
20	Balai Besar POM di Palangkaraya		117.787.370,00	117.787.370,00
21	Balai Besar POM di Palembang		89.718.600,00	89.718.600,00
22	Balai Besar POM di Pekanbaru		164.730.260,00	164.730.260,00
23	Balai Besar POM di Pontianak		35.198.800,00	35.198.800,00
24	Balai Besar POM di Samarinda		215.011.707,00	215.011.707,00
25	Balai Besar POM di Semarang		58.721.400,00	58.721.400,00
26	Balai Besar POM di Serang		240.659.561,00	240.659.561,00
27	Balai Besar POM di Surabaya		207.022.043,00	207.022.043,00
28	Balai Besar POM di Yogyakarta		70.366.069,00	70.366.069,00
29	Balai POM di Ambon		24.276.853,00	24.276.853,00
30	Balai POM di Batam		126.414.800,00	126.414.800,00
31	Balai POM di Bengkulu		33.293.800,00	33.293.800,00
32	Balai POM di Bogor		-	-
33	Balai POM di Gorontalo		130.828.800,00	130.828.800,00
34	Balai POM di Jambi		45.157.050,00	45.157.050,00
35	Balai POM di Jember	291.187.950,00	6.675.300,00	297.863.250,00
36	Balai POM di Kediri	308.666.854,00	5.319.250,00	313.986.104,00
37	Balai POM di Kendari		272.393.462,00	272.393.462,00
38	Balai POM di Kupang		65.359.099,00	65.359.099,00
39	Balai POM di Mamuju		12.093.800,00	12.093.800,00
40	Balai POM di Manokwari		124.683.043,00	124.683.043,00
41	Balai POM di Palu		515.440.905,00	515.440.905,00
42	Balai POM di Pangkal Pinang		58.912.300,00	58.912.300,00
43	Balai POM di Payakumbuh	57.476.140,00	-	57.476.140,00
44	Balai POM di Sofifi		12.793.800,00	12.793.800,00
45	Balai POM di Surakarta	148.374.230,00		148.374.230,00
46	Loka POM di Kabupaten Banyumas		2.600.000,00	2.600.000,00
47	Loka POM di Kabupaten Belitung		550.000,00	550.000,00
48	Loka POM di Kabupaten Bima		4.769.250,00	4.769.250,00
49	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		1.190.000,00	1.190.000,00
50	Loka POM di Kabupaten Merauke		1.221.000,00	1.221.000,00
51	Loka POM di Kabupaten Sorong		3.130.000,00	3.130.000,00
52	Loka POM di Kabupaten Tabalong		1.320.000,00	1.320.000,00
53	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang		1.999.000,00	1.999.000,00
54	Loka POM di Kota Balikpapan		3.168.250,00	3.168.250,00
55	Loka POM di Kota Dumai		555.000,00	555.000,00
56	Loka POM di Kota Lubuklinggau		1.000.000,00	1.000.000,00
57	Loka POM di Kota Tanjungpinang		1.580.000,00	1.580.000,00
	TOTAL	805.705.174,00	14.812.451.367,00	15.618.156.541,00

Lampiran 22. Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Nama Satuan Kerja	Software	Hasil Kajian/ Penelitian	ATB Lainnya	Total ATB
1	Settama	4.831.513.300,00			4.831.513.300,
2	Ittama	1.085.450.767,00			1.085.450.767,
3	Deputi I	5.602.314.640,00			5.602.314.640,
4	Deputi II	1.696.504.400,00			1.696.504.400,
5	Deputi III	6.556.558.570,00			6.556.558.570,
6	PPPOMN	5.084.554.321,00			5.084.554.321,
7	Deputi IV	253.000.000,00			253.000.000,
8	PUSAKOM	736.014.750,00	150.405.000,00		886.419.750,
9	PUSDATIN	58.025.195.990,00	47.295.910.485,00		105.321.106.475,
10	PPSDM	1.748.131.400,00		138.844.800,00	1.886.976.200,
11	Balai Besar POM di Yogyakarta	56.980.000,00			56.980.000,
12	Balai Besar POM di Padang	39.930.000,00			39.930.000,
13	Balai POM di Jambi	17.600.000,00			17.600.000,
14	Balai Besar POM di Bandar Lampung	7.700.000,00			7.700.000,
15	Balai Besar POM di Pontianak	99.000.000,00			99.000.000,
16	Balai POM di Palu	51.560.000,00			51.560.000,
17	Balai Besar POM di Denpasar	1.075.411.841,00			1.075.411.841,
TOTAL		86.967.419.979,00	47.446.315.485,00	138.844.800,00	134.552.580.264,00

Lampiran 23. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam rupiah)

No.	Satuan Kerja	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga
1	Settama	3.712.267.551,00
2	Deputi III	32.055.912,00
3	Ittama	32.169.860,00
4	PPPOMN	280.350.000,00
5	PPSDM	201.410.562,00
6	PUSDATIN	1.771.936.000,00
7	Balai Besar POM di Banda Aceh	89.300.000,00
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	256.571.965,00
9	Balai Besar POM di Bandung	152.798.726,00
10	Balai Besar POM di Banjarmasin	123.903.656,00
11	Balai Besar POM di Jakarta	225.125.658,00
12	Balai Besar POM di Jayapura	88.462.424,00
13	Balai Besar POM di Makassar	405.627.242,00
14	Balai Besar POM di Manado	100.832.000,00
15	Balai Besar POM di Mataram	43.489.660,00
16	Balai Besar POM di Padang	230.727.800,00
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	70.849.802,00
18	Balai Besar POM di Pontianak	74.423.292,00
19	Balai Besar POM di Semarang	117.330.016,00
20	Balai Besar POM di Serang	137.036.912,00
21	Balai Besar POM di Surabaya	341.137.595,00
22	Balai Besar POM di Yogyakarta	161.655.444,00
23	Balai POM di Ambon	1.453.366.629,00
24	Balai POM di Batam	124.206.950,00
25	Balai POM di Bengkulu	79.642.568,00
26	Balai POM di Bogor	46.858.375,00
27	Balai POM di Kediri	486.085.950,00
28	Balai POM di Kendari	34.536.131,00
29	Balai POM di Kupang	754.973.896,00
30	Balai POM di Mamuju	110.626.891,00
31	Balai POM di Manokwari	1.332.582.581,00
32	Balai POM di Palopo	44.001.965,00
33	Balai POM di Palu	98.319.791,00
34	Balai POM di Pangkal Pinang	20.527.666,00
35	Balai POM di Payakumbuh	3.274.054.729,00
36	Balai POM di Sofifi	40.882.000,00
37	Balai POM di Surakarta	46.750.745,00
38	Balai POM di Tasikmalaya	120.668.933,00
39	Loka POM di Kabupaten Banyumas	12.172.552,00
40	Loka POM di Kabupaten Belitung	15.877.000,00
41	Loka POM di Kabupaten Buleleng	25.850.863,00
42	Loka POM di Kabupaten Bungo	18.206.392,00
43	Loka POM di Kabupaten Ende	24.621.832,00
44	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	300.503.751,00
45	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	429.259.360,00
46	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	120.257.000,00
47	Loka POM di Kabupaten Tabalong	14.643.837,00
48	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	22.322.866,00
49	Loka POM di Kota Balikpapan	30.250.385,00
50	Loka POM di Kota Dumai	305.065.962,00
51	Loka POM di Kota Lubuklinggau	15.153.634,00
	TOTAL	18.051.733.311,00

Lampiran 24. Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Belanja Pegawai yang Masih Harus	Belanja Barang yang Masih Harus	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	Total Utang Kepada Pihak Ketiga
1	432731	Settama	32.472.992.972,00	434.333.656,00	3.616.950.796,00		36.524.277.424,00
2	445155	Deputi I		79.778,00	-		79.778,00
3	445161	Deputi II		-	-		-
4	445170	Deputi III		153.335,00	32.055.912,00		32.209.247,00
5	632437	Deputi IV		-	-	254.988.965,00	254.988.965,00
6	433005	Ittama	8.097.227,00	-	32.169.860,00		40.267.087,00
7	632420	PPPOMN	2.533.932,00	410.874.457,00	280.350.000,00		693.758.389,00
8	672828	PPSDM	1.456.798,00	-	201.410.562,00		202.867.360,00
9	632441	PUSAKOM	1.005.546,00	227.088,00	-		1.232.634,00
10	632458	PUSDATIN	-	-	1.771.936.000,00		1.771.936.000,00
11	432790	Balai Besar POM di Banda Aceh	41.438.000,00	-	89.300.000,00		130.738.000,00
12	432850	Balai Besar POM di Bandar Lampung	-	57.894.555,00	256.571.965,00		314.466.520,00
13	432753	Balai Besar POM di Bandung	32.013.001,00	54.737.254,00	152.798.726,00		239.548.981,00
14	432881	Balai Besar POM di Banjarmasin	-	59.861.082,00	123.903.656,00		183.764.738,00
15	432954	Balai Besar POM di Denpasar	260.000,00	65.333.980,00	-		65.593.980,00
16	432747	Balai Besar POM di Jakarta	2.701.000,00	75.447.752,00	225.125.658,00		303.274.410,00
17	432985	Balai Besar POM di Jayapura	2.406.565,00	49.557.467,00	88.462.424,00		140.426.456,00
18	432923	Balai Besar POM di Makassar	-	84.068.819,00	405.627.242,00		489.696.061,00
19	432901	Balai Besar POM di Manado	-	60.110.182,00	100.832.000,00		160.942.182,00
20	432960	Balai Besar POM di Mataram	10.858.000,00	65.266.224,00	43.489.660,00		119.613.884,00
21	432804	Balai Besar POM di Medan	1.085.147,00	73.759.033,00	-		74.844.180,00
22	432810	Balai Besar POM di Padang	-	74.720.233,00	230.727.800,00		305.448.033,00
23	432872	Balai Besar POM di Palangkaraya	-	45.257.542,00	-		45.257.542,00
24	432841	Balai Besar POM di Palembang	-	87.430.578,00	-		87.430.578,00
25	432829	Balai Besar POM di Pekanbaru	-	97.012.935,00	70.849.802,00		167.862.737,00
26	432866	Balai Besar POM di Pontianak	90.500,00	53.139.455,00	74.423.292,00		127.653.247,00
27	432897	Balai Besar POM di Samarinda	-	71.384.591,00	-		71.384.591,00
28	432762	Balai Besar POM di Semarang	725.000,00	100.673.734,00	117.330.016,00		218.728.750,00
29	672821	Balai Besar POM di Serang	550.300,00	56.827.090,00	137.036.912,00		194.414.302,00
30	432784	Balai Besar POM di Surabaya	-	131.167.103,00	341.137.595,00		472.304.698,00
31	432778	Balai Besar POM di Yogyakarta	-	86.543.564,00	161.655.444,00		248.199.008,00
32	432948	Balai POM di Ambon	756.850,00	59.215.689,00	1.453.366.629,00		1.513.339.168,00
33	672838	Balai POM di Batam	-	85.500.004,00	124.206.950,00		209.706.954,00
34	432991	Balai POM di Bengkulu	5.027.000,00	93.567.060,00	79.642.568,00		178.236.628,00
35	672846	Balai POM di Bogor	-	4.648.684,00	46.858.375,00		51.507.059,00
36	672859	Balai POM di Gorontalo	275.862,00	49.667.873,00	-		49.943.735,00
37	432835	Balai POM di Jambi	-	66.391.609,00	-		66.391.609,00
38	672843	Balai POM di Jember	-	6.968.466,00	-		6.968.466,00
39	672841	Balai POM di Kediri	-	8.009.348,00	486.085.950,00		494.095.298,00
40	432932	Balai POM di Kendari	20.678.000,00	51.106.387,00	34.536.131,00		106.320.518,00
41	432979	Balai POM di Kupang	31.674.000,00	36.839.672,00	643.622.657,00		712.136.329,00
42	419578	Balai POM di Mamuju	-	43.081.189,00	110.626.891,00		153.708.080,00
43	689071	Balai POM di Manokwari	-	2.965.500,00	1.133.982.281,00		1.136.947.781,00
44	672845	Balai POM di Palopo	3.843.452,00	4.702.813,00	44.001.965,00		52.548.230,00
45	432917	Balai POM di Palu	-	37.100.558,00	98.319.791,00		135.420.349,00
46	672842	Balai POM di Pangkal Pinang	-	47.194.835,00	20.527.666,00		67.722.501,00
47	690465	Balai POM di Payakumbuh	4.166.321,00	6.065.988,00	327.326.406,00		337.558.715,00
48	419508	Balai POM di Soffi	-	41.530.873,00	40.882.000,00		82.412.873,00
49	672839	Balai POM di Surakarta	29.854.756,00	3.005.668,00	46.750.745,00		79.611.169,00
50	672847	Balai POM di Tangerang	-	12.918.588,00	-		12.918.588,00
51	672848	Balai POM di Tarakan	-	16.261.439,00	-		16.261.439,00
52	672840	Balai POM di Tasikmalaya	-	4.864.718,00	120.668.933,00		125.533.651,00
53	690481	Loka POM di Aceh Selatan	-	776.550,00	-		776.550,00
54	690463	Loka POM di Aceh Tengah	-	9.648.952,00	-		9.648.952,00
55	690473	Loka POM di Kabupaten Banggai	2.175.000,00	2.908.053,00	-		5.083.053,00
56	672844	Loka POM di Kabupaten Banyumas	-	2.870.192,00	12.172.552,00		15.042.744,00
57	690479	Loka POM di Kabupaten Belitung	-	1.661.381,00	15.877.000,00		17.538.381,00
58	690475	Loka POM di Kabupaten Bima	-	7.167.166,00	-		7.167.166,00
59	690474	Loka POM di Kabupaten Buleleng	-	4.220.203,00	25.856.263,00		30.076.466,00
60	690466	Loka POM di Kabupaten Bungo	-	4.144.495,00	18.206.392,00		22.350.887,00
61	690483	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	-	1.981.884,00	-		1.981.884,00
62	672853	Loka POM di Kabupaten Ende	-	10.192.073,00	24.621.832,00		34.813.905,00
63	690484	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	-	4.211.459,00	300.503.751,00		304.715.210,00
64	690472	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	-	4.275.748,00	-		4.275.748,00
65	672854	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	861.300,00	665.400,00	387.469.360,00		388.996.060,00
66	690469	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	-	5.203.023,00	-		5.203.023,00
67	690486	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	125.300,00	810.300,00	-		935.600,00
68	690476	Loka POM di Kabupaten Merauke	-	1.006.480,00	-		1.006.480,00
69	672852	Loka POM di Kabupaten Mimika	-	-	-		-
70	690462	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-		-
71	690477	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4.194.000,00	4.956.178,00	120.257.000,00		129.407.178,00
72	690468	Loka POM di Kabupaten Sanggau	1.781.000,00	8.264.341,00	-		10.045.341,00
73	690480	Loka POM di Kabupaten Sorong	6.229.362,00	-	-		6.229.362,00

Lampiran 24. Utang Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No.	Kode Satker	Satuan Kerja	Belanja Pegawai yang Masih Harus	Belanja Barang yang Masih Harus	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Dana Pihak Ketiga	Total Utang Kepada Pihak Ketiga
74	690470	Loka POM di Kabupaten Tabalong	6.328.000,00	3.237.510,00	14.643.837,00		24.209.347,00
75	690485	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	-	1.459.728,00	-		1.459.728,00
76	690482	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	-	2.142.940,00	-		2.142.940,00
77	690467	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	-	1.499.557,00	22.322.866,00		23.822.423,00
78	690471	Loka POM di Kota Balikpapan	-	2.475.235,00	30.250.385,00		32.725.620,00
79	672850	Loka POM di Kota Baubau	-	5.197.733,00	-		5.197.733,00
80	672849	Loka POM di Kota Dumai	-	-	305.065.962,00		305.065.962,00
81	672851	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	6.567.202,00	15.153.634,00		21.720.836,00
82	690464	Loka POM di Kota Tanjungbalai	5.741.000,00	91.600,00	-		5.832.600,00
83	690478	Loka POM di Kota Tanjungpinang	136.480,00	2.026.687,00	-		2.163.167,00
		TOTAL	32.702.061.671,00	3.077.130.518,00	14.657.952.094,00	254.988.965,00	50.692.133.248,00

**PERINCIAN KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TA 2024 UNAUDITED**

NO	SATKER	NILAI
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	4.505.118,00
2	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	10.514.273,00
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	(324.775,00)
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	(233.328.949,00)
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	30.927.404,00
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	(254.002.000,00)
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	(8.400.000,00)
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	115.666.834,00
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	111.775.003,00
10	BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN	(75.509.923,00)
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	(195.224.085,00)
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	(555.000,00)
13	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	(133.332,00)
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	(10.278.529,00)
15	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	17.671.200,00
16	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	462.479.253,00
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	3.932.500,00
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	708.579.884,00
19	BALAI BESAR POM DI KUPANG	120.000,00
20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	30.715.187,00
21	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,	(32.250.000,00)
22	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	70.759.467,00
23	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	(30,00)
24	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	52.547.400,00
25	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	(25.122.483,00)
26	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	(32.555.706,00)
27	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT	(2.773.272,00)
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	22.899.750,00
29	BALAI POM DI SURAKARTA	10.415.161.071,00
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	(13.194.606,00)
31	BALAI POM DI JEMBER	37.562.429,00
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	1.955.984.160,00
33	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	(12.241.071,00)
34	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	(2.410.468,00)

35	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	(340.278.174,00)
36	LOKA POM DI ACEH TENGAH	(101.452.822,00)
37	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	18.548.990,00
38	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	2.066.140.000,00
39	BALAI POM DI SANGGAU	(19.180.172,00)
40	BALAI POM DI TABALONG	(2.726.186,00)
41	BALAI POM DI BALIKPAPAN	1.728.250,00
42	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	(650.000,00)
43	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.038.208,00
44	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	550.000,00
JUMLAH		14.780.214.798,00

PERINCIAN TRANSFER MASUK DAN TRANSFER KELUAR PER SATKER
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TA 2024 UNAUDITED

No	Nama Satker Pengirim	Nama Akun	Transfer Keluar	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk	Selisih
1	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Peralatan dan Mesin	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	1.172.900.511,00	1.172.900.511,00
2	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Gedung dan Bangunan	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	6.315.606.275,00	6.315.606.275,00
3	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Irigasi	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	10.563.014,00	10.563.014,00
4	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	(935.394.069,00)	(935.394.069,00)
5	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	(505.248.504,00)	(505.248.504,00)
6	PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00	BALAI POM DI SANGGAU	(1.056.304,00)	(1.056.304,00)
7	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	Bahan Baku	19.503.500,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	19.503.500,00	0,00
8	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Bahan Baku	2.021.976,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	2.021.976,00	0,00
9	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Peralatan dan Mesin	7.090.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	7.090.000,00	0,00
10	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.090.000,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	(7.090.000,00)	0,00
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	Bahan Baku	2.221.725,00	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	2.221.725,00	0,00

12	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Tanah	47.341.925.000,00	SLOG POLRI	0,00	(47.341.925.000,00)
13	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	4.000.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	4.000.000,00	0,00
14	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	98.043.667,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	98.043.667,00	0,00
15	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(95.281.467,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	(95.281.467,00)	0,00
16	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	12.000.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	12.000.000,00	0,00
17	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	2.600.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	2.600.000,00	0,00
18	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	114.900.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	114.900.000,00	0,00
19	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(114.400.000,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	(114.400.000,00)	0,00
20	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	6.500.000,00	BALAI BESAR POM DI KUPANG	6.500.000,00	0,00
21	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	1.000.000,00	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	1.000.000,00	0,00
22	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	370.461.178,00	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	370.461.178,00	0,00
23	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(233.285.138,00)	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	(233.285.138,00)	0,00
24	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	5.575.000,00	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	5.575.000,00	0,00
25	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	3.000.000,00	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	3.000.000,00	0,00

26	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	272.630.410,00	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	272.630.410,00	0,00
27	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(217.548.224,00)	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	(217.548.224,00)	0,00
28	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	517.534.400,00	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	517.534.400,00	0,00
29	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(268.961.320,00)	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	(268.961.320,00)	0,00
30	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	49.920.324,00	BALAI POM DI SURAKARTA	49.920.324,00	0,00
31	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(48.420.324,00)	BALAI POM DI SURAKARTA	(48.420.324,00)	0,00
32	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	37.930.000,00	BALAI POM DI TASIKMALAYA	37.930.000,00	0,00
33	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.930.000,00)	BALAI POM DI TASIKMALAYA	(36.930.000,00)	0,00
34	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	310.575.957,00	BALAI POM DI JEMBER	310.575.957,00	0,00
35	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(290.777.835,00)	BALAI POM DI JEMBER	(290.777.835,00)	0,00
36	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	101.526.785,00	BALAI POM DI BANYUMAS	101.526.785,00	0,00
37	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(87.397.241,00)	BALAI POM DI BANYUMAS	(87.397.241,00)	0,00
38	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	4.487.410,00	BALAI POM DI BOGOR	4.487.410,00	0,00
39	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	125.598.374,00	BALAI POM DI BOGOR	125.598.374,00	0,00

40	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(111.138.374,00)	BALAI POM DI BOGOR	(111.138.374,00)	0,00
41	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	39.049.940,00	BALAI POM DI TANGERANG	39.049.940,00	0,00
42	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.549.940,00)	BALAI POM DI TANGERANG	(38.549.940,00)	0,00
43	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	2.950.000,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	2.950.000,00	0,00
44	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	3.392.900,00	BALAI POM DI BALIKPAPAN	3.392.900,00	0,00
45	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Barang Konsumsi	6.904.790,00	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	6.904.790,00	0,00
46	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Bahan Baku	27.955.500,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	27.955.500,00	0,00
47	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Bahan Baku	22.554.534,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	22.554.534,00	0,00
48	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Bahan Baku	1.200.000,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	1.200.000,00	0,00
49	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Bahan Baku	1.420.800,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	1.420.800,00	0,00
50	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Bahan Baku	10.197.954,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	10.197.954,00	0,00
51	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Suku Cadang	409.540,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	409.540,00	0,00
52	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Bahan Baku	10.517.100,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	10.517.100,00	0,00
53	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Suku Cadang	14.680.062,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	14.680.062,00	0,00

54	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Suku Cadang	3.000.000,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	3.000.000,00	0,00
55	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Suku Cadang	14.680.062,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	14.680.062,00	0,00
56	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Bahan Baku	1.265.400,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	1.265.400,00	0,00
57	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Bahan Baku	1.265.400,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	1.265.400,00	0,00
58	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Bahan Baku	1.265.400,00	BALAI BESAR POM DI KUPANG	1.265.400,00	0,00
59	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Dalam Proses	1.133.066.756,00	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	1.133.066.756,00	0,00
60	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Peralatan dan Mesin	205.069.000,00	BALAI POM DI TASIKMALAYA	205.069.000,00	0,00
61	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(205.069.000,00)	BALAI POM DI TASIKMALAYA	(205.069.000,00)	0,00
62	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Bahan Baku	2.640.000,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	2.640.000,00	0,00
63	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Suku Cadang	5.525.850,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	5.525.850,00	0,00
64	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Bahan Baku	1.574.540,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	1.574.540,00	0,00
65	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Bahan Baku	8.306.100,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	8.306.100,00	0,00
66	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Bahan Baku	7.680.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	7.680.000,00	0,00

67	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Peralatan dan Mesin	6.359.616.800,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	6.359.616.800,00	0,00
68	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.170.431.694,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	(5.170.431.694,00)	0,00
69	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Barang Konsumsi	4.407.270,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	4.407.270,00	0,00
70	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Bahan Baku	3.633.030,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	3.633.030,00	0,00
71	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Bahan Baku	549.450,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	549.450,00	0,00
72	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	Bahan Baku	7.159.282,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	7.159.282,00	0,00
73	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	Peralatan dan Mesin	6.578.789.743,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	6.578.789.743,00	0,00
74	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(656.146.460,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	(656.146.460,00)	0,00
75	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	Peralatan dan Mesin	4.950.000,00	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	4.950.000,00	0,00
76	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.950.000,00)	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	(4.950.000,00)	0,00
77	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	Bahan Baku	615.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	615.000,00	0,00
78	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	Bahan Baku	780.900,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	780.900,00	0,00
79	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Bahan Baku	1.162.218,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	1.162.218,00	0,00
80	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Bahan Baku	27.225.000,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	27.225.000,00	0,00

81	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Bahan Baku	1.162.218,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	1.162.218,00	0,00
82	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Barang Konsumsi	1.445.400,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	1.445.400,00	0,00
83	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Bahan Baku	1.162.218,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	1.162.218,00	0,00
84	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Suku Cadang	3.124.000,00	BALAI POM DI TULANG BAWANG	3.124.000,00	0,00
85	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Bahan Baku	1.677.895,00	BALAI POM DI TULANG BAWANG	1.677.895,00	0,00
86	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	BALAI POM DI SANGGAU	7.700.000,00	0,00
87	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.700.000,00)	BALAI POM DI SANGGAU	(7.700.000,00)	0,00
88	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	Peralatan dan Mesin	5.450.356.675,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	5.450.356.675,00	0,00
89	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(656.623.114,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	(656.623.114,00)	0,00
90	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	Bahan Baku	5.060.700,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	5.060.700,00	0,00
91	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	Bahan Baku	1.860.000,00	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	1.860.000,00	0,00
92	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	Bahan Baku	1.098.500,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	1.098.500,00	0,00
93	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	Bahan Baku	15.350.552,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	15.350.552,00	0,00
94	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	Bahan Baku	8.457.900,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	8.457.900,00	0,00
95	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	Bahan Baku	1.400.562,00	BALAI POM DI ENDE	1.400.562,00	0,00

96	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	Bahan Baku	1.500.000,00	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	1.500.000,00	0,00
97	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	Bahan Baku	2.756.908,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	2.756.908,00	0,00
98	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	Bahan Baku	2.220.000,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	2.220.000,00	0,00
99	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	Bahan Baku	3.046.950,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	3.046.950,00	0,00
100	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	Peralatan dan Mesin	903.854.200,00	BALAI POM DI BIMA	903.854.200,00	0,00
101	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(706.511.600,00)	BALAI POM DI BIMA	(706.511.600,00)	0,00
102	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Peralatan dan Mesin	4.950.000,00	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4.950.000,00	0,00
103	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.950.000,00)	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	(4.950.000,00)	0,00
104	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	Bahan Baku	925.459,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	925.459,00	0,00
105	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	Peralatan dan Mesin	44.004.510,00	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	44.004.510,00	0,00
106	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(36.505.631,00)	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	(36.505.631,00)	0,00
107	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Peralatan dan Mesin	98.189.704,00	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	98.189.704,00	0,00
108	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(98.189.704,00)	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	(98.189.704,00)	0,00

109	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Peralatan dan Mesin	11.055.000,00	BALAI POM DI BANYUMAS	11.055.000,00	0,00
110	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.055.000,00)	BALAI POM DI BANYUMAS	(11.055.000,00)	0,00
111	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	Gedung dan Bangunan	-	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	125.000.000,00	125.000.000,00
112	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	Aset Tetap Renovasi	125.000.000,00	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	(125.000.000,00)
113	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	Aset Tetap Renovasi	129.980.000,00	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	-	(129.980.000,00)
114	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	Software	-	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	129.980.000,00	129.980.000,00
115	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Peralatan dan Mesin	41.014.010,00	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	41.014.010,00	0,00
116	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(33.515.131,00)	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	(33.515.131,00)	0,00
117	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Peralatan dan Mesin	9.960.600,00	BALAI POM DI JEMBER	9.960.600,00	0,00
118	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.976.360,00)	BALAI POM DI JEMBER	(5.976.360,00)	0,00
119	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	24.134.703,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	24.134.703,00	0,00

120	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	20.783.429,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	20.783.429,00	0,00
121	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Gedung dan Bangunan	702.500.000,00	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	702.500.000,00	0,00
122	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(115.705.884,00)	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	(115.705.884,00)	0,00
123	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	34.355.906,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	34.355.906,00	0,00
124	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Peralatan dan Mesin	34.298.250,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	34.298.250,00	0,00
125	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.149.122,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	(17.149.122,00)	0,00
126	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	89.354.123,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	89.354.123,00	0,00
127	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	33.865.583,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	33.865.583,00	0,00
128	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	154.365.451,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	154.365.451,00	0,00
129	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	37.852.427,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	37.852.427,00	0,00
130	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	48.128.913,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	48.128.913,00	0,00
131	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	40.633.812,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	40.633.812,00	0,00
132	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	66.095.651,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	66.095.651,00	0,00
133	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	35.058.538,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	35.058.538,00	0,00

134	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	10.892.410,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	10.892.410,00	0,00
135	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	93.580.783,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	93.580.783,00	0,00
136	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	23.952.816,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	23.952.816,00	0,00
137	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	50.370.728,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	50.370.728,00	0,00
138	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	14.982.183,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	14.982.183,00	0,00
139	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	21.495.673,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	21.495.673,00	0,00
140	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	32.372.228,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	32.372.228,00	0,00
141	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	35.106.577,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35.106.577,00	0,00
142	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	36.275.259,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	36.275.259,00	0,00
143	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	26.975.524,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	26.975.524,00	0,00
144	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	12.304.811,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	12.304.811,00	0,00
145	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	22.700.059,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	22.700.059,00	0,00
146	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	75.726.250,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	75.726.250,00	0,00
147	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	34.452.275,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	34.452.275,00	0,00

148	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	37.573.413,00	BALAI BESAR POM DI KUPANG	37.573.413,00	0,00
149	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	18.965.135,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	18.965.135,00	0,00
150	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	24.556.856,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	24.556.856,00	0,00
151	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	40.534.509,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	40.534.509,00	0,00
152	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	15.697.145,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	15.697.145,00	0,00
153	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	8.003.003,00	BALAI POM DI TASIKMALAYA	8.003.003,00	0,00
154	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.799.546,00	BALAI POM DI KEDIRI	2.799.546,00	0,00
155	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	48.530.960,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	48.530.960,00	0,00
156	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.229.506,00	BALAI POM DI JEMBER	2.229.506,00	0,00
157	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	3.174.578,00	BALAI POM DI PALOPO	3.174.578,00	0,00
158	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	6.736.883,00	BALAI POM DI BOGOR	6.736.883,00	0,00
159	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Peralatan dan Mesin	440.312.750,00	BALAI POM DI BOGOR	440.312.750,00	0,00
160	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(440.312.750,00)	BALAI POM DI BOGOR	(440.312.750,00)	0,00
161	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.823.362,00	BALAI POM DI TANGERANG	2.823.362,00	0,00

162	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	5.924.102,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	5.924.102,00	0,00
163	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.720.892,00	BALAI POM DI DUMAI	1.720.892,00	0,00
164	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.296.165,00	BALAI POM DI BAU-BAU	1.296.165,00	0,00
165	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.188.407,00	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	1.188.407,00	0,00
166	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	8.470.051,00	BALAI POM DI ENDE	8.470.051,00	0,00
167	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.042.316,00	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	2.042.316,00	0,00
168	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	28.461.612,00	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	28.461.612,00	0,00
169	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.862.179,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	2.862.179,00	0,00
170	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.275.578,00	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	1.275.578,00	0,00
171	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	522.546,00	LOKA POM DI ACEH TENGAH	522.546,00	0,00
172	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.479.424,00	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	1.479.424,00	0,00
173	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	946.165,00	BALAI POM DI SANGGAU	946.165,00	0,00
174	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.784.006,00	BALAI POM DI TABALONG	1.784.006,00	0,00
175	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.348.728,00	BALAI POM DI BALIKPAPAN	1.348.728,00	0,00

176	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.214.118,00	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	2.214.118,00	0,00
177	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	946.165,00	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	946.165,00	0,00
178	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.140.031,00	BALAI POM DI BIMA	2.140.031,00	0,00
179	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.362.733,00	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	2.362.733,00	0,00
180	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	3.853.545,00	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	3.853.545,00	0,00
181	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	150.122,00	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	150.122,00	0,00
182	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.462.631,00	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	2.462.631,00	0,00
183	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	3.085.204,00	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	3.085.204,00	0,00
184	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.209.370,00	LOKA POM DI ACEH SELATAN	1.209.370,00	0,00
185	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	326.074,00	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	326.074,00	0,00
186	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	814.635,00	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	814.635,00	0,00
187	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	2.836.379,00	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	2.836.379,00	0,00
188	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.192.331,00	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	1.192.331,00	0,00
189	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	Bahan Baku	1.113.387,00	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1.113.387,00	0,00

190	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	Peralatan dan Mesin	54.128.500,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	54.128.500,00	0,00
191	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(54.128.500,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	(54.128.500,00)	0,00
192	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	2.200.000,00	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	2.200.000,00	0,00
193	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.200.000,00)	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	(2.200.000,00)	0,00
194	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	193.305.000,00	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	193.305.000,00	0,00
195	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(43.165.625,00)	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	(43.165.625,00)	0,00
196	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	41.780.000,00	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	41.780.000,00	0,00
197	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(31.335.000,00)	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	(31.335.000,00)	0,00
198	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	62.670.000,00	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	62.670.000,00	0,00
199	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(47.002.500,00)	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	(47.002.500,00)	0,00
200	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	18.498.484,00	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	18.498.484,00	0,00
201	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.498.484,00)	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	(18.498.484,00)	0,00
202	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	511.361.730,00	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	511.361.730,00	0,00
203	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Aset Tetap Lainnya	2.346.357.955,00	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	2.346.357.955,00	0,00
204	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(261.883.034,00)	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	(261.883.034,00)	0,00

205	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Peralatan dan Mesin	249.137.600,00	BALAI POM DI BOGOR	249.137.600,00	0,00
206	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(238.867.790,00)	BALAI POM DI BOGOR	(238.867.790,00)	0,00
207	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Bahan Baku	1.738.260,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	1.738.260,00	0,00
208	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Bahan Baku	230.254,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	230.254,00	0,00
209	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	Bahan Baku	4.249.600,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	4.249.600,00	0,00
210	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	Barang Konsumsi	30.262.500,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	30.262.500,00	0,00
211	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	Suku Cadang	50.500.000,00	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	50.500.000,00	0,00
212	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	Bahan Baku	2.053.500,00	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	2.053.500,00	0,00
213	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	Bahan Baku	11.660.880,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	11.660.880,00	0,00
214	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	Peralatan dan Mesin	78.558.500,00	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	78.558.500,00	0,00
215	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(78.558.500,00)	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	(78.558.500,00)	0,00
216	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	Bahan Baku	1.150.000,00	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	1.150.000,00	0,00
217		Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	2.261.594.986,00	2.261.594.986,00
218		Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	21.924.564.000,00	21.924.564.000,00
TOTAL			66.517.032.909,00		49.418.637.818,00	(17.098.395.091,00)

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyeroran uang ke kas negara/daerah																				
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti																							
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
1	Pengelolaan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Berkoordinasi dengan Kemenkes supaya mengintegrasikan aplikasi https://sertifikasidob.pom.go.id pada Badan POM dengan aplikasi http://elcic.kemkes.go.id milik Kemenkes;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.207 tanggal 28 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 dari Plt. Kepala Badan POM kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Kepala Pusdatin agar berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengintegrasikan aplikasi sertifikasidob.pom.go.id pada Badan POM dengan aplikasi http://elcic.kemkes.go.id milik Kemenkes; 2. Surat Undangan Rapat Nomor B-PW.01.09.34.06.24.167 tanggal 4 Juni 2024 dari Direktur Wasdisyan ONPP kepada antara lain Direktur Prodisfar Kemenkes (sesuai daftar pada lampiran surat) terkait rencana integrasi aplikasi sertifikasi CDOB dengan aplikasi e-licensing Kemenkes; 3. Notulen integrasi aplikasi sertifikasi CDOB dengan e-Licensing Kemenkes; 4. Surat Undangan Pembahasan Interoperabilitas Data CDOB dengan e-Licensing Nomor TL03.02.8.06.24.308 tanggal 14 Juni 2024 dari KaPusdatin BPOM kepada antara lain Direktur Prodisfar Kemenkes dan KaPusdatin Kemenkes (sesuai daftar pada lampiran surat) terkait diskusi teknis Interoperabilitas Data Aplikasi CDOB dengan e-Licensing; 5. Notulen rapat Pembahasan Interoperabilitas Data Aplikasi CDOB dengan e-Licensing tanggal 21 Juni 2024; 6. Surat Pernyataan KaPusdatin BPOM agar berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengintegrasikan aplikasi sertifikasiCDOB.pom.go.id pada BPOM dengan http://elcic.kemkes.go.id milik Kemenkes.	1	0							TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum ada data dukung koordinasi antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan terkait pengintegrasian aplikasi sertifikasidob.pom.go.id pada Badan POM dengan http://elcic.kemkes.go.id pada Kementerian Kesehatan.																					
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan PO supaya tidak melakukan pungutan PNPB atas penerbitan IP CPPOB, sampai peraturan tentang tarif penerbitan IP CPPOB ditetapkan;			1											0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.208 tanggal 28 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 dari Plt. Kepala Badan POM kepada Plt. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan agar tidak melakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan IP CPPOB, sampai peraturan tentang tarif penerbitan IP CPPOB ditetapkan; 2. Screenshoot pelaksanaan uji coba terhadap penghentian pembayaran PNPB pada pengajuan IP CPPOB melalui sistem e-sertifikasi tanggal 30 April 2024; 3. Surat Pemberitahuan Penonaktifan Sementara Fitur Pembayaran Izin Penerapan CPPOB dalam rangka ekspor pada sistem e-sertifikasi tanggal 2 Mei 2024 dari Direktur Wasprod PO kepada pemohon layanan IP CPPOB dalam rangka ekspor; 4. Nota Dinas Nomor PI.02.02.8.05.24.233 tanggal 6 Mei 2024 dari KaPusdatin BPom kepada Sestama BPOM perihal TL atas potensi temuan BPK terhadap pelayanan IP CPPOB; dan 4. Surat Pernyataan Plt. Deputy Bidang Pengawasan PO tanggal 15 Juli 2024 bahwa tidak akan melakukan pungutan PNPB atas penerbitan IP CPPOB sampai peraturan tentang tarif penerbitan IP CPPOB ditetapkan.	1	0					TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum ada data dukung berupa: 1. Surat pernyataan Plt. Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang menyatakan tidak melakukan pungutan PNPB atas penerbitan IP CPPOB sampai dengan peraturan tarif penerbitan IP CPPOB ditetapkan; dan 2. Bukti kebijakan penghentian pungutan PNPB atas penerbitan IP CPPOB sampai dengan peraturan tarif penerbitan IP CPPOB ditetapkan.											
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Menginstruksikan Kepala BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Semarang supaya memerintahkan petugas penguji untuk sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPT dalam penerbitan LHU; dan															1									0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.209 tanggal 28 Juni 2024 dari Plt. Kepala Badan POM kepada Kepala BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Semarang agar memerintahkan petugas penguji untuk sepenuhnya memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dalam penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU); 2. Surat Instruksi Nomor T-PI.05.9A.07.24.1839 tanggal 12 Juli 2024 dari Kepala BBPOM di Semarang kepada Petugas Penguji BBPOM di Semarang agar sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPT dalam penerbitan LHU dan dituangkan dalam surat pernyataan; 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Obat BBPOM di Semarang tanggal 12 Juli 2024; 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Obat Tradisional dan SK BBPOM di Semarang tanggal 12 Juli 2024; 5. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Kosmetik BBPOM di Semarang tanggal 12 Juli 2024; 6. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Pangan BBPOM di Semarang tanggal 12 Juli 2024; 7. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Mikrobiologi BBPOM di Semarang tanggal 12 Juli 2024; 8. Surat Instruksi Nomor R-PI.02.01.1A.07.56 tanggal 15 Juli 2024 dari Kepala BBPOM di Banda Aceh kepada Ketua Tim Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya BBPOM di Banda Aceh agar sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPT dalam penerbitan LHU dan dituangkan dalam surat pernyataan; dan 9. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengujian Pangan dan Bahan berbahaya BBPOM di Banda Aceh tanggal 15 Juli 2024.	1	0					TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum ada data dukung berupa: 1. Surat instruksi Kepala BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Semarang supaya memerintahkan petugas penguji untuk sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPT dalam penerbitan LHU; dan 2. Surat pernyataan petugas penguji BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Semarang untuk sepenuhnya memanfaatkan aplikasi SIPT dalam penerbitan LHU.	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Menginstruksikan Kepala BBPOM di Banda Aceh supaya memerintahkan petugas penguji untuk memedomani ketentuan Standar Timeline Pengujian Laboratorium Badan POM dalam melaksanakan pengujian.																									1								

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Pengelolaan Belanja Pegawai pada Badan POM Belum Memadai	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama supaya Menyelaraskan peraturan tentang flexi time jam kerja yang berlaku di lingkungan Badan POM	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.211 tanggal 28 Juni 2024 dari Pjt. Kepala Badan POM kepada Sekretaris Utama Badan POM untuk menyelaraskan peraturan tentang flexi time jam kerja yang berlaku di lingkungan Badan POM; 2. Surat Pemberitahuan Proses Perubahan Kepka BPOM Nomor HK.02.02.1.2.08.21.356 Tahun 2021 Nomor B-KP.09.03.2.24.05.24.350 tanggal 3 Mei 2024 tentang penyesuaian status kehadiran flexi time dari Sestama BPOM kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM, serta Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kepala Loka POM di seluruh Indonesia; 3. Draft Kepka BPOM Nomor HK.02.02.1.2..... Tahun 2024 tentang Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan BPOM; 4. Surat Undangan Pembahasan Rancangan SK Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan BPOM Nomor B-KP.09.03.24.05.24.143 tanggal 17 Mei 2024 dari Karo SDM kepada Karo Hukum, Inspektur I dan Inspektur II; dan 5. Nota Dnas Nomor KP.09.03.24.05.24.176 tanggal 22 Mei 2024 perihal Laporan Hasil Pembahasan Awal Penyusunan Rancangan Keputusan Ka BPOM tentang Penerapan Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan BPOM dari Karo SDM kepada Sestama BPOM.	1								TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum ada data dukung berupa bukti melakukan penyelarasan peraturan tentang flexi time jam kerja yang berlaku di lingkungan Badan POM.	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama supaya Mengevaluasi kebijakan pelaksanaan WFH di lingkungan Badan POM dengan memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian; dan	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.211 tanggal 28 Juni 2024 dari Pjt. Kepala Badan POM kepada Sekretaris Utama Badan POM untuk mengevaluasi kebijakan pelaksanaan WFH di lingkungan Badan POM dengan memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian; 2. Surat Nomor B-KP.09.03.2.24.04.24.281 tanggal 5 April 2024 perihal Survei Kesiapan Penerapan Flexible Working Arrangement dari Sestama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM, serta Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kepala Loka POM di seluruh Indonesia; 3. Matriks data hasil survei pelaksanaan WFH di lingkungan BPOM	1							TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa bukti melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan WFH di lingkungan Badan POM dengan memperhatikan kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian.		
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama supaya Menerintahkan Kepala Biro SDM untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi E-Tukin dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.211 tanggal 28 Juni 2024 dari Pjt. Kepala Badan POM kepada Sekretaris Utama Badan POM untuk memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi E-Tukin dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut; 2. Surat Instruksi Nomor R-KU.02.03.2.07.24.5 tanggal 12 Juli 2024 dari Sestama BPOM kepada Karo SDM BPOM; dan 3. Surat Pernyataan Karo SDM tanggal 15 Juli 2024 bahwa akan mengevaluasi efektivitas aplikasi e-tukin dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	0		1			0			TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum ada data dukung berupa bukti melakukan evaluasi efektivitas aplikasi E-Tukin dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada Lima Sektor Tidak Sesuai Ketentuan	1	IDR 25.500.000,00	BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang supaya memerintahkan Kepala Biro Renku untuk mengevaluasi penganggaran KIE pada periode berikutnya dengan memperhatikan keterkaitan KIE dalam mencapai target Rincian Output (RO) yang ditetapkan dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi satker pelaksana KIE dalam rangka meningkatkan pengendalian untuk memitigasi risiko inefisiensi dan tumpang tindih kegiatan KIE antar satker;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Pjt. Kepala BPOM No. R-PI.05.1.7.06.24.212 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekreteraris Utama tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-PI.05.2.07.24.542 tanggal 12 Juli 2024 kepada Kepala Biro Perencanaan Keuangan untuk mengevaluasi penganggaran KIE pada periode berikutnya dengan memperhatikan keterkaitan KIE dalam mencapai target Rincian Output (RO) yang ditetapkan dan kesesuaian tugas pokok dan fungsi satuan kerja pelaksana KIE dalam rangka meningkatkan pengendalian untuk memitigasi risiko inefisiensi dan tumpang tindih kegiatan KIE antar satker.	0		1			0				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang supaya menyusun dasar pertimbangan pemilihan lokasi KIE	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - 1. Surat Pjt. Kepala BPOM No. R-PI.05.1.7.06.24.213 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Balai Besar POM di Bandung dan Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Kepala Balai Besar POM di Semarang No. T-PI.05.9A.07.24.1840 tanggal 12 Juli 2024 kepada Ketua Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi BBPOM di Semarang agar menyusun dasar pertimbangan pemilihan lokasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 3. Surat Pernyataan Kepala Balai Besar POM di Semarang yang menyatakan akan menyusun dasar pertimbangan pemilihan lokasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 4. Dasar Pertimbangan Pemilihan Lokasi KIE 2024 untuk BBPOM di Bandung	0		1			0				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Bandung supaya mencapai target output jumlah peserta KIE yang telah ditetapkan pada periode berikutnya	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Pjt. Kepala BPOM No. R-PI.05.1.7.06.24.214 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Balai Besar POM di Bandung tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Pernyataan Kepala Balai Besar POM Bandung yang menyatakan akan mencapai target output jumlah peserta KIE yang telah ditetapkan pada periode berikutnya	1		0			0				

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa			BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Semarang supaya memanfaatkan sisa kaos perlengkapan peserta KIE Tahun 2023 pada kegiatan KIE berikutnya; dan	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.215 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Kepala Balai Besar POM di Semarang No. T-Pl.05.9A.07.24.1842 tanggal 12 Juli 2024 kepada Ketua Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi BBPOM di Semarang memanfaatkan sisa kaos perlengkapan peserta KIE tahun 2023 pada kegiatan KIE berikutnya 3. Surat Pernyataan Kepala Balai Besar POM di Semarang yang menyatakan akan memanfaatkan sisa kaos perlengkapan peserta KIE Tahun 2023 pada kegiatan KIE berikutnya	0		1		0		0			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Yogyakarta supaya memerintahkan 1)PPK kegiatan KIE untuk memedomani regulasi terkait pengeluaran anggaran belanja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.216 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Kepala Balai Besar POM Yogyakarta No R-Pl.05.10A.07.24.1079 kepada PPK Kegiatan KIE untuk memedomani regulasi terkait pengeluaran anggaran belanja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya 3. Surat Pernyataan PPK yang menyatakan akan memedomani regulasi terkait pengeluaran anggaran belanja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya	1		0		0		0			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Yogyakarta supaya memerintahkan 2) Bendahara Pengeluaran untuk menyertokan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp25.500.000,00.	1	IDR 25.500.000,00	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.216 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Bukti setor Kurang Potong PPh21 Honor Narsum KIE Tomas Th 2023. Temuan Audit BPK LK Th 2023 Nomor NTPN CDC05BBD0HEENPR senilai Rp25.500.000,00 tanggal 16 Juli 202	1	IDR 25.500.000,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00		IDR 25.500.000,00
4	Penyusunan HPS Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Surveilans QMS ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 Badan POM Belum Berdasarkan Data yang Valid	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Biro Renken selaku KPA pada Settimana supaya memerintahkan PPK untuk memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS; dan	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.217 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Utama tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-Pl.05.207.24.559 tanggal 12 Juli 2024 kepada KPA Sekretariat Utama agar: a. PPK untuk memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS; dan b. Tim Teknis kegiatan Tata Laksana untuk menyampaikan data yang valid dalam mendukung penyusunan HPS kegiatan resertifikasi ISO berikutnya 3. Surat Pernyataan PPK Biro Hukum dan Organisasi yang menyatakan akan memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS 4. Surat Instruksi KPA Sekretariat Utama No. Pl.05.2.21.07.24.1682 tanggal 12 Juli 2024 kepada PPK Biro Hukum dan Organisasi agar memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS	0		1		0		0			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Biro Renken selaku KPA pada Settimana supaya memerintahkan Tim Teknis kegiatan Tata Laksana untuk menyampaikan data yang valid dalam mendukung penyusunan HPS kegiatan resertifikasi ISO berikutnya	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.217 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Utama tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. Pl. 05.2.21.07.24.1681 tanggal 12 Juli 2024 kepada Tim Teknis Tata Laksana untuk menyampaikan data yang valid dalam mendukung penyusunan HPS kegiatan resertifikasi ISO berikutnya 3. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. Pl. 05.2.07.24.559 tanggal 12 Juli 2024 kepada KPA Sekretariat Utama memerintahkan PPK untuk memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS 4. Surat Instruksi KPA Sekretariat Utama No. Pl. 05.2.21.07.24.1682 kepada PPK Biro Hukum dan Organisasi untuk memedomani regulasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penyusunan HPS 5. Surat Instruksi KPA Sekretariat Utama No. Pl. 05.2.21.07.24.1681 kepada Tim Teknis Kegiatan Tata Laksana untuk menyampaikan data yang valid dalam mendukung penyusunan HPS kegiatan resertifikasi ISO berikutnya 6. Surat Pernyataan Ketua Tim Kerja Tata Laksana yang menyatakan menyampaikan data yang valid dalam mendukung penyusunan HPS kegiatan kegiatan resertifikasi ISO berikutnya 7. Surat Penawaran Harga 8. HPS Pengadaan Jasa Konsultan Surveilans QMS ISO 9001: 2015 BPOM Tahun 2024 9. Surat Informasi Harga / Daftar Rincian Kuantitas dan Harga Pekerjaan Audit Resertifikasi dan Surveilans Sistem Manajemen ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023 dari PT Garuda Sertifikasi Indonesia tanggal 31 Januari 2023	1		0		0		0			

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Spesifikasi Luas Tanah dan Luas Bangunan atas Belanja Sewa Gudang Barang Bukti Tahun 2023 pada Setttama Tidak Sesuai dengan Kontrak	1	IDR 26.701.714,29	BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Biro Renkeu selaku KPA pada Setttama supaya memerintahkan PPK untuk menyertorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp26.701.714,29 ke Kas Negara.	1	IDR 26.701.714,29	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.218 tgl 28 Juni 2024 19 Juli 2024 1. Surat Instruksi Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Perencanaan dan keuangan nomor R-Pl.05.2.07.24.553 tanggal 5 Juli 2024 2. Surat Instruksi KPA kepada PPK nomor R-Pl.05.2.21.07.24.1684 tanggal 8 Juli 2024 agar meyetorkan kelebihan pembayaran Rp26.701.714,29 ke kas negara 3. Surat Pernyataan PPK Biro Umum an Daan Zacharu Osmar tanggal 9 Juli 2024 bahwa akan meyetorkan kelebihan pembayaran Rp26.701.714,29 ke kas negara 4. Bukti setor pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 3229D3CIFKABOHD3 tgl 19 Juni 2024 senilai Rp16.000.000 5. Bukti setor pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 2132461QV41M9THA tgl 24 juni 2024 senilai Rp4.000.000 8/5/2024 12:00:00 AM - 0. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.218 tgl 28 Juni 2024 1. Surat Instruksi Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Perencanaan dan keuangan nomor R-Pl.05.2.07.24.553 tanggal 5 Juli 2024 2. Surat Instruksi KPA kepada PPK nomor R-Pl.05.2.21.07.24.1684 tanggal 8 Juli 2024 agar meyetorkan kelebihan pembayaran Rp26.701.714,29 ke kas negara 3. Surat Pernyataan PPK Biro Umum an Daan Zacharu Osmar tanggal 9 Juli 2024 bahwa akan meyetorkan kelebihan pembayaran Rp26.701.714,29 ke kas negara 4. Bukti setor pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 3229D3CIFKABOHD3 tgl 19 Juni 2024 senilai Rp16.000.000 5. Bukti setor pengembalian lebih bayar sewa gudang TA 2023 (ROUM) NTPN 2132461QV41M9THA tgl 24 juni 2024 senilai Rp4.000.000 6. Bukti penyeroran "Pengembalian kelebihan pembayaran pekerjaan sewa gudang barang bukti 2023" senilai Rp6.701.715	1	IDR 26.701.714,29	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00		IDR 26.701.715,00
6	Pelaksanaan Belanja Jasa Lainnya atas Dua Paket Pekerjaan pada Setttama Belum Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Biro Renkeu selaku KPA pada Setttama supaya memerintahkan PPK Pengadaan Penyelenggaraan Acara Publikasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Bertajuk Untukmu Indonesia, Simfoni Untuk Negeri serta PPK Pengadaan Video Creative Content untuk memedomani regulasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan.	1	0	7/1/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024: 1. Surat Plt. Kepala BPOM No. R-Pl.05.1.7.06.24.219 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Utama tentang Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-Pl.05.2.07.24.561 tanggal 12 Juli 2024 kepada KPA Sekretariat Utama untuk memerintahkan PPK Pengadaan Penyelenggaraan Acara Publikasi Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Bertajuk Untukmu Indonesia, Simfoni Untuk Negeri serta PPK Pengadaan Video Creative Content untuk memedomani regulasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan 3. Surat Instruksi KPA Sekretariat Utama No. Pl.05.2.21.07.24.1683 tanggal 12 Juli 2024 kepada PPK Biro Kerjasama untuk memedomani regulasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan 4. Surat Pernyataan PPK untuk memedomani regulasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan	1		0		0	0				
7	Pelaksanaan Dua Paket Pengadaan Jasa Cleaning Service pada Setttama dan PPPOMN Belum Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Biro Renkeu selaku KPA pada Setttama supaya memerintahkan PPK Pekerjaan Jasa Cleaning Service pada Setttama untuk menetapkan kriteria beserta indikator capaian hasil pekerjaan jasa cleaning service yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam kontrak; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.220 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi KPA No. R-Pl.05.2.21.07.24.1685 Tanggal 8 Juli 2024 3. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-Pl.05.2.21.07.24.554 tanggal 5 Juli 2024 4. Surat Pernyataan PPK Biro Umum	0		1		0		0			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala PPPOMN selaku KPA supaya memerintahkan PPK Pengadaan Jasa Cleaning Service pada PPPOMN untuk menetapkan kriteria beserta indikator capaian hasil pekerjaan jasa cleaning service yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam kontrak.			7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.221 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Kepala PPPOMN No. R-Pl.05.10.07.24.396 Tanggal 15 Juli 2024 3. Surat Pernyataan Kepala Subbagian TU PPPOMN selaku PPK III PPPOMN	0		1		0		0			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setttama supaya memerintahkan Kepala Biro Renkeu beserta Tim Penyusun Juklak Anggaran Tahun 2024 untuk: 1)Merevisi Juklak tentang Perijin Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap agar penggunaan DPR dan pertanggungjawaban biaya transportasi menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan atau sebaliknya sesuai PMK/keputusan;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.225 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-Pl.05.2.07.24.540 tanggal 12 Juli 2024 3. Surat Pernyataan Kepala Biro Keuangan untuk kesanggupan melaksanakan revisi Juklak Anggaran 4. Surat Sekretariat Utama No. HK.02.02.2.21.05.24.12 tentang Penyampaian Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024 5. Surat Sekretariat Utama No. B-PR.05.04.2.21.05.24.393 tentang Penyampaian Informasi Tambahan Atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2024 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024	1		0		0		0			

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah	
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama supaya memerintahkan Kepala Biro Renkeu beserta Tim Penyusun Juklak Anggaran Tahun 2024 untuk: 2) Mengatur pertanggungjawaban transportasi Jabodetabek, Bandung dan Serang sesuai bukti pengeluaran riil maksimal sebesar SBM; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.225 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. R-Pl.05.2.07.24.540 tanggal 12 Juli 2024 3. Surat Pernyataan Kepala Biro Keuangan untuk kesanggupan melaksanakan revisi Juklak Anggaran 4. Surat Sekretariat Utama No. HK.02.02.2.21.05.24.12 tentang Penyampaian Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024 5. Surat Sekretariat Utama No. B-PR.05.04.2.21.05.24.393 tentang Penyampaian Informasi Tambahan Atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan BPOM Tahun Anggaran 2024 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 142 Tahun 2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024	1		0				0				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama dan Deputy Bidang Pengawasan OTSKK supaya memerdomani Kepka Badan POM tentang Juklak Anggaran di Lingkungan Badan POM terkait kegiatan bersifat pertemuan/rapat di lingkungan Badan POM	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.226 tgl 28 Juni 2024	0		1				0				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan Direktur KMEI untuk menyelesaikan tindak lanjut atas laporan pengawasan tahun 2023 yang belum selesai;	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - 11 Juli 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.222 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Terkait Realisasi Belanja Barang yang Belum Sepenuhnya Mencapai Target Output Nomor R-Pl.05.3.07.24.390 Tanggal 5 Juli 2024 3. Surat Pernyataan Plh Direktur Pengawasan KMEI ONAPPZA 4. Matrik Tindak Lanjut Pengawasan Mutu Iklan, dan Penandaan ONPP yang telah ditindaklanjuti	1			0			0				
9	Realisasi Belanja Barang pada Tiga Satker Badan POM Belum Mencapai Target Output	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan PO supaya memerintahkan Direktur Standarisasi PO untuk mencapai target output yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan penggunaan anggaran berikutnya; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.223 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Plh Deputy Bidang Pengawasan PO tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023 Nomor R-Pl.05.5.07.24.101 tanggal 5 Juli 2024 3. Surat Pernyataan Direktur Standarisasi PO	0		1				0				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Penindakan supaya memerintahkan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyelesaikan kegiatan penyidikan tahun 2023 yang belum diserahkan ke JPU.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - 11 Juli 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.224 tgl 28 Juni 2024 2. Surat instruksi Deputy Penindakan ke Direktur Penyidikan untuk menyelesaikan kegiatan penyidikan tahun 2023 yang belum diserahkan ke JPU Nomor R-Pl.05.6.07.24.24 tgl 15 Juli 2024 3. Surat pernyataan direktur penyidikan tgl 15 Juli 2024 4. Surat Direktur penyidikan Obat dan makanan nomor R.PD.03.03.64.05.24.363 tanggal 20 Mei 2024 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka Sherry Lamitha sesuai petunjuk P-19	1			0			0				
			IDR 792.322.884,82	BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala Pusdatin selaku KPA supaya memerintahkan PPK untuk menyertakan kelebihan pembayaran sebesar Rp438.515.942,20 (Rp136.452.822,00 + Rp266.919.483,84 + Rp35.143.636,36) ke Kas Negara;	1	IDR 438.515.942,20	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 Loka POM di Aceh Tengah 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.227 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Nomor R-Pl.05.1.C.07.24.286 tanggal 1 Juli 2024 terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 3. Surat Pernyataan PPK Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terkait Penyetoran Kelebihan Pembayaran ke Kas Negara 4. Bukti Setor NTPN No. EBD8DC0NA04DN89ST dengan jumlah Rp10.000.000 dan No. DCAC81JNFV03QODP dengan jumlah Rp5.000.000 Pusdatin 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.229 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi KPA Pusdatin Nomor B-1.02.02.8.07.24.186 tanggal 15 Juli 2024 terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 3. Surat Pernyataan PPK Pusdatin terkait Penyetoran Kelebihan Pembayaran ke Kas Negara 4. Surat Pernyataan Kesanggupan CV. DEARINDO HUTAMA PERSADA 5. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Bayu Berlian Mandiri	0	IDR 15.000.000,00	1	IDR 423.515.942,20	0	IDR 0,00	0	IDR 0,00			IDR 184.382.392,62

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Pelaksanaan Pekerjaan pada Tiga Satker Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp792.322.884,82	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong selaku KPA supaya memerintahkan PPK untuk melakukan perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi; dan BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah selaku KPA supaya memerintahkan PPK untuk melakukan pengamanan atas alat kelengkapan pompa yang belum terpasang dan memastikan alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan/pekerjaan selanjutnya.	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 Loka POM di Aceh Tengah 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.227 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1C.07.24.286 tanggal 1 Juli 2024 3. Surat Pernyataan PPK akan Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi 4 Bukti perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atas pekerjaan Pengecatan dinding Loka POM di Rejang Lebong 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.228 tgl 28 Juni 2024 2. Surat Instruksi Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Nomor R-Pl.06.07.10C.07.24.239 tanggal 15 Juli 2024 3. Surat Pernyataan PPK akan Melakukan perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi 4 Bukti perbaikan atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atas pekerjaan Pengecatan dinding	0	1	0	0						
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah selaku KPA supaya memerintahkan PPK untuk melakukan pengamanan atas alat kelengkapan pompa yang belum terpasang dan memastikan alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan/pekerjaan selanjutnya.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.227 tgl 28 Juni 2024 2 Surat Instruksi Kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah no R-Pl.05.1C.07.24.286 tanggal 1 Juli 2024 kepada PPK 3. Surat pernyataan PPK Loka POM di Kab. Aceh Tengah an. Nur Ainun Aslam, S.H tanggal 2 Juli 2024 4. Daftar Inventaris Barang Pompa Hydrant	0	1	0	0						
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama supaya merevisi SOP Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban Hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 : 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.230 tgl 28 Juni 2024, dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Sekretaris Utama agar merevisi SOP/Pedoman Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran. BPOM telah melampirkan data dukung berupa: 1. Surat Instruksi Sekretaris Utama kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk merevisi SOP/Pedoman Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban Hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran; 2. Surat pernyataan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan akan merevisi SOP/Pedoman Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban Hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran; Namun belum terdapat dokumen berupa bukti revisi SOP/Pedoman Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban Hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran.	0	1	0	0		Belum diusulkan sesuai rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa revisi SOP Pengelolaan Hibah dengan mengatur teknis pengesahan, pencatatan dan pertanggungjawaban Hibah Kas Langsung oleh Bendahara Pengeluaran				
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan: 1)PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan;	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-Pl.05.1.7.06.24.231 tgl 28 Juni 2024, Dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif agar melampirkan data dukung berupa:1. Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif kepada: a. PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan b. Bendahara Pengeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terib dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan; c. BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 2. Surat Pernyataan PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan. 3. Dokumen pemeriksaan Kas Bulanan oleh PPK kepada BP dan BPP 4. Surat pernyataan Bendahara Pegeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dnegan terib dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan 5. Dokumen LPJ BP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN 6. Surat pernyataan BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 7. Dokumen LPJ BPP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN.	1	0	0	0		Belum diusulkan sesuai rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan: 1) PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan;				

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Penatausahaan Kas dan Setara Kas pada Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA Belum Terbit	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan: 2) Bendahara Pengeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan; dan	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 : Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.231 tgl 28 Juni 2024, Dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif agar melampirkan data dukung berupa:1. Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif kepada: a. PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan b. Bendahara Pengeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan; c. BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 2. Surat Pernyataan PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan. 3. Dokumen pemeriksaan Kas Bulanan oleh PPK kepada BP dan BPP 4. Surat pernyataan Bendahara Pegeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan 5. Dokumen LPJ BP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN 6. Surat pernyataan BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 7. Dokumen LPJ BPP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN.	1		0		0		0		Diusulkan sesuai rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan: 2) Bendahara Pengeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan.	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Deputy Bidang Pengawasan ONAPPZA supaya memerintahkan: 3) BPP untuk periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan.			7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 : Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.231 tgl 28 Juni 2024, dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif agar melampirkan data dukung berupa:1. Surat Instruksi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif kepada: a. PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan b. Bendahara Pengeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan; c. BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 2. Surat Pernyataan PPK untuk melakukan pemeriksaan kas kepada Bendahara Pengeluaran dan BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan. 3. Dokumen pemeriksaan Kas Bulanan oleh PPK kepada BP dan BPP 4. Surat pernyataan Bendahara Pegeluaran dan BPP pada periode pelaporan berikutnya untuk melakukan pencatatan dan pembukuan dengan terbit dan tepat waktu agar pencatatan BKU sesuai dengan LPJ bulanan 5. Dokumen LPJ BP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN 6. Surat pernyataan BPP untuk pada periode pelaporan berikutnya menyusun LPJ bulanan sesuai dengan peraturan. 7. Dokumen LPJ BPP dan dokumen pendukungnya yang sudah divalidasi KPPN.										
12	Bendahara Pengeluaran pada 45 Satker Badan POM Menyetorkan Pajak Melewat Batas Waktu Sebesar Rp595.614.677,00	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan kepada 45 Kepala Satker terkait supaya Memerintahkan PPK untuk melakukan monitoring atas kepatuhan Bendahara Pengeluaran dan BPP dalam melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara secara tepat waktu; dan	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Plt. Kepala BPOM No. R-PI.05.1.7.06.24.232 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Utama BPOM, Deputy I, Deputy II, Deputy III, Deputy IV, Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM, Kepala Balai POM, dan Kepala Loka POM (daftar terlampir) perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Instruksi No. R-PI.05.20C:07.24.269 tanggal 5 Juli 2024 dari Kepala Loka POM Kab. Kotawaringin Barat kepada PPK Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023, agar PPK membuat Surat Pernyataan dan melengkapi data dukung sesuai instruksi agar melakukan monitoring atas kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak ke kas Negara secara tepat waktu; dan 3. Surat pernyataan PPK Loka POM Kab. Kotawaringin Barat bahwa akan melakukan monitoring atas kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan penyetoran pajak ke kas Negara secara tepat waktu.	0		1		0		0	Belum diusulkan sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dokumen dari satker Deputy Penindakan, BPOM di Palangkaraya, Medan, BPOM di Kendari, Palopo, Loka POM di Dumai, Manggarai Barat, Lubuklinggau, dan Sangihe)		
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan kepada 45 Kepala Satker terkait supaya Memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan BPP untuk melakukan penyetoran pajak ke Kas Negara dengan terbit sesuai peraturan yang berlaku.			7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I 2024 1. Surat Instruksi Plt. Kepala BPOM No. R-PI.05.1.7.06.24.233 tanggal 28 Juni 2024 kepada Sekretaris Utama BPOM, Deputy I, Deputy II, Deputy III, Deputy IV, Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar POM, Kepala Balai POM, dan Kepala Loka POM (daftar terlampir) perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 2. Surat Instruksi No. R-PI.05.20C:07.24.270 tanggal 5 Juli 2024 dari Kepala Loka POM Kab. Kotawaringin Barat kepada Bendahara Pengeluaran Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023, agar Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pernyataan dan melengkapi data dukung sesuai instruksi agar melakukan melakukan penyetoran pajak ke kas Negara dengan terbit sesuai peraturan yang berlaku. 3. Surat pernyataan Bendahara Pengeluaran Loka POM Kab. Kotawaringin Barat bahwa akan melakukan penyetoran pajak ke kas Negara dengan terbit sesuai peraturan yang berlaku.										0

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah			
	Judul	Jml	Nilai	Urutan	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti						
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
13	Pengelolaan Persediaan Belum Memadai	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Banda Aceh selaku KPB supaya memerintahkan petugas pengelola persediaan untuk lebih terlibat dalam mencatat transaksi keluar masuk barang persediaan dan mencantumkan hasil pemeriksaan sesuai fisik persediaan dalam kegiatan stock opname selanjutnya;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.234 tgl 28 Juni 2024, dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh agar melampirkan data dukung berupa: 1. Surat Instruksi Kepala BBPOM di Banda Aceh selaku KPB kepada petugas pengelola persediaan untuk lebih terlibat dalam mencatat transaksi keluar masuk barang persediaan dan mencantumkan hasil pemeriksaan sesuai fisik persediaan dalam kegiatan stok opname selanjutnya; 2. Surat pernyataan petugas pengelola persediaan BBPOM di Banda Aceh akan lebih terlibat dalam mencatat transaksi keluar masuk barang persediaan dan mencantumkan hasil pemeriksaan sesuai fisik persediaan dalam kegiatan stok opname selanjutnya.	1		0		0		0		0	Diusulkan sesuai rekomendasi karena telah terdapat dokumen berupa: 1. Surat dari Kepala BBPOM di Banda Aceh yang memerintahkan Petugas Pengelola Persediaan untuk lebih terlibat dalam mencatat transaksi keluar masuk barang persediaan dan mencantumkan hasil pemeriksaan sesuai fisik persediaan dalam kegiatan stok opname selanjutnya 2. Surat pernyataan petugas pengelola persediaan BBPOM di Banda Aceh akan lebih terlibat dalam mencatat transaksi keluar masuk barang persediaan dan mencantumkan hasil pemeriksaan sesuai fisik persediaan dalam kegiatan stok opname selanjutnya.			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala BBPOM di Semarang selaku KPB supaya memerintahkan petugas pengelola persediaan untuk mencantumkan keterangan kondisi persediaan dalam pelaksanaan stock opname selanjutnya;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 : Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.235 tgl 28 Juni 2024, Dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang agar melampirkan data dukung berupa: 1. Surat Instruksi Kepala BBPOM di Semarang selaku KPB kepada petugas pengelola persediaan untuk mencantumkan keterangan kondisi persediaan dalam pelaksanaan stok opname selanjutnya; 2. Surat pernyataan petugas pengelola persediaan BBPOM di Semarang untuk mencantumkan keterangan kondisi persediaan dalam pelaksanaan stok opname selanjutnya (surat pernyataan belum dilampirkan namun telah terdapat BA Stockopname yang mencantumkan kondisi persediaan).	1		0		0		0		0	Belum diusulkan sesuai rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa surat dari Kepala Balai Besar POM di Semarang selaku KPB supaya supaya memerintahkan petugas pengelola persediaan untuk mencantumkan keterangan kondisi persediaan dalam pelaksanaan stock opname selanjutnya.			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB supaya melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan dan memerintahkan Petugas Pengelola Persediaan untuk menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.236 tgl 28 Juni 2024, dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Kepala Balai POM di Surakarta agar melampirkan data dukung berupa: 1. Surat pernyataan Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB supaya melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan dan memerintahkan Petugas Pengelola Persediaan agar menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan; 2. Bukti melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai dengan ketentuan; 3. Surat Instruksi Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB kepada Petugas Pengelola Persediaan agar menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan; 4. Surat Pernyataan Petugas Pengelola Persediaan Balai POM di Surakarta akan menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan. Diusulkan sesuai rekomendasi karena telah terdapat surat Instruksi Plt. Kepala BPOM kepada Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB supaya melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan dan memerintahkan Petugas Pengelola Persediaan untuk menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan.	1		0		0		0		0	Belum sesuai rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa: 1. Surat pernyataan Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB supaya melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan dan memerintahkan Petugas Pengelola Persediaan agar menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan; 2. Bukti melengkapi prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai dengan ketentuan; 3. Surat Instruksi Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB kepada Petugas Pengelola Persediaan agar menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan; 4. Surat Pernyataan Petugas Pengelola Persediaan Balai POM di Surakarta akan menjalankan prosedur pemusnahan barang persediaan sesuai ketentuan.			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala PPPOMN supaya: 1)Menetapkan SOP Pelaporan Data pada aplikasi Infalabs dan mekanisme rekonsiliasi data pencatatan antara aplikasi Infalabs, SAKTI, dan catatan manual; dan 2)Memerintahkan Petugas Pengelola BMN untuk melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 1. Surat Instruksi Plt. Kepala BPOM No. R-PL05.1.7.06.24.238 tanggal 28 Juni 2024 kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023. 2. Surat pernyataan Kepala PPPOMN akan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Data pada aplikasi Infalabs dan mekanisme rekonsiliasi data pencatatan antara aplikasi Infalabs, SAKTI dan catatan manual serta akan memerintahkan Petugas Pengelola BMN untuk melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan; 3. Surat Instruksi Kepala PPPOMN kepada Petugas Pengelola BMN untuk melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan; 4. Surat Pernyataan Petugas Pengelola BMN PPPOMN akan melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan.	1		0		0		0		0		0	Belum diusulkan sesuai rekomendasi karena belum terdapat : 1) SOP Pelaporan Data pada aplikasi Infalabs dan mekanisme rekonsiliasi data pencatatan antara aplikasi Infalabs, SAKTI, dan catatan manual yang ditetapkan oleh Kepala PPPOMN dan 2) Surat dari Kepala PPPOMN yang memerintahkan Petugas Pengelola BMN untuk melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan. 3) Surat Pernyataan Petugas Pengelola BMN PPPOMN akan melakukan rekonsiliasi pencatatan mutasi masuk dan keluar persediaan dengan Petugas Pengelola Persediaan setiap akhir bulan.	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Kepala PPPOMN dan 42 Kepala UPT Badan POM supaya menyusun rencana pemanfaatan yang mengatur monitoring dan koordinasi pemanfaatan sisa persediaan bahan kimia cair dan kimia lainnya secara periodik.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I Tahun 2024 : Surat Instruksi Kepala BPOM perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023 Nomor R-PI.05.1.7.06.24.237 tgl 28 Juni 2024, dalam Surat Instruksi tersebut, Plt. Kepala BPOM menginstruksikan kepada Kepala PPPOMN, Kepala Balai Besar POM, Kepala Balai POM dan Kepala Loka POM (daftar terlampir) agar melampirkan data dukung berupa: 1. Surat pernyataan Kepala Satker akan menyusun rencana pemanfaatan yang mengatur monitoring dan koordinasi pemanfaatan sisa persediaan bahan kimia cair dan kimia lainnya secara periodik; 2. Bukti Kepala Satker telah menyusun rencana pemanfaatan yang mengatur monitoring dan koordinasi pemanfaatan sisa persediaan bahan kimia cair dan kimia lainnya secara periodik.	0		1		0		0		0		0	Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat dokumen berupa: 1. Surat pernyataan Kepala Satker akan menyusun rencana pemanfaatan yang mengatur monitoring dan koordinasi pemanfaatan sisa persediaan bahan kimia cair dan kimia lainnya secara periodik; 2. Bukti Kepala Satker telah menyusun rencana pemanfaatan yang mengatur monitoring dan koordinasi pemanfaatan sisa persediaan bahan kimia cair dan kimia lainnya secara periodik (belum dilengkapi dokumen dari satker BBPOM di Pontianak, Palembang dan BPOM di Palopo).	

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyerahan uang ke kas negara/daerah					
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti								
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
14	Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Kepala BBPOM di Pontianak, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Bungo selaku KPB untuk berkoordinasi dengan KPKNL setempat guna mendapatkan penilaian terhadap tanah dan bangunan yang diperoleh melalui hibah;	1	0	7/11/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.239 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.546 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Penilaian Terhadap Tanah dan Bangunan yang Diperoleh dengan Hibah; 3. Surat Pernyataan Kepala Balai POM di Surakarta, Kepala Balai POM di Tarakan dan Kepala Loka POM di Kab. Bungo tanggal 15-16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan melakukan koordinasi dengan KPKNL setempat guna mendapatkan penilaian terhadap tanah dan bangunan yang diperoleh melalui hibah (Beserta bukti pendukung surat permohonan penilaian dan koordinasi ke KPKNL setempat)	0		1		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti koordinasi Kepala BBPOM di Pontianak, Balai POM di Tarakan, Balai POM di Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Bungo selaku KPB dengan KPKNL setempat guna mendapatkan penilaian terhadap tanah dan bangunan yang diperoleh melalui hibah sampai terbitnya penilaian dari KPKNL					
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB untuk melakukan upaya pengamanan fisik aset tetap dari hibah;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.240 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.547 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Upaya Pengamanan Fisik Aset Tetap dari Hibah; 3. Surat Pernyataan Kepala Balai POM di Surakarta tanggal 16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan melakukan upaya pengamanan fisik aset tetap dari hibah (berserta data dukung bukti dokumentasi)	1		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti Kepala Balai POM di Surakarta selaku KPB melakukan pengamanan fisik aset tetap dari hibah					
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Kepala BBPOM di Banda Aceh selaku KPB untuk melengkapi administrasi penghapusan Aset Tetap;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.241 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.548 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Melengkapi Administrasi Penghapusan Aset Tetap; 3. Surat Pernyataan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akanmelengkapi administrasi penghapusan aset tetap (berserta data dukung bukti dokumentasi)	1		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti Kepala BBPOM di Banda Aceh selaku KPB melengkapi administrasi penghapusan Aset Tetap					
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan 11 Kepala UPT Badan POM selaku KPB untuk berkoordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan dan instansi terkait dalam pengamanan dan pemanfaatan senpi yang tidak berada dalam penguasaan satker yang berwenang;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.242 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.549 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Pengamanan dan pemanfaatan Senjata Api; 3. Surat Pernyataan 9 Kepala UPT Badan POM tanggal 15-16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Deputi 4 dan instansi terkait dalam pengamanan dan pemanfaatan senpi yang tidak berada dalam penguasaan Satker yang berwenang (berserta 5 UPT melampirkan bukti koordinasi)	0		1		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat seluruh Bukti koordinasi Kepala UPT Badan POM selaku KPB dengan Deputi Bidang Penindakan dan instansi terkait dalam pengamanan dan pemanfaatan senpi yang tidak berada dalam penguasaan Satker yang berwenang (baru terdapat 5 UPT yang melampirkan bukti koordinasi dari 11 UPT)			
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan 16 Kepala UPT Badan POM selaku KPB untuk melakukan pendaftaran ulang BPSPK senpi yang masa berlakunya telah kadaluarsa di Kepolisian Daerah setempat;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.243 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.550 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Pendaftaran Ulang BPSPK Senjata Api; 3. Surat Pernyataan 16 Kepala UPT Badan POM tanggal 15-16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan melakukan pendaftaran ulang BPSPK Senpi yang masa berlakunya telah kadaluarsa di Polda Setempat (Beserta bukti pendukung permohonan pendaftaran ulang BPSPK Senpi); 4. BPSPK atas 1 unit Senpi tanggal 21 Mei 2024 s.d. 16 Mei 2029 pada BBPOM di Bandar Lampung	0		1		0		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti pendaftaran ulang BPSPK senpi yang masa berlakunya telah kadaluarsa di Kepolisian Daerah setempat oleh Kepala UPT pada Balai Besar POM di Jakarta, Balai POM di Semarang, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Palangka Raya, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Manado, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Denpasar, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Bengkulu selaku KPB	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Deputi Bidang Penindakan untuk menyusun dan menerbitkan SOP terkait pengelolaan senpi pada lingkungan Badan POM;	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.244 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretraris Utama badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.551 tanggal 12 Juli 2024 perihal Serat Instruksi Berupa SOP terkait Pengelolaan Senjata Api kepada Deputi Bidang Penindakan; 3. SOP Nomor POM-05.04/CFM.01/SOP.01/IK.64.17 tanggal 13 Mei 2024 perihal Peminjaman Senjata Api Non Organik disahkan oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan.	1		0		0		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti menyusun dan menerbitkan SOP terkait pengelolaan senpi pada lingkungan Badan POM oleh Deputi Bidang Penindakan	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Setama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Kepala Biro Umum Kepala Balai POM di Gorontalo dan Kepala Balai POM di Manokwari untuk melaksanakan opname fisik atas KDP setiap tahun; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PL05.1.7.06.24.245 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PL.03.02.2.07.24.545 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Pelaksanaan Opname Fisik atas KDP; 3. Surat Pernyataan Kepala Biro Umum tanggal 16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan membuat Opname Fisik atas KDP setiap tahun (berserta data dukung bukti pelaksanaan opname fisik KDP); 4. Surat Pernyataan Kepala Balai POM di Gorontalo tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan membuat Opname Fisik atas KDP setiap tahun (berserta data dukung bukti pelaksanaan opname fisik KDP); 5. Surat Pernyataan Kepala Balai POM di Manokwari tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan membuat Opname Fisik atas KDP setiap tahun	0		1		0		0		0		0	TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti pelaksanaan opname fisik KDP pada Balai POM di Manokwari			

LAMPIRAN 27. MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT																	
No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah
								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM menginstruksikan Sestama selaku Pengguna Barang supaya memerintahkan Deputi Bidang Penindakan, Kepala Pusakom, Kepala PPSDM, Kepala Biro Umum dan 31 Kepala UPT Badan POM selaku KPB untuk mengajukan penerbitan PSP kepada KPKNL dan Sestama sesuai kewenangannya.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PI.05.1.7.06.24.246 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor R-PI.03.02.2.07.24.544 tanggal 12 Juli 2024 perihal Surat Instruksi Aset Tetap Belum Memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN; 3. Surat Pernyataan 35 Kepala Satuan Kerja terkait tanggal 15-16 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan mengajukan penerbitan PSP ke KPKNL dan Sestama sesuai kewenangannya (berserta data dukung bukti Pengajuan Penerbitan PSP); 4. 20 dokumen SK Penetapan PSP yang mencakup 112 NUP telah memiliki PSP BMN dari total 501 NUP. Sisa sebanyak 389 belum memiliki PSP BMN	0		1		0		0		TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti terbitnya SK PSP BMN atas 389 NUP (501 - 112 = 389 NUP)	
15	Sistem Informasi Pengelolaan PNB dan Pelayanan Publik pada Badan POM Belum Dapat Menyajikan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Secara Akurat	1		BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Mengevaluasi penerapan kebijakan Pendapatan Diterima Dimuka terhadap Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan; dan	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024: 1. Surat Kepala Badan Pom Nomor R-PI.05.1.7.06.24.247 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK atas LK TA 2023; 2. Surat Pernyataan Deputi 1 dan 2 tanggal 4 dan 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan pendapatan diterima dimuka terhadap pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan;	0		1		0		0		TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan Deputi Bidang Pangan Olahan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan Pendapatan Diterima Dimuka terhadap Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	
				BPK merekomendasikan agar Kepala Badan POM Menginstruksikan Kepala Pusdatin supaya berkoordinasi dengan Kepala Satker terkait dalam pengembangan aplikasi e-Payment dan/atau aplikasi pelayanan publik sesuai hasil evaluasi.	1	0	7/19/2024 12:00:00 AM - PTL Semester I TA 2024 - 26/06/2024 1. Surat Kepala Badan POM Nomor R-PI.05.1.7.06.24.248 tanggal 28 Juni 2024 perihal Surat Instruksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2023; 2. Surat Pernyataan Kepala Pusdatin tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Kepala Satker terkait dalam pengembangan aplikasi e-Payment dan/atau aplikasi pelayanan publik sesuai hasil evaluasi; 3. Notula Pembahasan Tinjau Ulang Juklak PNB dan Evaluasi Kebijakan PDDM tanggal 11 Juni 2024	0		1		0		0		TL Belum Sesuai Rekomendasi karena belum terdapat Bukti koordinasi Kepala Pusdatin dengan satuan kerja terkait dalam pengembangan aplikasi e-Payment dan/atau aplikasi pelayanan publik sesuai hasil evaluasi	
				Jumlah	15	IDR 844.524.599,11	Jumlah	49	IDR 490.717.656,49	Jumlah	26	IDR 67.201.714,29	23	IDR 423.515.942,20	0	IDR 0,00	0

REKENING VIRTUAL DI LINGKUNGAN BADAN POM PER 31 DESEMBER 2024

No	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Per 31 Desember 2024
1	432731	SETTAMA	8100124327311000	BPP 175 SETTAMA BPOM	MANDIRI	-
2	432731	SETTAMA	8100124327311001	BPP 175 SETTAMA BPOM_01	MANDIRI	-
3	432731	SETTAMA	8100124327311002	BPP 175 SETTAMA BPOM_02	MANDIRI	-
4	432731	SETTAMA	8100124327311003	BPP 175 SETTAMA BPOM_03	MANDIRI	-
5	432731	SETTAMA	8100124327311004	BPP 175 SETTAMA BPOM_04	MANDIRI	-
6	432731	SETTAMA	8100124327311005	BPP 175 SETTAMA BPOM_05	MANDIRI	-
7	432731	SETTAMA	8100124327311006	BPP 175 SETTAMA BPOM_06	MANDIRI	-
8	432731	SETTAMA	8100124327311007	BPP 175 SETTAMA BPOM_07	MANDIRI	-
9	432731	SETTAMA	8100124327311000	BPP 175 SEKRETARIAT UTAMA BPOM 08	MANDIRI	-
10	433005	ITTAMA	8100124330051000	BPG 175 INSPEKTORAT BPOM	MANDIRI	-
11	433005	ITTAMA	8100124330051001	BPP175.INSPEKTORAT BADAN POM 01	MANDIRI	-
12	433005	ITTAMA	8100124330051002	BPP175.INSPEKTORAT BADAN POM 02	MANDIRI	-
13	433005	ITTAMA	8100124330051003	BPP175.INSPEKTORAT BADAN POM 03	MANDIRI	-
14	445155	DEPUTI I	9890314451551000	BPG 175 DEPUTI I BPOM	BNI	-
15	445155	DEPUTI I	9890314451551001	BPP Dit. Was. Produksi	BNI	-
16	445155	DEPUTI I	9890314451551002	BPP Dit. Registrasi Obat	BNI	-
17	445155	DEPUTI I	9890314451551003	BPP Dit. Was. KMEI	BNI	-
18	445155	DEPUTI I	1700010800591	BPP 175 DEP I BIDANG PON PPZA 05	BNI	-
19	445161	DEPUTI II	8100124451611000	BPG175.DEPUTI II BADAN POM RI	MANDIRI	-
20	445161	DEPUTI II	8100124451611001	BPP 175 DEPUTI II BPOM RI_01	MANDIRI	-
21	445161	DEPUTI II	8100124451611002	BPP 175 DEPUTI II BPOM RI_02	MANDIRI	-
22	445161	DEPUTI II	8100124451611003	BPP 175 DEPUTI II BPOM RI_03	MANDIRI	-
23	445161	DEPUTI II	8100124451611004	BPP 175 DEPUTI II BPOM RI_04	MANDIRI	-
24	445161	DEPUTI II	8100124451611005	BPP 175 DEPUTI II BPOM RI_05	MANDIRI	-
25	445170	DEPUTI III	8100124451701000	BPG 175 DEPUTI III BPOM RI	MANDIRI	-
26	445170	DEPUTI III	8100124451701001	BPP 175 DEP III BIDANG PPO 01	MANDIRI	-
27	445170	DEPUTI III	8100124451701002	BPP 175 DEP III BIDANG PPO 02	MANDIRI	-
28	445170	DEPUTI III	8100124451701003	BPP 175 DEP III BIDANG PPO 03	MANDIRI	-
29	445170	DEPUTI III	8100124451701004	BPP 175 DEP III BIDANG PPO 04	MANDIRI	-
30	445170	DEPUTI III	8100124451701005	BPP 175 DEP III BIDANG PPO 05	MANDIRI	-
31	632420	PPPOMN	8100126324201000	BPG 175 PUSAT P2OMN	MANDIRI	-
32	632420	PPPOMN	8100126324201000	BPG 175 PUSAT P2OMN	MANDIRI	-
33	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	9890316324371000	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	BNI	-
34	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	9890316324371001	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 01	BNI	-
35	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	9890316324371002	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 02	BNI	-
36	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	9890316324371003	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 03	BNI	-
37	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	9890316324371004	BPP 175 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 04	BNI	-
38	632437	Bpg17 Deputy IV Bidang Penindakan	1230063243705	RPL 175 PDT DEP IV BID PENIDKN BPOM UTK TPPU	BNI	Rp254.988.965,71
39	632441	PUSAKOM	8100126324411000	BPG175.PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT MAKANAN	MANDIRI	-
40	632458	PUSDATIN	8100126324581000	BPG 175 PUSDATIN OM	MANDIRI	-
41	672828	PPSDM	8100126728281000	BPG 175 PUSAT PSDM POM	MANDIRI	-
42	432747	BALAI BESAR POM DI JAKARTA	8100124327471000	BPG175.BALAI BESAR POM JAKARTA	MANDIRI	-
43	432753	BALAI BESAR POM DI BANDUNG	8100124327531000	BPG 095 BBPOM DI BANDUNG	MANDIRI	-
44	432762	BALAI BESAR POM DI SEMARANG	9890314327621000	BPG 134 BALAI BESAR POM SEMARANG	BNI	-
45	432778	BALAI BESAR POM DI YOGYAKARTA	8100124327781000	BPG 030 BALAI BESAR POM YOGYAKARTA	MANDIRI	-
46	432784	BALAI BESAR POM DI SURABAYA	650234327841000	BPG 135 BALAI BESAR POM SURABAYA	BRI	-
47	432790	BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH	8100374327901000	BPG 001 BALAI BESAR POM BANDA ACEH	BANK SYARIAH INDONESIA	-
48	432804	BALAI BESAR POM DI MEDAN	650234328041000	BPG 004 BALAI BESAR POM MEDAN	BRI	-

REKENING VIRTUAL DI LINGKUNGAN BADAN POM PER 31 DESEMBER 2024

No	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Per 31 Desember 2024
49	432810	BALAI BESAR POM DI PADANG	8100374328101000	BPG 010 BALAI BESAR POM DI PADANG	BANK SYARIAH INDONESIA	-
50	432829	BALAI BESAR POM DI PEKANBARU	9890314328291000	BPG 008 BALAI BESAR POM PEKANBARU	BNI	-
51	432841	BALAI BESAR POM DI PALEMBANG	8100124328411000	BPG 014 BALAI BESAR POM DI PALEMBANG	MANDIRI	-
52	432850	BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG	650234328501000	BPG 017 BPOM BANDAR LAMPUNG	BRI	-
53	432866	BALAI BESAR POM DI PONTIANAK	8100124328661000	BPG 042 BALAI BESAR POM PONTIANAK	MANDIRI	-
54	432872	BALAI BESAR POM DI PALANGKARAYA	650234328721000	BPG 043 BALAI POM PALANGKARAYA	BRI	-
55	432881	BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN	8100124328811000	BPG 045 BALAI POM BANJARMASIN	MANDIRI	-
56	432897	BALAI BESAR POM DI SAMARINDA	650234328971000	BPG 046 BALAI BESAR POM SAMARINDA	BRI	-
57	432901	BALAI BESAR POM DI MANADO	8100124329011000	BPG 049 BALAI BESAR POM MANADO	MANDIRI	-
58	432923	BALAI BESAR POM DI MAKASSAR	8100124329231000	BPG 136 BALAI BESAR POM MAKASSAR	MANDIRI	-
59	432954	BALAI BESAR POM DI DENPASAR	650234329541000	BPG 037 BALAI BESAR POM DENPASAR	BRI	-
60	432960	BALAI BESAR POM DI MATARAM	8100124329601000	BPG 038 BALAI BESAR POM MATARAM	MANDIRI	-
61	432985	BALAI BESAR POM DIJAYAPURA	650234329851000	BPG 063 BALAI BESAR POM JAYAPURA	BRI	-
62	672821	BALAI BESAR POM DI SERANG	8100126728211000	BPG 020 BALAI BESAR POM SERANG	MANDIRI	-
63	672838	BALAI POM DI BATAM	9890316728381000	BPG 137 BALAI POM BATAM	BNI	-
64	419508	BALAI POM DI SOFIFI	8100124195081000	BPG 062 BALAI POM SOFIFI	MANDIRI	-
65	419578	BALAI POM DI MAMUJU	8100374195781000	BPG 178 BALAI POM MAMUJU	BSI	-
66	419578	BALAI POM DI MAMUJU	1700010800591	RPL 178 PDT 419578 UTK DANA SITAAN TERSANGKA		-
67	432835	BALAI POM DI JAMBI	650234328351000	BPG 012 BALAI POM JAMBI	BRI	-
68	432917	BALAI POM DI PALU	8100124329171000	BPG 051 BALAI POM PALU	MANDIRI	-
69	432932	BALAI POM DI KENDARI	650234329321000	BPG 060 BALAI POM KENDARI	BRI	-
70	432948	BALAI POM DI AMBON	9890314329481000	BPG 061 BALAI POM AMBON	BNI	-
71	432979	BALAI POM DI KUPANG	8100124329791000	BPG 039 BALAI POM KUPANG	MANDIRI	-
72	432991	BALAI POM DI BENGKULU	8100124329911000	BPG 016 BALAI POM BENGKULU	MANDIRI	-
73	672842	BALAI POM DI PANGKALPINANG	8100126728421000	BPG 015 BALAI POM PANGKALPINANG	MANDIRI	-
74	672859	BALAI POM DI GORONTALO	8100126728591000	BPG 050 BALAI POM GORONTALO	MANDIRI	-
75	689071	BALAI POM DI MANOKWARI	8100126890711000	BPG 065 BPOM MANOKWARI	MANDIRI	-
76	672852	LOKA POM KABUPATEN MIMIKA	650616728521000	BPG 141 LOKA POM KAB MIMIKA	BRI	-
77	672839	BALAI POM DI KOTA SURAKARTA	9890316728391000	BPG028 BPOM LOKA POM KOTA SURAKARTA	BNI	-
78	672840	Balai POM di TASIKMALAYA	8100126728401000	BPG025 BPOM LOKA TASIKMALAYA	MANDIRI	-
79	672841	BALAI POM DI KEDIRI	8100126728411000	BPG034 BPOM LOKA POM KAB. KEDIRI	MANDIRI	-
80	672843	BALAI POM DI JEMBER	8100126728431000	BPG131 BPOM LOKA POM KAB. JEMBER	MANDIRI	-
81	672844	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	9890316728441000	BPG029 BPOM LOKA POM KAB. BANYUMAS	BNI	-
82	672845	BALAI POM DI PALOPO	8100126728451000	BPG058 BPOM LOKA KOTA PALOPO	MANDIRI	-
83	672846	BALAI POM DI BOGOR	8100126728461000	BPG023 BPOM LOKA POM KAB. BOGOR	MANDIRI	-
84	672847	BALAI POM DITANGERANG	8100126728471000	BPG 127 BPOM LOKA POM KAB. TANGERANG	MANDIRI	-
85	672848	BALAI POM DI TARAKAN	9890316728481000	BPG 048 BPOM LOKA POM KOTA TARAKAN	BNI	-
86	672849	LOKA POM DI KOTA DUMAI	9890316728491000	BPG 120 BPOM LOKA POM DUMAI	BNI	-
87	672850	LOKA POM KOTA BAUBAU	650616728501000	BPG 103 BPOM LOKA POM KOTA BAUBAU	BRI	-
88	672851	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	8100126728511000	BPG070 BPOM LOKA POM KOTA LUBUKLINGGAU	MANDIRI	-
89	672853	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	8100126728531000	BPG 040 BPOM Loka POM Kab. Ende	MANDIRI	-
90	672854	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	8100126728541000	BPG 104 BPOM Loka POM Kab Tanimbar	MANDIRI	-
91	690462	LOKA POM KAB PULAU MOROTAI	9890316904621000	BPG 112 LOKA POM KAB PULAU MOROTAI	BNI	-
92	690464	LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	8100376904641000	BPG 076 LOKA POM KOTA TANJUNGBALAI	BRI	-
93	690465	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	8100376904651000	BPG 011 LOKA POM PAYAKUMBUH	BANK SYARIAH INDONESIA	-
94	690466	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	6904661000	BPG 013 LOKA POM KOTA SUNGAI PENUH	BRI	-
95	690467	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	650616904671000	BPG 116 LOKA POM KAB TULANG BAWANG	BRI	-
96	690468	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	8100126904681000	BPG 167 LOKA KAB SANGGAU	MANDIRI	-

REKENING VIRTUAL DI LINGKUNGAN BADAN POM PER 31 DESEMBER 2024

No	Satker	Nama Satker	No Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Per 31 Desember 2024
97	690469	LOKA POM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	650616904691000	BPG 102 LOKA POM KAB KOTAWARINGIN BARAT	BRI	-
98	690470	LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	650616904701000	BPG 151 LOKA POM KAB HULU SUNGAI UTARA	BRI	-
99	690471	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	650616904711000	BPG 047 LOKA POM BALIKPAPAN	BRI	-
100	690472	LOKA POM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE	8100126904721000	BPG 083 LOKA POM KAB KEPULAUAN SANGIHE	MANDIRI	-
101	690473	LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH	8100376904631000	BPG 122 LOKA POM ACEH TENGAH	BANK SYARIAH INDONESIA	-
102	690473	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	8100376904731000	BPG 053 LOKA POM KAB BANGGAI	BANK SYARIAH INDONESIA	-
103	690474	LOKA POM KABUPATEN BULELENG	650616904741000	BPG 132 LOKA POM KAB BULELENG	BRI	5.400,00
104	690475	LOKA POM KABUPATEN BIMA	9890316904751000	BPG 071 LOKA POM KAB BIMA	BNI	-
105	690476	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	650616904761000	BPG 068 LOKA POM KAB MERAUKE	BRI	-
106	690477	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	8100126904771000	BPG 146 LOKA KAB REJANG LEBONG	MANDIRI	-
107	690478	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	9890316904781000	BPG 009 LOKA POM KOTA TANJUNGPINANG	BNI	-
108	690479	LOKA POM KOTA BELITUNG	8100126904791000	BPG 107 LOKA KOTA BELITUNG	MANDIRI	-
109	690480	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	8100126904801000	BPG 066 LOKA POM KAB SORONG	MANDIRI	-
110	690481	LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN	8100376904811000	BPG 074 LOKA POM KAB ACEH SELATAN	BANK SYARIAH INDONESIA	-
111	690482	LOKA POM KABUPATEN TOBA	8100126904821000	BPG 125 LOKA POM KAB TOBA	MANDIRI	-
112	690483	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	650616904831000	BPG 077 LOKA POM KAB DHARMASRAYA	BRI	-
113	690484	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	9890316904841000	BPG 092 LOKA POM KAB INDRAGIRI HILIR	BNI	-
114	690485	LOKA POM KABUPATEN TANAH BUMBU	8100126904851000	BPG 081 LOKA KAB TANAH BUMBU	MANDIRI	-
115	690486	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	9890316904861000	BPG 111 LOKA POM KAB MANGGARAI BARAT	BNI	-

Lampiran 28. Alat Gelas Kualitatif per UAPPA-Wilayah dan Satker Pusat

No	LAPORAN KEUANGAN UAPPA-W DAN SATKER PUSAT	Kuantitas	Keterangan
1	SETTAMA	-	Tidak memiliki Alat gelas
2	ITTAMA	-	Tidak memiliki Alat gelas
3	DEPUTI I	-	Tidak memiliki Alat gelas
4	DEPUTI II	-	Tidak memiliki Alat gelas
5	DEPUTI III	-	Tidak memiliki Alat gelas
6	PPOMN	18,244	
7	DEPUTI IV	-	Tidak memiliki Alat gelas
8	PUSAKOM	-	Tidak memiliki Alat gelas
9	PUSDATIN	-	Tidak memiliki Alat gelas
10	PPSDM	-	Tidak memiliki Alat gelas
11	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banda Aceh	5,798	
12	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Medan	17,881	
13	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pekanbaru	775	
14	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Padang	30,833	
15	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Palembang	34,429	
16	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jakarta	36,909	
17	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Bandung	11,256	
18	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Semarang	24,277	
19	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Surabaya	19,377	
20	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Denpasar	23,573	
21	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pontianak	3,348	
22	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banjarmasin	24,319	
23	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Samarinda	9,251	
24	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Manado	40,852	
25	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Makassar	26,642	
26	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jayapura	15,033	
27	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Jambi	13,782	
28	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Palu	12,979	
TOTAL		369,558	

Lamp 30. Ikhtisar hibah uang luar negeri pada BPOM

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PER 31 Desember 2024**

		LK HLN 1	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF	
2	Pemberi Hibah	WORLD HEALTH ORGANIZATION	
3	Nama Proyek	JOINT WORK PLAN WHO BIENNIUM 2022-2023 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKUSOR DAN ZAT ADIKTIF	
4	<i>Grant ID</i>	-	-
5	No Register	23LNGDLA	
6	<i>Date Sign</i>	1/4/2022	
7	<i>Date Effective</i>	-	-
8	<i>Closing Date</i>	31/3/2024	
9	<i>Grant Amount</i>	282.800,00	282.800,00
10	<i>Disbursement</i> s.d 2023	3.418.372.637,00	3.418.372.637,00
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2024	78.797.000,00	78.797.000,00
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)		
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang	78.797.000,00	78.797.000,00
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja bansos	-	-
13	Neraca (Rupiah)		
	a. Aset Lancar	-	-
	b. Aset Tetap	-	-
	c. Aset Lainnya	-	-
	d. Kewajiban	-	-
14	<i>Executing Agency</i>	BPOM	BPOM
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)	-	-

LAMPIRAN 31. RINCIAN BARANG BUKTI PER SATWIL DAN SATKER PUSAT

No	SATUAN KERJA PUSAT DAN WILAYAH	Obat								Obat Tradisional								
		SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ	SPDP	Tahap 1	P18/P19	P20	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ
1	SETTAMA																	
2	ITTAMA																	
3	DEPUTI I																	
4	DEPUTI II																	
5	DEPUTI III																	
6	DEPUTI IV			11								286						
7	PPOMN																	
8	PUSAKOM																	
9	PUSDATIN																	
10	PPSDM																	
11	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banda Aceh		23.563											100				
12	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Medan	18.156	162	3.360	0	0	0	15.706	0	0	1.852	6	0	10	0	0	0	0
13	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pekanbaru						450			1.554						18		
14	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Padang	738				4.379									1.639			
15	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Palembang	17.515			25.650	5		81		1.312		25		3.691				
16	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jakarta	3.145	0	72	47.482	0	0	0	310	24	0	14.472		694	0	0	0	0
17	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Bandung				2.121	24				394.806				1.714	93			
18	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Semarang	534.714			37.431									6.213				
19	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Surabaya	16.420	0	0	460	99	0	0	1.200	54.045	0	0	0	127.250	53.069	0	56.040	804
20	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Denpasar		120		140				294					695				95
21	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pontianak																	
22	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banjarmasin				360.804	1	1.114	11.188								36.593		
23	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Samarinda			13.282		12												
24	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Manado				2.687	13.350								1.131	285			
25	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Makassar	56.708		3.049		20.987						441		1.806				
26	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jayapura					2		839							529			
27	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Jambi		10.615	1								2						
28	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Palu	0	1.681	1.240	2.000	0	0	0	17.570	0	774	0	0	337	0	0	0	125
	TOTAL	647.396	36.141	21.015	478.775	38.859	1.564	27.814	19.374	451.741	2.626	15.232	0	143.641	55.615	36.611	56.040	1.024

		LAMPIRAN 31. RINCIAN BARANG BUKTI PER SATWIL DAN SATKER PUSAT															
No	SATUAN KERJA PUSAT DAN WILAYAH	Suplemen Kesehatan								Pangan							
		SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ	SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ
1	SETTAMA																
2	ITTAMA																
3	DEPUTI I																
4	DEPUTI II																
5	DEPUTI III																
6	DEPUTI IV											24					
7	PPPOMN																
8	PUSAKOM																
9	PUSDATIN																
10	PPSDM																
11	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banda Aceh																
12	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pekanbaru																
14	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Padang									901			19				
15	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Palembang									8			38	13			
16	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jakarta	1.076	0	0	0	7.523	0	0	0	8	1.756	0	0	20	0	0	0
17	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Bandung					60				9	86		16	7			
18	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Semarang			4.006	9												
19	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Surabaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.015	0	0	1.633	0
20	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Denpasar																
21	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pontianak																
22	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banjarmasin														1		
23	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Samarinda																
24	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Manado																
25	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Makassar											1					
26	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jayapura									30			8				
27	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Jambi			9								42					
28	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1.076	0	4.015	9	7.583	0	0	0	956	1.842	67	4.096	40	1	1.633	0

		LAMPIRAN 31. RINCIAN BARANG BUKTI PER SATWIL DAN SATKER PUSAT																	
No	SATUAN KERJA PUSAT DAN WILAYAH	Kemasan								Kosmetik									
		SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ	SPDP	Tahap 1	P18/P19	P20	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ	
1	SETTAMA																		
2	ITTAMA																		
3	DEPUTI I																		
4	DEPUTI II																		
5	DEPUTI III																		
6	DEPUTI IV			27								1.879							
7	PPPOMN																		
8	PUSAKOM																		
9	PUSDATIN																		
10	PPSDM																		
11	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banda Aceh										59								
12	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Medan	5.484	0	0	0	0	0	0	0	5.484	16.641	0	0	1.791	5.314	0	0	0	
13	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pekanbaru															11	334		
14	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Padang									1.048	1.349			45	312				
15	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Palembang				2					2.476	5.671			313					
16	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jakarta	4.113	0	0	1	8.849	0	0	0	180.523	0	423.478		123	4.463	0	0	0	
17	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Bandung									2.292		7.718		512	13				
18	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Semarang	34.254			1.390							14.212		308					
19	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Surabaya	0	0	1.250	1	0	0	0	0	860	0	1.101	0	18.328	1.408	0	612.583	0	
20	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Denpasar				1						6	696		281				143	
21	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pontianak									3.452									
22	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banjarmasin				1			1						0		16.338			
23	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Samarinda														1.443				
24	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Manado	504				6				1.871	6.422			5.069	312				
25	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Makassar													6.868	759				
26	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jayapura													155	112				
27	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Jambi																		
28	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Palu	0	0	8	1.336	0	0	0	0	157	0	6	0	3.412	0	0	0	39	
	TOTAL	44.355	0	1.285	2.732	8.855	0	1	0	198.163	30.148	449.090	0	37.205	14.136	16.349	612.917	182	

		LAMPIRAN 31. RINCIAN BARANG BUKTI PER SATWIL DAN SATKER PUSAT																	
No	SATUAN KERJA PUSAT DAN WILAYAH	Mesin/Alat Produksi								Lain-lain								JUMLAH	
		SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ	SPDP	Tahap 1	P18/P19	P21	Tahap 2	Proses Persidangan	SP3	Non PJ		
1	SETTAMA																	-	
2	ITTAMA																	-	
3	DEPUTI I																	-	
4	DEPUTI II																	0	
5	DEPUTI III																	0	
6	DEPUTI IV			34								70						2.331	
7	PPPOMN																	0	
8	PUSAKOM																	0	
9	PUSDATIN																	0	
10	PPSDM																	0	
11	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banda Aceh																	23.722	
12	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Medan	4	0	2	0	0	0	0	0	11	0	30	22	0	0	0		74.035	
13	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pekanbaru																	2.367	
14	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Padang									9				3				10.442	
15	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Palembang				22					17	1	3	17	5				56.865	
16	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jakarta	32	4	0	1	11	0	0	0	2	0	1	33	19,5	0	0	0	698.236	
17	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Bandung	15	8		14	10				48		1	7	20				409.594	
18	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Semarang				5					525			34					633.101	
19	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Surabaya	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	186	3	0	0	0	0	950.757	
20	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Denpasar										1		1				31	2.504	
21	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Pontianak									1								3.453	
22	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Banjarmasin						6				5		38	3	447	2		426.542	
23	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Samarinda																	14.737	
24	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Manado												8	11				31.656	
25	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Makassar				42							22		7				90.690	
26	UAPPA-W di Lingkup Balai Besar POM Jayapura													3				1.678	
27	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Jambi																	10.669	
28	UAPPA-W di Lingkup Balai POM Palu	4	0	0	6	0	0	0	0	372	0	4	1.650	0	0	0	15	30.736	
	TOTAL	55	12	37	91	21	6	0	0	985	7	317	1.813	71,5	447	2	46	3.474.115	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:40 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	228,845,990,000	271,957,247,499	43,111,257,499	118.84	221,503,550,000	251,467,161,949	29,963,611,949	113.53
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	228,845,990,000	271,957,247,499	43,111,257,499	118.84	221,503,550,000	251,467,161,949	29,963,611,949	113.53
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	228,845,990,000	271,957,247,499	43,111,257,499	118.84	221,503,550,000	251,467,161,949	29,963,611,949	113.53
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,354,321,946,000	2,192,782,718,683	(161,539,227,317)	93.14	2,199,093,753,000	2,191,058,412,575	(8,035,340,425)	99.63
1. Belanja Pegawai	802,168,468,000	799,476,921,775	(2,691,546,225)	99.66	725,351,203,000	722,558,060,480	(2,793,142,520)	99.61
2. Belanja Barang	1,252,694,112,000	1,164,716,080,588	(87,978,031,412)	92.98	1,242,891,822,000	1,238,148,571,087	(4,743,250,913)	99.62
3. Belanja Modal	299,459,366,000	228,589,716,320	(70,869,649,680)	76.33	230,850,728,000	230,351,781,008	(498,946,992)	99.78
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063

Tgl Data : 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:40 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_kl_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,354,321,946,000	2,192,782,718,683	(161,539,227,317)	93.14	2,199,093,753,000	2,191,058,412,575	(8,035,340,425)	99.63
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak 09/05/25 9:40 AM
Halaman 1
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	495,957	0	495,957	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	254,994,365	176,400,000	78,594,365	44.55
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,760,255,555	1,152,528,423	1,607,727,132	139.50
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	399,462	(399,462)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	487,727,240	476,584,097	11,143,143	2.34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(487,727,240)	(2,382,920)	(485,344,320)	20,367.63
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	474,201,177	(474,201,177)	(100.00)
Persediaan	139,448,522,870	148,808,484,839	(9,359,961,969)	(6.29)
JUMLAH ASET LANCAR	142,464,268,747	150,612,013,901	(8,147,745,154)	(5.41)
ASET TETAP				
Tanah	1,726,822,662,687	1,688,380,858,025	38,441,804,662	2.28
Peralatan dan Mesin	3,209,368,070,471	3,099,255,818,791	110,112,251,680	3.55
Gedung dan Bangunan	1,057,417,869,828	991,271,337,416	66,146,532,412	6.67
Jalan, Irigasi dan Jaringan	29,595,727,807	29,151,311,568	444,416,239	1.52
Aset Tetap Lainnya	15,618,156,541	18,600,793,300	(2,982,636,759)	(16.03)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,878,016,202	48,419,791,693	(25,541,775,491)	(52.75)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,682,234,679,110)	(2,489,920,660,342)	(192,314,018,768)	7.72
JUMLAH ASET TETAP	3,379,465,824,426	3,385,159,250,451	(5,693,426,025)	(0.17)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1,327,337,564	0	1,327,337,564	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(1,327,337,564)	0	(1,327,337,564)	0.00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	134,552,580,264	138,198,335,885	(3,645,755,621)	(2.64)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	18,051,733,311	11,064,623,482	6,987,109,829	63.15
Aset Lain-lain	9,454,353,280	55,916,268,806	(46,461,915,526)	(83.09)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(88,966,121,781)	(88,513,425,741)	(452,696,040)	0.51
JUMLAH ASET LAINNYA	73,092,545,074	116,665,802,432	(43,573,257,358)	(37.35)
JUMLAH ASET	3,595,022,638,247	3,652,437,066,784	(57,414,428,537)	(1.57)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	50,692,133,248	10,346,135,403	40,345,997,845	389.96
Pendapatan Diterima Dimuka	26,040,574,519	26,608,246,462	(567,671,943)	(2.13)
Uang Muka dari KPPN	495,957	0	495,957	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	76,733,203,724	36,954,381,865	39,778,821,859	107.64
JUMLAH KEWAJIBAN	76,733,203,724	36,954,381,865	39,778,821,859	107.64

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data 09/05/25 2:10 AM
Tgl Cetak 09/05/25 9:40 AM
Halaman 2
lap_neraca_kl_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,518,289,434,523	3,615,482,684,919	(97,193,250,396)	(2.69)
JUMLAH EKUITAS	3,518,289,434,523	3,615,482,684,919	(97,193,250,396)	(2.69)
JUMLAH EKUITAS	3,518,289,434,523	3,615,482,684,919	(97,193,250,396)	(2.69)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,595,022,638,247	3,652,437,066,784	(57,414,428,537)	(1.57)

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 1

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	269,274,652,736	241,658,193,456	27,616,459,280	11.428
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	269,274,652,736	241,658,193,456	27,616,459,280	11.428
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	269,274,652,736	241,658,193,456	27,616,459,280	11.428
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	828,968,108,436	718,866,991,756	110,101,116,680	15.316
Beban Persediaan	79,009,988,033	80,066,369,350	(1,056,381,317)	(1.319)
Beban Barang dan Jasa	487,801,974,351	521,934,926,500	(34,132,952,149)	(6.54)
Beban Pemeliharaan	115,196,415,324	94,715,472,478	20,480,942,846	21.624
Beban Perjalanan Dinas	488,682,948,379	544,209,373,301	(55,526,424,922)	(10.203)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,903,696,800	1,365,401,828	538,294,972	39.424

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 2

lap_lo_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	275,424,589,584	280,473,779,787	(5,049,190,203)	(1.8)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	1,543,839	(1,543,839)	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,276,987,720,907	2,241,633,858,839	35,353,862,068	1.577
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,007,713,068,171)	(1,999,975,665,383)	(7,737,402,788)	0.387
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(10,017,513,261)	(4,840,272,975)	(5,177,240,286)	106.962
Pendapatan Pelepasan Aset	1,103,543,243	1,692,384,517	(588,841,274)	(34.794)
Beban Pelepasan Aset	11,121,056,504	6,532,657,492	4,588,399,012	70.238
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1,228,379,684)	29,816,272,719	(31,044,652,403)	(104.12)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,495,348,471	34,841,651,218	(32,346,302,747)	(92.838)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,723,728,155	5,025,378,499	(1,301,650,344)	(25.902)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(11,245,892,945)	24,975,999,744	(36,221,892,689)	(145.027)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,018,958,961,116)	(1,974,999,665,639)	(43,959,295,477)	2.226
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,018,958,961,116)	(1,974,999,665,639)	(43,959,295,477)	2.226

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,615,482,684,919	3,623,992,256,883	(8,509,571,964)	(0.23)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,018,958,961,116)	(1,974,999,665,639)	(43,959,295,477)	2.23
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	15,630,491,466	21,291,054,314	(5,660,562,848)	(26.59)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,339,812,429	1,080,482,259	259,330,170	24
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	40,362,816	(10,387,409)	50,750,225	(488.57)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	14,724,517,398	20,237,439,464	(5,512,922,066)	(27.24)
LAIN-LAIN	(474,201,177)	(16,480,000)	(457,721,177)	2,777.4 ₃
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,906,135,219,254	1,945,199,039,361	(39,063,820,107)	(2.01)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(97,193,250,396)	(8,509,571,964)	(88,683,678,432)	1,042.1 ₆
EKUITAS AKHIR	3,518,289,434,523	3,615,482,684,919	(97,193,250,396)	(2.69)

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	495,957	0
0.0	111819	Setara Kas lainnya	254,988,965	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5,400	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	2,760,255,555	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	487,727,240	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	487,727,240
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,719,391,619	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	354,031,404	0
0.0	117114	Suku Cadang	45,003,434,774	0
0.0	117131	Bahan Baku	83,386,121,573	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	985,543,500	0
0.0	131111	Tanah	1,726,822,662,687	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,209,368,070,471	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,057,417,869,828	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,063,392,732	0
0.0	134112	Irigasi	10,326,662,354	0
0.0	134113	Jaringan	17,205,672,721	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	805,705,174	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	14,812,451,367	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	22,878,016,202	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,489,361,468,240
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	183,427,489,812
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,984,072,818
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,955,447,516
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,217,703,465
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	288,497,259
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	1,327,337,564	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan	0	1,327,337,564
0.0	162151	Software	86,967,419,979	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	47,446,315,485	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	138,844,800	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	18,051,733,311	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	9,052,174,326	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	402,178,954	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	8,245,373,617
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	80,353,473,148
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	367,275,016
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	32,702,061,671

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,077,130,518
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	14,657,952,094
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	254,988,965
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	185,522,666
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	25,855,051,853
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	495,957
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,192,703,921,683
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	271,957,247,499	0
0.0	313211	Transfer Keluar	66,517,032,909	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	49,418,637,818
0.0	391111	Ekuitas	0	3,615,482,684,919
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,339,812,429
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	14,780,214,798
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	55,697,400	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	474,201,177	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	2,486,940,161
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset	0	40,362,816
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	577,496,755
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	526,046,488
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	178,654,547
3.0	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	267,803,854,888
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	838,738
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,290,873,563
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	342,258,955
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	322,391,828
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	450,000,000
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	6,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	431,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	258,428,324
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,116,269,364
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	248,481,126,150	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,446,830	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	15,332,689,892	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,231,913,249	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,480,268,700	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36,636,579,146	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	3,176,886,792	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	11,802,486,480	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	29,768,154,621	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	833,050,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	991,008,725	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	21,709,291,854	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	328,070	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	992,578,350	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	216,147,184	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	22,000,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,454,576,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	971,297,040	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	3,285,178,850	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	74,800,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	4,282,669,332	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	363,212,200	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	409,578,799,755	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	30,279,619,216	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	72,308,915,207	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,586,741,199	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,523,561,013	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8,557,634,181	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,042,478,122	0
3.0	521211	Beban Bahan	112,683,566,613	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,861,913,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	29,067,167,368	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,680,397,585	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	177,877,067	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	9,587,948	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	38,564,579,739	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,146,994,102	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,045,872,015	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	900,243,687	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	22,586,200	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	8,391,729,037	0
3.0	522141	Beban Sewa	36,500,788,014	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	26,702,965,015	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	128,024,757,239	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,302,952,143	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	998,168,301	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	111,129,853	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,582,859,813	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	29,405,700	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	329,475,160	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,408,970,775	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	200,478,084,442	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,506,453,568	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86,611,896,038	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	147,411,114,587	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6,896,167,206	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	10,779,232,538	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	236,429,298,859	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28,938,438,882	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	92,127,030	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	307,872,513	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	453,699,341	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4,399,953	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	9,041,603,352	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	34,903,938	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	122,245,716	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	20,090,974,799	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,290,352,218	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	42,143,101,361	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau	574,535,074	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	1,329,161,726	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	58,342,493,564	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	576,519,670	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	154,593,522	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,620,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	11,121,056,504	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	3,569,134,633	0
JUMLAH			8,998,875,188,493	8,998,875,188,493

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,192,782,718,683
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	271,957,247,499	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	577,496,755
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	526,046,488
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	234,030,213
3.0	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	267,201,206,741
3.1	425321	Pengembalian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan	20,000,000	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	838,738
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,290,873,563
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	342,258,955
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	322,391,828
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	1,475,673,218
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0	6,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	431,000
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	79,514,416
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	249,604,027,370	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,607,657	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	159,707
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,350,958,780	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	18,339,338
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,233,600,372	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,648,799
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,497,510,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	20,301,300
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	37,027,216
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	36,682,677,000	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	523,742
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,178,088,107	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,806,904,420	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	4,128,260
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	5,017,450
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	29,960,569,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	525,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	833,250,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	50,411,275
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,041,420,000	0
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	52,559,462
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	21,761,614,216	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,033
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	331,032	0
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	4,606,990
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	997,185,340	0
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	399,918
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	216,547,102	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	22,000,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,456,721,000	0
3.1	511624	Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,145,000
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	972,093,660	0
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	796,620
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	3,277,185,000	0
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	220,150
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	74,800,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	4,254,372,682	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	2,877,350
3.1	512212	Pengembalian Belanja Uang Lembur PPPK	0	640,300
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	315,009,500	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan	0	786,758,512
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	382,064,322,234	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	27,942,936,941	0
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan	0	2,205,800
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	72,416,998,865	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	26,775,930
3.1	521113	Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6,251,000
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,592,992,199	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,527,172,673	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	54,906,400
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,612,540,581	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,321,359,441	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	6,967,617
3.0	521211	Belanja Bahan	113,031,917,013	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,391,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,864,264,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29,106,597,963	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	24,183,595
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,638,650,135	0
3.0	521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	177,877,067	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	9,587,948	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94,360,398,082	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	4,672,160
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	40,284,547,663	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,140,396,857	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,051,441,829	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	927,210,176	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	22,586,200	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	8,391,729,037	0
3.0	522141	Belanja Sewa	37,643,745,873	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	44,497,298
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	5,635,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	26,789,115,065	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	20,787,644
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	127,961,768,440	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,284,960,783	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	31,774,034	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	998,168,301	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	111,129,853	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	30,135,217
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,598,840,240	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	18,488,554,665	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	29,405,700	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	329,475,160	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,520,050,227	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	903,536,888
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	201,365,468,351	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,673,893,568	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	165,570,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86,734,874,140	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	127,199,102
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	723,890,632
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	148,148,588,198	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	6,962,225,200	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	66,057,994
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar	0	64,418,450
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	10,843,650,988	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	1,061,373,700	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 09/05/25 6:54 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 4
lap_neraca_percobaan_kas_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178,300,963,927	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	8,135,493,832	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,386,826,365	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	60,920,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	14,420,167,222	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	120,000,000	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	40,005,732	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	55,939,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,333,405,536	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	5,674,621,006	0
JUMLAH			2,468,108,651,747	2,468,108,651,747

Keterangan :
FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	242,624,479,000	249,807,678,000	249,604,027,370	79,514,416	249,524,512,954	99.92	283,165,046
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,555,000	4,114,000	3,607,657	159,707	3,447,950	87.69	666,050
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,985,163,000	15,373,294,000	15,350,958,780	18,339,338	15,332,619,442	99.85	40,674,558
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,025,566,000	4,261,083,000	4,233,600,372	1,648,799	4,231,951,573	99.36	29,131,427
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,087,261,000	3,502,325,000	3,497,510,000	20,301,300	3,477,208,700	99.86	25,116,300
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,618,233,000	36,717,862,000	36,682,677,000	37,027,216	36,645,649,784	99.9	72,212,216
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,008,214,000	3,196,303,000	3,178,088,107	523,742	3,177,564,365	99.43	18,738,635
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,260,787,000	11,825,049,000	11,806,904,420	4,128,260	11,802,776,160	99.85	22,272,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	38,542,767,000	30,579,152,000	29,960,569,000	5,017,450	29,955,551,550	97.98	623,600,450
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	853,020,000	833,575,000	833,250,000	525,000	832,725,000	99.96	850,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,411,462,000	1,090,181,000	1,041,420,000	50,411,275	991,008,725	95.53	99,172,275
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	354,422,507,000	357,190,616,000	356,192,612,706	217,596,503	355,975,016,203	99.72	1,215,599,797
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	13,765,652,000	21,772,241,000	21,761,614,216	52,559,462	21,709,054,754	99.95	63,186,246
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,220,000	696,000	331,032	3,033	327,999	47.56	368,001
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,141,588,000	1,002,613,000	997,185,340	4,606,990	992,578,350	99.46	10,034,650
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	319,134,000	222,807,000	216,547,102	399,918	216,147,184	97.19	6,659,816
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	100	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,657,280,000	2,459,407,000	2,456,721,000	2,145,000	2,454,576,000	99.89	4,831,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	933,356,000	980,210,000	972,093,660	796,620	971,297,040	99.17	8,912,960
511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,218,496,000	3,381,257,000	3,277,185,000	220,150	3,276,964,850	96.92	104,292,150
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	86,850,000	74,800,000	74,800,000	0	74,800,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	90,018,000	7,000	0	0	0	0	7,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	20,213,594,000	29,916,038,000	29,778,477,350	60,731,173	29,717,746,177	99.54	198,291,823
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	3,177,204,000	4,552,214,000	4,254,372,682	2,877,350	4,251,495,332	93.46	300,718,668
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	361,044,000	370,107,000	315,009,500	640,300	314,369,200	85.11	55,737,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	3,538,248,000	4,922,321,000	4,569,382,182	3,517,650	4,565,864,532	92.83	356,456,468
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	401,300,049,000	382,072,487,000	382,064,322,234	786,758,512	381,277,563,722	100	794,923,278
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,496,837,000	28,067,006,000	27,942,936,941	2,205,800	27,940,731,141	99.56	126,274,859
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	425,796,886,000	410,139,493,000	410,007,259,175	788,964,312	409,218,294,863	99.97	921,198,137
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	803,971,235,000	802,168,468,000	800,547,731,413	1,070,809,638	799,476,921,775	99.8	2,691,546,225

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	92,612,175,000	78,263,658,000	72,416,998,865	26,775,930	72,390,222,935	92.53	5,873,435,065
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7,670,966,000	6,665,272,000	6,592,992,199	6,251,000	6,586,741,199	98.92	78,530,801
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,647,908,000	1,696,748,000	1,527,172,673	0	1,527,172,673	90.01	169,575,327
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,934,249,000	8,678,175,000	8,612,540,581	54,906,400	8,557,634,181	99.24	120,540,819
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,843,553,000	3,436,580,000	3,321,359,441	0	3,321,359,441	96.65	115,220,559
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	117,708,851,000	98,740,433,000	92,471,063,759	87,933,330	92,383,130,429	93.65	6,357,302,571
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	112,870,657,000	118,404,095,000	113,031,917,013	6,967,617	113,024,949,396	95.46	5,379,145,604
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,530,585,000	10,555,261,000	9,864,264,000	2,391,000	9,861,873,000	93.45	693,388,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,143,828,000	33,891,712,000	29,106,597,963	24,183,595	29,082,414,368	85.88	4,809,297,632
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	840,372,000	3,054,566,000	2,638,650,135	0	2,638,650,135	86.38	415,915,865
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	50,000,000	178,553,000	177,877,067	0	177,877,067	99.62	675,933
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	9,589,000	9,587,948	0	9,587,948	99.99	1,052
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	161,435,442,000	166,093,776,000	154,828,894,126	33,542,212	154,795,351,914	93.22	11,298,424,086
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,920,305,000	96,866,338,000	94,360,398,082	0	94,360,398,082	97.41	2,505,939,918
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	8,960,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	100,929,265,000	96,869,578,000	94,360,398,082	0	94,360,398,082	97.41	2,509,179,918
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	45,022,908,000	40,457,545,000	40,284,547,663	4,672,160	40,279,875,503	99.57	177,669,497
522112	Belanja Langganan Telepon	1,518,260,000	1,146,062,000	1,140,396,857	0	1,140,396,857	99.51	5,665,143
522113	Belanja Langganan Air	1,285,804,000	1,058,150,000	1,051,441,829	0	1,051,441,829	99.37	6,708,171
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,146,483,000	955,323,000	927,210,176	0	927,210,176	97.06	28,112,824
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	76,050,000	23,052,000	22,586,200	0	22,586,200	97.98	465,800
522131	Belanja Jasa Konsultan	7,603,028,000	8,404,440,000	8,391,729,037	0	8,391,729,037	99.85	12,710,963
522141	Belanja Sewa	39,716,235,000	38,283,073,000	37,643,745,873	44,497,298	37,599,248,575	98.33	683,824,425
522151	Belanja Jasa Profesi	37,151,518,000	27,942,607,000	26,789,115,065	5,635,000	26,783,480,065	95.87	1,159,126,935
522191	Belanja Jasa Lainnya	123,631,753,000	133,420,286,000	127,961,768,440	20,787,644	127,940,980,796	95.91	5,479,305,204
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	257,152,039,000	251,690,538,000	244,212,541,140	75,592,102	244,136,949,038	97.03	7,553,588,962
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,200,816,000	25,080,914,000	24,284,960,783	0	24,284,960,783	96.83	795,953,217
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48,200,000	31,775,000	31,774,034	0	31,774,034	100	966
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	998,169,000	998,169,000	998,168,301	0	998,168,301	100	699

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	207,378,000	111,772,000	111,129,853	0	111,129,853	99.43	642,147
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,014,081,000	47,417,354,000	43,598,840,240	30,135,217	43,568,705,023	91.95	3,848,648,977
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,334,745,000	18,595,514,000	18,488,554,665	0	18,488,554,665	99.42	106,959,335
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	40,000,000	30,000,000	29,405,700	0	29,405,700	98.02	594,300
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	402,416,000	329,550,000	329,475,160	0	329,475,160	99.98	74,840
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,728,007,000	4,483,270,000	2,520,050,227	0	2,520,050,227	56.21	1,963,219,773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	83,973,812,000	97,078,318,000	90,392,358,963	30,135,217	90,362,223,746	93.11	6,716,094,254
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219,441,766,000	219,056,447,000	201,365,468,351	903,536,888	200,461,931,463	91.92	18,594,515,537
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,188,167,000	38,878,741,000	36,673,893,568	165,570,000	36,508,323,568	94.33	2,370,417,432
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,478,534,000	98,868,695,000	86,734,874,140	127,199,102	86,607,675,038	87.73	12,261,019,962
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	183,631,652,000	166,772,630,000	148,148,588,198	723,890,632	147,424,697,566	88.83	19,347,932,434
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	516,740,119,000	523,576,513,000	472,922,824,257	1,920,196,622	471,002,627,635	90.33	52,573,885,365
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,198,280,000	7,244,894,000	6,962,225,200	66,057,994	6,896,167,206	96.1	348,726,794
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6,043,680,000	11,400,062,000	10,843,650,988	64,418,450	10,779,232,538	95.12	620,829,462
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	9,241,960,000	18,644,956,000	17,805,876,188	130,476,444	17,675,399,744	95.5	969,556,256
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,247,181,488,000	1,252,694,112,000	1,166,993,956,515	2,277,875,927	1,164,716,080,588	93.16	87,978,031,412
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	0	1,268,334,000	1,061,373,700	0	1,061,373,700	83.68	206,960,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	0	1,268,334,000	1,061,373,700	0	1,061,373,700	83.68	206,960,300
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201,506,137,000	208,894,325,000	178,300,963,927	0	178,300,963,927	85.35	30,593,361,073
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,356,173,000	8,507,620,000	8,135,493,832	0	8,135,493,832	95.63	372,126,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	206,862,310,000	217,401,945,000	186,436,457,759	0	186,436,457,759	85.76	30,965,487,241
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59,122,968,000	41,908,130,000	19,386,826,365	0	19,386,826,365	46.26	22,521,303,635
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	20,430,000	0	0	0	0		0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1,150,000,000	1,130,000,000	60,920,000	0	60,920,000	5.39	1,069,080,000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	96,160,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	27,731,771,000	30,440,438,000	14,420,167,222	0	14,420,167,222	47.37	16,020,270,778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	88,121,329,000	73,478,568,000	33,867,913,587	0	33,867,913,587	46.09	39,610,654,413
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:41 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
534131	Belanja Modal Jaringan	450,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	41,000,000	40,005,732	0	40,005,732	97.57	994,268
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	56,943,000	56,943,000	55,939,000	0	55,939,000	98.24	1,004,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	506,943,000	217,943,000	215,944,732	0	215,944,732	99.08	1,998,268
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	724,500,000	1,358,731,000	1,333,405,536	0	1,333,405,536	98.14	25,325,464
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6,875,344,000	5,733,845,000	5,674,621,006	0	5,674,621,006	98.97	59,223,994
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,599,844,000	7,092,576,000	7,008,026,542	0	7,008,026,542	98.81	84,549,458
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	303,090,426,000	299,459,366,000	228,589,716,320	0	228,589,716,320	76.33	70,869,649,680
	JUMLAH BELANJA	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tanggal : 09/05/25 9:42 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
07	KESEHATAN							
01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,584,522,008,000	1,579,350,026,000	1,363,890,610,300	997,333,248	1,362,893,277,052	86.29	216,456,748,948
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	17,075,864,000	17,727,324,000	16,706,438,068	0	16,706,438,068	94.24	1,020,885,932
4118	Intelijen Obat dan Makanan	12,950,364,000	14,804,982,000	14,463,507,088	0	14,463,507,088	97.69	341,474,912
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	22,490,488,000	22,390,488,000	20,943,104,216	87,443,298	20,855,660,918	93.15	1,534,827,082
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	30,909,626,000	31,581,532,000	28,345,991,934	152,006,140	28,193,985,794	89.27	3,387,546,206
4121	Pengawasan Kosmetik	19,222,176,000	19,222,176,000	18,470,839,292	105,331,684	18,365,507,608	95.54	856,668,392
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	13,994,630,000	13,994,630,000	12,983,134,010	8,700,000	12,974,434,010	92.71	1,020,195,990
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	26,809,608,000	28,138,222,000	25,900,564,790	16,906,222	25,883,658,568	91.99	2,254,563,432
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	30,286,388,000	30,286,388,000	27,307,758,178	177,530,174	27,130,228,004	89.58	3,156,159,996
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	20,963,126,000	21,054,306,000	19,481,047,566	29,693,868	19,451,353,698	92.39	1,602,952,302
4126	Registrasi Pangan Olahan	16,559,840,000	16,559,840,000	15,853,194,994	6,261,600	15,846,933,394	95.69	712,906,606
4127	Registrasi Obat	22,431,158,000	22,431,158,000	21,330,400,820	9,175,136	21,321,225,684	95.05	1,109,932,316
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	21,794,048,000	21,794,048,000	20,007,266,010	65,006,624	19,942,259,386	91.5	1,851,788,614
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	13,220,310,000	13,603,820,000	13,510,094,130	517,181,120	12,992,913,010	95.51	610,906,990
4130	Standardisasi Pangan Olahan	15,036,364,000	15,037,988,000	14,486,692,134	8,490	14,486,683,644	96.33	551,304,356
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15,937,506,000	16,388,316,000	15,147,468,638	0	15,147,468,638	92.43	1,240,847,362
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	31,930,980,000	31,930,980,000	29,944,537,458	134,710,000	29,809,827,458	93.36	2,121,152,542
4133	Pengujian Obat dan Makanan	72,156,676,000	72,917,766,000	66,284,648,288	71,420,096	66,213,228,192	90.81	6,704,537,808
4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	19,030,268,000	19,030,268,000	17,688,037,610	0	17,688,037,610	92.95	1,342,230,390
4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	25,660,682,000	25,660,682,000	24,555,870,682	256,169,172	24,299,701,510	94.7	1,360,980,490
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10,951,542,000	10,951,542,000	9,977,086,934	6,392,534	9,970,694,400	91.04	980,847,600
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	10,340,679,000	9,363,635,000	8,807,130,788	0	8,807,130,788	94.06	556,504,212
	JUMLAH PROGRAM Program Pengawasan Obat dan Makanan	2,054,274,331,000	2,054,220,117,000	1,806,085,423,928	2,641,269,406	1,803,444,154,522	87.92	250,775,962,478
WA	Program Dukungan Manajemen							
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	32,787,024,000	32,417,024,000	29,158,461,248	64,106,194	29,094,355,054	89.75	3,322,668,946
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	42,495,948,000	43,325,784,000	40,495,852,560	205,543,394	40,290,309,166	92.99	3,035,474,834
4110	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	29,918,782,000	29,639,310,000	27,743,194,540	108,832,996	27,634,361,544	93.24	2,004,948,456
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	21,424,300,000	22,424,300,000	20,478,200,990	9,225,240	20,468,975,750	91.28	1,955,324,250

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_fsfpk_kl

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	109,277,026,000	103,440,026,000	96,357,014,222	470,861,554	95,886,152,668	92.7	7,553,873,332
4114	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	104,475,604,000	98,516,926,000	93,561,757,192	108,343,034	93,453,414,158	94.86	5,063,511,842
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	72,975,561,000	59,571,363,000	55,690,965,414	57,103,383	55,633,862,031	93.39	3,937,500,969
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	23,508,330,000	23,508,330,000	22,393,687,860	302,697,513	22,090,990,347	93.97	1,417,339,653
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,114,109,234,000	1,124,479,383,000	1,103,771,125,289	1,421,464,757	1,102,349,660,532	98.03	22,129,722,468
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	1,550,971,809,000	1,537,322,446,000	1,489,650,259,315	2,748,178,065	1,486,902,081,250	96.9	50,420,364,750
	JUMLAH SUBFUNGSI OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	3,605,246,140,000	3,591,542,563,000	3,295,735,683,243	5,389,447,471	3,290,346,235,772	91.76	301,196,327,228
	JUMLAH FUNGSI KESEHATAN	3,605,246,140,000	3,591,542,563,000	3,295,735,683,243	5,389,447,471	3,290,346,235,772	91.76	301,196,327,228

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN							
063010100KD	Balai Besar POM Jakarta							
432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	51,319,096,000	50,625,276,000	48,841,620,944	161,138,012	48,680,482,932	96.16	1,944,793,068
672821	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	30,880,170,000	31,174,170,000	30,304,109,991	6,091,975	30,298,018,016	97.19	876,151,984
672847	BALAI POM DI TANGERANG	10,641,335,000	10,937,735,000	10,719,274,223	1,980,370	10,717,293,853	97.98	220,441,147
	JUMLAH BELANJA Balai Besar POM Jakarta	92,840,601,000	92,737,181,000	89,865,005,158	169,210,357	89,695,794,801	96.9	3,041,386,199
063010100KP	BA(063) ES1(01) DKI JAKARTA							
432731	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	400,557,681,000	425,010,856,000	408,655,045,688	1,228,194,451	407,426,851,237	95.86	17,584,004,763
433005	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	32,161,297,000	27,693,231,000	26,028,217,758	119,933,632	25,908,284,126	93.55	1,784,946,874
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	53,801,474,000	54,465,781,000	50,883,764,110	32,237,613	50,851,526,497	93.36	3,614,254,503
445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	53,601,083,000	53,601,083,000	50,594,696,241	401,560,651	50,193,135,590	93.64	3,407,947,410
445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	66,962,879,000	67,142,879,000	62,331,277,927	235,258,202	62,096,019,725	92.48	5,046,859,275
632420	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	79,135,826,000	69,482,408,000	66,121,171,938	36,635,436	66,084,536,502	95.11	3,397,871,498
632437	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	36,974,867,000	38,069,198,000	36,160,147,753	0	36,160,147,753	94.99	1,909,050,247
632441	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	21,360,497,000	18,738,978,000	17,543,307,557	130,360,617	17,412,946,940	92.92	1,326,031,060
632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	52,237,802,000	49,258,463,000	46,780,878,596	54,171,517	46,726,707,079	94.86	2,531,755,921
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) DKI JAKARTA	796,793,406,000	803,462,877,000	765,098,507,568	2,238,352,119	762,860,155,449	95.23	40,602,721,551
063010200KD	BA(063) ES1(01) JAWA BARAT							
432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	65,003,803,000	64,800,025,000	61,964,996,222	94,644,336	61,870,351,886	95.48	2,929,673,114
672840	BALAI POM DI TASIKMALAYA	10,893,401,000	11,148,401,000	10,805,941,533	573,746	10,805,367,787	96.92	343,033,213
672846	BALAI POM DI BOGOR	10,922,419,000	12,548,251,000	12,382,932,846	45,899,072	12,337,033,774	98.32	211,217,226
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) JAWA BARAT	86,819,623,000	88,496,677,000	85,153,870,601	141,117,154	85,012,753,447	96.22	3,483,923,553
063010300KD	BA(063) ES1(01) JAWA TENGAH							
432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	62,032,584,000	63,794,354,000	60,746,379,781	16,309,931	60,730,069,850	95.2	3,064,284,150
432778	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39,715,969,000	39,295,334,000	35,393,750,708	8,922,849	35,384,827,859	90.05	3,910,506,141
672839	BALAI POM DI SURAKARTA	9,867,975,000	10,839,975,000	10,671,601,075	7,329,498	10,664,271,577	98.38	175,703,423
672844	BALAI POM DI BANYUMAS	6,596,812,000	6,853,812,000	6,550,077,572	455,814	6,549,621,758	95.56	304,190,242
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) JAWA TENGAH	118,213,340,000	120,783,475,000	113,361,809,136	33,018,092	113,328,791,044	93.86	7,454,683,956
063010500KD	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAWA TIMUR							
432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	73,956,636,000	71,617,386,000	69,473,776,680	11,666,411	69,462,110,269	96.99	2,155,275,731
432960	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	28,463,787,000	28,033,787,000	25,431,888,296	1,086,123	25,430,802,173	90.71	2,602,984,827
672841	BALAI POM DI KEDIRI	10,982,280,000	11,534,280,000	11,206,333,544	2,263,151	11,204,070,393	97.14	330,209,607
672843	BALAI POM DI JEMBER	8,912,798,000	9,451,298,000	9,163,065,136	1,888,909	9,161,176,227	96.93	290,121,773

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
690475	BALAI POM DI BIMA	4,931,885,000	4,931,885,000	4,675,296,174	13,452,987	4,661,843,187	94.52	270,041,813
	JUMLAH BELANJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAWA TIMUR	127,247,386,000	125,568,636,000	119,950,359,830	30,357,581	119,920,002,249	95.53	5,648,633,751
063010600KD	BA(063) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	29,029,899,000	29,029,899,000	27,132,276,985	32,530,143	27,099,746,842	93.35	1,930,152,158
690463	LOKA POM DI ACEH TENGAH	4,851,156,000	5,062,437,000	4,917,121,031	515,401	4,916,605,630	97.12	145,831,370
690481	LOKA POM DI ACEH SELATAN	4,534,266,000	4,384,266,000	4,196,304,453	370,572	4,195,933,881	95.7	188,332,119
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	38,415,321,000	38,476,602,000	36,245,702,469	33,416,116	36,212,286,353	94.2	2,264,315,647
063010700KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA UTARA							
432804	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	48,987,730,000	51,290,546,000	49,788,988,791	20,677,685	49,768,311,106	97.03	1,522,234,894
690464	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	4,076,674,000	4,424,763,000	4,196,112,202	1,029,222	4,195,082,980	94.81	229,680,020
690482	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4,037,999,000	4,266,999,000	4,154,274,980	370,330	4,153,904,650	97.35	113,094,350
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SUMATERA UTARA	57,102,403,000	59,982,308,000	58,139,375,973	22,077,237	58,117,298,736	96.93	1,865,009,264
063010800KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA BARAT							
432810	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44,028,712,000	44,028,712,000	41,939,175,453	10,825,448	41,928,350,005	95.23	2,100,361,995
672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26,762,674,000	26,462,674,000	25,519,292,133	1,036,756	25,518,255,377	96.43	944,418,623
690465	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	20,307,443,000	19,432,670,000	18,941,169,220	6,976,518	18,934,192,702	97.43	498,477,298
690478	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4,221,085,000	4,377,085,000	4,139,694,837	6,702,314	4,132,992,523	94.42	244,092,477
690483	LOKA POM DI KABUPATEN SIJUNJUNG	3,708,723,000	3,708,723,000	3,587,323,384	2,551,899	3,584,771,485	96.66	123,951,515
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SUMATERA BARAT	99,028,637,000	98,009,864,000	94,126,655,027	28,092,935	94,098,562,092	96.04	3,911,301,908
063010900KD	BA(063) ES1(01) RIAU							
432829	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	46,364,718,000	46,154,718,000	43,192,523,488	7,219,399	43,185,304,089	93.57	2,969,413,911
672849	BALAI POM DI DUMAI	6,517,731,000	6,791,731,000	5,869,733,526	1,219,898	5,868,513,628	86.41	923,217,372
690484	BALAI POM DI INDRAGIRI HULU	5,681,839,000	6,019,839,000	5,454,664,808	2,528,386	5,452,136,422	90.57	567,702,578
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) RIAU	58,564,288,000	58,966,288,000	54,516,921,822	10,967,683	54,505,954,139	92.45	4,460,333,861
063011000KD	BA(063) ES1(01) JAMBI							
432835	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34,886,550,000	34,886,550,000	32,105,403,009	1,595,611	32,103,807,398	92.02	2,782,742,602
432991	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29,541,984,000	29,490,984,000	28,682,732,175	688,915	28,682,043,260	97.26	808,940,740
690466	LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO	4,290,101,000	4,314,101,000	4,170,059,809	740,446	4,169,319,363	96.64	144,781,637
690477	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	4,801,300,000	5,431,800,000	5,317,936,490	487	5,317,936,003	97.9	113,863,997
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) JAMBI	73,519,935,000	74,123,435,000	70,276,131,483	3,025,459	70,273,106,024	94.81	3,850,328,976
063011100KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA SELATAN							
432841	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	32,807,149,000	34,049,827,000	33,654,512,017	16,396,286	33,638,115,731	98.79	411,711,269
432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	33,032,442,000	33,032,442,000	30,068,703,418	49,122,303	30,019,581,115	90.88	3,012,860,885

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20,561,786,000	22,178,919,000	20,736,266,912	3,811,287	20,732,455,625	93.48	1,446,463,375
672851	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4,497,759,000	4,497,759,000	4,314,545,291	2,120,110	4,312,425,181	95.88	185,333,819
690467	BALAI POM DI TULANG BAWANG	4,713,791,000	4,713,791,000	4,183,178,606	703,653	4,182,474,953	88.73	531,316,047
690479	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	4,537,055,000	4,767,631,000	4,253,884,391	1,190,191	4,252,694,200	89.2	514,936,800
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SUMATERA SELATAN	100,149,982,000	103,240,369,000	97,211,090,635	73,343,830	97,137,746,805	94.16	6,102,622,195
063011300KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN BARAT							
432866	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31,012,982,000	31,129,432,000	29,166,206,783	7,788,006	29,158,418,777	93.67	1,971,013,223
690468	BALAI POM DI SANGGAU	4,364,947,000	4,365,997,000	4,203,453,161	2,621,296	4,200,831,865	96.22	165,165,135
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	35,377,929,000	35,495,429,000	33,369,659,944	10,409,302	33,359,250,642	94.01	2,136,178,358
063011500KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN							
432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	24,933,735,000	24,778,193,000	23,826,708,515	9,428,568	23,817,279,947	96.12	960,913,053
432881	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	29,803,431,000	29,003,431,000	27,849,908,249	3,776,517	27,846,131,732	96.01	1,157,299,268
690469	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5,476,746,000	5,226,746,000	5,082,078,154	4,647,170	5,077,430,984	97.14	149,315,016
690470	BALAI POM DI TABALONG	4,421,627,000	4,541,627,000	4,425,098,321	1,112,862	4,423,985,459	97.41	117,641,541
690485	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	12,795,089,000	13,131,089,000	4,523,000,168	11,033,550	4,511,966,618	34.36	8,619,122,382
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	77,430,628,000	76,681,086,000	65,706,793,407	29,998,667	65,676,794,740	85.69	11,004,291,260
063011600KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR							
432897	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31,488,688,000	32,780,358,000	31,642,166,182	49,350,789	31,592,815,393	96.38	1,187,542,607
672848	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	15,988,031,000	15,320,031,000	13,211,604,594	15,250,477	13,196,354,117	86.14	2,123,676,883
690471	BALAI POM DI BALIKPAPAN	5,919,745,000	6,170,221,000	4,964,828,170	3,274,588	4,961,553,582	80.41	1,208,667,418
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	53,396,464,000	54,270,610,000	49,818,598,946	67,875,854	49,750,723,092	91.8	4,519,886,908
063011700KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI UTARA							
419508	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	35,567,261,000	35,895,261,000	17,620,461,491	11,676,799	17,608,784,692	49.06	18,286,476,308
432901	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	34,799,722,000	36,319,634,000	35,428,183,917	413,315	35,427,770,602	97.54	891,863,398
672859	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	19,931,864,000	20,289,582,000	18,161,107,001	8,083,163	18,153,023,838	89.47	2,136,558,162
690462	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	4,207,261,000	4,157,261,000	3,950,594,972	2,390,040	3,948,204,932	94.97	209,056,068
690472	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4,648,777,000	5,498,777,000	5,303,018,597	370,889	5,302,647,708	96.43	196,129,292
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SULAWESI UTARA	99,154,885,000	102,160,515,000	80,463,365,978	22,934,206	80,440,431,772	78.76	21,720,083,228
063011800KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI TENGAH							
432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	26,396,633,000	25,696,633,000	24,752,604,724	71,881	24,752,532,843	96.33	944,100,157
432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	26,593,219,000	26,863,219,000	26,210,347,204	50,831,396	26,159,515,808	97.38	703,703,192
672850	BALAI POM DI BAU-BAU	6,921,404,000	6,921,404,000	6,733,751,380	1,302,411	6,732,448,969	97.27	188,955,031
690473	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	4,137,387,000	4,195,387,000	3,974,944,612	1,269,012	3,973,675,600	94.72	221,711,400
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SULAWESI TENGAH	64,048,643,000	63,676,643,000	61,671,647,920	53,474,700	61,618,173,220	96.85	2,058,469,780

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
063011900KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26,935,521,000	26,085,521,000	22,063,860,278	942,150	22,062,918,128	84.58	4,022,602,872
432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	51,666,112,000	49,286,656,000	45,086,800,785	59,124,660	45,027,676,125	91.36	4,258,979,875
432948	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	30,912,619,000	30,572,619,000	29,396,106,381	3,083,163	29,393,023,218	96.14	1,179,595,782
672845	BALAI POM DI PALOPO	10,409,364,000	11,170,364,000	10,754,668,163	495	10,754,667,668	96.28	415,696,332
672854	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	4,930,663,000	5,986,794,000	5,693,713,887	4,068,974	5,689,644,913	95.04	297,149,087
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) SULAWESI SELATAN	124,854,279,000	123,101,954,000	112,995,149,494	67,219,442	112,927,930,052	91.79	10,174,023,948
063012200KD	BA(063) ES1(01) BALI							
432954	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	45,007,580,000	41,917,580,000	39,385,123,997	5,451,480	39,379,672,517	93.95	2,537,907,483
432979	BALAI BESAR POM DI KUPANG	35,314,386,000	35,242,886,000	34,869,384,878	20,669,585	34,848,715,293	98.88	394,170,707
672853	BALAI POM DI ENDE	7,901,955,000	8,306,955,000	7,747,269,422	1,828,858	7,745,440,564	93.24	561,514,436
690474	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	15,985,780,000	15,985,780,000	4,974,802,419	1,425,503	4,973,376,916	31.11	11,012,403,084
690486	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5,441,410,000	5,451,264,000	5,230,302,953	7,338,447	5,222,964,506	95.81	228,299,494
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) BALI	109,651,111,000	106,904,465,000	92,206,883,669	36,713,873	92,170,169,796	86.25	14,734,295,204
063012500KD	BA(063) ES1(01) PAPUA							
432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	32,006,163,000	30,706,163,000	27,011,061,556	4,666,542	27,006,395,014	87.95	3,699,767,986
672852	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5,288,116,000	5,304,116,000	5,081,111,232	430,522	5,080,680,710	95.79	223,435,290
689071	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	37,619,571,000	28,097,315,000	24,116,572,810	22,413,114	24,094,159,696	85.75	4,003,155,304
690476	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4,590,806,000	4,864,806,000	4,645,018,131	333,423	4,644,684,708	95.48	220,121,292
690480	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	7,491,119,000	7,491,119,000	6,921,604,348	13,806,580	6,907,797,768	92.21	583,321,232
	JUMLAH BELANJA BA(063) ES1(01) PAPUA	86,995,775,000	76,463,519,000	67,775,368,077	41,650,181	67,733,717,896	88.64	8,729,801,104
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
672828	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	54,638,513,000	51,720,013,000	48,178,507,111	235,430,777	47,943,076,334	92.7	3,776,936,666
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	54,638,513,000	51,720,013,000	48,178,507,111	235,430,777	47,943,076,334	93.15	3,776,936,666
	JUMLAH BELANJA 01	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161539227317
	JUMLAH BELANJA	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/25 9:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN							
51	BELANJA PEGAWAI	803,971,235,000	802,168,468,000	800,547,731,413	1,070,809,638	799,476,921,775	99.66	2,691,546,225
52	BELANJA BARANG	1,247,181,488,000	1,252,694,112,000	1,166,993,956,515	2,277,875,927	1,164,716,080,588	92.98	87,978,031,412
53	BELANJA MODAL	303,090,426,000	299,459,366,000	228,589,716,320	0	228,589,716,320	76.33	70,869,649,680
	JUMLAH BELANJA (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317
	JUMLAH BELANJA	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 9:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	737,593,724,000	735,154,565,000	628,883,041,393	486,695,824	628,396,345,569	6731.52	106,758,219,431
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	8,537,932,000	8,863,662,000	8,353,219,034	0	8,353,219,034	94.24	510,442,966
4118	Intelijen Obat dan Makanan	6,475,182,000	7,402,491,000	7,231,753,544	0	7,231,753,544	97.69	170,737,456
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	8,280,592,000	8,230,592,000	7,633,543,189	28,282,624	7,605,260,565	92.4	625,331,435
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	13,169,400,000	13,505,353,000	12,041,122,116	75,583,070	11,965,539,046	88.6	1,539,813,954
4121	Pengawasan Kosmetik	6,646,436,000	6,646,436,000	6,286,221,327	32,543,995	6,253,677,332	94.09	392,758,668
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5,336,386,000	5,336,386,000	4,844,387,228	4,350,000	4,840,037,228	90.7	496,348,772
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	10,861,736,000	11,447,246,000	10,406,408,356	8,453,101	10,397,955,255	90.83	1,049,290,745
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	11,442,987,000	11,442,987,000	10,096,459,693	80,040,887	10,016,418,806	87.53	1,426,568,194
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	8,135,363,000	8,180,953,000	7,476,927,658	14,846,934	7,462,080,724	91.21	718,872,276
4126	Registrasi Pangan Olahan	6,139,394,000	6,139,394,000	5,786,366,896	3,130,800	5,783,236,096	94.2	356,157,904
4127	Registrasi Obat	5,125,244,000	5,125,244,000	4,657,550,595	66,068	4,657,484,527	90.87	467,759,473
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,097,532,000	5,097,532,000	4,437,199,978	15,747,972	4,421,452,006	86.74	676,079,994
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,176,692,000	5,368,447,000	5,293,015,465	230,021,560	5,062,993,905	94.31	305,453,095
4130	Standardisasi Pangan Olahan	5,479,042,000	5,479,854,000	5,204,282,133	4,245	5,204,277,888	94.97	275,576,112
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	7,002,628,000	7,228,033,000	6,607,609,319	0	6,607,609,319	91.42	620,423,681
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13,283,557,000	13,283,557,000	12,450,390,332	65,434,800	12,384,955,532	93.24	898,601,468
4133	Pengujian Obat dan Makanan	32,299,068,000	32,679,613,000	29,565,955,267	21,390,048	29,544,565,219	90.41	3,135,047,781

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 9:43 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	9,515,134,000	9,515,134,000	8,844,018,805	0	8,844,018,805	92.95	671,115,195
4135	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	12,830,341,000	12,830,341,000	12,277,935,341	128,084,586	12,149,850,755	94.7	680,490,245
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	10,951,542,000	10,951,542,000	9,977,086,934	6,392,534	9,970,694,400	91.04	980,847,600
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	10,340,679,000	9,363,635,000	8,807,130,788	0	8,807,130,788	94.06	556,504,212
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	939,720,591,000	939,272,997,000	817,161,625,391	1,201,069,048	815,960,556,343	86.999	123,312,440,657
WA	Program Dukungan Manajemen							
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	16,393,512,000	16,208,512,000	14,579,230,624	32,053,097	14,547,177,527	89.75	1,661,334,473
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan	16,448,936,000	16,863,854,000	15,503,305,718	76,315,219	15,426,990,499	91.48	1,436,863,501
4110	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	14,959,391,000	14,819,655,000	13,871,597,270	54,416,498	13,817,180,772	93.24	1,002,474,228
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	10,712,150,000	11,212,150,000	10,239,100,495	4,612,620	10,234,487,875	91.28	977,662,125
4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	54,638,513,000	51,720,013,000	48,178,507,111	235,430,777	47,943,076,334	92.7	3,776,936,666
4114	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	52,237,802,000	49,258,463,000	46,780,878,596	54,171,517	46,726,707,079	94.86	2,531,755,921
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	24,325,187,000	19,857,121,000	18,563,655,138	19,034,461	18,544,620,677	93.39	1,312,500,323
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	7,836,110,000	7,836,110,000	7,464,562,620	100,899,171	7,363,663,449	93.97	472,446,551
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,111,236,120,000	1,121,459,437,000	1,100,874,057,348	1,420,171,877	1,099,453,885,471	7483.85	22,005,551,529
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	1,308,787,721,000	1,309,235,315,000	1,276,054,894,920	1,997,105,237	1,274,057,789,683	97.466	35,177,525,317
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	2,248,508,312,000	2,248,508,312,000	2,093,216,520,311	3,198,174,285	2,090,018,346,026	93.094	158,489,965,974
04	PNBP							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	54,667,280,000	54,520,448,000	53,062,263,757	11,970,800	53,050,292,957	3025.61	1,470,155,043

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	2,964,652,000	2,964,652,000	2,838,008,919	15,439,025	2,822,569,894	95.21	142,082,106
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2,285,413,000	2,285,413,000	2,131,873,851	420,000	2,131,453,851	93.26	153,959,149
4121	Pengawasan Kosmetik	2,964,652,000	2,964,652,000	2,949,198,319	20,121,847	2,929,076,472	98.8	35,575,528
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1,660,929,000	1,660,929,000	1,647,179,777	0	1,647,179,777	99.17	13,749,223
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2,543,068,000	2,543,068,000	2,465,077,039	10	2,465,077,029	96.93	77,990,971
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,700,207,000	3,700,207,000	3,557,419,396	8,724,200	3,548,695,196	95.91	151,511,804
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2,346,200,000	2,346,200,000	2,263,596,125	0	2,263,596,125	96.48	82,603,875
4126	Registrasi Pangan Olahan	2,140,526,000	2,140,526,000	2,140,230,601	0	2,140,230,601	99.99	295,399
4127	Registrasi Obat	6,090,335,000	6,090,335,000	6,007,649,815	4,521,500	6,003,128,315	98.57	87,206,685
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,799,492,000	5,799,492,000	5,566,433,027	16,755,340	5,549,677,687	95.69	249,814,313
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1,433,463,000	1,433,463,000	1,462,031,600	28,569,000	1,433,462,600	100	400
4130	Standardisasi Pangan Olahan	2,039,140,000	2,039,140,000	2,039,063,934	0	2,039,063,934	100	76,066
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	966,125,000	966,125,000	966,125,000	0	966,125,000	100	0
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,681,933,000	2,681,933,000	2,521,878,397	1,920,200	2,519,958,197	93.96	161,974,803
4133	Pengujian Obat dan Makanan	3,779,270,000	3,779,270,000	3,576,368,877	14,320,000	3,562,048,877	94.25	217,221,123
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	98,062,685,000	97,915,853,000	95,194,398,434	122,761,922	95,071,636,512	97.221	2,844,216,488
WA	Program Dukungan Manajemen							
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan	4,799,038,000	4,799,038,000	4,744,620,562	26,456,478	4,718,164,084	98.31	80,873,916
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,873,114,000	3,019,946,000	2,897,067,941	1,292,880	2,895,775,061	195.62	124,170,939
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	7,672,152,000	7,818,984,000	7,641,688,503	27,749,358	7,613,939,145	97.732	205,044,855

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/25 9:43 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PNBP	105,734,837,000	105,734,837,000	102,836,086,937	150,511,280	102,685,575,657	97.258	3,049,261,343
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
DR 4123	Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	78,797,000	78,797,000	0	78,797,000	100	0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DR	0	78,797,000	78,797,000	0	78,797,000	100	0
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	78,797,000	78,797,000	0	78,797,000	100	0
	JUMLAH	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	577,496,755	0	577,496,755	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	526,046,488	0	526,046,488	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	129,935,000	234,030,213	0	234,030,213	180.11
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	129,935,000	1,337,573,456	0	1,337,573,456	1,029.42
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	228,716,055,000	267,201,206,741	20,000,000	267,181,206,741	116.82
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	228,716,055,000	267,201,206,741	20,000,000	267,181,206,741	116.82
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	838,738	0	838,738	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	838,738	0	838,738	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,290,873,563	0	1,290,873,563	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,290,873,563	0	1,290,873,563	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	342,258,955	0	342,258,955	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	322,391,828	0	322,391,828	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,475,673,218	0	1,475,673,218	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6,000,000	0	6,000,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	431,000	0	431,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,146,755,001	0	2,146,755,001	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.84
	JUMLAH PENDAPATAN	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 09/05/25 9:43 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN					
063010100KD	Balai Besar POM Jakarta					
432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	64,000,000	146,714,438	0	146,714,438	229.24
672821	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	123,200,000	223,061,752	0	223,061,752	181.06
672847	BALAI POM DI TANGERANG	0	3,744,415	0	3,744,415	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010100KD Balai Besar POM Jakarta	187,200,000	373,520,605	0	373,520,605	199.53
063010100KP	BA(063) ES1(01) DKI JAKARTA					
432731	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	111,018,000	474,049,148	0	474,049,148	427
433005	INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	0	33,750,695	0	33,750,695	0
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	40,723,100,000	54,824,222,000	0	54,824,222,000	134.63
445161	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	120,626,800,000	131,050,161,008	1,500,000	131,048,661,008	108.64
445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	46,200,500,000	53,594,504,584	10,650,000	53,583,854,584	115.98
632420	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	3,779,270,000	5,474,283,281	0	5,474,283,281	144.85
632437	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	0	838,738	0	838,738	0
632441	PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	0	21,463,138	0	21,463,138	0
632458	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	0	92,155,106	0	92,155,106	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010100KP BA(063) ES1(01) DKI JAKARTA	211,440,688,000	245,565,427,698	12,150,000	245,553,277,698	116.13
063010200KD	BA(063) ES1(01) JAWA BARAT					
432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	550,780,000	834,922,354	0	834,922,354	151.59
672840	BALAI POM DI TASIKMALAYA	0	9,244,773	0	9,244,773	0
672846	BALAI POM DI BOGOR	0	11,627,921	0	11,627,921	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010200KD BA(063) ES1(01) JAWA BARAT	550,780,000	855,795,048	0	855,795,048	155.38
063010300KD	BA(063) ES1(01) JAWA TENGAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	540,750,000	837,416,519	1,880,000	835,536,519	154.51
432778	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	280,300,000	283,091,365	0	283,091,365	101
672839	BALAI POM DI SURAKARTA	0	1,347,765	0	1,347,765	0
672844	BALAI POM DI BANYUMAS	0	1,224,000	0	1,224,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010300KD BA(063) ES1(01) JAWA TENGAH	821,050,000	1,123,079,649	1,880,000	1,121,199,649	136.56
063010500KD	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAWA TIMUR					
432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	2,446,905,000	2,555,838,233	0	2,555,838,233	104.45
432960	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	826,620,000	1,357,379,174	0	1,357,379,174	164.21
672841	BALAI POM DI KEDIRI	0	681,183	0	681,183	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010500KD BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAWA TIMUR	3,273,525,000	3,913,898,590	0	3,913,898,590	119.56
063010600KD	BA(063) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	181,375,000	220,307,390	0	220,307,390	121.47
690463	LOKA POM DI ACEH TENGAH	0	153,511,168	0	153,511,168	0
690481	LOKA POM DI ACEH SELATAN	0	700,000	0	700,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010600KD BA(063) ES1(01) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	181,375,000	374,518,558	0	374,518,558	206.49
063010700KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA UTARA					
432804	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	1,082,240,000	1,817,235,532	0	1,817,235,532	167.91
690464	BALAI POM DI TANJUNGBALAI	0	149,500	0	149,500	0
690482	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	0	757,799	0	757,799	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010700KD BA(063) ES1(01) SUMATERA UTARA	1,082,240,000	1,818,142,831	0	1,818,142,831	168
063010800KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA BARAT					
432810	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	891,117,000	1,225,957,007	0	1,225,957,007	137.58
672838	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	1,179,050,000	1,466,532,188	0	1,466,532,188	124.38

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
690465	BALAI POM DI PAYAKUMBUH	0	11,569,340	0	11,569,340	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063010800KD BA(063) ES1(01) SUMATERA BARAT	2,070,167,000	2,704,058,535	0	2,704,058,535	130.62
063010900KD	BA(063) ES1(01) RIAU					
432829	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	712,580,000	730,787,647	0	730,787,647	102.56
	JUMLAH PENDAPATAN 063010900KD BA(063) ES1(01) RIAU	712,580,000	730,787,647	0	730,787,647	102.56
063011000KD	BA(063) ES1(01) JAMBI					
432835	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	865,170,000	1,006,357,510	0	1,006,357,510	116.32
432991	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	410,650,000	661,952,885	750,000	661,202,885	161.01
690477	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	0	170,004,107	0	170,004,107	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011000KD BA(063) ES1(01) JAMBI	1,275,820,000	1,838,314,502	750,000	1,837,564,502	144.03
063011100KD	BA(063) ES1(01) SUMATERA SELATAN					
432841	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	450,000,000	219,360,535	0	219,360,535	48.75
432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	0	392,788,280	730,000	392,058,280	0
672842	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	288,380,000	599,397,218	0	599,397,218	207.85
672851	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	0	555,000	0	555,000	0
690479	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	0	1,539,149	0	1,539,149	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011100KD BA(063) ES1(01) SUMATERA SELATAN	738,380,000	1,213,640,182	730,000	1,212,910,182	164.27
063011300KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN BARAT					
432866	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	740,000,000	572,645,958	0	572,645,958	77.38
690468	BALAI POM DI SANGGAU	0	1,585,667	0	1,585,667	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011300KD BA(063) ES1(01) KALIMANTAN BARAT	740,000,000	574,231,625	0	574,231,625	77.6
063011500KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN					
432872	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	656,900,000	936,151,726	0	936,151,726	142.51

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2
Tanggal : 09/05/25 9:43 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
432881	BALAI BESAR POM DI BANJARBARU	1,048,850,000	1,361,912,209	0	1,361,912,209	129.85
690470	BALAI POM DI TABALONG	0	5,458,800	0	5,458,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011500KD BA(063) ES1(01) KALIMANTAN SELATAN	1,705,750,000	2,303,522,735	0	2,303,522,735	135.04
063011600KD	BA(063) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR					
432897	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	320,000,000	565,923,989	0	565,923,989	176.85
672848	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	0	3,093,838	0	3,093,838	0
690471	BALAI POM DI BALIKPAPAN	0	1,302,000	0	1,302,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011600KD BA(063) ES1(01) KALIMANTAN TIMUR	320,000,000	570,319,827	0	570,319,827	178.22
063011700KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI UTARA					
419508	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	0	1,758,986,472	0	1,758,986,472	0
432901	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	290,235,000	129,521,208	0	129,521,208	44.63
672859	BALAI BESAR POM DI GORONTALO	209,900,000	400,957,963	0	400,957,963	191.02
690462	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	0	1,635,000	0	1,635,000	0
690472	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0	545,000	0	545,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011700KD BA(063) ES1(01) SULAWESI UTARA	500,135,000	2,291,645,643	0	2,291,645,643	458.21
063011800KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI TENGAH					
432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	398,085,000	943,905,421	0	943,905,421	237.11
432932	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	488,250,000	865,345,177	0	865,345,177	177.23
	JUMLAH PENDAPATAN 063011800KD BA(063) ES1(01) SULAWESI TENGAH	886,335,000	1,809,250,598	0	1,809,250,598	204.13
063011900KD	BA(063) ES1(01) SULAWESI SELATAN					
419578	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	69,260,000	153,183,026	0	153,183,026	221.17
432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	670,375,000	820,576,012	4,240,000	816,336,012	121.77
432948	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	126,050,000	354,398,344	0	354,398,344	281.16

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
672845	BALAI POM DI PALOPO	0	4,193,137	0	4,193,137	0
672854	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	0	289,821,650	0	289,821,650	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063011900KD BA(063) ES1(01) SULAWESI SELATAN	865,685,000	1,622,172,169	4,240,000	1,617,932,169	186.9
063012200KD	BA(063) ES1(01) BALI					
432954	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	410,075,000	871,953,421	0	871,953,421	212.63
432979	BALAI BESAR POM DI KUPANG	547,875,000	286,415,590	0	286,415,590	52.28
672853	BALAI POM DI ENDE	57,500,000	124,705,586	0	124,705,586	216.88
690486	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0	1,518,000	0	1,518,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063012200KD BA(063) ES1(01) BALI	1,015,450,000	1,284,592,597	0	1,284,592,597	126.5
063012500KD	BA(063) ES1(01) PAPUA					
432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	361,830,000	699,850,797	250,000	699,600,797	193.35
689071	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	117,000,000	240,717,436	0	240,717,436	205.74
690476	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	0	4,157,176	0	4,157,176	0
	JUMLAH PENDAPATAN 063012500KD BA(063) ES1(01) PAPUA	478,830,000	944,725,409	250,000	944,475,409	197.25
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
672828	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	0	65,603,051	0	65,603,051	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	65,603,051	0	65,603,051	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.84
	JUMLAH PENDAPATAN	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 09/05/25 9:43 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	577,496,755	0	577,496,755	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	526,046,488	0	526,046,488	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	129,935,000	234,030,213	0	234,030,213	180.11
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	228,716,055,000	267,201,206,741	20,000,000	267,181,206,741	116.82
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	838,738	0	838,738	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,290,873,563	0	1,290,873,563	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	342,258,955	0	342,258,955	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	322,391,828	0	322,391,828	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,475,673,218	0	1,475,673,218	0
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6,000,000	0	6,000,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	431,000	0	431,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.85
	JUMLAH PENDAPATAN	228,845,990,000	271,977,247,499	20,000,000	271,957,247,499	118.85

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:44 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	242,624,479,000	249,807,678,000	249,604,027,370	79,514,416	249,524,512,954	99.92	283,165,046
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,555,000	4,114,000	3,607,657	159,707	3,447,950	87.69	666,050
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15,985,163,000	15,373,294,000	15,350,958,780	18,339,338	15,332,619,442	99.85	40,674,558
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,025,566,000	4,261,083,000	4,233,600,372	1,648,799	4,231,951,573	99.36	29,131,427
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,087,261,000	3,502,325,000	3,497,510,000	20,301,300	3,477,208,700	99.86	25,116,300
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,618,233,000	36,717,862,000	36,682,677,000	37,027,216	36,645,649,784	99.9	72,212,216
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,008,214,000	3,196,303,000	3,178,088,107	523,742	3,177,564,365	99.43	18,738,635
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	12,260,787,000	11,825,049,000	11,806,904,420	4,128,260	11,802,776,160	99.85	22,272,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	38,542,767,000	30,579,152,000	29,960,569,000	5,017,450	29,955,551,550	97.98	623,600,450
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	853,020,000	833,575,000	833,250,000	525,000	832,725,000	99.96	850,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,411,462,000	1,090,181,000	1,041,420,000	50,411,275	991,008,725	95.53	99,172,275
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	354,422,507,000	357,190,616,000	356,192,612,706	217,596,503	355,975,016,203	99.72	1,215,599,797
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	13,765,652,000	21,772,241,000	21,761,614,216	52,559,462	21,709,054,754	99.95	63,186,246
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,220,000	696,000	331,032	3,033	327,999	47.56	368,001
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,141,588,000	1,002,613,000	997,185,340	4,606,990	992,578,350	99.46	10,034,650
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	319,134,000	222,807,000	216,547,102	399,918	216,147,184	97.19	6,659,816
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	100	0
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,657,280,000	2,459,407,000	2,456,721,000	2,145,000	2,454,576,000	99.89	4,831,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	933,356,000	980,210,000	972,093,660	796,620	971,297,040	99.17	8,912,960
511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,218,496,000	3,381,257,000	3,277,185,000	220,150	3,276,964,850	96.92	104,292,150
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	86,850,000	74,800,000	74,800,000	0	74,800,000	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	90,018,000	7,000	0	0	0	0	7,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	20,213,594,000	29,916,038,000	29,778,477,350	60,731,173	29,717,746,177	99.54	198,291,823
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	3,177,204,000	4,552,214,000	4,254,372,682	2,877,350	4,251,495,332	93.46	300,718,668
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	361,044,000	370,107,000	315,009,500	640,300	314,369,200	85.11	55,737,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	3,538,248,000	4,922,321,000	4,569,382,182	3,517,650	4,565,864,532	92.83	356,456,468
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	401,300,049,000	382,072,487,000	382,064,322,234	786,758,512	381,277,563,722	100	794,923,278
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	24,496,837,000	28,067,006,000	27,942,936,941	2,205,800	27,940,731,141	99.56	126,274,859
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	425,796,886,000	410,139,493,000	410,007,259,175	788,964,312	409,218,294,863	99.97	921,198,137
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	803,971,235,000	802,168,468,000	800,547,731,413	1,070,809,638	799,476,921,775	99.8	2,691,546,225

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:44 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	92,612,175,000	78,263,658,000	72,416,998,865	26,775,930	72,390,222,935	92.53	5,873,435,065
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7,670,966,000	6,665,272,000	6,592,992,199	6,251,000	6,586,741,199	98.92	78,530,801
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,647,908,000	1,696,748,000	1,527,172,673	0	1,527,172,673	90.01	169,575,327
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,934,249,000	8,678,175,000	8,612,540,581	54,906,400	8,557,634,181	99.24	120,540,819
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,843,553,000	3,436,580,000	3,321,359,441	0	3,321,359,441	96.65	115,220,559
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	117,708,851,000	98,740,433,000	92,471,063,759	87,933,330	92,383,130,429	93.65	6,357,302,571
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	112,870,657,000	118,404,095,000	113,031,917,013	6,967,617	113,024,949,396	95.46	5,379,145,604
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11,530,585,000	10,555,261,000	9,864,264,000	2,391,000	9,861,873,000	93.45	693,388,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	36,143,828,000	33,891,712,000	29,106,597,963	24,183,595	29,082,414,368	85.88	4,809,297,632
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	840,372,000	3,054,566,000	2,638,650,135	0	2,638,650,135	86.38	415,915,865
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	50,000,000	178,553,000	177,877,067	0	177,877,067	99.62	675,933
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	9,589,000	9,587,948	0	9,587,948	99.99	1,052
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	161,435,442,000	166,093,776,000	154,828,894,126	33,542,212	154,795,351,914	93.22	11,298,424,086
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,920,305,000	96,866,338,000	94,360,398,082	0	94,360,398,082	97.41	2,505,939,918
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	8,960,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	100,929,265,000	96,869,578,000	94,360,398,082	0	94,360,398,082	97.41	2,509,179,918
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	45,022,908,000	40,457,545,000	40,284,547,663	4,672,160	40,279,875,503	99.57	177,669,497
522112	Belanja Langganan Telepon	1,518,260,000	1,146,062,000	1,140,396,857	0	1,140,396,857	99.51	5,665,143
522113	Belanja Langganan Air	1,285,804,000	1,058,150,000	1,051,441,829	0	1,051,441,829	99.37	6,708,171
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,146,483,000	955,323,000	927,210,176	0	927,210,176	97.06	28,112,824
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	76,050,000	23,052,000	22,586,200	0	22,586,200	97.98	465,800
522131	Belanja Jasa Konsultan	7,603,028,000	8,404,440,000	8,391,729,037	0	8,391,729,037	99.85	12,710,963
522141	Belanja Sewa	39,716,235,000	38,283,073,000	37,643,745,873	44,497,298	37,599,248,575	98.33	683,824,425
522151	Belanja Jasa Profesi	37,151,518,000	27,942,607,000	26,789,115,065	5,635,000	26,783,480,065	95.87	1,159,126,935
522191	Belanja Jasa Lainnya	123,631,753,000	133,420,286,000	127,961,768,440	20,787,644	127,940,980,796	95.91	5,479,305,204
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	257,152,039,000	251,690,538,000	244,212,541,140	75,592,102	244,136,949,038	97.03	7,553,588,962
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,200,816,000	25,080,914,000	24,284,960,783	0	24,284,960,783	96.83	795,953,217
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48,200,000	31,775,000	31,774,034	0	31,774,034	100	966
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	998,169,000	998,169,000	998,168,301	0	998,168,301	100	699

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:44 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	207,378,000	111,772,000	111,129,853	0	111,129,853	99.43	642,147
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,014,081,000	47,417,354,000	43,598,840,240	30,135,217	43,568,705,023	91.95	3,848,648,977
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,334,745,000	18,595,514,000	18,488,554,665	0	18,488,554,665	99.42	106,959,335
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	40,000,000	30,000,000	29,405,700	0	29,405,700	98.02	594,300
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	402,416,000	329,550,000	329,475,160	0	329,475,160	99.98	74,840
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,728,007,000	4,483,270,000	2,520,050,227	0	2,520,050,227	56.21	1,963,219,773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	83,973,812,000	97,078,318,000	90,392,358,963	30,135,217	90,362,223,746	93.11	6,716,094,254
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219,441,766,000	219,056,447,000	201,365,468,351	903,536,888	200,461,931,463	91.92	18,594,515,537
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,188,167,000	38,878,741,000	36,673,893,568	165,570,000	36,508,323,568	94.33	2,370,417,432
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,478,534,000	98,868,695,000	86,734,874,140	127,199,102	86,607,675,038	87.73	12,261,019,962
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	183,631,652,000	166,772,630,000	148,148,588,198	723,890,632	147,424,697,566	88.83	19,347,932,434
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	516,740,119,000	523,576,513,000	472,922,824,257	1,920,196,622	471,002,627,635	90.33	52,573,885,365
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,198,280,000	7,244,894,000	6,962,225,200	66,057,994	6,896,167,206	96.1	348,726,794
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6,043,680,000	11,400,062,000	10,843,650,988	64,418,450	10,779,232,538	95.12	620,829,462
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	9,241,960,000	18,644,956,000	17,805,876,188	130,476,444	17,675,399,744	95.5	969,556,256
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,247,181,488,000	1,252,694,112,000	1,166,993,956,515	2,277,875,927	1,164,716,080,588	93.16	87,978,031,412
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	0	1,268,334,000	1,061,373,700	0	1,061,373,700	83.68	206,960,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	0	1,268,334,000	1,061,373,700	0	1,061,373,700	83.68	206,960,300
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201,506,137,000	208,894,325,000	178,300,963,927	0	178,300,963,927	85.35	30,593,361,073
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	5,356,173,000	8,507,620,000	8,135,493,832	0	8,135,493,832	95.63	372,126,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	206,862,310,000	217,401,945,000	186,436,457,759	0	186,436,457,759	85.76	30,965,487,241
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59,122,968,000	41,908,130,000	19,386,826,365	0	19,386,826,365	46.26	22,521,303,635
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	20,430,000	0	0	0	0		0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1,150,000,000	1,130,000,000	60,920,000	0	60,920,000	5.39	1,069,080,000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	96,160,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	27,731,771,000	30,440,438,000	14,420,167,222	0	14,420,167,222	47.37	16,020,270,778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	88,121,329,000	73,478,568,000	33,867,913,587	0	33,867,913,587	46.09	39,610,654,413
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 09/05/25 9:44 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl_poc

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
534131	Belanja Modal Jaringan	450,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	41,000,000	40,005,732	0	40,005,732	97.57	994,268
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	56,943,000	56,943,000	55,939,000	0	55,939,000	98.24	1,004,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	506,943,000	217,943,000	215,944,732	0	215,944,732	99.08	1,998,268
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	724,500,000	1,358,731,000	1,333,405,536	0	1,333,405,536	98.14	25,325,464
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6,875,344,000	5,733,845,000	5,674,621,006	0	5,674,621,006	98.97	59,223,994
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	7,599,844,000	7,092,576,000	7,008,026,542	0	7,008,026,542	98.81	84,549,458
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	303,090,426,000	299,459,366,000	228,589,716,320	0	228,589,716,320	76.33	70,869,649,680
	JUMLAH BELANJA	2,354,243,149,000	2,354,321,946,000	2,196,131,404,248	3,348,685,565	2,192,782,718,683	93.28	161,539,227,317

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl. Cetak 09/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	176,400,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,152,528,423	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	399,462	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	167,416,648	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	309,167,449	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	837,083
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	1,545,837
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,627,002,345	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	476,809,812	0
0.0	117114	Suku Cadang	50,028,692,631	0
0.0	117131	Bahan Baku	85,709,870,615	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	966,109,436	0
0.0	131111	Tanah	1,688,380,858,025	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,099,255,818,791	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	991,271,337,416	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,240,756,000	0
0.0	134112	Irigasi	10,178,268,847	0
0.0	134113	Jaringan	16,732,286,721	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	18,600,793,300	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	48,419,791,693	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,326,733,887,161
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	154,529,247,330
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,890,105,269
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	1,577,838,736
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,905,484,540
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	284,097,306
0.0	162151	Software	90,752,020,400	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	47,446,315,485	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	11,064,623,482	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	55,916,268,806	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	7,608,189,339
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	80,905,236,402
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	634,173,175
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	3,580,499,851
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	6,131,462,377
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	130,546,462
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	26,477,700,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,615,482,684,919

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl. Cetak 09/05/2025
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_kl_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			6,230,873,535,787	6,230,873,535,787